



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Siliwangi Nomor 355- 357 Semarang 50146 Telepon 7604640, 7605660, 7605700
Faksimile. 7607697 Laman : <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : perhubungan@jatengprov.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama Ir. Arief Djatmiko, MA NIP : 19660801 199603 1 004

Jabatan Kepala Dinas Perhubungan

Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan SK Gubernur No. 800.1.3.3/290/2025

Tanggal 07 Mei 2025

Bertugas untuk dan atas nama Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 355-357

Semarang

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan serta program kerja berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 September 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. Arief Djatmiko, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19660801 199603 1 004

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	1
A. Kepala Dinas.....	2
B. Sekretariat	3
C. Bidang Lalu Lintas Jalan	3
D. Bidang Angkutan Jalan.....	4
E. Bidang Jaringan Transportasi Dan Perkeretaapian	4
F. Bidang Pelayaran	5
G. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	5
2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan.....	9
A. Kondisi Infrastruktur Perhubungan	9
B. Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	64
C. Kondisi Aset/Modal Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.....	66
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	67
2.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	79
2.5. Isu Strategis Perangkat Daerah	88
A. Telaahan Renstra K/L.....	88
B. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	92
C. Potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan daerah....	104
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN	1
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	1
A. Tujuan Perangkat Daerah	1
B. Sasaran Perangkat Daerah.....	4
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	6
3.3 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah.....	15
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	1

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah..... 1

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah 117

BAB V PENUTUP.....119

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Jumlah Bus dan Jumlah Perusahaan AKDP Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....10

Tabel II. 2 Jumlah Bus Operasional dan Bus Cadangan AKAP Di Provinsi Jawa Tengah11

Tabel II. 3 Layanan Trayek AJDP Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....12

Tabel II. 4 Jumlah Angkutan Taksi, Pariwisata dan Angkutan Sewa Khusus (ASK) Per Kabupaten/Kota.....13

Tabel II. 5 Kebutuhan Trayek Angkutan Pedesaan Yang Melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu daerah Provinsi.....15

Tabel II. 6 Kondisi Infrastruktur Simpul Terminal Penumpang Tipe B.....16

Tabel II. 7 Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan (SPP) Terminal Penumpang Tipe B Tahun 202417

Tabel II. 8 Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2024 ..18

Tabel II. 9 Indikasi Rencana Kebutuhan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Jawa Tengah.....19

Tabel II. 10 Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 19

Tabel II. 11 Koridor Pengembangan Angkutan Umum di Kawasan Aglomerasi Perkotaan.....21

Tabel II. 12 Perkembangan Jumlah Penumpang Trans Jateng Masing-Masing Koridor 2017-202422

Tabel II. 13 Persentase Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng Pelayanan Trans Jateng Tahun 2021 – 202423

Tabel II. 14 Operasional dan Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng Tahun 2022 dan 2024.....26

Tabel II. 15 Jumlah Tempat Pemberhentian Bus (TPB) Pelayanan Trans Jateng Tahun 2024.....26

Tabel II. 16 Jumlah Penumpang (Orang) Pada Masa Angkutan Lebaran dan Nataru...27

Tabel II. 17 Hirarki Pelabuhan di Provinsi Jawa Tengah.....28

Tabel II. 18 Data Produksi Pelabuhan Di Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024.....30

Tabel II. 19 Rekapitulasi Data Perusahaan Tahun 2024.....31

Tabel II. 20 Gambaran Pelayanan Dari dan Ke Karimunjawa Tahun 2020-202432

Tabel II. 21 Daftar Lintas Penyeberangan Sungai Kewenangan Provinsi33

Tabel II. 22 Fasilitas Keselamatan Penyeberangan Sungai Kewenangan Provinsi Tahun 2024.....34

Tabel II. 23 Data Pergerakan Pesawat Bandara Ahmad Yani Semarang Tahun 2020-2024.....35

Tabel II. 24 Data Produksi Penumpang Bandara Ahmad Yani Semarang Tahun 2020-2024.....36

Tabel II. 25 Data Produksi Kargo (Kilogram) Bandara Ahmad Yani Semarang Tahun 2020-202436

Tabel II. 26 Data Pergerakan Pesawat Bandara Internasional Adi Sumarmo Tahun 2020-202437

Tabel II. 27 Data Produksi Penumpang Bandara Internasional Adi Sumarmo Tahun 2020-202437

Tabel II. 28 Data Produksi Kargo (Kilogram) Bandara Internasional Adi Sumarmo Tahun 2020-202438

Tabel II. 29 Data Pergerakan Pesawat Bandara Tunggul Wulung Tahun 2020-2024 ...38

Tabel II. 30 Data Produksi Penumpang Bandara Tunggul Wulung Tahun 2020-2024 38

Tabel II. 31 Data Produksi Bagasi dan Kargo (Kilogram) Bandara Tunggul Wulung Tahun 2020-202439

Tabel II. 32 Data Pergerakan Pesawat Bandara Dewadaru Tahun 2020 - 202439

Tabel II. 33 Data Produksi Penumpang Bandara Dewadaru Tahun 2020-2024.....40

Tabel II. 34 Data Pergerakan Pesawat Bandara Ngloram Tahun 2021-202441

Tabel II. 35 Data Produksi Penumpang Bandara Ngloram Tahun 2021-202441

Tabel II. 36 Data Pergerakan Pesawat Jenderal Besar Soedirman Tahun 2022-2024 ..42

Tabel II. 37 Data Produksi Penumpang Bandara Jenderal Besar Soedirman Tahun 2022-202442

Tabel II. 38 Rincian Panjang Jalur Kereta Api Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (Km/Sp)42

Tabel II. 39 Rincian dan Kode Stasiun Pada Masing-Masing DAOP di Provinsi Jawa Tengah44

Tabel II. 40 Tingkat Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas di Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....45

Tabel II. 41 Data Kecelakaan di Provinsi Jawa Tengah.....46

Tabel II. 42 Jumlah dan Panjang Ruas Jalan Provinsi Per BPSPP Wilayah48

Tabel II. 43 Perkembangan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi49

Tabel II. 44 Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) Pada Masing-Masing BPSPP Wilayah 2020-202450

Tabel II. 45 Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) Pada BPSPP Wilayah.....50

Tabel II. 46 Pelaksanaan *Ramp Check* di Terminal Tipe B Pada Masing-Masing BPSPP Wilayah Tahun 202457

Tabel II. 47 Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Tahun 2024 di Jawa Tengah.....58

Tabel II. 48 Data Perlintasan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 202459

Tabel II. 49 Data Perlintasan Di Ruas Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 202459

Tabel II. 50 Perkembangan VCR Pada Ruas Jalan Yang Berpotensi Terjadi Kemacetan/Rawan Macet pada Tahun 2023 – 202462

Tabel II. 51 Indikasi Ruas Jalan Provinsi Yang Berpotensi Terjadi Kemacetan/Rawan Macet pada Tahun 202463

Tabel II. 52 Jumlah Pegawai (PNS) Menurut Unit Kerja65

Tabel II. 53 Jumlah Pegawai (ASN) Menurut Tingkat Pendidikan66

Tabel II. 54 Rincian Tenga Teknis66

Tabel II. 55 Rincian Aset/Modal Dinas Perhubungan Tahun 202466

Tabel II. 56 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah68

Tabel II. 57 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah77

Tabel II. 58 Rasio Realsisasi Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.....78

Tabel II. 59 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....79

Tabel II. 60 Analisa SWOT Sektor Perhubungan Darat.....84

Tabel II. 61 Analisa SWOT Sektor Perhubungan Laut.....85

Tabel II. 62 Analisa SWOT Sektor Perhubungan Udara.....86

Tabel II. 63 Strategi dari Analisa SWOT.....86

Tabel II. 64 Persandingan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.....89

Tabel II. 65 Telaahan Renstra K/L.....90

Tabel II. 66 Telaahan Rencana Tata Wilayah92

Tabel II. 67 Capaian Indikator TPB/SDGs Tahun 202496

Tabel II. 68 Telaahan RTRW dan KLHS.....98

Tabel II. 69 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah.....105

Tabel III. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.... 5

Tabel III. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 7

Tabel III. 3 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah..... 9

Tabel III. 4 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi JawaTengah Tahun 2025 – 2029 16

Tabel IV. 1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan2

Tabel IV. 2 Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Daerah Tahun 2025-2029100

Tabel IV. 3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029118

Tabel IV. 4 Indikator Kinerja Kunci.....118

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Kab/Kota dan Renja PD	2
Gambar II. 1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	2
Gambar II. 2	Struktur Organisasi Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A	7
Gambar II. 3	Struktur Organisasi Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A.....	8
Gambar II. 4	Persebaran Terminal Penumpang Tipe B di Jawa Tengah	16
Gambar II. 5	Load Factor Penumpang Trans Jateng 2017-2024.....	23
Gambar II. 6	Penumpang Kategori Umum Januari-Agustus 2025	25
Gambar II. 7	Penumpang Kategori Pelajar Januari-Agustus 2025	25
Gambar II. 8	Penumpang Kategori Lansia Januari-Agustus 2025	25
Gambar II. 9	Persebaran Pelabuhan Di Provinsi Jawa Tengah	29
Gambar II. 10	Kondisi V/C Rasio Ruas Jalan Provinsi Tahun 2024	62
Gambar II. 11	Proporsi Pegawai ASN dan Non ASN Tahun 2024	64
Gambar II. 12	Proporsi Jumlah dan Kebutuhan Pegawai.....	65
Gambar III. 1	Logframe Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.....	2
Gambar III. 2	Cascading Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029	2
Gambar III. 3	Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.....	3
Gambar III. 4	Cascading Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	3
Gambar III. 5	Rangkuman Program Pembangunan Daerah	4

BAB I

PENDAHULUAN

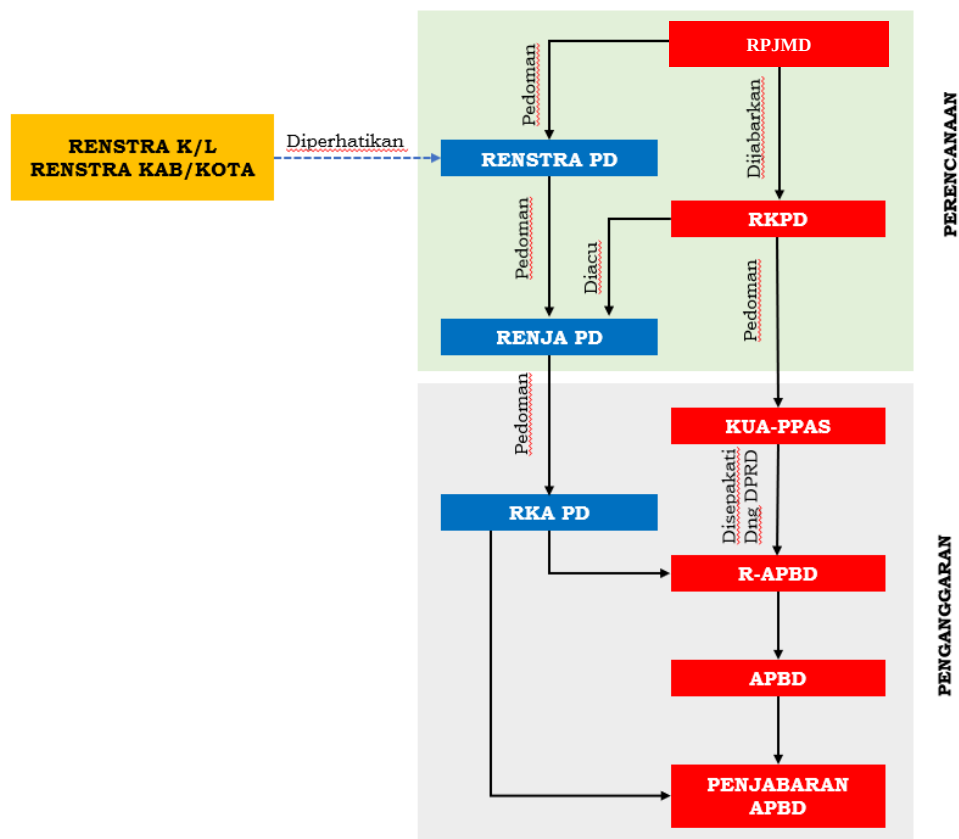
1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah sesuai tupoksi Perangkat Daerah, serta dilandasi oleh kondisi transportasi yang masih menghadapi berbagai tantangan utama, khususnya terkait aspek keselamatan, peningkatan konektivitas antarwilayah, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Fungsi Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Rencana strategis dapat dilihat sebagai formulasi secara menyeluruh atau *roadmap* yang menjelaskan bagaimana usaha-usaha dilakukan untuk mencapai tujuan melalui penerapan strategi-strategi yang dipilih.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan melalui tahapan sebagai berikut : 1) Persiapan penyusunan Renstra meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai renstra PD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi 2) penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah meliputi penyusunan pohon kinerja, *cascading*, manajemen resiko dan penyusunan dokumen renstra 3) penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah 4) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 5) perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dan 6) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Kab/Kota dan Renja PD sebagaimana bagan berikut.



Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Jateng, 2025

Gambar I. 1 Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Kab/Kota dan Renja PD

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta selaras dengan Renstra Kementerian Perhubungan 2025–2029. Dokumen ini menjadi pedoman perencanaan lima tahunan perangkat daerah yang dijabarkan ke dalam Renja tahunan, kemudian dilanjutkan pada tahap penganggaran bersama DPRD.

Transportasi memiliki peran strategis dalam membangun konektivitas antarwilayah dan antarkawasan, sehingga mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, karena merupakan permintaan turunan dari aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, pariwisata, pendidikan, dan sektor strategis lainnya. Oleh karena itu, pembangunan transportasi harus inklusif, adaptif, serta mendukung daya saing daerah secara berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur perhubungan juga diarahkan untuk mengatasi kesenjangan sosial melalui penerapan prinsip *Gender Equity, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Hal ini sejalan dengan pencapaian SDGs, khususnya tujuan kesetaraan gender, pengurangan kesenjangan, kota berkelanjutan, inovasi infrastruktur, dan penanganan perubahan iklim. Sektor transportasi juga berkontribusi pada upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, antara lain: Keselamatan transportasi yang rendah, ditandai tingginya angka kecelakaan lalu lintas akibat keterbatasan fasilitas keselamatan seperti rambu, marka, penerangan jalan, fasilitas penyeberangan, dan perlindungan bagi pengguna rentan. Aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah yang belum optimal, sehingga menurunkan efisiensi pergerakan orang dan barang serta berimplikasi pada aspek keselamatan. Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jawa Tengah telah

menetapkan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) melalui Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023.

Untuk periode 2025–2029, Tujuan Pertama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan kualitas layanan transportasi yang diarahkan untuk mendukung Sasaran Daerah Kedua, yaitu terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, Tujuan Kedua Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah yang berintegritas dan dinamis, yang ditujukan untuk mendukung Sasaran Daerah Pertama, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis. Kedua tujuan tersebut secara sinergis mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah, yaitu Mewujudkan Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7095);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6040);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5236);
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
 27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
 28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
 29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);
 31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 279). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 39. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 40. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 41. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
 42. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 124);
 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6).
 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25);
45. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);
 46. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 2 ; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 145);
 47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 165);
 48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);
 49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 171);
 50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 172);
 51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
 52. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
 53. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1391);
 54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 913);

55. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424);
56. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 813);
57. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1674);
58. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
59. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
60. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 647);
61. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 648);
62. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2013 tentang Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 80);
63. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 22);
64. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 54)
65. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP.432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
66. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);

- 67. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/57 Tahun 2016 Tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe B Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor);
- 68. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.34/07 Tahun 2021 tentang Penetapan Trayek Pelayanan Angkutan Dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021);
- 69. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/2/Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan rencana dan program / kegiatan bagi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Menjabarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, serta menetapkan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode 2025-2029;
- 2. Menetapkan program dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
- 3. Dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
- 4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah baik tahunan maupun sesuai periode jangka menengah (2025-2029).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Serta Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bab ini menguraikan Tujuan Perangkat Daerah, Sasaran Perangkat Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah, Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Bab ini menguraikan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah
BAB V	PENUTUP Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah- kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.
Lampiran	1) Pohon Kinerja; 2) Cascading Perangkat Daerah; 3) Manajemen Risiko.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, kedudukan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya, pada tahun 2025 ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam ketentuan tersebut, tidak terdapat perubahan kelembagaan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Menindak lanjuti hal tersebut telah disusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah serta Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Dalam Rancangan Peraturan Gubernur tersebut dilakukan penyesuaian yaitu Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B dan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B, yang ditingkatkan statusnya menjadi Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A dan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A. Pada saat ini masih menunggu diterbitkannya Peraturan Gubernur terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, Bidang Pelayaran, Unit Pelaksana Teknis Daerah sebanyak 6 Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah, dan Balai Transporasi Jawa Tengah serta kelompok jabatan fungsional.

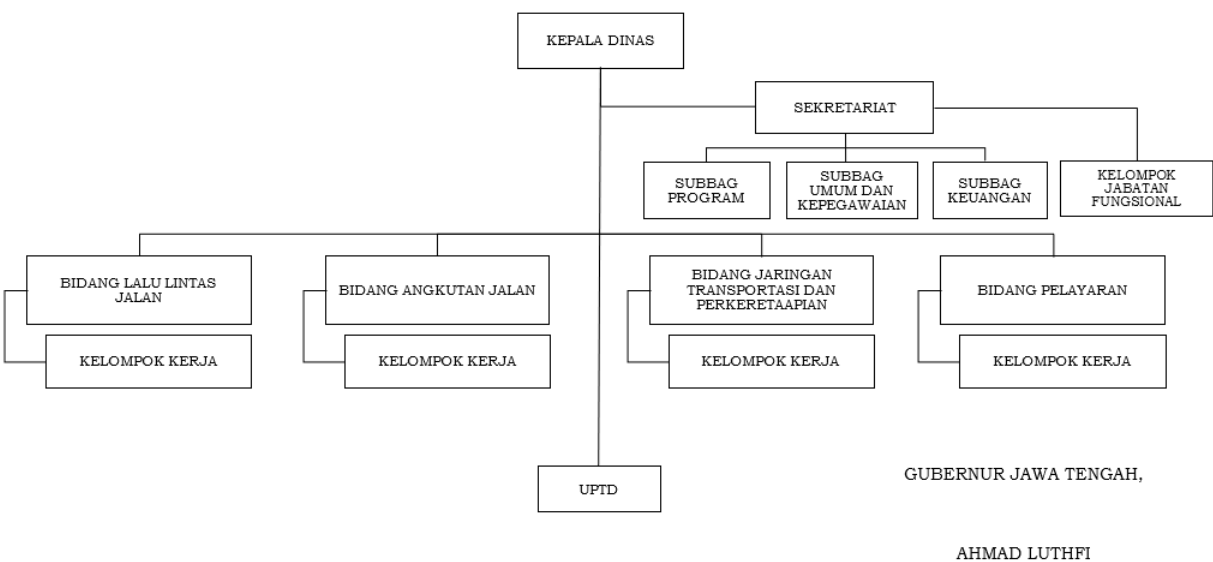
Adapun tugas pokok Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;

- 2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
- 4. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mempunyai susunan organisasi terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat;
- 3. Bidang Lalu Lintas Jalan;
- 4. Bidang Angkutan Jalan;
- 5. Bidang Jaringan Transportasi Dan Perkeretaapian;
- 6. Bidang Pelayaran;
- 7. UPT Dinas; dan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional;



Sumber : Rapergub Jateng
Gambar II. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

A. Kepala Dinas

Adapun tugas pokok Kepala Dinas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas melaksanakan fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
- 2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
4. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi :

1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
4. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5. Pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
7. Penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah Daerah;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Lalu Lintas Jalan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan, Rekayasa Lalu Lintas Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
5. Pelaporan dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Angkutan Jalan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek, Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Angkutan Aglomerasi Perkotaan Dan Perbatasan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek, dan angkutan aglomerasi ;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek, dan angkutan aglomerasi;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek, dan angkutan aglomerasi ;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek, dan angkutan aglomerasi;
5. Pelaporan dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek, dan angkutan aglomerasi ; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Jaringan Transportasi Dan Perkeretaapian

Bidang Jaringan Transportasi Dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Terminal Angkutan Jalan, Perencanaan Transportasi, dan Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Jaringan Transportasi Dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang terminal penumpang, perencanaan transportasi dan perkeretaapian
2. Pelaksanaan kebijakan bidang terminal penumpang, perencanaan transportasi dan perkeretaapian;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang terminal penumpang, perencanaan transportasi dan perkeretaapian;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang terminal penumpang, perencanaan transportasi dan perkeretaapian;

5. Pelaporan dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang terminal penumpang, perencanaan transportasi dan perkeretaapian; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Pelayaran

Bidang Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Laut, Kepelabuhanan, Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang angkutan laut, kepelabuhanan, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang angkutan laut, kepelabuhanan, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang angkutan laut, kepelabuhanan, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang angkutan laut, kepelabuhanan, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
5. Pelaporan dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang angkutan laut, kepelabuhanan, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

UPTD melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Balai di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Adapun Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memiliki UPTD yaitu Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A serta Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A.

1. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Balai tersebut dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A terdiri dari 6 Balai berdasarkan wilayah kerjanya, berikut pembagian wilayah kerja Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A :

- a. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A berkedudukan di Semarang dengan wilayah kerja 6 Kabupaten/Kota meliputi Wilayah Pengembangan

Kedungsepur : Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, dan Kota Salatiga;

- b. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A berkedudukan di Pati dengan wilayah kerja 5 Kabupaten/Kota meliputi Wilayah Pengembangan Jekuti : Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Wilayah Pengembangan Banglor : Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora;
- c. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A berkedudukan di Surakarta dengan wilayah kerja 7 Kabupaten/Kota meliputi Wilayah Pengembangan Subosukowonosraten : Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten;
- d. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A berkedudukan di Magelang dengan wilayah kerja 5 Kabupaten/Kota meliputi Wilayah Pengembangan Keburejo : Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Wilayah Pengembangan Gelangmanggung : Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung;
- e. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A berkedudukan di Banyumas dengan wilayah kerja 5 Kabupaten/Kota meliputi Wilayah Pengembangan Wonobanjar : Kabupaten Wonosobo Kabupaten Banjarnegara, Wilayah Pengembangan Cibalingmas : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan;
- f. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A berkedudukan di Pekalongan dengan wilayah kerja 7 Kabupaten/Kota meliputi Wilayah Pengembangan : Bregasmalang : Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Wilayah Pengembangan Petanglong : Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang;

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. evaluasi, dan pelaporan bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Sumber : Rapergub Jateng

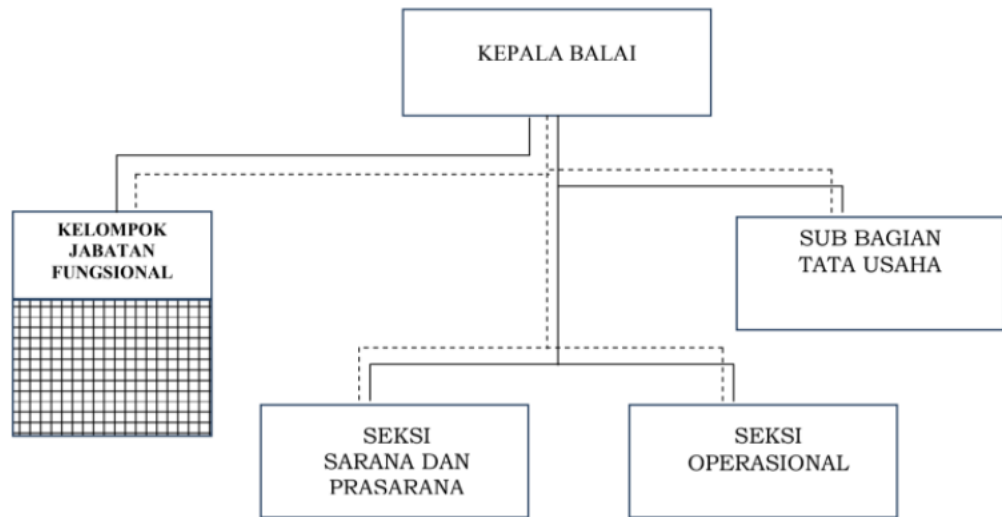
Gambar II. 2 Struktur Organisasi Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A

2. Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A

Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan Angkutan Aglomerasi Perkotaan.

Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang sarana dan prasarana, dan operasional Angkutan Aglomerasi Perkotaan. Dalam melaksanakan tugas, Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A melaksanakan fungsi :

- Penyusunan rencana teknis operasional di bidang sarana dan prasarana, dan operasional Angkutan Aglomerasi Perkotaan;
- Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang sarana dan prasarana, dan operasional Angkutan Aglomerasi Perkotaan;
- Evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana, dan operasional Angkutan Aglomerasi Perkotaan
- Pengelolaan ketatausahaan dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya



Sumber : Rapergub Jateng

Gambar II. 3 Struktur Organisasi Balai Transportasi Jawa Tengah
Kelas A

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tata laksana (proses, prosedur dan mekanisme) diantaranya peta proses bisnis dinas perhubungan yang saat ini masih dalam proses penyusunan (menyesuaikan renstra perangkat daerah) serta standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan diantaranya adalah :

1. Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 067/182/2019 3 Mei 2019 tentang Standar Prosedur Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe B di Jawa Tengah;
2. Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 067/23/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Sub Keuangan pada Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 067/21/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Program;
4. Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 067/20/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 061/17.845 tanggal 1 November 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Persetujuan Teknis Analisis Dampak lalu Lintas di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 551.1/269/2021 tentang Standar Operasional Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor. 067/80/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Verifikasi Sertifikat Standart Pelaku Usaha Angkutan laut, Pelayaran Rakyat dan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan;

8. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor. 067/11/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng;
9. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor. 067/11/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
10. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor. 900.1.131/5/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Restribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
11. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor. 500.10.1/511/2024 tentang Standar Operasional Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan Peralatan Mesin Lainnya di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
12. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor. 500.11.7/690/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Fasilitas Perlengkapan Jalan;
13. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor. 500.11.8/342/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Rekomendasi Angkutan Umum.

2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

A. Kondisi Infrastruktur Perhubungan

Dalam rangka mendukung visi Jawa Tengah sebagai provinsi maju, berdaya saing, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur perhubungan yang mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan keselamatan perjalanan, serta memperbaiki kualitas layanan angkutan umum. Upaya pembangunan sektor perhubungan diarahkan pada pengembangan jaringan transportasi yang terintegrasi, andal, inklusif, dan berkelanjutan, dengan menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama, hal ini diwujudkan melalui strategi peningkatan standar keselamatan transportasi, modernisasi angkutan umum, serta standarisasi simpul transportasi.

Dengan kebijakan tersebut, pembangunan sektor perhubungan di Jawa Tengah tidak hanya mendukung kelancaran mobilitas orang, barang, dan jasa, tetapi juga menjamin keselamatan, keamanan, keterjangkauan, serta perlindungan bagi seluruh pengguna jalan dan transportasi. Lebih jauh, peningkatan kualitas perhubungan diharapkan dapat memperkuat daya saing daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka akses ke pusat-pusat pertumbuhan baru, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Infrastruktur Pendukung Konektivitas Transportasi

a. Angkutan Jalan

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Angkutan Jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi diantaranya Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan tidak

dalam trayek yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi diantaranya taxi, angkutan sewa khusus dan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) serta pelayanan angkutan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu daerah Provinsi).

- 1) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
- Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 551.2/321/2020 tentang Penetapan Jaringan Trayek dan Kebutuha Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Jawa Tengah terdapat 272 trayek AKDP dengan kebutuhan kendaraan sebanyak 6.442 kendaraan sedangkan jumlah kendaraan pada tahun 2024 sebanyak 3.434 kendaraan. Adapun data kendaraan dari Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II. 1 Jumlah Bus dan Jumlah Perusahaan AKDP Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan	Jumlah Perusahaan
BPSPP Wilayah I Kelas A			
1	Kab. Demak	69	3
2	Kab. Semarang	109	2
3	Kab. Grobogan	58	4
4	Kota Salatiga	33	2
5	Kota Semarang	57	10
6	Kab. Kendal	81	6
BPSPP Wilayah II Kelas A			
7	Kab. Blora	6	1
8	Kab. Rembang	20	1
9	Kab. Pati	43	2
10	Kab. Kudus	98	7
11	Kab. Jepara	107	6
BPSPP Wilayah III Kelas A			
12	Kota Surakarta	107	9
13	Kab. Boyolali	76	9
14	Kab. Klaten	0	0
15	Kab. Sukoharjo	0	0
16	Kab. Wonogiri	84	8
17	Kab. Karanganyar	41	7
18	Kab. Sragen	34	7
BPSPP Wilayah IV Kelas A			
19	Kab. Kebumen	100	8
20	Kab. Purworejo	106	5
21	Kab. Magelang	79	11
22	Kab. Temanggung	216	2
23	Kota Magelang	47	4
BPSPP Wilayah V Kelas A			
24	Kab. Cilacap	63	10
25	Kab. Banyumas	302	15
26	Kab. Purbalingga	53	7
27	Kab. Banjarnegara	120	23
28	Kab. Wonosobo	315	11

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan	Jumlah Perusahaan
BPSPP Wilayah VI Kelas A			
29	Kab. Batang	16	5
30	Kab. Pekalongan	176	5
31	Kab. Pemalang	169	5
32	Kab. Tegal	159	4
33	Kab. Brebes	153	6
34	Kota Tegal	155	4
34	Kota Pekalongan	182	5
Jumlah		3.434	214

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

2) Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

Berdasarkan data tahun 2020 hingga tahun 2024, jumlah armada/kendaraan angkutan umum di Jawa Tengah menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020, jumlah armada mencapai titik terendah yakni 1.921 unit. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan pembatasan mobilitas masyarakat serta menurunnya aktivitas operasional angkutan umum.

Memasuki periode 2021–2023, jumlah armada mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan ekonomi nasional serta mulai pulihnya mobilitas masyarakat. Namun, pada tahun 2024 jumlah armada kembali menurun menjadi 2.846 unit, turun dari tahun 2023 yang mencapai 3.096 unit. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum serta meningkatnya peralihan ke kendaraan pribadi, terutama setelah aksesibilitas jaringan jalan tol di Jawa Tengah semakin merata dan mudah dijangkau. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius, mengingat ketersediaan dan keberlangsungan armada angkutan umum sangat berpengaruh terhadap pelayanan transportasi publik, pengurangan kemacetan, pengendalian emisi, serta keselamatan lalu lintas. Adapun data kendaraan dari Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel II. 2 Jumlah Bus Operasional dan Bus Cadangan AKAP Di Provinsi Jawa Tengah

No	Tahun	Jumlah Bus AKAP				Jumlah Bus Cadangan
		Ekonomi		Non Ekonomi		
		Bus	Rit	Bus	Rit	
1	2020	601	1.201	1.320	2.641	216
2	2021	402	804	2 670	5 340	216
3	2022	436	872	2.660	5.320	216
4	2023	436	872	2.660	5.320	216
5	2024	580	580	2.266	2.266	160

Sumber : BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah, 2025

3) Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP)

Pada tahun 2024, pelayanan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) di Jawa Tengah baru terealisasi pada 31 trayek dengan total 256 kendaraan.

Padahal, kebutuhan ideal yang teridentifikasi mencapai 66 trayek dengan estimasi 969 kendaraan. Artinya, pemenuhan kebutuhan AJDP baru mencapai kurang dari separuh dari total yang direncanakan. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan trayek AJDP disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a) Tingkat kebutuhan mobilitas masyarakat yang belum merata, terutama di wilayah dengan aksesibilitas tinggi yang telah terlayani moda transportasi lain (jalan tol, KA, maupun angkutan daring).
- b) Rendahnya minat operator swasta untuk membuka layanan trayek baru karena pertimbangan keekonomian, termasuk keterisian penumpang (load factor) yang belum stabil.
- c) Belum terintegrasinya AJDP dengan moda transportasi lain, sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Adapun rincian trayek tersebut sebagai berikut :

Tabel II. 3 Layanan Trayek AJDP Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

NO	KOTA ASAL TUJUAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI	RINCIAN KETETAPAN KEBUTUHAN ANGKUTAN AJDP			KODE PELAYANAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT (ASAL-TUJUAN)
		JUMLAH KUOTA	SESUAI IJIN	SISA KUOTA	
I. REGULAR					
1	Cilacap - Pemalang	12	0	12	233.0127-AJ
2	Cilacap - Purbalingga	14	4	10	233.0103-AJ
3	Cilacap - Kota Pekalongan	10	4	6	233.0175-AJ
4	Cilacap - Purwokerto	16	7	9	233.0102-AJ
5	Cilacap - Semarang	30	15	15	233.0174-AJ
6	Cilacap- Kota Tegal	10	1	9	233.0176-AJ
7	Cilacap - Purworejo	16	0	16	233.0106-AJ
8	Purwokerto - Surakarta	12	2	10	233.0272-AJ
9	Purwokerto - Semarang	95	30	65	233.0274-AJ
10	Purwokerto - Kota Pekalongan	20	4	16	233.0275-AJ
11	Purwokerto - Kota Tegal	12	0	12	233.0276-.AJ
12	Semarang - Blora	30	9	21	233.7416-AJ
13	Semarang - Kota Tegal	10	10	0	233.7476-AJ
14	Semarang - Rembang	10	0	10	233.7417-AJ
15	Semarang - Surakarta	43	39	4	233.7472-AJ
16	Semarang - Purworejo	14	0	14	233.7406-AJ
17	Semarang - Wonogiri	20	0	20	233.7412-AJ
18	Temanggung - Purwokerto	10	0	10	233.2302-AJ
19	Temanggung - Semarang	10	0	10	233.2374-AJ
20	Pemalang - Surakarta	10	4	6	233.2772-AJ
21	Pati - Klaten	6	0	6	233.1810-AJ
22	Pati - Semarang	20	10	10	233.1874-AJ
23	Banjarnegara - Surakarta	10	0	10	233.0472-AJ
24	Banjarnegara - Semarang	20	6	14	233.0474-AJ
25	Kota Pekalongan - Semarang	14	0	14	233.7574-AJ
26	Kota Pekalongan - Surakarta	10	0	10	233.7572-AJ
27	Purbalingga - Semarang	12	10	2	233.0374-AJ
28	Purbalingga - Surakarta	16	1	15	233.0372-AJ
29	Brebes - Wonogiri	10	0	10	233.2912-AJ
30	Brebes - Purworejo	4	0	4	233.2906-AJ
31	Brebes - Semarang	15	5	10	233.2974-AJ
32	Surakarta - Cepu	10	0	10	233.7216-.AJ
33	Klaten - Semarang	14	2	12	233.1274-AJ
34	Wonogiri - Semarang	14	0	14	233.1274-AJ
35	Pekalongan - Semarang	14	0	14	233.2674-AJ

NO	KOTA ASAL TUJUAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI	RINCIAN KETETAPAN KEBUTUHAN ANGKUTAN AJDP			KODE PELAYANAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT (ASAL-TUJUAN)
		JUMLAH KUOTA	SESUAI IJIN	SISA KUOTA	
36	Karanganyar - Semarang	12	0	12	233.1374-AJ
37	Kebumen - Semarang	14	3	11	233.0574-AJ
38	Sragen - Semarang	10	0	10	233.1474-AJ
39	Kota Tegal - Surakarta	14	0	14	233.7672-AJ
40	Sukoharjo - Pati	10	4	6	233.1118-AJ
41	Jepara - Sukoharjo	31	5	26	233.2011-AJ
42	Jepara - Surakarta	10	3	7	233.2072-AJ
43	Wonosobo - Semarang	10	0	10	233.0774-AJ
44	Wonosobo - Surakarta	12	0	12	233.0772-AJ
45	Wonosobo - Tegal	10	0	10	233.0776-AJ
46	Kudus - Wonosobo	6	0	6	233.1907-AJ
47	Semarang - Sukoharjo	10	4	6	233.0776-AJ
48	Purwokerto - Wonosobo	10	5	5	233.0776-AJ
II. DUKUNGAN KSPN					
49	Semarang - Jepara	37	24	13	233.2074-AJ
51	Kota Magelang - Cilacap	10	1	9	233.7101-AJ
52	Kota Magelang - Banjarnegara	10	0	10	233.7104-AJ
53	Wonosobo - Cilacap	10	0	10	233.0701-AJ
54	Sragen - Kota Magelang	12	0	12	233.7414-AJ
56	Jepara - Kota Magelang	10	4	6	233.2002-AJ
55	Jepara - Wonosobo	26	17	9	233.2009-AJ
57	Rembang - Magelang (Borobudur)	9	0	9	233.1708-AJ
58	Purwokerto - Kota Magelang	16	0	16	233.0271-AJ
59	Magelang - Kudus	6	0	6	233.0819-AJ
60	Magelang - Kota Tegal	12	4	8	233.0876-AJ
61	Magelang - Semarang	15	14	1	233.0874-AJ
62	Magelang - Surakarta	6	0	6	233.0874-AJ
63	Magelang - Wonosobo	10	0	10	233.0807-AJ
64	Pati - Magelang	6	0	6	233.1808-AJ
65	Cilacap - Jepara	10	5	5	233.0271-AJ
66	Jepara - Karanganyar	12	0	12	233.0819-AJ

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

4) Angkutan Tidak Dalam Trayek (Taksi dan Angkutan Sewa Khusus)

Pada Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah jumlah kendaraan untuk Taksi sebanyak 737 Kendaraan, dan Angkutan Sewa Khusus (ASK) sebanyak 789 Kendaraan. Adapun rincian per masing-masing Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Tabel II. 4 Jumlah Angkutan Taksi, Pariwisata dan Angkutan Sewa Khusus (ASK) Per Kabupaten/Kota

Kab/Kota Pelayanan	Rincian Ketetapan Kebutuhan / Kuota Taksi			Kode Pelayanan Angkutan Taksi	Rincian Ketetapan Kebutuhan / Kuota Ask			Kode Pelayanan Angkutan Sewa Khusus
	Jumlah Kuota	Sesuai Ijin	Sisa Kuota		Jumlah Kuota	Sesuai Ijin	Sisa Kuota	
Kabupaten Kendal	31	0	31	233.24-TX.01	60	13	47	233.24-ASK.01
Kabupaten Demak	13	0	13	233.21-TX.01	50	13	37	233.21-ASK.01
Kabupaten Semarang (Ungaran)	5	0	5	233.22-TX.01	207	40	167	233.22-ASK.01
Kota Salatiga	18	0	18	233.73-TX.01	257	63	194	233.73-ASK.01
Kota Semarang	499	286	213	233.74-TX.01	3.010	294	2716	233.74-ASK.01
Kab.Grobogan (Purwodadi)	5	0	5	233.15-TX.01	30	1	29	233.15-ASK.01
Kabupaten Jepara	14	0	14	233.20-TX.02	68	0	68	233.20-ASK.02
Kabupaten Kudus	26	24	2	233.19-TX.02	120	0	120	233.19-ASK.02
Kabupaten Pati	12	5	7	233.18-TX.02	108	16	92	233.18-ASK.02
Kabupaten Rembang	5	0	5	233.17-TX.02	25	0	25	233.17-ASK.02
Kabupaten Blora	5	0	5	233.16-TX.02	25	0	25	233.16-ASK.02
Kota Surakarta	17	0	17	233.72-TX.03	937	28	909	233.72-ASK.03

Kab/Kota Pelayanan	Rincian Ketetapan Kebutuhan / Kuota Taksi			Kode Pelayanan Angkutan Taksi	Rincian Ketetapan Kebutuhan / Kuota Ask			Kode Pelayanan Angkutan Sewa Khusus
	Jumlah Kuota	Sesuai Ijin	Sisa Kuota		Jumlah Kuota	Sesuai Ijin	Sisa Kuota	
Kabupaten Boyolali	115	100	15	233.09-TX.03	145	4	141	233.09-ASK.03
Kabupaten Sukoharjo	12	0	12	233.11-TX.03	90	3	87	233.11-ASK.03
Kabupaten Karanganyar	5	0	5	233.12-TX.03	35	9	26	233.12-ASK.03
Kabupaten Wonogiri	5	0	5	233.14-TX.03	75	2	73	233.14-ASK.03
Kabupaten Sragen	5	0	5	233.13-TX.03	50	3	47	233.13-ASK.03
Kabupaten Klaten	5	0	5	233.10-TX.03	80	3	77	233.10-ASK.03
Kabupaten Purworejo	52	39	13	233.06-TX.04	200	0	200	233.06-ASK.04
Kabupaten Wonosobo	30	27	3	233.07-TX.04	60	1	59	233.07-ASK.04
Kota Magelang	29	29	0	233.71-TX.04	125	7	118	233.71-ASK.04
Kabupaten Magelang	66	65	1	233.08-TX.04	177	42	135	233.08-ASK.04
Kabupaten Temanggung	34	22	12	233.23-TX.04	91	12	79	233.23-ASK.04
Kabupaten Banjarnegara	25	25	0	233.049-TX.05	50	4	46	233.04-ASK.05
Kabupaten Purbalingga	30	30	0	233.03-TX.05	60	29	31	233.03-ASK.05
Kabupaten Banyumas	100	42	58	233.02-TX.05	384	142	242	233.02-ASK.05
Kabupaten Cilacap	32	0	32	233.01-TX.05	77	19	58	233.01-ASK.05
Kabupaten Kebumen	3	3	0	233.05-TX.05	63	1	62	233.05-ASK.05
Kota Pekalongan	24	24	0	233.75-TX.06	175	11	164	233.75-ASK.06
Kabupaten Batang	5	0	5	233.25-TX.06	100	5	95	233.25-ASK.06
Kabupaten Pekalongan	5	0	5	233.26-TX.06	102	14	88	233.26-ASK.06
Kabupaten Brebes	5	0	5	233.29-TX.06	189	1	188	233.29-ASK.06
Kabupaten Tegal	7	7	0	233.76-TX.06	280	0	280	233.76-ASK.06
Kota Tegal	10	9	1	233.28-TX.06	174	0	174	233.28-ASK.06
Kabupaten Pemalang	5	0	5	233.27-TX.06	150	9	141	233.27-ASK.06
JUMLAH	1.259	737	522		7.829	789	7.040	

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dari tabel diatas diperoleh gambaran daerah perkotaan besar dan pusat pertumbuhan (Semarang, Salatiga, Kudus, Banyumas) masih membutuhkan percepatan perizinan dan optimalisasi layanan taksi, karena kebutuhan lebih tinggi dibandingkan realisasi izin sedangkan terkait angkutan sewa khusus hampir di seluruh wilayah belum terpenuhi secara signifikan. Dalam mengatasi hal tersebut diperlukan berbagai macam strategi melalui percepatan perizinan, mendorong investasi operator, serta integrasi dengan layanan angkutan umum massal.

5) Angkutan Pedesaan

Angkutan pedesaan adalah angkutan pada jaringan trayek pedesaan yang melayani suatu kawasan pedesaan dan tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan. Dalam Hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan terhadap jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu daerah Provinsi. Kondisi eksisting menunjukkan bahwa angkutan pedesaan lintas wilayah perbatasan di Jawa Tengah saat ini belum tersedia. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk kondisi jaringan jalan yang sebagian besar hanya dapat dilalui oleh Mobil Penumpang Umum (MPU). Selain faktor teknis tersebut, keberlangsungan angkutan pedesaan juga sangat dipengaruhi oleh aspek keekonomian penyelenggara. Rendahnya jumlah penumpang, tingginya

biaya operasional kendaraan, serta terbatasnya dukungan insentif membuat banyak operator angkutan pedesaan mengalami kesulitan untuk menjaga keberlanjutan layanan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, saat ini sedang dilakukan survey lapangan guna memetakan kondisi eksisting serta kebutuhan rill angkutan pedesaan lintas kabupaten/kota di Jawa Tengah. Adapun trayek Angkutan pedesaan di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan analisa awal kebutuhan adalah sebagai berikut:

Tabel II. 5 Kebutuhan Trayek Angkutan Pedesaan Yang Melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu daerah Provinsi

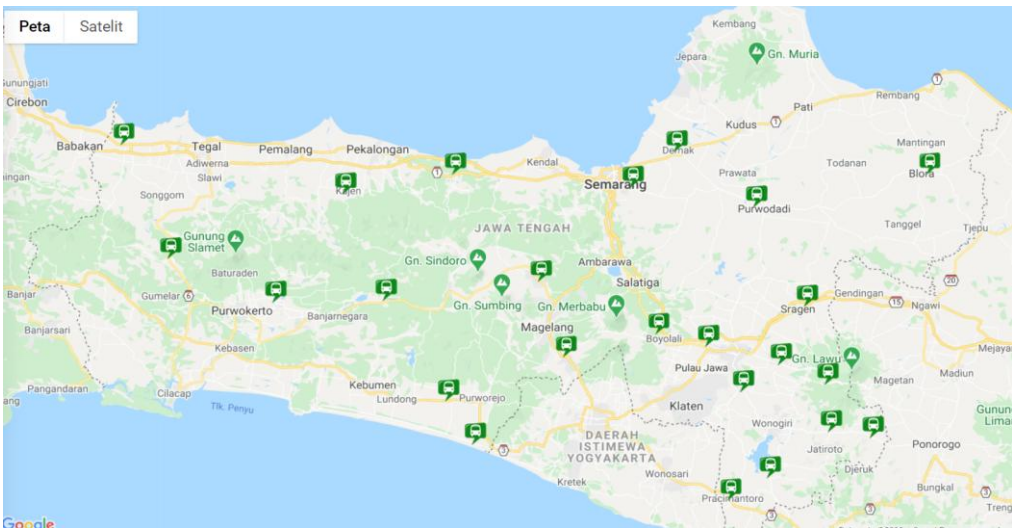
No	TRAYEK	Keterangan
1	Terminal Boja (Kendal) – Limbangan – Sumowono (Kab. Semarang)	Kab.Kendal dan Kab. Semarang
2	Bringin (Kab Semarang) – Ngajaran – Pringapus – Mendiro –Kawengen - Banyumeneng (Kab Demak)	Kab. Semarang, Kab. Demak
3	Terminal Tingkir (Salatiga) – Suruh – Karanggede – Waduk Kedungombo (Kab. Boyolali)	Kota Salatiga, Kab. Boyolali
4	Godong (Kab Grobogan) – Karangrayung – Juwangi – Waduk Kedungombo (Kab. Boyolali)	Kab. Grobogan, Kab. Boyolali
5	Majenang - Salem	Kab. Cilacap, Kab. Brebes
6	T. Juwana (tipe c) -Jakenan-Pucakwangi-Todanan-Terminal Ngawen (tipe c)	Kab. Pati, Kab. Blora
7	T. Lasem(tipe c)-Pamotan-T.Jatirogo (tipe c)	Kab. Rembang, Kab. Tuban
8	Terminal Watu Kelir (Kab Sukoharjo) – Pasar Krisak (Kab Wonogiri)	Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri
9	Solo – Sukoharjo – Songgorunggi – Mento – Klerong – Jatipuro – Jatiyoso (Kab Karanganyar)	Kota Surajarta, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar
10	Jatisrono (Kab Wonogiri) - Jatipuro (Kab. Karanganyar)	Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar
11	Sragen -Ngawi	Kab. Sragen, Kab. Ngawi
12	Sawangan (Kab Magelang) - Selo (Kab Boyolali)	Kab. Magelang, Kab. Boyolsli
13	Muntilan (Kab Magelang) – Ngluwar – Bligo – Salam – Tempel - Jombor (Yogya)	Kab. Magelang, Jogja
14	Kaloran (Kab Temanggung) – Sumowono (Kab Semarang)	Kab. Temanggung, Kab. Semarang
15	Sapuran (Kab Wonosobo) – Kepil – Bruno (Kab Purworejo)	Kab. Wonosobo, Kab. Purworejo
16	Majenang (Kab Cilacap) – Salem (Kab Brebes)	Kab. Cilacap, Kab. Brebes
17	Sokaraja (Kab Banyumas) - Kemangkön – Bukateja (Kab Purbalingga)	Kab. Banyumas, kab. Purbalingga
18	Wanayasa (Kab Banyumas) - Batur - Dieng - Batas Wonosobo	Kab. Banyumas, Kab. Wonosobo
19	Baturaden (Kab Bayumas) – Serang Kab Purbalingga	Kab. Banyumas, kab. Purbalingga
20	Jatibarang - Balapulang	Kab. Brebes, Kab. Tegal
21	Pekalongan - Batang - Tulis - Bandar	Kota Pekalongan, Kab. Batang
22	Ketanggungan - Jatibarang - Slawi	Kab. Brebes, Kab. Tegal
23	Jatibarang - Margasari	Kab. Brebes, Kab. Tegal

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

b. Terminal Penumpang Tipe B

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Di Jawa Tengah dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/57 Tahun 2016 tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe B Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/57 Tahun 2016 tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe B Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah berjumlah 24 terminal. Adapun berikut persebaran Terminal Penumpang Tipe B di Jawa Tengah :



Sumber : <http://gis.perhubungan.jatengprov.go.id/>, 2024

Gambar II. 4 Persebaran Terminal Penumpang Tipe B di Jawa Tengah

Namun demikian dari 24 Terminal Penumpang Tipe B dimaksud pada SK Gubernur yang beroperasi sebanyak 23 Terminal, dikarenakan Terminal Nampurejo sudah tidak beroperasi setelah mulai beroperasi Terminal Kutoarjo (saat ini masih dalam proses revisi SK Gubernur). Selain itu terdapat 1 terminal yang tidak layak yaitu Terminal Bintoro. Di sisi lain dari 23 Terminal Penumpang Tipe B yang beroperasi terdapat 3 terminal yang status asetnya belum sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel II. 6 Kondisi Infrastruktur Simpul Terminal Penumpang Tipe B

No	Nama Terminal	Kab / Kota	Kondisi	Status Aset
BPSPP Wilayah I				
1	Penggaron	Kota Semarang	Layak Operasi	Milik Pemprov
2	Purwodadi	Kab. Grobogan	Layak Operasi	Milik Pemprov
3	Bintoro	Kab. Demak	Tidak Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik PT KAI
BPSPP Wilayah II				
4	Gagak Rimang	Kab. Blora	Layak Operasi	Milik Pemprov
BPSPP Wilayah III				
5	Pengagung	Kab. Boyolali	Layak Operasi	Milik Pemprov
6	Pilangsari	Kab. Sragen	Layak Operasi	Milik Pemprov
7	Tegalgede	Kab. Karanganyar	Layak Operasi	Milik Pemprov
8	Tawangmangu	Kab. Karanganyar	Layak Operasi	Milik Pemprov
9	Jatisrono	Kab. Wonogiri	Layak Operasi	Milik Pemprov
10	Baturetno	Kab. Wonogiri	Layak Operasi	Milik Pemprov
11	Pracimantoro	Kab. Wonogiri	Layak Operasi	Milik Pemprov
12	Purwantoro	Kab. Wonogiri	Layak Operasi	Milik Pemprov
13	Kartosuro	Kab. Sukoharjo	Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Bondo Deso
14	Sukoharjo	Kab. Sukoharjo	Layak Operasi	Milik Pemprov
BPSPP Wilayah IV				
15	Madureso	Kab. Temanggung	Layak Operasi	Milik Pemprov

No	Nama Terminal	Kab / Kota	Kondisi	Status Aset
16	Drs. Prayitno	Kab. Magelang	Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik PT KAI
17	Kutoarjo	Kab. Purworejo	Proses Pembangunan	Milik Pemprov
18	Nampurejo	Kab. Purworejo	Saat ini sudah tidak beroperasi setelah Terminal Kutoarjo beroperasi (Menunggu revisi SK Gubernur)	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Bondo Deso (sudah tidak beroperasi dari tahun 2022)
BPSPP Wilayah V				
19	Banjarnegara	Kab. Banjarnegara	Layak Operasi	Milik Pemprov
20	Purbalingga	Kab. Purbalingga	Layak Operasi	Milik Pemprov
BPSPP Wilayah VI				
21	Banyuputih	Kab. Batang	Layak Operasi	Milik Pemprov
22	Kajen	Kab. Pekalongan	Layak Operasi	Milik Pemprov
23	Bumiayu	Kab. Brebes	Layak Operasi	Milik Pemprov
24	Tanjung	Kab. Brebes	Layak Operasi	Milik Pemprov

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Selain itu pada Tahun 2024 dilakukan survay Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada Terminal Penumpang Tipe B mendasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dengan hasil sebagai berikut :

Tabel II. 7 Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan (SPP) Terminal Penumpang Tipe B Tahun 2024

No	Terminal	Kab/Kota	% Pemenuhan SPP Terminal Penumpang Tipe B					
			Ketersediaan Sarana Prasarana		Kondisi Sarana Prasarana			
			Ada	Tidak Ada	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
BPSPP Wilayah I								
1	Penggaron	Kota Semarang	60,79%	39,21%	48,29%	41,67%	6,62%	3,42%
2	Purwodadi	Kab. Grobogan	72,22%	27,78%	29,06%	32,48%	7,69%	30,77%
3	Bintoro	Kab. Demak	43,91%	56,09%	15,13%	18,76%	1,15%	64,96%
BPSPP Wilayah II								
4	Gagak Rimang	Kab. Blora	65,49%	34,51%	39,06%	23,68%	5,64%	31,62%
BPSPP Wilayah III								
5	Penggung	Kab. Boyolali	50,11%	49,89%	30,56%	64,96%	4,49%	0,00%
6	Pilangsari	Kab. Sragen	55,34%	44,66%	31,20%	63,93%	4,36%	0,51%
7	Kartosuro	Kab. Sukoharjo	48,21%	51,79%	23,93%	70,04%	4,87%	1,15%
8	Sukoharjo	Kab. Sukoharjo	53,95%	46,05%	31,28%	64,23%	4,49%	0,00%
9	Tegalgede	Kab. Karanganyar	47,46%	52,54%	20,85%	23,72%	0,64%	54,79%
10	Tawangmangu	Kab. Karanganyar	43,27%	56,73%	22,09%	73,42%	3,21%	1,28%
11	Baturetno	Kab. Wonogiri	50,75%	49,25%	30,77%	64,23%	4,36%	0,64%
12	Jatisrono	Kab. Wonogiri	53,10%	46,90%	34,62%	18,29%	4,36%	42,74%
13	Pracimantoro	Kab. Wonogiri	49,04%	50,96%	29,06%	26,71%	3,21%	41,03%
14	Purwantoro	Kab. Wonogiri	50,64%	49,36%	27,56%	21,15%	3,21%	48,08%
BPSPP Wilayah IV								
15	Madureso	Kab. Temanggung	53,95%	46,05%	48,25%	45,26%	0,51%	5,98%
16	Drs. Prayitno	Kab. Magelang	49,04%	50,96%	41,20%	53,80%	4,36%	0,64%
17	Kutoarjo	Kab. Purworejo	69,23%	30,77%	60,68%	11,54%	0,00%	27,78%
18	Nampurejo	Kab. Purworejo	Proses penghapusan dan saat ini sudah tidak operasi					
BPSPP Wilayah V								
19	Banjarnegara	Kab. Banjarnegara	54,27%	45,73%	24,79%	37,39%	3,21%	34,62%
20	Purbalingga	Kab. Purbalingga	55,45%	44,55%	37,82%	58,33%	3,85%	0,00%
BPSPP Wilayah V								
21	Banyuputih	Kab. Batang	56,84%	43,16%	41,20%	42,91%	4,36%	11,54%
22	Kajen	Kab. Pekalongan	61,86%	38,14%	38,63%	56,37%	4,36%	0,64%
23	Tanjung	Kab. Brebes	48,93%	51,07%	49,06%	35,04%	4,36%	11,54%
24	Bumiayu	Kab. Brebes	43,70%	56,30%	40,17%	53,21%	5,98%	0,64%
Rata-rata Jawa Tengah			51,56%	44,27%	33,14%	41,71%	3,72%	17,27%

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Rata-rata tingkat pemenuhan sarana prasarana berdasarkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan (SPP) Terminal Penumpang Angkutan Jalan untuk 6 aspek (pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan / keteraturan, kenyamanan, kemudahan / keterjangkauan dan kesetaraan) pada Tahun 2024 sebesar 51,56%. Adapun rata-rata kondisi sarana prasarana eksisting Terminal Penumpang Tipe B pada Tahun 2024 dalam kondisi baik sebesar 33,14%.

Sedangkan jumlah kendaraan masuk di Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2024 sebanyak 349.167 kendaraan yang didominasi oleh kendaraan bus besar dengan jumlah 207.568 kendaraan. Terminal dengan jumlah kendaraan masuk terbanyak ada di terminal Tipe B Purbalingga sebanyak 49.434 kendaraan.

Tabel II. 8 Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2024

No.	Nama Terminal	Kabupaten / Kota	Kendaraan Masuk				Jumlah
			Bis Besar	Bis Sedang	Bis Kecil	Mobil Penumpang Umum	
1	Purbalingga	Purbalingga	8.939	45.675	3.633	31.871	90.118
2	Sukoharjo	Sukoharjo	17.697	35.056	-	1.091	53.844
3	Purwodadi	Grobogan	18.186	21.482	-	-	39.668
4	Banjarnegara	Banjarnegara	7.560	5.484	17.868	-	30.912
5	Pilangsari	Kab. Sragen	23.058	1	830	-	23.889
6	Penggaron	Kota Semarang	2.292	15.940	574	1.538	20.344
7	Kartosuro	Sukoharjo	19.498	4	-	4	19.506
8	Dr. Prayitno Muntilan	Kab. Magelang	11.022	1.988	4.199	-	17.209
9	Kutoarjo	Purworejo	-	15.251	-	-	15.251
10	Madureso	Temanggung	7.562	7.433	228	-	15.223
11	Jatisrono	Kab. Wonogiri	14.447	-	-	-	14.447
12	Purwantoro	Kab. Wonogiri	13.430	-	-	-	13.430
13	Penggung	Kab. Boyolali	13.077	-	-	-	13.077
14	Banyuputih	Batang	2.577	3.577	4.527	-	10.681
15	Bintoro	Kab. Demak	6.408	1.968	2.081	-	10.457
16	Tanjung	Brebes	7.339	-	2.929	-	10.268
17	Bumiayu	Brebes	7.210	1.579	-	-	8.789
18	Tegalgede	Karanganyar	2.565	2.150	374	3.106	8.195
19	Kajen	Kab. Pekalongan	5.017	686	2.491	-	8.194
20	Tawangmangu	Karanganyar	755	2.567	1.761	2.431	7.514
21	Pracimantoro	Kab. Wonogiri	6.513	842	-	-	7.355
22	Baturetno	Kab. Wonogiri	6.071	1.237	-	-	7.308
23	Gagak Rimang	Kab. Blora	6.345	-	-	-	6.345
24	Nampurejo	Purworejo	-	-	-	-	-
	JUMLAH		207.568	162.920	41.495	40.041	452.024

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dalam mendukung peningkatan konektivitas dan aksesibilitas direncanakan penuntasan pembangunan terminal Tipe B Kutoarjo Kabupaten Purworejo, peningkatan Terminal Tipe B Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, Terminal Tipe B Madureso Kabupaten Magelang, Terminal Tipe B

Banyuputih Kabupaten Batang, Kabupaten Sukoharjo, Terminal Tipe B Penggaron Kota Semarang, Terminal Purbalingga Kabupaten Purbalingga dan Terminal Bumiayu Tipe B di Kabupaten Brebes serta pemeliharaan pada semua terminal tipe B di Jawa Tengah.

Selain itu Pada Tahun 2023 telah disusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJLLAJ), dimana dalam salah satu rekomendasinya adalah pembangunan simpul transportasi Terminal Penumpang Tipe B.

Tabel II. 9 Indikasi Rencana Kebutuhan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Jawa Tengah

No	Kab/Kota	Jumlah (Terminal)	Keterangan
1	Kab Tegal	1	Belum mempunyai Terminal Tipe A dan Tipe B
2	Kab. Kendal	1	Belum mempunyai Terminal Tipe A dan Tipe B
3	Kab. Rembang	1	Belum mempunyai Terminal Tipe A dan Tipe B
4	Kab. Pati	1	Belum mempunyai Terminal Tipe A dan Tipe B
5	Kab. Jepara	1	Belum mempunyai Terminal Tipe A dan Tipe B
6	Kab. Cilacap	1	Sudah mempunyai Terminal Tipe A di Cilacap bagian Timur namun belum mengakomodir Cilacap Bagian Barat
7	Kab. Banyumas	1	Sudah mempunyai Terminal Tipe A di Wilayah Perkotaan namun belum mengakomodir Banyumas Bagian Barat
Jumlah		7	

Sumber : RIJLLAJ, 2023

Hal tersebut selaras dengan Dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah dimana jumlah dan persebaran terminal tipe A dan tipe B belum dapat memenuhi kebutuhan. Sampai dengan tahun 2024 masih terdapat kebutuhan pembangunan terminal tipe A di 5 kabupaten/kota dan tipe B di 6 kabupaten/kota.

Tabel II. 10 Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten / Kota	Terminal Tipe A		Terminal Tipe B	
		Eksisting	RTRW Provinsi	Eksisting	RTRW Provinsi
	Kedungsepur				
1	Kab. Kendal				Ada (P)
2	Kab. Demak	Demak*	Ada	Bintoro	
3	Kab. Semarang	Bawen	Ada		
4	Kota Semarang	Mangkang	Ada	Penggaron	Ada
5	Kota Salatiga	Tingkir	Ada		
6	Kab. Grobogan			Purwodadi	Ada
	Subosukowonosraten				
7	Kab. Sukoharjo			Kartosuro, Sukoharjo	Ada
8	Kab. Boyolali			Penggunung	Ada
9	Kota Surakarta	Tirtonadi	Ada		
10	Kab. Karanganyar			Tegalgede, Tawangmangu	Ada
11	Kab. Wonogiri	Giri Adipura	Ada	Jatisrono, Pracimantoro, Purwantoro, dan Baturetno	Ada
12	Kab. Sragen		Ada (B)	Pilangsari	Ada

No	Kabupaten / Kota	Terminal Tipe A		Terminal Tipe B	
		Eksisting	RTRW Provinsi	Eksisting	RTRW Provinsi
13	Kab. Klaten	Ir. Soekarno	Ada		
	Cibalingmas				
14	Kab. Purbalingga	Bobotsari	Ada	Purbalingga	Ada
15	Kab. Banyumas	Purwokerto	Ada		Ada*
16	Kab. Cilacap	Bangga Bangun Desa	Ada		Ada* (B)
	Bregasmalang				
17	Kab. Brebes			Bumiayu dan Tanjung	Ada
18	Kab. Tegal		Ada* (B)		Ada
19	Kota Tegal	Tegal	Ada		
20	Kab. Pemalang	Induk Pemalang	Ada		Ada
	Petanglong				
21	Kab. Pekalongan		Ada* (B)	Kajen	Ada
22	Kab. Batang			Banyuputih	Ada
23	Kota Pekalongan	Pekalongan	Ada		
	Wonobanjar				
24	Kab. Banjarnegara			Banjarnegara	
25	Kab. Wonosobo	Mendolo	Ada		
	Keburejo				
26	Kab. Kebumen	Kebumen	Ada		
27	Kab. Purworejo	Purworejo	Ada	Kutoarjo* dan Nampurejo**	Ada
	Gelangmanggung				
28	Kab. Magelang		Ada* (B)	Drs. Prayitno	Ada
29	Kota Magelang	Tidar	Ada		
30	Kab. Temanggung			Madureso	Ada
	Jekuti				
31	Kab. Jepara		Ada		
32	Kab. Kudus	Jati	Ada		
33	Kab. Pati		Ada* (B)		
	Banglor				
34	Kab. Rembang				Ada (P/B)
35	Kab. Blora	Cepu	Ada	Gagak Rimang	Ada

Sumber: RIJLLAJ DISHUB JATENG 2023 & PERDA NO 8 2024 RTRW
Catatan : B = Pembangunan, P = Peningkatan/ Pengembangan

Pada Tahun 2025 Terminal Bintoro di Kabupaten Demak direncanakan akan tutup operasional, dikarenakan sudah terdapat Terminal A di Kabupaten Demak serta lahan yang dipakai Terminal Bintoro saat ini merupakan asset dari PT KAI. Terkait dengan peningkatan konektivitas provinsi perlu adanya peningkatan terminal tipe C menjadi Terminal tipe B baik secara dokumen perencanaan Kab/Kota (RTRW Kab/Kota) dan realisasi dari dokumen tersebut. Hal tersebut sebagai sinergi pengembangan kawasan utamanya Peningkatan Terminal Tipe C Kabupaten Cilacap.

- c. Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan
- Sampai dengan Tahun 2024 sudah 5 Wilayah Pengembangan (7 koridor) dilayani Trans Jateng, yaitu : Wilayah Pengembangan Kedungsepur 2 koridor (Semarang-Bawen, Semarang-Kendal dan Semarang – Purwodadi (Gubug), Wilayah Pengembangan Cibalingmas 1 koridor (Purwokerto-Purbalingga) Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten 2 koridor (Surakarta-Sragen, Wonogiri-Surakarta) dan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung&Keburejo 1 koridor (Kutoarjo-Borobudur).

Sejalan dengan hal tersebut, layanan Trans Jateng juga berperan penting dalam mendukung implementasi Perda Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender, dengan menghadirkan transportasi publik yang aman, nyaman, terjangkau, serta inklusif. Kehadiran Trans Jateng diharapkan dapat memperluas akses mobilitas yang setara bagi perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, sehingga prinsip kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dapat terintegrasi dalam pencapaian target pembangunan transportasi daerah sesuai dengan arah kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu untuk mendukung Perpres 79/2019 terkait dengan kebutuhan Angkutan Aglomerasi Perkotaan mendukung Kawasan Industri Brebes dibutuhkan kajian pengembangan Angkutan Aglomerasi Perkotaan Bregasmalang. Selain itu dengan terbitnya Perpres 109/2020 utamanya Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Terpadu Batang diperlukan kajian pengembangan Angkutan Aglomerasi Perkotaan Petanglong serta rencana integrasi layanan Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans jateng Wilayah Pengembangan Kedungsepur dan Petanglong. Untuk Wilayah Pengembangan Petanglong sendiri sudah dilakukan kajian Studi Kelayakan Layanan Angkutan Masal Aglomerasi Perkotaan di wilayah Pengembangan Petanglong pada TA. 2024 dengan rekomendasi 4 Trayek diantaranya yaitu Koridor I Pekalongan - Wiradesa - Kajen, Koridor II Pekalongan - Kedungwuni - Kajen, Koridor III Pekalongan - batang - Banyuputih - Limpung, Koridor IV Weleri - Banyuputih (penghubung Antar WP Kedungsepur dan Petanglong). berikut detail koridor di masing – masing Wilayah Pengembangan :

Tabel II. 11 Koridor Pengembangan Angkutan Umum di Kawasan Aglomerasi Perkotaan

No.	Wilayah Aglomerasi	Jaringan Trayek	Panjang Trayek (Km)	Jumlah Bus	Jumlah Shelter Terbangun	Kebutuhan Shelter	Ket
1	KEDUNGSEPUR (Kendal, Ungaran, Semarang, Purwodadi)	1. Semarang – Bawen (Stasiun Tawang-T.Bawen)	45	28	92	94	Op. 7 Juli 2017
		2. Semarang – Kendal (T.Mangkang-RTH Weleri)	37,8	16	53	53	Op. 28 Oktober 2019 Penambahan 2 Unit armada pada tahun 2024
		3. Semarang – Demak	33	-	-	-	-
		4. Semarang – Grobogan (Gubug)	50,2	14	23	69	(Op.13 Oktober 2021)
2	SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten)	5. Boyolali – Surakarta	29,9	-	-		
		6. Surakarta – Sragen (T. Tirtonadi-Sumberlawang Via Sangiran)	35	14	25	85	Op. 3 September 2020
		7. Surakarta – Karanganyar	18,3	-	-	-	-

No.	Wilayah Aglomerasi	Jaringan Trayek	Panjang Trayek (Km)	Jumlah Bus	Jumlah Shelter Terbangun	Kebutuhan Shelter	Ket
		8. Surakarta – Wonogiri	42	15	62	122	Op 8 Agustus 2023 Penambahan armada 1 Unit tahun 2024
		9. Sukoharjo – Klaten	28,4	-	-	-	-
3	BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen)	10. Purwokerto – Purbalingga (T.Bulupitu-T.Bukateja)	42	14	61	62	Op. 13 Agus. 2018
		11. Purwokerto – Wangon	32,8	-	-	-	-
4	PURWOMANGGUNG (Purworejo, Wonosobo, Kota Magelang, Kab. Magelang, Temanggung	12. Terminal Secang – Muntilan (via Borobudur)	42	-	-	-	-
		13. Terminal Secang – Terminal Parakan	23,5	-	-	-	-
		14. St. Kutoarjo – Borobudur	50	14	34	49	Op. 1 Sep. 2020
5	PETANGLONG (Kota Pekalongan; Kab. Pekalongan, Kab. Batang	15. Pekalongan – Kajen	26,9	-	-	-	-
		16. Banyuputih – Batang	30	-	-	-	-
		17. Limpung – Banyuputih dan KIT Batang – Banyuputih	6,6 dan 12,9	-	-	-	-
		18. Weleri – Banyuputih (penghubung Antar WP Kedungsepur dan Petanglong)	17,3	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

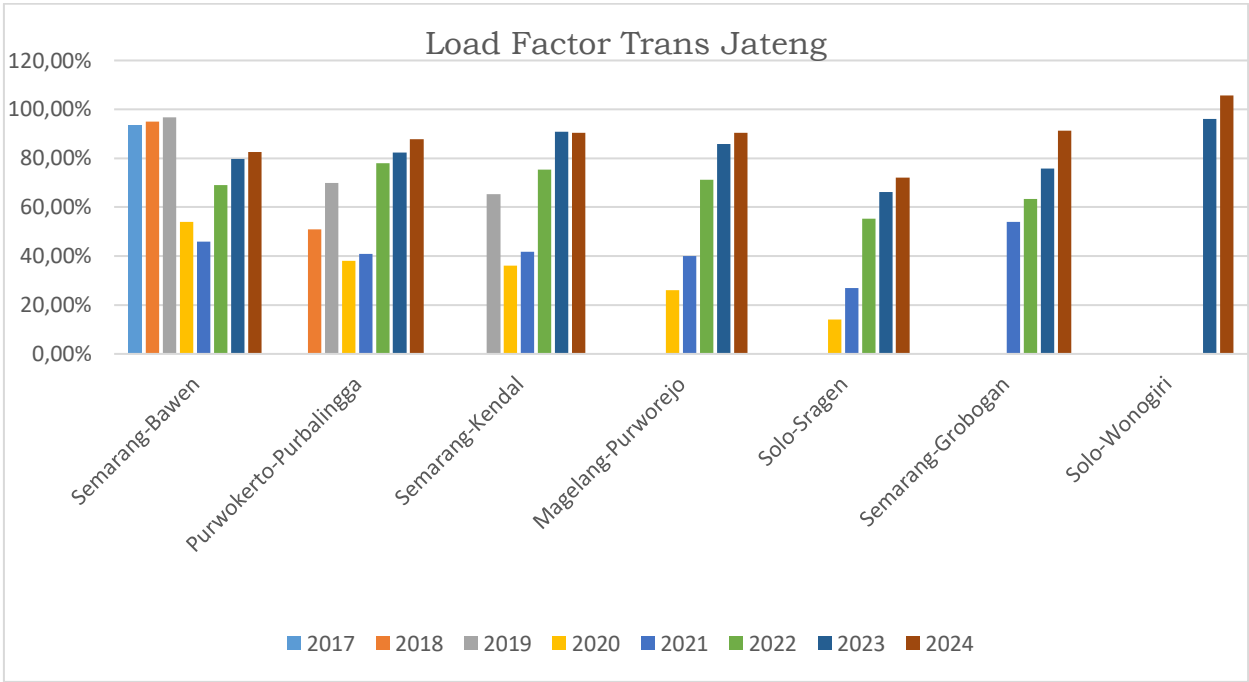
Mulai Tahun 2025 penumpang Trans Jateng dikategorikan menjadi 6 (enam) yaitu penumpang umum, pelajar, buruh, lansia, disabilitas dan veteran. Sampai dengan Tahun 2024 Trans jateng sudah mengangkut/melayani 36.301.982 orang. Adapun rincian perkembangan jumlah penumpang masing-masing koridor Trans Jateng sebagai berikut :

Tabel II. 12 Perkembangan Jumlah Penumpang Trans Jateng Masing-Masing Koridor 2017-2024

No	Wilayah Pengembangan / Koridor TransJateng	Jumlah Penumpang yang Dilayani (Orang)							
		2017 – 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total 2017-2024
	Kedungsepur								
1.	T. Bawen – Stas. Tawang (Juli 2017)	2.611.014	2.117.390	1.054.091	1.136.921	1.686.921	1.954.632	2.024.614	12.585.583
2.	T. Mangkang – T. Bahurekso (Nov. 2019). Diperpanjang ke Weleri (Agus. 2022)	-	178.943	592.411	682.477	1.235.294	1.479.581	1.583.926	5.752.632
3.	T. Penggaron – T. Godong – T. Gubug (Okt.2021)	-	-	-	133.380	774.188	925.977	1.117.710	2.951.255
	Barlingmascakeb								
4.	Purwokerto – Purbalingga (Agus. 2018)	351.896	1.141.126	613.804	673.120	1.261.351	1.344.065	1.435.938	6.821.300
	Subosukowonosraten								
5.	Tirtonadi – Sumberlawang via Sangiran (Sept. 2020)	-	-	55.442	327.786	676.153	810.218	883.874	2.753.473
6.	Tirtonadi – Wonogiri (Agustus 2023)	-	-	-	-	-	471.794	1.345.894	1.817.688

No	Wilayah Pengembangan / Koridor TransJateng	Jumlah Penumpang yang Dilayani (Orang)							
		2017 – 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total 2017-2024
	Purwomanggung								
7.	Kutoarjo – Borobudur (September 2020)	-	-	106.124	485.848	872.555	1.047.738	1.107.786	3.620.051
Total 7 Koridor		2.962.910	3.437.459	2.421.872	3.439.532	6.506.462	8.034.005	9.499.742	36.301.982

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023



Sumber : Dinas Perhubungan 2025

Gambar II. 5 Load Factor Penumpang Trans Jateng 2017-2024

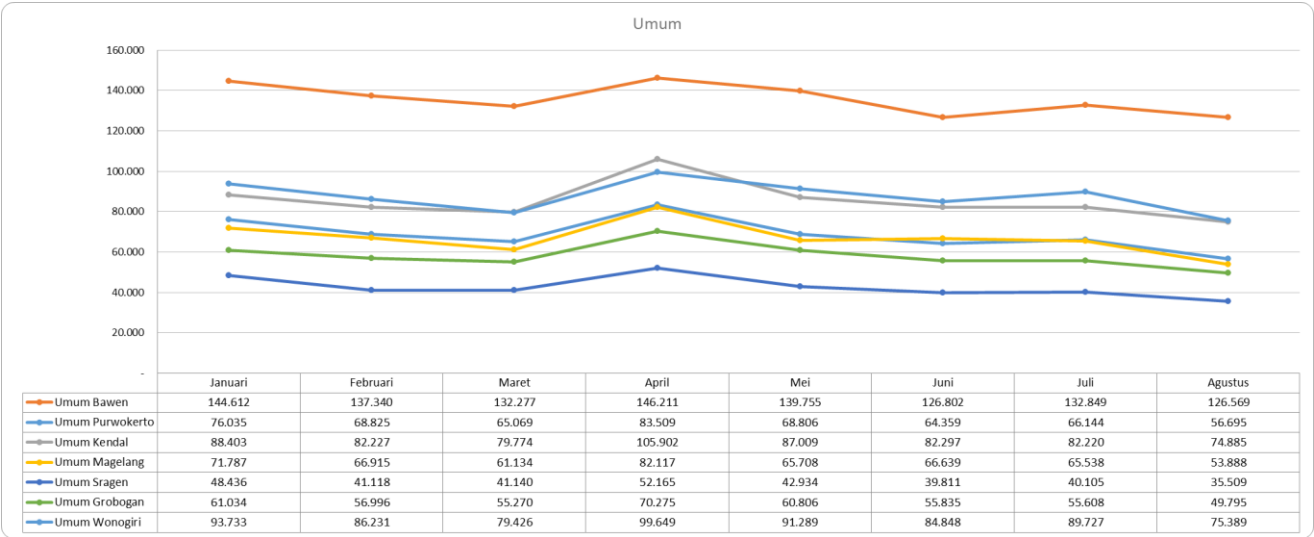
Pada tahun 2021, mulai dilakukan survey perhitungan jumlah perpindahan kendaraan pribadi ke moda angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) untuk mengetahui kontribusi Trans Jateng dalam meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum perkotaan. Sebagaimana hasil survey Kepuasan Masyarakat terdapat perpindahan moda sebesar 52,22%.

Tabel II. 13 Persentase Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng Pelayanan Trans Jateng Tahun 2021 – 2024

No.	Koridor	Persentase Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng (%)			
		2021	2022	2023	2024
1.	Semarang-Bawen	43,79	46,06	44,66	44,44
2.	Purwokerto-Purbalingga	59,05	52,81	50,14	50,86
3.	Semarang-Kendal	36,94	41,21	50,29	49,72
4.	Kutoarjo-Borobudur	43,22	47,84	44,57	56,47
5.	Solo-Sangiran Via Sumberlawang	49,28	48,16	55,03	58,23
6.	Semarang-Gubug Via Godong	-	56,15	56,80	53,89
7.	Solo – Sukoharjo – Wonogiri	-	-	-	52,84
Persentase Total Perpindahan Kendaraan Pribadi ke Trans Jateng		46,39	48,16	50,12	52,35

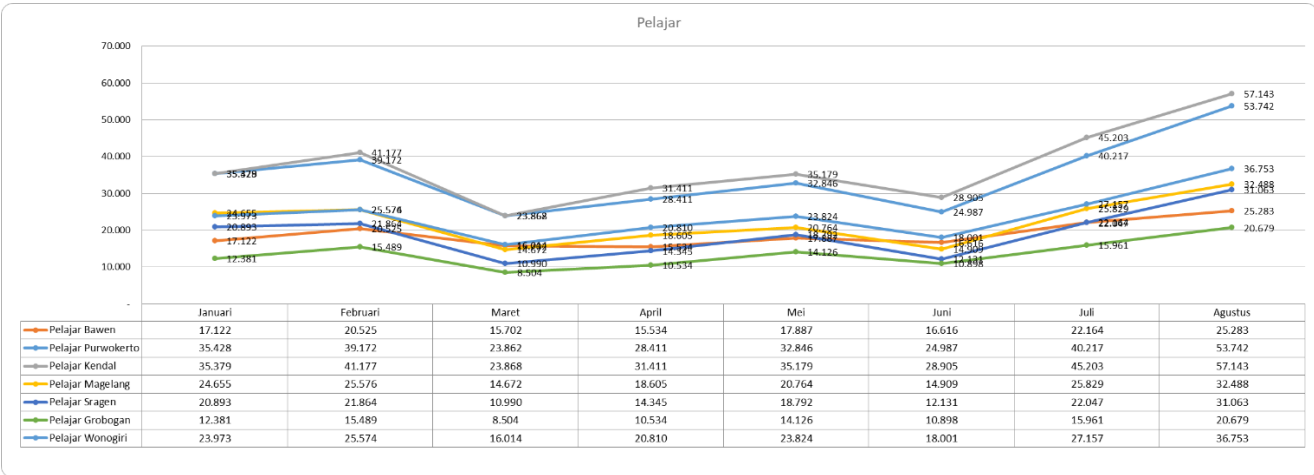
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Layanan Trans Jateng memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, salah satunya adalah berkurangnya beban biaya transportasi harian. Penghematan tersebut dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih produktif, sehingga turut mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/124 Tahun 2025 tentang Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng tanggal 30 April 2025, telah menetapkan penurunan tarif Trans Jateng menjadi Rp 1.000,- (Pelajar, Buruh, Veteran, Lansia, Disabilitas). Kebijakan ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi publik yang terjangkau, tetapi juga selaras dengan rencana aksi penanggulangan kemiskinan, yang menjadi salah satu fokus utama arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah. Bagi pemerintah terdapat penghematan anggaran yang dikeluarkan terkait bahan bakar yang bersubsidi. Penghematan konsumsi bahan bakar selain bermanfaat untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup juga untuk memenuhi prioritas pembangunan lain. Kebijakan penurunan tarif yang mulai diberlakukan pada 15 Juni 2025 memberikan dampak yang berbeda terhadap jumlah penumpang Trans Jateng. Pada kategori penumpang umum, kebijakan ini hanya sedikit berpengaruh terhadap penurunan jumlah pengguna kategori umum, sementara pada kategori pelajar dan lansia terjadi peningkatan signifikan sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut :



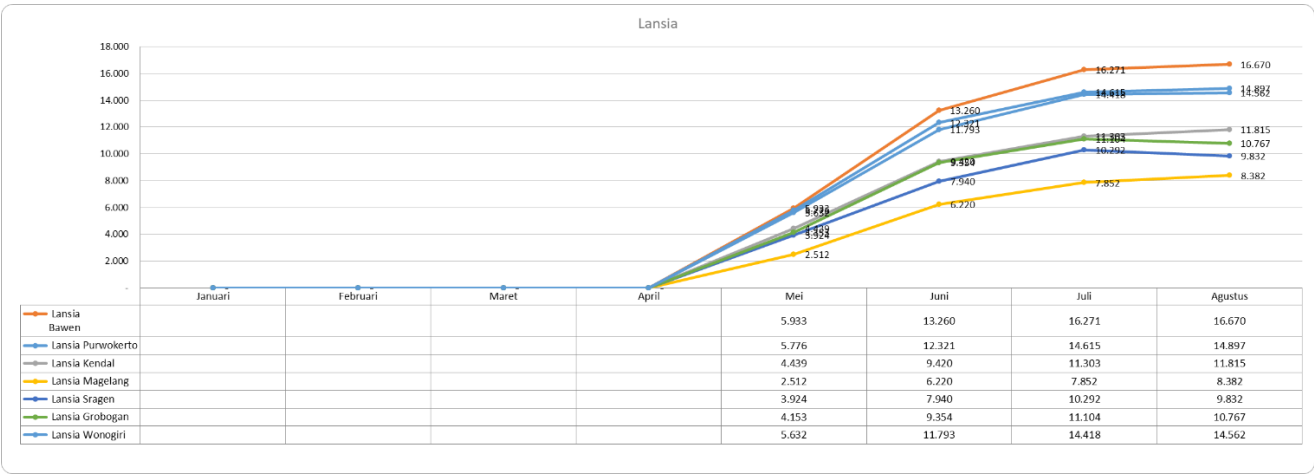
Sumber : Dinas Perhubungan 2025

Gambar II. 6 Penumpang Kategori Umum Januari-Agustus 2025



Sumber : Dinas Perhubungan 2025

Gambar II. 7 Penumpang Kategori Pelajar Januari-Agustus 2025



Sumber : Dinas Perhubungan 2025

Gambar II. 8 Penumpang Kategori Lansia Januari-Agustus 2025

Beralihnya masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum (mode shifting) dapat mengatasi kemacetan lalu lintas, meningkatkan keselamatan dan menghemat biaya peningkatan kapasitas infrastruktur jalan. Manfaat layanan Trans Jateng yang dapat dikapitasikan dibandingkan dengan biaya atau anggaran yang dikeluarkan sebagai mana tabel berikut.:

Tabel II. 14 Operasional dan Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng Tahun 2022 dan 2024

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1.	Total Biaya Operasional Trans Jateng				
	a. Biaya Operasional Kendaraan (BOK)	Rp.000, -	72.935.587	82.982.804	92.031.251
	b. Biaya Tenaga Kerja (Gaji Crew)	Rp.000, -	19.166.873	21.127.030	22.657.423
	c. Biaya Prasarana (Shelter, dll)	Rp.000, -	1.658.700	1.833.500	871.560
	d. Total Biaya (1a+1b+1c)	Rp.000, -	93.761.160	105.942.854	115.560.234
2.	Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng				
	a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.000, -	22.405.562	27.454.138	32.472.937
	b. Estimasi Penghematan Biaya Perjalanan	Rp.000, -	36.763.473	45.880.510	50.177.948
	c. Estimasi Penghematan Subsidi BBM	Rp.000, -	12.825.370	14.861.343	22.890.512
	d. Total Nilai Manfaat (2a+2b+2c)	Rp.000, -	71.994.406	88.195.991	105.541.397
3.	Proporsi Anggaran & Manfaat (2d:1d)x100%	%	76,78	83,2	91,33

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Untuk mendukung konektivitas jaringan transportasi aglomerasi perkotaan, diperlukan perluasan cakupan layanan koridor Trans Jateng. Upaya ini dilakukan melalui penambahan koridor baru sekaligus peningkatan kualitas layanan pada koridor yang sudah ada. Salah satu faktor penting dalam memperluas jangkauan layanan adalah penyediaan halte yang representatif, aman, dan mudah diakses, sehingga memudahkan penumpang dalam melakukan perjalanan serta meningkatkan minat masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum. Antara Tahun 2018 – 2024 telah terbangun 353 halte di 7 koridor Trans Jateng. Berikut data terkait dengan jumlah halte Trans Jateng pada Tahun 2024 :

Tabel II. 15 Jumlah Tempat Pemberhentian Bus (TPB) Pelayanan Trans Jateng Tahun 2024

Koridor Trans Jateng	Kebutuhan	Terbangun	Belum Terbangun*
Kota Semarang – Kabupaten Semarang (Bawen)	95	92	3
Kabupaten Banyumas (Purwokerto) - Purbalingga	64	62	2
Kota Semarang – Kendal (Weleri)	53	53	0
Kabupaten Magelang –Purworejo (Kutoarjo)	47	34	13
Surakarta – Sragen (Sumberlawang)	87	25	62
Kota Semarang – Grobogan (Gubug – Godong)	71	22	49
Surakarta – Sukoharjo –Wonogiri	122	52	70
Total	539	340	199

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Catatan : * Halte yang belum terbangun di beberapa tempat sudah dilengkapi rambu bus stop/MMT

Pemenuhan shelter direncanakan pada 3 (tiga) koridor yaitu Koridor Surakarta – Sragen (Sumberlawang); Koridor Kota Semarang – Grobogan (Gubug – Godong) dan Koridor Surakarta – Sukoharjo –Wonogiri dan rencana pembukaan koridor pada WP Gelangmanggung, Jekuti, Petanglong, Cibalingmas, Kedungsepur.

d. Angkutan pada Masa Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Angkutan pada masa lebaran, natal dan tahun baru merupakan penyelenggaraan / pengelolaan angkutan (disemua moda transportasi) pada masa lalu lintas tinggi pada waktu tertentu (*peak season*). Penyelenggaran ini melibatkan beberapa *stakeholder* yang bertujuan untuk menciptakan kelancaran lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, dan terkendali. Pada Tahun 2024 pengguna angkutan umum sebanyak 31.946.832 orang pada masa lebaran dan 21.015.051 orang pada masa nataru. Hal ini mengalami lonjakan pada tahun sebelumnya dikarenakan massif nya Pemerintah mengadakan mudik gratis setiap tahun, serta meingkatnya layanan angkutan umum.

Tabel II. 16 Jumlah Penumpang (Orang) Pada Masa Angkutan Lebaran dan Nataru

No	Jumlah Penumpang	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Lebaran	16.329.328	NA	7.851.683	24.343.824	30.474.683	31.946.832
a.	Angkutan Umum	8.179.814	NA	5.295.715	15.477.634	17.895.047	19.087.399
b.	Pribadi	8.149.514	NA	2.555.968	8.866.190	12.579.636	12.859.433
2.	Nataru	11.482.975	NA	15.653.528	16.978.216	17.072.434	21.015.051
a.	Angkutan Umum	3.660.441	NA	11.446.488	9.986.033	11.803.434	15.575.860
b.	Pribadi	7.822.534	NA	4.207.039	6.992.183	5.269.000	5.439.191
	Total	27.812.303	NA	23.505.211	41.322.039	47.547.137	52.961.883

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan dimasa lebaran, natal dan tahun baru lebih banyak yang menggunakan angkutan umum dibandingkan kendaraan pribadi. Namun, hal ini masih tetap diperlukan peningkatan layanan angkutan umum untuk mengatasi permasalahan yang terkait kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

e. Infrastruktur Pendukung Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP

1) Pelabuhan

Mendasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.432 Tahun 2017, terdapat 14 Pelabuhan di Jawa Tengah yang terdiri dari 1 Pelabuhan Utama (Tanjung Emas Semarang), 2 Pelabuhan Pengumpul (Tanjung Intan Cilacap dan Tegal), 8 Pelabuhan Pengumpan Regional dan

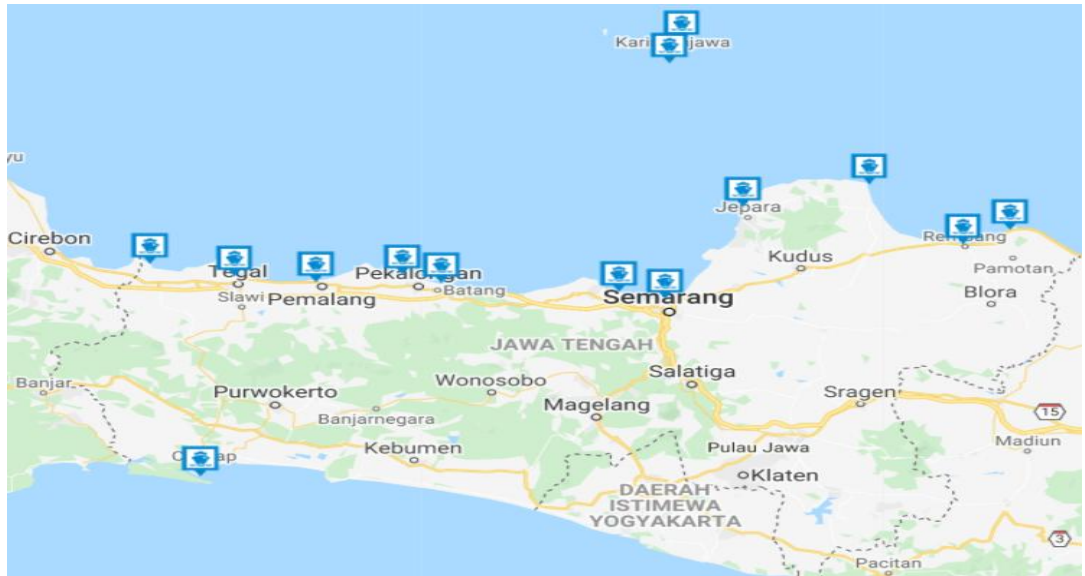
3 Pelabuhan Pengumpan Lokal. Adapun rincian dari pelabuhan dimaksud sebagaimana berikut :

Tabel II. 17 Hirarki Pelabuhan di Provinsi Jawa Tengah

No.	Pelabuhan	Hierarki	Keterangan
1.	Tanjung Emas, Kota Semarang	Utama	
2.	Tanjung Intan, Kabupaten Cilacap	Pengumpul	
3.	Tegal, Kota Tegal	Pengumpul	
4.	Batang, Kabupaten Batang	Pengumpan Regional	• 2027 menjadi Pengumpul • Sebagian lahan reklamasi masih dalam proses di BPN
5.	Sluke, Kabupaten Rembang	Pengumpan Regional	• 2027 menjadi Pengumpul • Lahan masih terdapat sengketa dalam proses di Pengadilan
6.	Tasik Agung, Kabupaten Rembang	Pengumpan Regional	• Pada kolam pelabuhan terdapat karang hidup
7.	Jepara, Kabupaten Jepara	Pengumpan Regional	
8.	Karimunjawa, Kabupaten Jepara	Pengumpan Regional	
9.	Juwana, Kabupaten Pati	Pengumpan Regional	• Dermaga terletak di alur sungai (kondisi saat ini dilihat dari pelayanan sebagai pelabuhan perikanan) • Hasil studi FS/kelayakan Ta. 2022 pengembangan Pelabuhan Juwana yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan tidak memenuhi kelayakan sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional dan direkomendasikan untuk menjadi Pelabuhan Perikanan.
10.	Kendal, Kabupaten Kendal	Pengumpan Regional	• Terdapat tumpang tindih aset (terdapat layanan Pelabuhan penyeberangan dan Pelabuhan niaga) • Bagian dari Wilayah Kerja Tanjung Emas
11.	Legonbajak, Kabupaten Jepara	Pengumpan Regional	
12.	Brebes, Kabupaten Brebes	Pengumpan Lokal	• 2027 menjadi Pengumpan Regional
13.	Pekalongan	Pengumpan Lokal	• 2027 menjadi Pengumpan Regional
14.	Pemalang	Pengumpan Lokal	• 2027 menjadi Pengumpan Regional

Sumber :
 - KP.432 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), 2017
 - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Pada Tahun 2020 Kementerian Perhubungan mulai melakukan reviu KP.432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).



Sumber : <http://gis.perhubungan.jatengprov.go.id/>, 2024

Gambar II. 9 Persebaran Pelabuhan Di Provinsi Jawa Tengah

Sedangkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, rencana hierarki pelabuhan sebagai berikut : Pelabuhan Utama (Tanjung Emas Semarang sebagai satu kesatuan sistem dengan Terminal Kendal), 4 Pelabuhan Pengumpul (Tanjung Intan Cilacap, Tegal, Batang (KITB), Sluke), sisanya merupakan Pelabuhan Pengumpan Regional sejumlah 6 pelabuhan dan Pelabuhan Pengumpan Lokal sejumlah 10 pelabuhan. Pelabuhan ini dimanfaatkan untuk melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayaran dalam provinsi (pengumpan regional) atau dalam kabupaten (pengumpan lokal).

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pelabuhan Pengumpan Regional merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, namun sampai dengan saat ini kewenangan dimaksud belum diserahkan secara P3D dari Pemerintah Pusat Cq. Kementerian Perhubungan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Proses saat ini pada tahap persiapan proses P3D utamanya terkait dengan personil, pendanaan dan pemetaan aset. Namun sesuai dengan hasil konsultasi dengan BKN Proses P3D Pelabuhan Pengumpan Regional sudah kedaluarsa dengan demikian bisa dianggap sebagai pengalihan bias.

Dalam mendukung kawasan industri terdapat rencana pengembangan/pembangunan pelabuhan kendal dan pelabuhan batang. Saat ini, Pelabuhan Kendal menghadapi beberapa kendala teknis yang perlu segera ditangani. Permasalahan utama yang dihadapi adalah pendangkalan

kolam pelabuhan serta kebutuhan rehabilitasi breakwater pada dermaga penyeberangan. Akibat kondisi tersebut, operasional kapal motor Kali Bodri yang sebelumnya aktif melayani penyeberangan di Pelabuhan Kendal sekarang berpindah layanan. Hal ini berdampak pada menurunnya fungsi pelabuhan sebagai simpul transportasi laut sekaligus pintu distribusi logistik di wilayah sekitarnya. Sementara itu, proses pengembangan Pelabuhan Batang masih terus berjalan. Berdasarkan laporan per Desember 2024, progres pembangunan telah mencapai 59,9%. Saat ini juga sedang berlangsung pembahasan perjanjian konsesi antara Pelindo dan UPP Kelas III Batang. Namun, pembahasan tersebut belum mencapai kesepakatan karena Pelindo mengusulkan masa konsesi selama 80 tahun dengan skema profit sharing 0%, yang dinilai belum seimbang bagi pemerintah. Dari sisi regulasi, izin pembangunan Pelabuhan Batang telah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 23 April 2024, dengan status sebagai pelabuhan pengumpan regional. Sesuai ketentuan, dalam jangka waktu enam bulan sejak diterbitkannya izin pembangunan, perjanjian konsesi wajib diselesaikan. Hingga saat ini, proses tersebut masih menjadi perhatian utama agar pembangunan pelabuhan dapat berjalan sesuai target waktu dan memberikan manfaat optimal bagi penguatan jaringan logistik Jawa Tengah. Pengembangan Pelabuhan Kendal dan Pelabuhan Batang memiliki arti penting dalam mendukung Konektivitas sektor industri dan perdagangan di kawasan Pantura Jawa Tengah dengan penyelesaian permasalahan teknis di Pelabuhan Kendal dan percepatan pembangunan Pelabuhan Batang, diharapkan kedua pelabuhan tersebut dapat berfungsi optimal sebagai simpul distribusi logistik dan generator ekonomi regional, sehingga mendukung pencapaian target pembangunan Jawa Tengah dalam periode perencanaan. Data Produksi Pelabuhan Di Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel II. 18 Data Produksi Pelabuhan Di Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pelabuhan	14	14	14	14	14
2	Pelabuhan Tanjung Emas					
	a. Kunjungan kapal (<i>call</i>)	3.193	3.281	4.027	4.391	3.827
	b. GRT (GT)	24.578.491	27.081.098	32.552.981	33.189.978	29.661.229
	c. Kargo (ton)	4.501.617	15.697.387	15.445.826	17.400.930	16.673.261
	d. Kontainer (<i>Teus</i>)	717.062	797.020	765.942	781.841	895.904
	e. Penumpang (orang)	158.581	174.974	341.244	398.001	378.547
	f. <i>Dweelling Time</i> TPKS Impor	3,84	3,93	3,65	3,27	4.43
	g. <i>Dweelling Time</i> TPKS Expor	2,78	3,52	3,05	2,92	4.02
3	Pelabuhan Tanjung Intan					
	a. Kunjungan kapal (<i>call</i>)	1.441	1.509	1.545	1.354	1.406
	b. GRT (GT)	29.555.795	31.064.395	37.960.543	31.229.248	33.026.874
	c. Kargo (ton)	8.533.608	8.455.772	7.813.447	7.205.115	7.513.386

Sumber : Diolah dari Perhubungan Dalam Angka, 2025

Selama tahun 2024, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sebagai pelabuhan utama di Jawa Tengah mencatat rata-rata dwelling time impor sebesar 4,43 hari, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 3,27 hari. Untuk layanan ekspor, dwelling time juga mengalami kenaikan dari 2,92 hari pada tahun 2023 menjadi 4,02 hari pada tahun 2024. Peningkatan dwelling time ini menunjukkan masih adanya inefisiensi dalam proses bongkar muat dan arus logistik di pelabuhan. Kondisi tersebut berdampak negatif terhadap daya saing, karena memperlambat perputaran barang, meningkatkan biaya logistik, serta mengurangi kecepatan distribusi ke daerah hinterland Jawa Tengah.

Apabila tidak segera diatasi, tingginya dwelling time berpotensi menghambat iklim investasi, memperbesar biaya produksi, dan mengurangi daya tarik Pelabuhan Tanjung Emas sebagai simpul utama perdagangan internasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa perbaikan manajemen kepelabuhanan, percepatan pelayanan kepabeanan, serta peningkatan koordinasi antar-instansi untuk menurunkan dwelling time agar sesuai dengan standar nasional maupun internasional.

2) Perusahaan Angkutan Laut Dan Jasa Terkait Angkutan Di Perairan di Jawa Tengah

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Dalam memperlancar proses kegiatan di bidang Pelayaran terdapat kegiatan usaha atau yang sering disebut usaha jasa terkait. Usaha Jasa Terkait diantaranya berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas. Di Jawa Tengah terdapat 669 Angkutan Laut Dan Jasa Terkait Angkutan Di Perairan di Jawa Tengah. Data sebagaimana tabel :

Tabel II. 19 Rekapitulasi Data Perusahaan Tahun 2024

NO	KOTA/KAB	Bongkar Muat	Depo	EMKL	JPT	Tally	Penyewaan Peralatan Angkutan Laut	Pelra	TOTAL
1	Banyumas	0	0	0	1	0	0	0	1
2	Batang	5	0	0	2	0	2	0	9
3	Boyolali	0	0	0	2	0	0	0	2
4	Brebes	0	0	0	1	0	0	0	1
5	Cilacap	22	0	3	13	2	2	0	42
6	Demak	0	0	0	4	0	0	0	4
7	Jepara	9	0	0	1	1	1	7	19
8	Karanganyar	0	0	0	1	1	1	0	3
9	Kebumen	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	KOTA/KAB	Bongkar Muat	Depo	EMKL	JPT	Tally	Penyewaan Peralatan Angkutan Laut	Pelra	TOTAL
10	Kendal	0	0	0	2	0	0	0	2
11	Klaten	0	0	0	2	0	0	0	2
12	Kudus	1	0	0	1	1	0	0	3
13	Pati	0	0	0	0	0	0	2	2
14	Pekalongan	0	0	0	0	1	0	0	1
15	Pemalang	0	0	0	0	0	3	0	3
16	Purbalingga	0	0	0	1	0	0	0	1
17	Rembang	12	0	0	0	0	0	1	13
18	Semarang	27	9	10	443	4	4	41	538
19	Sragen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Sukoharjo	0	0	0	5	2	1	0	8
21	Surakarta	0	0	0	4	0	0	0	4
22	Tegal	0	0	0	1	2	0	2	5
23	Temanggung	0	0	0	2	0	0	0	2
24	Wonogiri	0	0	0	1	2	0	0	3
25	Wonosobo	0	0	0	1	0	0	0	1
TOTAL		76	9	13	488	16	14	53	669

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

3) Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejak Tahun 2020 sudah tidak lagi mengoperasikan KMC Kartini dikarenakan secara teknis sudah tidak layak untuk dioperasikan serta pada saat ini penyeberangan dari dan ke Karimunjawa sudah terdapat layanan penyeberangan. Sampai dengan tahun 2024 proses hibah KMC Kartini telah diupayakan, update terakhir terkait dengan updaya tersebut yaitu dengan adanya surat Kadishub Prov Jabar No 5480/Ku.03.11.02/Sekre Tanggal 16 Agustus 2024 Hal Permohonan hibah KMC Kartini 1. Rencana terkait hibah tersebut KMC Kartini 1 akan dimanfaatkan untuk menunjang pariwisata di daerah Pangandaran. Selain itu telah dilakukan tinjauan lapangan oleh BPKAD Prov Jabar dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 November 2024.

Tabel II. 20 Gambaran Pelayanan Dari dan Ke Karimunjawa Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penumpang KM. Muria (orang)/KMC. Siginjai*) (Jepara-Karimunjawa)	30.924	29.890	43.755	50.943	62.402
2	Jumlah penumpang KMC. Bahari Ekspres 1 (Jepara –Karimunjawa) (orang)	27.162	45.410	107.447	153.348	168.571
3	Jumlah penumpang KM Kelimutu (Semarang-Karimunjawa)	891	405	4.999	895	3.255
4	Jumlah penumpang KM Lawit (Semarang-Karimunjawa)	667	834	4.052	1.877	N/A
Jumlah Penumpang Terangkut		200.192	59.644	76.539	160.253	234.228

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Mendasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.34/07 Tahun 2021 Tentang Penetapan Trayek Pelayanan Angkutan Dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah terdapat 5 lintas penyeberangan sungai antar kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana tabel berikut :

Tabel II. 21 Daftar Lintas Penyeberangan Sungai Kewenangan Provinsi

No	Aktivitas Lintas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Sisi Dermaga	Fasilitas Penyeberangan			Dokumen Kapal	
			Dermaga	Lampu Penerangan High Mast (Alur)	Lampu Penerangan (Dermaga)	Pas Sungai	Surat Keterangan Ukur
1.	Sungai Kalikutho Kab. Batang – Kab. Kendal	Desa Lutungmati (Batang)	Permanen (2023)	-	3 Unit (2023)	2024	2024
		Desa Tegalsari (Kendal)	Permanen (2023)	-	3 Unit (2023)	2024	2024
2.	Sungai Kalikutho Kab. Batang – Kab. Kendal	Desa Yosorejo (Batang)	Non Permanen	-	3 Unit (2022)	-	-
		Desa Jatipurwo (Kendal)	Permanen (2023)	1 Unit (2023)	6 Unit (2022)	2024	2024
3.	Sungai Pemali Kab. Brebes – Kab. Tegal	Desa Tegalwangi (Brebes)	Non Permanen	1 Unit (2022)	3 Unit (2022)	-	-
		Desa Bojong Prupuk Utara (Kab. Tegal)	Non Permanen	-	4 Unit (2022)	-	-
4.	Sungai Gangsa Kab. Brebes – Kota Tegal	Desa Randusanga Wetan (Brebes)	Non Permanen	-	5 Unit (2019)	2024	2024
		Desa Kajongan (Kota Tegal)	Non Permanen	-	1 Unit (APBD Tegal)	2024	2024
5.	Sungai Bengawan Solo Surakarta – Sukoharjo	Desa Sangkrah (Kota Surakarta)	Non Permanen	-	Belum Ada	-	-
		Desa Gading (Sukoharjo)	Non Permanen	-	Belum Ada	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Fasilitas pelabuhan sungai utamanya dermaga sungai rencana akan dibangun pada periode 2025-2030 Desa Kajongan (Kota Tegal), Desa Randusanga Wetan (Brebes), Desa Gading (Sukoharjo), Desa Sangkrah (Kota Surakarta).

Selain itu mendasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.432 Tahun 2017 juga terdapat 26 dermaga penyeberangan di Jawa Tengah yaitu : Pelabuhan Kendal, Pelabuhan Jepara, Pelabuhan Karimunjawa, (Cilacap di Sleko, Prenca, Alas Malang, Motehan, Sodong, Wijayapura, Lomanis, Cigintung, Perkuyan, Kutawaru, Klaces, Patimuan, Karanganyar), Waduk Gajah Mungkur di Dermaga wisata Waduk GM, Waduk Sempor, Waduk Mrica, Waduk Penjalin, Waduk Malahayu, (Wadaslintang di Dermaga Tritis, Kumijing, Plunjaran, Kalibening TPI2, TPI 4, Sumberejo, Prasasti (Kebumen), Erorejo), (Kedung Ombo di Kedunguter Sragen, Kemukus Sragen, WKO Boyolayar Sragen, Embun Bening Kec.Geyer Kab. Grobogan, Wana Wisata desa Blawong Kemusu Boyolali)

Mendasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.34/07 Tahun 2021 Tentang Penetapan Trayek Pelayanan Angkutan Dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah terdapat 5 lintas penyeberangan sungai antar kabupaten/kota yang menjadi

kewenangan Pemerintah Provinsi. Ketersediaan faslitas keselamatan untuk penyeberangan yang menjadi kewenangan provinsi sebagaimana tabel berikut :

Tabel II. 22 Fasilitas Keselamatan Penyeberangan Sungai Kewenangan Provinsi Tahun 2024

No	Aktivitas Lintas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Sisi Dermaga	Fasilitas Keselamtan Penyeberangan Sungai		
			<i>Life Jacket</i>	Rambu Keselamatan	Papan Sop Penyeberangan
1.	Sungai Kalikutho Kab. Batang – Kab. Kendal	Desa Lutungmati (Batang)	12	1	1
		Desa Tegalsari (Kendal)	12	1	1
2.	Sungai Kalikutho Kab. Batang – Kab. Kendal	Desa Yosorejo (Batang)	1	-	-
		Desa Jatipurwo (Kendal)	2	-	-
3.	Sungai Pemali Kab. Brebes – Kab. Tegal	Desa Tegalwangi (Brebes)	-	-	-
		Desa Bojong Prupuk Utara (Kab. Tegal)	-	-	-
4.	Sungai Gangsa Kab. Brebes – Kota Tegal	Desa Randusanga Wetan (Brebes)	5	-	-
		Desa Kajongan (Kota Tegal)	5	-	-
5.	Sungai Bengawan Solo Surakarta – Sukoharjo	Desa Sangkrah (Kota Surakarta)	-	-	-
		Desa Gading (Sukoharjo)	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

f. Infrastruktur Pendukung Konektivitas Perhubungan Udara
 Jumlah Bandara di Provinsi Jawa Tengah ada 6 (enam) Bandara yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang di Kota Semarang, Bandara Internasional Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali, Bandara Tunggul Wulung di Kabupaten Cilacap, Bandara Dewadaru Karimunjawa di Kabupaten Jepara, Bandara Ngloram di Kabupaten Blora dan Bandara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga.

1) Bandara Ahmad Yani Semarang di Kota Semarang

- a) Klasifikasi Bandara : Bandar Kelas 4C
- b) *Runway* (54 : 2560 m x 45 m (120.600 m²)
F/D/X/T)
- c) *Taxiway* (51 : 140 m x 15 m (2.100 m²)
R/D/X/T)
- d) *Apron* (27 : 296.24 m x 98 m (29.031.52 m²)
F/D/X/T)
- e) Pesawat Terbesar : 5 PESAWAT JENIS B-737 / F-100; 2 PESAWAT JENIS CN-235, 2 HELICOPTER
- f) Fasilitas Sisi Darat :
 Terminal : 5.546 m²
 Kargo : 99 m²

Bandara Internasional Ahmad Yani merupakan bandar udara yang terletak di Kota Semarang. Berdasarkan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 2024 tanggal 2 April 2024, status Bandara Ahmad Yani diturunkan dari bandara internasional menjadi bandara domestik.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya untuk mengembalikan status internasional bandara tersebut. Hasilnya, pada tanggal 22 April 2025, diterbitkan surat dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Nomor HK/302/1/3/DRJU.KUM-2025, tentang Tindak Lanjut Penetapan Status Bandara Jenderal Ahmad Yani sebagai Bandar Udara Internasional. Beberapa hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 25 April 2025, terbit Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Bandara S.M. Badaruddin II di Palembang, Bandara H.A.S. Hanandjoeddin di Bangka Belitung, dan Bandara Jenderal Ahmad Yani di Semarang sebagai bandara internasional.

Saat ini, status Bandara Ahmad Yani telah resmi kembali menjadi Bandara Internasional setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional. Rute pergerakan penerbangan Bandara Ahmad Yani Semarang Semarang saat ini diantaranya dari dan ke Bandara Internasional Soekarno–Hatta Banten, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta; Bandara internasional Syamsudin Noor Banjarmasin; Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Kalimantan Timur; Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar; Bandara Iskandar Pangkal Bun; Bandara Internasional Hang Nadim Batam; Bandara Rahadi Osman Ketapang; dan Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar, serta pada direncanakan pada Bulan September terdapat penerbangan internasional Semarang – Kualalumpur.

Data pergerakan pesawat Bandara Ahmad Yani Semarang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II. 23 Data Pergerakan Pesawat Bandara Ahmad Yani Semarang Tahun 2020-2024

Pergerakan Pesawat	2020	2021	2022	2023	2024
Domestik	16.692	10.134	14.473	17.657	17.703
- Datang	8.345	5.030	7.313	8.585	8.696
- Berangkat	8.347	5.104	7.090	9.072	9.007
Internasional	413	99	368	576	372
- Datang	206	84	298	532	342
- Berangkat	207	15	70	44	30
Total	17.105	10.233	14.740	18.233	18.075

Sumber : Diolah dari PT. Angkasa Pura Indonesia, 2025

Pergerakan Pesawat pada Bandara Ahmad Yani Semarang penerbangan Internasional pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 hal ini disebabkan karena status Bandara Ahmad Yani hanya melayani penerbangan kargo internasional sehingga jumlah penerbangan internasional mengalami penurunan.. Adapun data produksi penumpang dan kargo bandara dari Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut:

Tabel II. 24 Data Produksi Penumpang Bandara Ahmad Yani Semarang Tahun 2020-2024

Penumpang	2020	2021	2022	2023	2024
Domestik	1.343.435	884.970	1.631.408	2.091.083	2.281.301
- Datang	675.907	440.626	817.293	1.048.649	1.140.327
- Berangkat	656.930	435.461	800.816	1.042.434	1.139.435
Internasional	40.602	9	77	4.867	145
- Datang	22.120	3	5	2.262	51
- Berangkat	20.482	6	72	2.605	94
Transit	10.598	8.883	13.299	9.753	1.539
Total	1.384.037	884.979	1.631.485	2.095.950	2.281.446

Sumber : Diolah dari PT. Angkasa Pura Indonesia, 2025

Tabel II. 25 Data Produksi Kargo (Kilogram) Bandara Ahmad Yani Semarang Tahun 2020-2024

Angkutan Barang	2020	2021	2022	2023	2024
Domestik	9.027.003	6.763.331	6.222.664	9.797.909	15.351.204
- Bongkar	3.596.405	2.979.118	1.378.827	1.247.101	1.527.315
- Muat	5.430.598	3.784.213	4.843.837	8.550.808	13.823.889
Internasional	368.737	1.212.031	3.578.079	4340839	3.481.791
- Bongkar	225.787	1.199.425	3.515.300	4.336.202	3.481.791
- Muat	142.950	12.606	62.779	4.637	0
Total	9.395.740	7.975.362	9.800.743	14.138.748	18.832.995

Sumber : Diolah dari PT. Angkasa Pura Indonesia, 2025

2) Bandara Internasional Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali

- a) Klasifikasi Bandara : Bandar Kelas III
- b) *Runway* (54 F/D/X/T) : 2500 m x 45 m (117.000 m²)
- c) *Taxiway* (51 R/D/X/T) : 240 m x 23 m (5.520 m²)
- d) *Apron* (27 F/D/X/T) : 102.5 m x 90 m (9.225 m²)
- e) Pesawat Terbesar : -
- f) Fasilitas Sisi Darat :
 - Terminal : 9.483 m²
 - Kargo : 883 m²

Rute pergerakan penerbangan Bandara Adi Soemarmo saat ini diantaranya dari dan ke Bandara Internasional Soekarno–Hatta Banten, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta; Bandara Internasional Supadio Pontianak ; dan Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar.

Data pergerakan pesawat Bandara Adi Sumarmo Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II. 26 Data Pergerakan Pesawat Bandara Internasional Adi Sumarmo Tahun 2020-2024

Pergerakan Pesawat	2020	2021	2022	2023	2024
Domestik	9.263	4.058	6.519	8.405	8.291
- Datang	4.631	2.029	3.260	4.203	4.146
- Berangkat	4.632	2.029	3.259	4.202	4.145
Internasional	86	9	217	444	495
- Datang	42	4	109	220	248
- Berangkat	44	5	108	224	247
Total	9.349	4.067	6.736	8.849	8.786

Sumber : Diolah dari PT. Angkasa Pura Indonesia, 2025

Pergerakan Pesawatdi Bandara Adi Suemarmo pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan pada setiap tahun. Adapun saat ini Bandara Adi Soemarmo tidak melayani penerbangan Internasional, penerbangan Internasional hanya melayani untuk carter umroh yang saat ini sudah berjalan yaitu penerbangan umroh setiap seminggu 2 (dua) kali menggunakan maskapai Citylink. Mendasarkan SK Menhub No. KM. 31 / 2024 tanggal 2 April 2024, status Bandara Adi Soemarmo diturunkan dari Bandara Internasional menjadi Bandara domestik, pada saat ini status Bandara Adi Soemarmo telah menjadi Bandar Udara Internasional setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan no 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional.

Adapun data produksi penumpang dan kargo bandara dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II. 27 Data Produksi Penumpang Bandara Internasional Adi Sumarmo Tahun 2020-2024

Penumpang	2020	2021	2022	2023	2024
Domestik	543.168	427.356	839.773	1.154.585	1.091.115
- Datang	269.181	216.766	412.468	567.171	542.588
- Berangkat	272.697	210.590	427.305	587.414	548.527
Internasional	17.198	15	33.739	84.698	98.673
- Datang	9.230	4	16.835	42.093	49.778
- Berangkat	7.968	11	16.904	42.605	48.895
Transit	1.290	0	0	0	0
Total	560.366	427.371	873.512	1.239.283	1.189.788

Sumber : Diolah dari PT. Angkasa Pura Indonesia, 2025

Tabel II. 28 Data Produksi Kargo (Kilogram) Bandara Internasional Adi Sumarmo Tahun 2020-2024

Angkutan Barang	2020	2021	2022	2023	2024
Domestik	2.339.039	1.856.723	1.760.287	3.047.697	4.360.918
- Bongkar	1.153.294	361.954	300.891	322.057	319.463
- Muat	1.185.745	1.494.769	1.459.396	2.725.640	4.041.455
Internasional	0	15.158	0	2.180	12.915
- Bongkar	0	15.158	0	1.780	9.922
- Muat	9	0	0	400	2.993
Total	2.339.039	1.871.881	1.760.287	3.047.877	4.373.833

Sumber : Diolah dari PT. Angkasa Pura Indonesia, 2025

3) Bandara Tunggul Wulung di Kabupaten Cilacap

- a) Klasifikasi Bandara : Bandar Kelas III
- b) Runway (54 F/D/X/T) : 1.400 m x 30 m (42.000 m²)
- c) Taxiway (51 R/D/X/T) : 105 m x 18 m (1.890 m²)
- d) Apron (27 F/D/X/T) : 190 m x 94 m (17.974 m²)
- e) Pesawat Terbesar : ATR 72-500
- f) Fasilitas Sisi Darat :
 - Terminal : 777 m²
 - Kargo : -

Data pergerakan pesawat Bandara Tunggul Wulung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang terdiri dari pesawat niaga dan bukan niaga (pesawat latih) sebagai berikut :

Tabel II. 29 Data Pergerakan Pesawat Bandara Tunggul Wulung Tahun 2020-2024

Pergerakan Pesawat	2020	2021	2022	2023	2024
Datang	3.963	3.223	3.351	2.444	2.213
Berangkat	3.964	3.223	3.352	2.444	2.214
Total	7.926	6.446	6.703	4.888	4.427

Sumber : UPBU Tunggul Wulung, 2025

Bandara Tunggul Wulung hanya melayani penerbangan carter adapun data produksi penumpang dan kargo bandara dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 202 sebagai berikut :

Tabel II. 30 Data Produksi Penumpang Bandara Tunggul Wulung Tahun 2020-2024

Penumpang	2020	2021	2022	2023	2024
Datang	627	355	139	156	209
Berangkat	795	337	173	170	173
Total	1.422	692	312	326	382

Sumber : UPBU Tunggul Wulung, 2025

Tabel II. 31 Data Produksi Bagasi dan Kargo (Kilogram)
Bandara Tunggul Wulung Tahun 2020-2024

ANGKUTAN BARANG	2020	2021	2022	2023	2024
BONGKAR	3.883	52	18	35	90
MUAT	4.677	514	144	110	198
JUMLAH	8.660	566	162	145	288

Sumber : UPBU Tunggul Wulung, 2025

4) Bandara Dewadaru Karimunjawa di Kabupaten Jepara

- a) Klasifikasi Bandara : Bandar Kelas III
- b) Runway (54 F/D/X/T) : 1.400 m x 30 m (42.000 m²)
- c) Taxiway (51 R/D/X/T) : 62 m x 15 m (930 m²)
- d) Apron (27 F/D/X/T) : 91 m x 50 m (4.550 m²)
- e) Pesawat Terbesar : ATR 72-600 atau yg sejenis
- f) Fasilitas Sisi Darat :
 - Terminal : 220 m²
 - Kargo : -

Kegiatan pengembangan yang dilakukan pada tahun Tahun 2019 perpanjangan Runway dari 1.200 m x 30 m menjadi 1.400 m x 30 m, pengembangan terminal penumpang dari 120 m² menjadi 220 m² dan Tahun 2020 pekerjaan pagar pengaman bandara serta pekerjaan talud bandara . Panjang Runway dimaksud hanya bisa melayani 69,44 % (50 orang dari total kapasitas sebesar 72 orang) pada saat Take Off. Pada Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah membebaskan lahan ± 16.010 m² untuk Perpanjangan Runway menjadi 1.600 m x 30 m. Pada Tahun 2022 terdapat perluasan gedung terminal penumpang dengan luas bangunan lantai 1 seluas 980 m² dan lantai 2 seluas 880 m²

Data pergerakan pesawat Bandara Dewadaru Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II. 32 Data Pergerakan Pesawat Bandara Dewadaru
Tahun 2020 - 2024

Pergerakan Pesawat	2020	2021	2022	2023	2024
Datang	31	4	65	118	101
Berangkat	31	4	65	116	101
Total	62	8	130	234	202

Sumber : UPBU Dewadaru, 2025

Pada tahun 2020-2022 terdapat penurunan pergerakan pesawat hal ini karena adanya pandemi Covid-19 pada triwulan 1 tahun 2020 dan setelah itu bandara Dewadaru masih belum melayani penerbangan reguler (bandara hanya melayani penerbangan

emergency/untuk kasus penerbangan darurat) selain itu juga terdapat pengembangan bandara.

Bandara Dewadaru hanya melayani penerbangan domestik. adapun data produksi penumpang bandara dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II. 33 Data Produksi Penumpang Bandara Dewadaru Tahun 2020-2024

Penumpang	2020	2021	2022	2023	2024
Datang	900	20	422	753	706
Berangkat	962	27	423	774	737
Total	1.862	47	845	1527	1443

Sumber : UPBU Dewadaru, 2025

5) Bandara Ngloram di Kabupaten Blora

- a) Klasifikasi Bandara : -
- b) Runway (54 F/D/X/T) : 1.600 m x 30 m (48.000 m²)
- c) Taxiway (51 R/D/X/T) : 141,5 m x 23 m (3.254,5 m²)
- d) Apron (27 F/D/X/T) : 90 m x 60 m (5.400 m²)
- e) Pesawat Terbesar : ATR 72-600 atau yg sejenis
- f) Fasilitas Sisi Darat :
 - Terminal : -
 - Kargo : -

Kegiatan pengembangan yang dilakukan pada tahun 2019 perpanjangan Runway dari 800 m x 30 m menjadi 1.200 m x 30 m, pagar keliling dan saluran sedangkan Tahun 2020 pekerjaan perpanjangan Runway dari 1.200 m x 30 m menjadi 1.600 m x 30 m, Pembuatan Tuning Area dan Rekonstruksi Apron. Pada Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah membebaskan lahan ± 30.792 m² untuk jalan akses ke bandara, jalan akses kendaraan PK-PPK, Gedung PK-PPK dan Gedung operasional. Pada Tahun 2022 Bandara Ngloram kembali diperluas melalui pengadaan lahan yang digunakan untuk keselamatan penerbangan.

Bandara Ngloram di Kabupaten Blora operasional Bulan November 2021 dan di resmikan pada tanggal 17 Desember 2021 namun operasional Bandara Ngloram berhenti beroperasi sementara waktu sejak Maret 2022 dikarenakan ada renovasi Bandara halim Perdana Kusuma yang merupakan rute penerbangan dari Blora ke Jakarta namun pada agustus 2022 penerbangan dibuka kembali dengan Rute Pondok cabe – Purbalingga dengan maskapi Wings Air. Selain itu dengan selesainya revitalisasi bandara Halim Bandara halim Perdana Kusuma, penerbangan Bandara halim Perdana Kusuma – Bandara Ngloram dibuka kembali Pada 27 Januari 2023 dengan jadwal penerbangan setiap rabu dan Jumat. Adapun data

produksi pesawat dan penumpang Bandara Ngloram dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II. 34 Data Pergerakan Pesawat Bandara Ngloram Tahun 2021-2024

Pergerakan Pesawat	2021	2022	2023	2024
Datang	10	8	39	20
Berangkat	10	8	39	18
Total	20	16	78	38

Sumber : UPBU Dewadaru, 2025

Tabel II. 35 Data Produksi Penumpang Bandara Ngloram Tahun 2021-2024

Penumpang	2021	2022	2023	2024
Datang	448	204	834	89
Berangkat	483	234	963	86
Total	931	438	1797	175

Sumber : UPBU Dewadaru, 2025

6) Bandara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga

- a) Klasifikasi Bandara : -
- b) Runway (54 F/D/X/T) : 1.600 m x 30 m (48.000 m²)
- c) Taxiway (51 R/D/X/T) :
- d) Komersiil : 160 m x 15 m (2.400 m²)
TNI AU : 150 m x 15 m (2.250 m²)
- e) Apron (27 F/D/X/T) :
- f) Komersiil : 103 m x 67 m (6.901 m²)
TNI AU : 79 m x 82 m (6.478 m²)
- g) Pesawat Terbesar : ATR 72-600 atau yg sejenis, Boeng 737-200
- h) Fasilitas Sisi Darat :
Terminal : -
Kargo : -

Kegiatan pengembangan yang dilakukan pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah membebaskan lahan ± 30.023 m² untuk operasional Tahap I panjang Runway 1.600 m. sedangkan Pada Tahun 2020 progres pengembangan Bandara Jenderal Besar Soedirman Runway 1.600 m x 30 m dan pembangunan Apron dan Taxiway. Pada Tahun 2021 dilakukan pengembangan sisi udara, parkir terminal dan jalan.

Bandara Jenderal Besar Soedirman diresmikan pada tanggal 11 Juni 2021 namun sudah operasional sejak 3 Juni 2021 dengan Citilink menjadi maskapai pertama yang melakukan penerbangan komersial di bandara tersebut. Rute yang dilayani mencakup Surabaya-Purbalingga dan Purbalingga-Jakarta (via Bandara Halim Perdanakusuma) dengan frekuensi dua kali dalam seminggu, yakni pada hari Kamis dan Sabtu menggunakan

ATR 72-600. Namun operasional Jenderal Besar Soedirman berhenti beroperasi sementara waktu sejak Desember 2021 dikarenakan ada renovasi Bandara halim Perdana Kusuma yang merupakan rute penerbangan dari dan ke Jakarta. Pada agustus 2022 penerbangan dibuka kembali dengan Rute Pondok cabe – Purbalingga dengan maskapi Wings Air. Selain itu dengan selesainya revitalisasi bandara Halim Bandara halim Perdana Kusuma, penerbangan Bandara halim Perdana Kusuma – Bandara Ngloram dibuka kembali Pada 10 November 2022 dengan jadwal penerbangan setiap selasa dan kamis. Adapun data produksi pesawat dan penumpang Bandara Jenderal Besar Soedirman dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II. 36 Data Pergerakan Pesawat Jenderal Besar Soedirman Tahun 2022-2024

PERGERAKAN PESAWAT	2022	2023	2024
Datang	18	16	12
Berangkat	18	16	12
JUMLAH	36	32	24

Sumber : Angkasa Pura Indonesia, 2025

Tabel II. 37 Data Produksi Penumpang Bandara Jenderal Besar Soedirman Tahun 2022-2024

PENUMPANG	2022	2023	2024
Datang	736	117	51
Berangkat	783	152	50
JUMLAH	1.519	269	101

Sumber : Angkasa Pura Indonesia, 2025

g. Infrastruktur Pendukung Konektivitas Perkeretaapian

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mempunyai / menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian. Panjang jalur Kereta Api di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sepanjang 1.680,26 Km / Sp, terdiri dari 929,498 Km / Sp jalur aktif dan 750,757 Km / Sp jalur non aktif. Dari 929,498 Km / Sp jalur aktif 292,44 Km / Sp merupakan jalur tunggal dan 637,06 Km / Sp jalur ganda. Adapun rincian panjang jalur Kereta Api sebagai berikut :

Tabel II. 38 Rincian Panjang Jalur Kereta Api Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (Km/Sp)

No.	Uraian	Panjang
I.	AKTIF	929,498
I.A.	GANDA	637,058
I.A.1.	DAOP III CIREBON	72,14
I.A.1.a.	Batas Jabar (Cirebon) - Batas daop III IV (Brebes)	36,91
I.A.1.b.	Perbatasan Jabar (Cirebon) - Ketanggungan - Perbatasan DAOP III V	35,23

No.	Uraian	Panjang
I.A.2.	DAOP IV SEMARANG	292,59
I.A.2.a.	Batas daop III IV (Brebes) - Semarang Tawang	152,489
I.A.2.b.	Semarang Tawang - Gambringan	60,309
I.A.2.c.	Gambringan - Perbatasan Jatim (Bojonegoro)	79,792
I.A.3.	DAOP V PURWOKERTO	167,316
I.A.3.a.	Perbatasan DAOP III V (Brebes) - Prupuk - Kroya	89,292
I.A.3.b.	Kroya - Kutoarjo - Batas Daop V VI (Purworejo)	78,024
I.A.4.	DAOP VI YOGYAKARTA	105,012
I.A.4.a.	Solo Balapan - Klaten - Brambanan	43,256
I.A.4.b.	Solo Balapan - Kedungbanteng - Perbatasan Jatim (Ngawi)	41,72
I.A.4.c.	Batas Daop V VI (Purworejo) - Wojo	20,036
I.B.	TUNGGAL	292,44
I.B.1.	DAOP IV SEMARANG	65,032
I.B.1.a.	Gundih - Gambringan	9,915
I.B.1.b.	Brumbung - Gundih - Batas daop IV VI (Grobogan)	55,117
I.B.2.	DAOP V PURWOKERTO	89,774
I.B.2.a.	Batas daop IV VI (Grobogan) - Solo Balapan	39,614
I.B.2.b.	Solo Balapan - Kadipiro - Bandara Adi Sumarmo	13,5
I.B.2.c.	Purwosari - Solo Kota - Sukoharjo – Wonogiri	36,66
I.B.3.	DAOP VI YOGYAKARTA	137,634
I.B.3.a.	Tegal - Slawi - Prupuk	38,5
I.B.3.b.	Perbatasan Jabar (Banjar) - Kroya	75,344
I.B.3.c.	Maos - Cilacap	20,755
I.B.3.d.	Gumilir - Karangtalun	3,035
II.	NON AKTIF	750,757
II.A.	DAOP IV SEMARANG	475,773
II.A.1.	Pekalongan – Wonopringgo	6,52
II.A.2.	Weleri – Besokor	3,7
II.A.3.	Kaliwungu - Kendal – Kalibodri	17,64
II.A.4.	Semarang Tawang - Semarang-Gudang	1,32
II.A.5.	Kedungjati - Tuntang – Ambarawa	36,76
II.A.6.	Ambarawa - Bedono - Batas DAOP	13,14
II.A.7.	Semarang - Demak - Kudus - Juana -Rembang-Jatirogo (Perbatasan Jawa Timur)	150,31
II.A.8.	Kudus - Mayong – Pecangaan	23,7
II.A.9.	Mayong – Welahan	5,9
II.A.10.	Juana – Tayu	24,56
II.A.11.	Rembang - Blora – Cepu	71,99
II.A.12.	Demak – Purwodadi – Blora	104,2
II.A.13.	Purwodadi – Ngrombo	7,733
II.A.14.	Wirosari – Kradenan	8,3
II.B.	DAOP V PURWOKERTO	142,16
II.B.1.	Maos - Purwokerto Timur	28,99
II.B.2.	Purwokerto - Purwokerto Timur – Wonosobo	92,98
II.B.3.	Banjarsari – Purbalingga	6,52
II.B.4.	Cilacap – Pelabuhan Cilacap	1,98
II.B.5.	Kutoarjo – Purworejo	11,69
II.C.	DAOP VI YOGYAKARTA	132,82
II.C.1.	Magelang - Secang – Ambarawa	62,88
II.C.2.	Secang - Temanggung – Parakan	27,19
II.C.3.	Purwosari – Kartasura – Boyolali	23,02
II.C.4.	Wonogiri – Baturetno	19,73
TOTAL		1.680,26

Sumber : BTP Jawa Bagian Tengah, 2024

Jumlah stasiun di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 115 stasiun, pada DAOP IV Semarang sebanyak 43 stasiun, DAOP V Purwokerto sebanyak 40 stasiun dan DAOP VI Yogyakarta sebanyak 27 stasiun dan DAOP III sebanyak 5 Stasiun. Adapun rincian dan kode stasiun untuk masing-masing DAOP sebagai berikut :

Tabel II. 39 Rincian dan Kode Stasiun Pada Masing-Masing DAOP di Provinsi Jawa Tengah

No	Nama Stasiun	Kode	Kelas	Jenis	No	Nama Stasiun	Kode	Kelas	Jenis
DAOP 3					10	Sidareja	SDR	Kelas 1	Penumpang
1	Brebes	BB	Kelas 1	Penumpang	11	Slawi	SLW	Kelas 2	Penumpang
2	Ketanggungan	KGK	Kelas 2	Penumpang	12	Prupuk	PPK	Kelas 2	Penumpang
3	Tanjung	TGN	Kelas 3	Penumpang	13	Bumiayu	BMA	Kelas 2	Penumpang
4	Larangan (Ke Pwt)	LRA	Kelas 3	Operasi	14	Gandrungmangun	GDM	Kelas 2	Penumpang
5	Songgom	SGG	Kelas 3	Operasi	15	Linggapura	LG	Kelas 3	Operasi
DAOP 4					16	Kretek	KRT	Kelas 3	Operasi
1	Tegal	TG	Besar A	Penumpang	17	Patuguran	PAT	Kelas 3	Operasi
2	Semarang Poncol	SMC	Besar A	Penumpang	18	Karangsari	KRR	Kelas 3	Operasi
3	Semarang Tawang	SMT	Besar A	Penumpang	19	Karanggandul	KGD	Kelas 3	Operasi
4	Pekalongan	PK	Besar C	Penumpang	20	Notog	NTG	Kelas 3	Operasi
5	Cepu	CU	Besar C	Penumpang	21	Kebasen	KBS	Kelas 3	Operasi
6	Pemalang	PML	Kelas 1	Penumpang	22	Randegan	RDN	Kelas 3	Operasi
7	Weleri	WLR	Kelas 1	Penumpang	23	Kemranjen	KJ	Kelas 3	Operasi
8	Ngrombo	NBO	Kelas 1	Penumpang	24	Sumpiuh	SPH	Kelas 3	Penumpang
9	Gundih	GD	Kelas 1	Penumpang	25	Tambak	TBK	Kelas 3	Operasi
10	Brumbung	BBG	Kelas 1	Penumpang	26	Ijo	IJ	Kelas 3	Operasi
11	Comal	CO	Kelas 2	Operasi	27	Sruweng	SRW	Kelas 3	Operasi
12	Sragi	SRI	Kelas 2	Operasi	28	Wonosari	WNS	Kelas 3	Operasi
13	Batang	BTG	Kelas 2	Operasi	29	Kutowinangun	KWN	Kelas 3	Penumpang
14	Ujungnegoro	UJN	Kelas 2	Operasi	30	Prembun	PRB	Kelas 3	Operasi
15	Krengseng	KNS	Kelas 2	Operasi	31	Butuh	BTH	Kelas 3	Operasi
16	Kalibodri	KBD	Kelas 2	Operasi	32	Sikampuh	SKP	Kelas 3	Operasi
17	Kaliwungu	KLN	Kelas 2	Operasi	33	Lebeng	LBG	Kelas 3	Operasi
18	Mangkang	MKG	Kelas 2	Operasi	34	Jeruklegi	JRL	Kelas 3	Operasi
19	Jerakah	JRK	Kelas 2	Operasi	35	Kawunganten	KWG	Kelas 3	Operasi
20	Alastua	ATA	Kelas 2	Operasi	36	Cipari	CPI	Kelas 3	Operasi
21	Gambringan	GBN	Kelas 2	Penumpang	37	Meluwung	MLW	Kelas 3	Operasi
22	Kradenan	KNN	Kelas 2	Penumpang	38	Kasugihan	KH	Kelas 3	Operasi
23	Doplang	DPL	Kelas 2	Operasi	39	Karangkandri	KKD	Kelas 3	Operasi
24	Randublatung	RBG	Kelas 2	Penumpang	40	Gumilir	GM	Kelas 3	Operasi
25	Larangan (Ke Smt)	LR	Kelas 3	Barang	Daop 6				
26	Suradadi	SD	Kelas 3	Operasi	1	Solo Balapan	SLO	Besar A	Penumpang
27	Petarukan	PTA	Kelas 3	Operasi	2	Solo Jebres	SK	Besar C	Penumpang
28	Kuripan	KRP	Kelas 3	Operasi	3	Purwosari	PWS	Besar C	Penumpang
29	Plabuan	PLB	Kelas 3	Operasi	4	Klaten	KT	Kelas 1	Penumpang
30	Tegowanu	TGW	Kelas 3	Operasi	5	Brambanan	BBN	Kelas 1	Penumpang
31	Gubug	GUB	Kelas 3	Penumpang	6	Bandara Adi Soemarmo	SMO	Kelas 1	Penumpang
32	Karang Jati	KGT	Kelas 3	Penumpang	7	Ceper	CE	Kelas 2	Penumpang
33	Sedadi	SDI	Kelas 3	Penumpang	8	Sragen	SR	Kelas 2	Penumpang
34	Tanggung	TGG	Kelas 3	Operasi	9	Jenar	JN	Kelas 3	Penumpang
35	Kedungjati	KEJ	Kelas 3	Penumpang	10	Wojo	WJ	Kelas 3	Penumpang
36	Padas	PDS	Kelas 3	Operasi	11	Srowot	SWT	Kelas 3	Penumpang
37	Telawah	TLW	Kelas 3	Penumpang	12	Delanggu	DL	Kelas 3	Penumpang
38	Karangsono	KSO	Kelas 3	Penumpang	13	Gawok	GW	Kelas 3	Penumpang
39	Jambon	JBN	Kelas 3	Penumpang	14	Solo Kota	STA	Kelas 3	Penumpang
40	Panunggalan	PNL	Kelas 3	Operasi	15	Sukoharjo	SKH	Kelas 3	Penumpang
41	Sulur	SL	Kelas 3	Operasi	16	Pasar Nguter	PNT	Kelas 3	Penumpang

No	Nama Stasiun	Kode	Kelas	Jenis	No	Nama Stasiun	Kode	Kelas	Jenis
42	Wadu	WDU	Kelas 3	Operasi	17	Wonogiri	WNG	Kelas 3	Penumpang
43	Kapuan	KPA	Kelas 3	Operasi	18	Palur	PL	Kelas 3	Operasi
DAOP 5					19	Kemiri	KMR	Kelas 3	Operasi
1	Purwokerto	PWT	Besar A	Penumpang	20	Masaran	MSR	Kelas 3	Operasi
2	Kutoarjo	KTA	Besar A	Penumpang	21	Kebon Romo	KRO	Kelas 3	Operasi
3	Kroya	KYA	Besar B	Penumpang	22	Kedung Banteng	KDB	Kelas 3	Operasi
4	Maos	MA	Besar C	Penumpang	23	Kalioso	KO	Kelas 3	Operasi
5	Kebumen	KM	Besar C	Penumpang	24	Salem	SLM	Kelas 3	Penumpang
6	Karangtalun	KRL	Besar C	Barang	25	Sumberlawang	SUM	Kelas 3	Operasi
7	Cilacap	CP	Kelas 1	Penumpang	26	Goprak	GPK	Kelas 3	Operasi
8	Karanganyar	KA	Kelas 1	Penumpang	27	Kadipiro	KDO	Kelas 3	Penumpang
9	Gombong	GB	Kelas 1	Penumpang					

Sumber : BTP Jawa Bagian Tengah, 2024

2. Infrastruktur Pendukung Keselamatan Perjalanan Transportasi

Jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jawa Tengah masih relatif tinggi dan memerlukan penanganan serius. Selama periode 2020–2024, rata-rata korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas mencapai kurang lebih 4.000 jiwa per tahun, atau setara dengan sekitar 11 orang per hari. Pada tahun 2024, Indeks Fatalitas Kecelakaan per 100.000 penduduk tercatat sebesar 10,89, menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun 2023. Namun demikian, angka tersebut tetap mencerminkan tingginya tingkat risiko di jalan raya. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, peningkatan keselamatan lalu lintas perlu ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah, melalui langkah-langkah penanganan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Adapun selengkapnya data terkait tingkat fatalitas kecelakaan di Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut :

Tabel II. 40 Tingkat Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas di Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kematian (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Indeks Fatalitas Per 100.000 Penduduk
2020	3.508	36.516.035	9,61
2021	3.750	36.742.501	10,21
2022	4.409	37.032.410	11,91
2023	4.302	37.488.277	11,62
2024	4.130	37.892.300	10,89

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Data kecelakaan di Provinsi Jawa Tengah 2020-2024 mengalami kenaikan setiap tahun nya, jumlah kejadian kecelakaan pada tahun 2024 sebesar 31.444 meningkat dibandingkan tahun 2023.

Tabel II. 41 Data Kecelakaan di Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian	Jumlah					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
A	Kecelakaan Lalu Lintas						
1	Jumlah Kejadian/Tahun	21.396	22.521	30.730	31.425	31.444	Kasus
	Jumlah Kejadian /Hari	58,62	61,70	84,19	86,10	86,15	Kasus
	Jumlah Kejadian /Jam	2,44	2,57	3,51	3,59	3,59	Kasus
2	Korban Meninggal Dunia/Tahun	3.508	3750	4.409	4.302	4.130	Orang
	Korban Meninggal Dunia/Hari	9,61	10,27	12,08	11,79	11,32	Orang
	Korban Meninggal Dunia/Jam	0,40	0,43	0,50	0,49	0,47	Orang
3	Korban Luka Berat	48	77	77	60	65	Orang
4	Korban Luka Ringan	24.495	25.847	35.869	36.915	37.275	Orang
5	Kerugian Materiil (Rp.000)	14.746.525	16.836.435	24.819.905	44.763.625	37.369.660	Rupiah
B	Jenis Kecelakaan Lalu Lintas						
1	Laka Tunggal	4.290	4.781	6.119	6968	5.220	Kejadian
2	Depan - Depan	2.464	3.035	3.995	5.868	5.750	Kejadian
3	Depan - Belakang	2.812	3.348	4.567	6.870	7.768	Kejadian
4	Depan - Samping	6.911	5.927	9.474	6.038	6.736	Kejadian
5	Beruntun / Karambol	385	391	514	412	456	Kejadian
6	Tabrak Manusia	1.743	1.741	2.282	3.159	3.471	Kejadian
7	Tabrak Lari	1.222	1.679	1.814	2.094	2.035	Kejadian
8	Tabrak Hewan	10	9	6	16	8	Kejadian
9	Lain-Lain	1.559	1.748	1.992	-	-	Kejadian
	Jumlah	21.396	22.659	30.763	31.425	31.444	Kejadian
C	Profesi Pelaku Laka Lantas						
1	Pegawai Negeri Sipil	556	547	671	644	507	Orang
2	Karyawan / Swasta	5.593	5.172	7.215	9.955	9.479	Orang
3	Mahasiswa / Pelajar	2.807	3.779	5.660	5.826	5.793	Orang
4	Pengemudi	68	68	116	518	425	Orang
5	TNI	68	54	59	31	24	Orang
6	Polri	99	89	80	53	49	Orang
7	Lain-Lain	9.261	10.260	12.798	13.283	13.759	Orang
	Jumlah	18.452	19.969	26.599	30.310	30.036	Orang
D	Usia Pelaku Laka Lantas						
1	< 15 Tahun	97	91	179	816	787	Orang
2	16 - 30 Tahun	1.495	1.724	3.016	2.443	2.303	Orang
3	31 – 40 Tahun	7.989	9.829	11.794	14.526	14.906	Orang
4	41 - 50 Tahun	4.329	4.869	5.694	8.758	5.378	Orang
5	> 51 Tahun	4.542	5.106	5.916	3.817	6.662	Orang
	Jumlah	18.452	21.619	26.599	30.360	30.036	Orang
E	SIM Pelaku Laka Lantas						
1	A	1.878	2.141	2.229	1.653	1.546	Unit
2	A UMUM	13	11	25	5	4	Unit
3	B1	593	659	526	366	327	Unit
4	B1 UMUM	428	467	459	248	258	Unit
5	BII	133	138	191	76	59	Unit
6	B II UMUM	746	836	1.488	429	405	Unit
7	C	7.918	8.870	8.503	5.539	4.898	Unit
8	SIM Internasional	-		-	1	-	Unit
9	Tanpa SIM	6.742	23.669	13.178	16.604	22.539	Unit

No	Uraian	Jumlah					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah	18.451	36.791	26.599	24.921	30.036	Unit
F	Kendaraan Yang Terlibat Laka Lantas						
1	Sepeda Motor	26.028	29.531	37.759	42.973	44.389	Unit
2	Mobil Penumpang	2.720	3.020	3.688	4.319	2.060	Unit
3	Mobil Bus	280	307	280	372	2.632	Unit
4	Mobil Barang	3.002	3.892	4.267	4.867	4.924	Unit
5	Kendaraan Khusus	17	82	53	15	35	Unit
6	Kendaraan Tidak Bermotor	1.512	1.504	2.188	1.660	1.633	Unit
	Jumlah	33.559	38.336	48.235	54.206	55.673	Unit
G	Lokasi Kejadian Laka Lantas						
1	Berdasarkan Kawasan						
a	Kawasan Pemukiman	14.306	15.118	21.948	24.057	24.102	Perkara
b	Kawasan Perbelanjaan	212	2.698	1.005	2.169	2.410	Perkara
c	Perkantoran	2.145		2.249	1.738	2.283	Perkara
d	Kawasan Wisata	112	104	129	117	346	Perkara
e	Kawasan Industri	23	155	18	89	382	Perkara
f	Lain-lain	4.598	4.581	5.414	3.255	1.921	Perkara
	Jumlah	21.396	22.656	30.763	31.425	31.444	Perkara
2	Berdasarkan Status Jalan						
a	Nasional	4.266	4.598	5.701	7.156	6.772	Perkara
b	Propinsi	5.075	5.282	6.344	7.088	7.136	Perkara
c	Kab/Kota	9.821	10.474	16.133	14.053	14.428	Perkara
d	Jalan TOL	162	224	243	302	283	Perkara
e	Lainnnya	2.072	227	2.342	2.826	2.825	Perkara
	Jumlah	21.396	20.805	30.763	31.425	31.444	Perkara
3	Berdasarkan Fungsi Jalan						
a	Arteri	5.220	4.345	5.219	7.860	8.145	Perkara
b	Kolektor	9.069	11.345	15.026	13.416	13.015	Perkara
c	Lokal	6.050	6.128	9.552	9.847	10.001	Perkara
d	Lingkungan	941	691	766	302	283	Perkara
e	Lain-Lain	116	12	200	-	-	Perkara
	Jumlah	21.396	22.521	30.763	31.425	31.444	Perkara
H	Faktor Penyebab Laka Lantas						
1	Manusia	17.006	15.710	25.585	31.143	29.660	Perkara
2	Alam	216	651	666	74	421	Perkara
3	Kelaikan Kendaraan	388	206	211	6	440	Perkara
4	Kelaikan Jalan	3.786	4.005	4.301	202	923	Perkara
	Jumlah	21.396	20.572	30.763	31.425	31.444	Perkara
I	Kecelakaan Lalu Lintas Menonjol						
1	Jumlah Kejadian	3	4	6	4	4	Kasus
2	Korban Meninggal Dunia	13	27	41	25	23	Orang
3	Korban Luka Berat	1	3	2	3	1	Orang
4	Korban Luka Ringan	20	27	22	48	43	Orang
5	Kerugian Materiil (Rp.000)	52.200	125.000	215.000	3.105.000	235.000.	Rupiah

Sumber : Polda Jateng, 2025

Di Provinsi Jawa Tengah, rata-rata terdapat 0,5 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas setiap jam, atau setara dengan 11 orang per hari. Tingginya angka fatalitas tersebut sebagian besar menimpa usia produktif (16–50 tahun) yang merupakan penopang utama perekonomian keluarga. Kondisi ini menjadikan kecelakaan lalu lintas bukan hanya persoalan keselamatan transportasi, tetapi juga ancaman serius terhadap ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Kehilangan pencari nafkah utama dalam hitungan jam berpotensi mendorong lahirnya keluarga miskin baru, sehingga isu keselamatan lalu lintas harus dipandang sebagai isu strategis pembangunan daerah yang mendesak ditangani secara komprehensif.

- a. Fasilitas Keselamatan Jalan Di Ruas Jalan Provinsi
- Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/2/Tahun 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kolektor Primer-2 dan Jalan Kolektor Primer-3 sebagai JalanProvinsi di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 173 ruas (2.440,12 Km). Terbagi dalam 6 (enam) Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah, adapun masing-masing Balai mengampu Ruas Jalan Provinsi sebagai berikut :

Tabel II. 42 Jumlah dan Panjang Ruas Jalan Provinsi Per BPSPP Wilayah

No	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan (BPSPP)	Lokasi	Jumlah Ruas	Panjang (Km)	Prosentase Panjang Ruas Jalan	Jumlah Ruas Jalan Kondisi Ideal	Persentase Ruas Jalan Kondisi Ideal
1	BPSPP Wilayah I Kelas A	Semarang	28	413,92	16,96%	2	7,14%
2	BPSPP Wilayah II Kelas A	Pati	23	347,39	14,23%	2	8,69%
3	BPSPP Wilayah III Kelas A	Surakarta	39	506,78	20,77%	2	5,12%
4	BPSPP Wilayah IV Kelas A	Magelang	24	380,39	13,87%	0	0%
5	BPSPP Wilayah V Kelas A	Banyumas	33	320,25	19,07%	5	15,15%
6	BPSPP Wilayah VI Kelas A	Pekalongan	27	471,78	19,33%	0	0%
Jumlah			173	2.440,12	100%	11	6,35%

Sumber : diolah dari Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 622/2 tahun 2023

Pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (Surakarta) paling banyak mengampu Ruas Jalan Provinsi sebanyak 39 Ruas Jalan dengan Panjang 506,78 Km (20,77%).

Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi merupakan salah satu kegiatan strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini mencakup penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), rambu lalu lintas, marka jalan, serta berbagai fasilitas penunjang keselamatan lainnya yang diarahkan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. adapun perkembangan jumlah pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan dari Tahun 2023-2025 sebagai berikut :

Tabel II. 43 Perkembangan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi

No	Uraian	Kebu- tuhan	Tahun			Keter- sediaan s.d 2025	Sisa Kebu- tuhan	Keter sediaan %
			2023	2024	2025 (Rencana)			
1	Rambu (Buah)	19.169	350	100	100	13.670	5.499	71,31
2	RPPJ (Unit)	1.398	29	8	8	1.281	117	91,63
1.	Marka (m)	2.404.741	60.000	15.000	219.000	1.255.896	1.148.845	52,23
4	Guardrail (Beam)	15.810	-	-	-	7.580	7.960	47,94
5	LPJU (Unit)	37.597	250	46	404	15.229	22.368	40,51
6	APILL (Unit)	246	2	-	1	213	33	86,59
7	Warning Light (Unit)	799	10	-	-	456	343	57,07

Sumber : Diolah dari GIS Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Pemenuhan perlengkapan jalan menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung keselamatan serta kelancaran transportasi di Jawa Tengah. Sesuai dengan tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang termuat dalam RPJMD 2025-2029, pada tahun 2026 pemenuhan perlengkapan jalan difokuskan pada jalur distribusi pangan sebagai bagian dari penguatan lumbung pangan daerah. Selanjutnya, pada tahun 2027 prioritas diarahkan untuk mendukung jalur pariwisata yang memiliki intensitas pergerakan tinggi, sehingga mampu meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi wisatawan maupun masyarakat. Pada tahun 2028, perhatian difokuskan pada penguatan jalur industri serta akses menuju kawasan pedesaan yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi, dengan memastikan standar keselamatan terpenuhi. Adapun pada tahun 2029–2030, pemenuhan perlengkapan jalan diprioritaskan pada ruas jalan provinsi yang masih memerlukan intervensi guna menjamin terciptanya jaringan jalan yang selamat, andal, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

b. Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Provinsi

Penanganan daerah rawan kecelakaan pada ruas jalan provinsi di masing-masing Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah merupakan salah satu kegiatan strategis dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) LLAJ, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Kajian Rencana Aksi Keselamatan (RAK) LLAJ yang menjadi dasar perencanaan intervensi pada lokasi-lokasi prioritas. Berdasarkan dokumen Kajian RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, tercatat sebanyak 86 lokasi daerah rawan kecelakaan yang tersebar di 66 ruas jalan provinsi. Penanganan lokasi tersebut diarahkan pada penyediaan fasilitas keselamatan jalan, rekayasa lalu lintas, serta peningkatan kesadaran masyarakat, sehingga diharapkan mampu menurunkan angka kecelakaan sekaligus

menciptakan sistem transportasi jalan yang lebih aman, andal, dan berkelanjutan. Adapun jumlah Daerah Rawan Kecelakaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II. 44 Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) Pada Masing-Masing BPSPP Wilayah 2020-2024

Unit Kerja	Total DRK	2023		2024		2025		
		Jumlah Penangan an DRK	Persentase akumulasi Penanganan DRK	Jumlah Penangan an DRK	Persentase akumulasi Penanganan DRK	Jumlah Penangan an DRK	Akumulatif Penangan an DRK	Persentase Akumulasi Penanganan DRK
BPSPP WILAYAH I	18	1	5,56%	1	11,11%	1	3	16,67%
BPSPP WILAYAH II	16	4	25,00%	1	31,25%	1	6	37,50%
BPSPP WILAYAH III	9	0	0,00%	2	22,22%	1	3	33,33%
BPSPP WILAYAH IV	12	0	0,00%	2	16,67%	1	3	25,00%
BPSPP WILAYAH V	7	0	0,00%	1	14,29%	1	2	28,57%
BPSPP WILAYAH VI	24	3	12,50%	5	33,33%	1	9	37,50%
	86	8	9,30%	12	23,26%	6	26	30,23%

Sumber : Diolah dari Dokumen RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dari tabel diatas Pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (Pekalongan) paling banyak daerah rawan kecelakaan pada Ruas Jalan Provinsi sebanyak 25 lokasi (29,07%). Secara rinci Daerah rawan kecelakaan adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 45 Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) Pada BPSPP Wilayah

NO	RUAS JALAN	KOORDINAT	Kab/Kota	REKOMENDASI KEBUTUHAN
BALAI PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH I				
1	Ambarawa-Bandungan	-7.227324, 110.345952	Kab. Semarang	1. Penambahan Warning Light 2. Penambahan rambu peringatan 3. Penambahan pita penggaduh
2	Salatiga-Kedungjati/ BTS. Kab Grobogan	-7.260675, 110.517879	Kab. Semarang	1. Rambu Chevron 4 2. Warning Light 3. Rumble Strip 4. PJU 1 Section 5. Rambu Hati-Hati 6. Marka Tepi, Marka Tengah dan Zebra Cross SMPN 1
3	Ruas Jalan Semarang-Purwodadi Grobogan	-7.041666, 110.821512	Kab. Grobogan	1. Perlu dilakukan pemasangan rambu batas kecepatan sesuai 2. Perlu penambahan rambu peringatan DRK dan RPPJ 3. Pemasangan Warning Light 4. Pemasangan rumble strip mendekati simpang
4	Salatiga-Kedungjati/ BTS. Kab Grobogan	-7.235245, 110.539805 Beringin- Salatiga	Kab. Semarang	1. Penambahan rambu batas kecepatan 2. Rambu Chevron 3. Warning Light 4. Pita Penggaduh
5	Weleri – Patean (BTS. Kab. Temanggung)	-7.040556 110.048694 (Weleri - Pagaruyung - Sukorejo)	Kab. Kendal	1. Guardrail (Jumlah Beam) 2. Delineator 3. Rambu Belok Belok 4. Rambu Hati Hati 5. PJU
6	Gubug-Kapung- Kedungjati/ BTS. Kab. Semarang	-7.260700, 110.517914	Kab. Semarang	1. Warning Light 2. Rppj 3. Marka Tepi : 4. Pita Penggaduh 5. Chevron
7	Jalan Raya Semarang Purwodadi, Lekok, Penawangan, Kab. Grobogan.	-7.024890 110.500694 s/d 7.024892, 110.500712	Kab. Grobogan	

NO	RUAS JALAN	KOORDINAT	Kab/Kota	REKOMENDASI KEBUTUHAN
8	Jalan Raya Desa Kemantren Godong Purwodadi	-7.025084, 110.7785 s/d -7.025942, 110,781019	Kab. Grobogan	
9	Weleri – Patean (BTS. Kab. Temanggung)	-7.038088, 110.049982	Kab. Kendal	1. Gruardrail 2. Rambu DRK 3. Chevron
10	Lemahbang-Kaloran (Kab. Semarang)	-7.222158, 110.373094	Kab. Semarang	
11	Sukorejo - Plantungan / Blimbing	-7.086051, 110.008363	Kab. Kendal	
12	Bts. Lingkar Salatiga - Ngablak / Bts.Kab. Magelang (Tanjakan Salib Putih)	-7.356289, 110.482881	Kota Salatiga	
13	Bts. Lingkar Salatiga - Ngablak / Bts.Kab. Magelang (Pertigaan Kopeng Arah Cuntel)	-7.397128, 110.421409	Kab. Semarang	
14	Temanggung - Kaloran / Bts.Kab. Semarang (Pertigaan 09)	-7.271013, 110.235394	Kab. Semarang	
15	Semarang - Godong (Pertigaan Pasar Tegowanu)	-7.049705, 110.599495	Kab. Grobogan	
16	Ungaran - Cangkiran (Perempatan Sumurjurang)	-7.104357, 110.388205	Kota Semarang	
BALAI PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH II				
17	Kudus – Margoyoso / BTS. Kab. Jepara (SK KALIWUNGU / BTS. KAB KUDUS - KALINYAMATAN)	-6.640988, 110.709716 (Ruas Jalan Jepara - Kudus)	Kab. Jepara	1. Perlu dilakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas terhadap pengurangan titik konflik pada bundaran 2. Perlunya pengecatan ulang marka 3. Perlu dilakukan survei pencacah lalu lintas dan dilakukan simulasi alternative 4. pemasangan APILL dalam pengaturan lalu lintas 5. Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas
18	Kudus-Margoyoso/BTS. Kabupaten Jepara (SK JALAN KUDUS - KALIWUNGU / BTS KAB JEPARA)	-6.640988, 110.709716 (Jepara - Kudus)	Kab. Jepara	1. Perlu dilakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas terhadap pengurangan titik konflik pada bundaran 2. Perlunya pengecatan ulang marka 3. Perlu dilakukan survei pencacah lalu lintas dan dilakukan simulasi alternative pemasangan APILL dalam pengaturan lalu lintas 4. Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas
19	Pati-Tayu	-6.651748, 111.061809 (Desa Mojoagung KM 87+600)	Kab. Pati	1. Pita penggaduh 2. Rambu turunan dan jalan naik 3. Papan Peringatan DRK 4. Perimbasan ranting pohon yang menutupi PJU
		-6.5606007 LS,111.0412319BT (Desa Sendangrejo KM 98+950)	Kab. Pati	1. Rambu simpang 3 2. Rambu DRK 3. Pengecatan marka jalan 4. Pita penggaduh 5. Zebra cross 6. Penambahan Warning Lamp 7. Tambal lubang jalan
		-6.610464, 111.053448 (Ngemplak Kidul, Margoyoso KM 92+300)	Kab. Pati	1. Rambu Traffic Light 2. Rambu DRK 3. Dilakukan pengaspalan jalan 4. Pita penggaduh 5. Ditambahkan PJU 6. Pelapisan ulang bahu jalan pada sisi kanan sepanjang 50 meter (area Traffic Light)
20	Keling/BTS.Kab. Jepara_Tayu	-6.5345489 LS,110.9416022 BT (Desa Plaosan KM 113+700) Jl. Keling-Tayu	Kab. Pati	1. Rambu hati-hati 2. Rambu DRK 3. Rambu tikungan tajam 4. Pita penggaduh 5. Penambahan Warning Lamp 6. Penambahan PJU
21	Kunduran – Ngawen – Blora	-6.99763 LS,111.38161 BT (POM BENSIN NGAWEN)	Kab. Blora	1. Pita penggaduh 2. Paku jalan sepanjang 3. Rambu peringatan hati hati 4. Rambu papan peringatan DRK 5. Sosialisasi lewat spanduk dan Razia lalu lintas (operasi gabungan) 6. Penanganan WL yang mati
		-7.01918 LS,111.30716 BT	Kab. Blora	

NO	RUAS JALAN	KOORDINAT	Kab/Kota	REKOMENDASI KEBUTUHAN
		(Simpang 4 Trembul Rejo Ngawen)	Kab. Blora	1. WL (warning lamp) 2. Rambu DRK 3. Dilakukan pemarkaan baru 4. Pita penggaduh 5. Paku jalan sekitar 6. Ditambahkan PJU 7. Pelapisan bahu jalan pada sisi kanan yang beda tinggi dengan jalan utama
		-6.5345489 LS,111.9416022 BT (SMP NEGERI 1 NGAWEN)	Kab. Blora	1. Rambu Peringatan hati-hati 2. Rambu papan peringatan DRK 3. Rambu Peringatan banyak anak menyebrang 4. Rambu Petunjuk fasilitas penyebrangan 5. Pembuatan zebra cross 6. Pita penggaduh sebelum dan sesudah lokasi 7. Paku jalan 8. Penambahan Warning Lamp 9. Penambahan PJU
		-7.05042 LS,111.24209 BT (SMP NEGERI 1 KUNDURAN BLORA)	Kab. Blora	1. Rambu hati-hati 2. Rambu petunjuk fasilitas penyebrangan 3. Rambu papan peringatan DRK 4. Rambu peringatan banyak anak menyebrang 5. Pita penggaduh (sebelum dan sesudah lokasi) 6. Penambahan Warning Lamp 7. Penambahan PJU 8. Paku jalan sekitar 300 m
22	Jl. Purwodadi (Kudus)	-6.837328, 110.832453	Kab. Kudus	
23	Jl. Pati - Tayu (Ketanen)	-6.6502, 111.0615	Kab. Pati	
24	Jl. Kudus – Jepara Ds. Sidorekso Kec. Kaliwungu Kab. Kudus (SK JALAN KUDUS - KALIWUNGU / BTS KAB JEPARA)	-6.46217, 110,47017 SD - 6.772689, 110,783815	Kab. Kudus	
BALAI PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH III				
25	Boyolali-Selo-Jrakah/BTS.Kab. Magelang	-7.7057516, 110.508244 (Tikungan Ngeplang)	Kab. Boyolali	1. Pelebaran Jalan 2. Pergeseran RPPJ Wisata 3. Penambahan Rambu peringatan tikungan, tanjakan, turunan, pertigaan 4. Pemeliharaan cermin tikungan 5. Penambahan Marka Tepi 6. Pemasangan Guardrail untuk mengganti gundukan tanah dan batu 7. Pemasangan papan peringatan terkait tumpahan solar
		-7.506692, 110.502837 (Irung Petruk)	Kab. Boyolali	1. Penambahan papan peringatan, rambu tikungan, jalan berkelok (Irung Petruk) 2. Penambahan chevron (Irung Petruk) 3. Penambahan penerangan jalan (Irung Petruk) 4. Penambahan rambu batas kecepatan (30km/jam) (Irung Petruk)
26	Boyolali-Selo-Jrakah/BTS.Kab. Magelang	-7.495766, 110.428196 (Selo -Jrakah)	Kab. Boyolali	1. Penertiban warung diatas drainase yang berlokasi di tanjakan 2. Penambahan rambu peringatan, tikungan, tanjakan 3. Penambahan penerangan jalan

NO	RUAS JALAN	KOORDINAT	Kab/Kota	REKOMENDASI KEBUTUHAN
27	Ruas Jalan Jatinom-Boyolali (Simpang 4 Jatinom depan Gapura Pesantren Al Manshurin)	-7.628043, 110.604904	Kab. Boyolali	1. Perlu dilakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas terhadap pengurangan titik konflik pada bundaran 2. Perlunya pemasangan rambu peringatan adanya simpang 4 3. Perlunya pemasangan warning light 4. Perlu dilakukan survei pencacah lalu lintas dan dilakukan simulasi alternative pemasangan APILL dalam pengaturan lalu lintas 5. Penegakan hukum terhadap pengguna jalan pelaku aggressive driving
28	Ruas Jalan Ahmad Yani, Surakarta (Ringin Semar)	-7.5593912, 110.834791	Kota Surakarta	1. Perlu dilakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas terhadap pengurangan titik konflik pada bundaran 2. Perlu dilakukan survei pencacah lalu lintas dan dilakukan simulasi alternative pemasangan APILL dalam pengaturan lalu lintas 3. Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas
29	Wonogiri Ngadirojo	-7.813228, 110.957312 (simpang 3 Bulusulur)	Kab. Wonogiri	1. Marka Solid 2. Paku jalan 3. Rambu Larangan Mendahului 4. Rambu Batas Akhir Larangan Mendahului
30	Nguter/ Bts. Kabupaten Sukoharjo – Wonogiri	-7.76989, 110.88792 (dekat Ponpes Mambaul Hikmah)	Kab. Wonogiri	1. Rambu Peringatan Simpang 3 2. Rambu Peringatan Pejalan kaki 3. Variable Message Sign 4. Rambu Larangan Mendahului 5. Rambu Batas Akhir larangan mendahului 6. Marka Solid 7. Paku jalan
31	RUAS SUKOHARJO- NGUTER/BTS. KAB. WONOGIRI	-7.704206,110.855046	Kab. Sukoharjo	
32	Jl. Lawu 172	-7.615597, 111,002065 s/d -7.616102, 111.003456;		1. Penambahan rambu hati-hati pada -7.525960, 110.817646 dan -7.525205, 110.817605; 2. Penambahan Warning Light (2 buah) pada -7.525363, 110.817639 dan -7.525767, 110.817586; 3. Penambahan marka tengah solid; 4. Penambahan marka tepi; 5. Penambahan rambu stop di -7.525593, 110.817692 6. Penambahan LPJU 1 section
BALAI PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH IV				
33	Salaman-Bener/BTS. Kab Purworejo Kab magelang	-7.5733, 110.0769	Kab. Magelang	1. Pemasangan LPJU 2. Perbaikan rambu tanjakan (arah magelang) 3. Penambahan rambu batas kecepatan
34	BTS.Kab Magelang/ Bener-Maron (Kab purworejo)	-7.596748, 110.064989 Kalijambe (Maron-Bener)	Kab. Purworejo	1. Penambahan penerangan jalan 2. Penebalan marka 3. Perbaikan cermin tikung 4. Penambahan pita penggaduh 5. Penambahan papan peringatan 6. Rambu batas kecepatan 7. Pemasangan Rambu Chevron 8. Delineator 9. Reflektor guardrail 10. Warning Light 11. Pagar Pengaman jalan
35	Parakan-Patean / BTS. Kab. Kab temanggung Kendal	-7.127659, 110.080347 Candiroto- Bejen (temanggung)	Kab. Temanggung	1. Overlay dan Pelebaran jalan 2. Pemasangan Marka jalan 3. Penambahan penerangan jalan 4. Penambahan pita penggaduh 5. Penambahan jalur penyelamat 6. Penambahan papan peringatan

NO	RUAS JALAN	KOORDINAT	Kab/Kota	REKOMENDASI KEBUTUHAN
		-7.15873, 110.06397	Kab. Temanggung	1. Guardrail 2. Warning Light : 3. Pemasangan LPJU 4. Pemasangan rambu lalu lintas 5. Pemasangan cermin tikungan 6. Penebalan marka
36	Magelang-Ngablak/ BTS. Kab Semarang Kab Semarang	-7.519074, 110.355771 Magelang- Salatiga (Pakis)	Kab. Magelang	1. Pemasangan LPJU 2. Penambahan delineator 3. Pemasangan marka tepi 4. Perawatan rambu 5. Penambahan Rambu batas kecepatan
37	Bener-Maron (Bts. Purworejo) Kab Purworejo	-7.6140, 110.0621	Kab. Purworejo	1. Penambahan rambu peringatan 2. Penambahan rambu batas kecepatan 3. Penambahan RPPJ Wisata 4. Penambahan Warning light 5. Perbaikan marka 6. Penambahan rambu larangan parkir 7. Koordinasi dengan satpol PP terkait warung pada jembatan 8. Penambahan guardrail 9. Penggantian cermin tikung 10. Perbaikan warning light 11. Perbaikan marka 12. Penambahan rambu peringatan tanjakan dan turunan
38	Magelang Ngablak / BTS. Kab Semarang	-7.355943, 110.482977 Ruas Jalan Magelang - Salatiga (Simpang Empat Kumpulrejo / Salib Putih)	Kota Salatiga	1. Pembatasan Lalu Lintas terhadap kendaraan angkutan barang disertai pemasangan rambu peringatan pembatasan angkutan barang 2. Pembangunan kembali U-Turn yang ideal 3. Kajian yang komperehensif terhadap jalur penyelamat di lokasi tersebut
39	Magelang-Ngablak/BTS. Kab. Semarang	-7.444890, 110.351335	Kab. Magelang	1. Guardrail 2. Warning Light 3. Pemasangan rambu lalu lintas 4. Pemasangan Delineator 5. Penebalan marka
40	Jalan Jurusan Purworejo – Magelang Ikut Desa. Kaliboto Kec. Bener Kab. Purworejo.	-7.381970, 110.030719	Kab. Purworejo	
41	Jl Candiroti – Bejen tepatnya depan kantor Perhutani Dsn Saren Ds/Kec Bejen Kab Temanggung Prop Jawa Tengah	-7.127659, 110.080347	Kab. Temanggung	1. Pemasangan rambu kurangi kecepatan 2. Pemasangan rambu turunan Panjang 3. Pemasangan rambu gunakan gigi rendah
42	Jl. Magelang - Salatiga, Pakis, Magelang	-7.448945, 110,342838 s.d - 7.446988, 110.347183;	Kab. Magelang	1. Pemasangan rambu hati hati 2. Pemasangan rambu turunan panjang
43	Wonosobo-Kejajar Kab Wonosobo	-7.244305, 109.951289	Kab. Wonosobo	1. Penambahan Warning Light 2. Penambahan Rambu Simpang Tiga 3. Penambahan papan peringatan
BALAI PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH V				
44	Batur -Dieng Kab Banjarnegara	-7.20698, 109.9163 Wanayasa- Dieng	Kab. Banjarnegara	1. Penambahan delineator 2. Penambahan guardrail 3. Penambahan LPJU 4. Perbaikan dan penambahan marka 5. Penambahan papan peringatan DRK
45	Kejajar-Dieng (Kab Wonosobo)	-7.209880, 109.924685	Kab. Wonosobo	1. Penambahan LPJU 2. Penambahan papan peringatan sebelum dan sesudah Rest Area 3. Penambahan rambu batas kecepatan 4. Penambahan papan peringatan gunakan gigi rendah 5. Penambahan delineator 6. Penambahan papan peringatan kendaraan yang akan naik 7. penambahan papan peringatan DRK 8. Perbaikan dan penambahan marka

NO	RUAS JALAN	KOORDINAT	Kab/Kota	REKOMENDASI KEBUTUHAN
				9. Penambahan Warning Light 10. Penambahan papan peringatan tanjakan/turunan panjang
46	Kertek-Kepil (wonosobo)	-7.389134, 109.963765	36	1. Perbaikan dan perawatan jalur penyelamat 2. Perawatan warning light 3. Overlay jalan menuju jalur penyelamat 4. Pagar Pengaman Jalan 5. Rambu Chevron 6. Delineator 7. Reflektor guardrail 8. Marka Zebra Cross 9. RPPJ 10. Rambu Peringatan 11. Papan Peringatan"
47	Jl Wadaslintang - Selokromo (Tanjakan Desa Panerusan)	-7.560116, 109.820249	Kab. Wonosobo	1. Penambahan rambu peringatan hati hati, tanjakan, turunan
48	Bobotsari- belik/ BTS. Kab Pemalang	-7.239676, 109.332104	Kab. Purbalingga	1. Penambahan rambu peringatan 2. Penambahan pita pengkaduh 3. Penambahan Warning Light 4. Penambahan Rambu Batas Kecepatan
49	Bobotsari – Belik/ BTS.Kab. Pemalang	-7.244421, 109.334357	Kab. Purbalingga	1. Guardrail 2. Warning Light : 2 3. Penggantian lampu PJU dengan lampu LED 4. Pengecatan ulang marka di sekitar lokasi 5. Penambahan rambu petunjuk jalur penyelamat 6. Penambahan rambu peringatan pengarah tikungan kiri/ kanan 7. Penambahan rambu dilarang mendahului 8. Penyediaan rumble strips sebelum jalur penyelamat 9. Rambu Kurangi Kecepatan
50	Sokaraja - Kalimanah	-7.443694, 109.326025	Kab. Banyumas	1. Guardrail 2. Warning Light : 3. Penggantian lampu PJU dengan lampu LED 4. Pengecatan ulang marka di sekitar lokasi 5. Penambahan rambu peringatan hati-hati 6. Penambahan rambu peringatan DRK 7. Penambahan rambu batas kecepatan 8. Penyediaan rumble strips sebelum dan sesudah lokasi DRK
BALAI PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH VI				
51	Bandungsari-Salem Kab brebes	-7.239676, 109.332104 (Gunung Lio-Brebes)	Kab. Brebes	1. Penambahan LPJU 2. Pemasangan guardrail 3. Penambahan rambu peringatan hati - hati dan tanah longsor 4. Penambahan rambu Chevron
		-7.093521, 108.807580 (Jembatan Bandungsari)	Kab. Brebes	1. Rambu peringatan rawan longsor 2. Overlay Jalan 3. Pemberian marka 4. Pemasangan guardrail
		-7.096942, 108.803907 (Tanjakan Depan SD)	Kab. Brebes	1. Pemasangan rambu peringatan tanjakan dan tikungan 2. Pemasangan rambu chevron 3. Penambahan marka tepi
		-7.092746, 108.807137	Kab. Brebes	1. Penambahan Guardrail
		-7.135487, 108.790767	Kab. Brebes	1. Penambahan RPPJ 2. Pemasangan Cermin Tikung
52	Pemalang - Randudongkal	-6.975978, 109.381052	Kab. Pemalang	1. Papan Peringatan 2. WL 3. Rambu Peringatan Hati2 4. Rambu Menyeberang

NO	RUAS JALAN	KOORDINAT	Kab/Kota	REKOMENDASI KEBUTUHAN
53	Randudongkal – Belik/Bts Kab. Purbalingga	-7.133070, 109.304597		1. Penebangan pohon di tanjakan cilukba 2. Cutting tanjakan cilukba 3. Pemasangan Guardrail 4. Pemasangan RLL dilarang mendahului 5. Rambu Peringatan dgn kata-kata 6. Pemasangan PJU
54	Ketanggungan – Songgom	6°57'14.12"S 108°53'25.62"T	Kab. Brebes	1. Pemasangan rambu peringatan tikungan berkelok
		6°59'39.85"S 108°55'11.92"T	Kab. Brebes	1. Pemasangan rambu peringatan tikungan berkelok
		7° 5'33.22"S 108°59'1.73"T	Kab. Brebes	1. Pemasangan rambu peringatan tikungan berkelok
		7° 6'16.14"S 108°59'1.01"T	Kab. Brebes	1. Pemasangan rambu peringatan tikungan tajam
55	Randudongkal – Belik/Bts Kab. Purbalingga (Rest Area Indah Sari)	-7.169092, 109.318664	Kab. Pemalang	1. WL 2. Papan Peringatan 3. Rumble Strip
56	Moga - Morongso / Bts.Kab.Tegal (SMK Al Falah)	-7.122779, 109.243573	Kab. Pemalang	1. Rambu Peringatan 2. Rambu Menyeberang 3. Warning Light 4. Rumble Strip 5. Zoss
57	Jl raya Pekajangan – Kedungwuni		Kab Pekalongan	
58	Jl raya Kedungwuni – Podo Kec. Kedungwuni.		Kab Pekalongan	
59	Batang - Wonotunggal - Surjo (Pertigaan Takzaka)	-7.040339, 109.802370	Kab. Batang	
60	Kebonagung - Bts.Kab. Batang (Pertigaan SDN Karangsari)	-7.031623, 109.615187	Kab. Pekalongan	
61	Banyuputih - Plantungan / Bts Kab. Kendal (SDN Sukomangli)	-7.0552957,109.9022149	Kab. Batang	
62	Pemalang - Randudongkal (Bantarbolang)	-7.053953, 109.379521	Kab. Pemalang	1. Cermin Tikung 2. Chevron (4 Bh) 3. Perbaikan Guardrail + reflektor 4. Marka 5. Rambu Peringatan
63	Jatinegara/Bts.Kab.Pemalang - Slawi (Pertigaan Desa Bogares Kidul)	-6.990626, 109.164985	Kab. Tegal	
64	Bumiayu - Sirampog (Pasar Sirampog)	-7.210080, 109.087037	Kab. Tegal	1. Cermin Tikung 2. Papan Peringatan 3. Rambu Peringatan 4. Marka 5. LPJU
65	Jl. Raya Ds. Randudongkal - Pemalang		Kab. Pemalang	
66	Jl. Raya Ds. Belik – Pemalang		Kab. Pemalang	

Sumber : Diolah dari Dokumen RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah, 2025

Pemenuhan fasilitas keselamatan pada Daerah rawan kecelakaan tersebut akan dilakukan bertahap oleh Dinas Perhubungan.

c. Pelaksanaan *Ramp Check*

Ramp check bertujuan untuk meningkatkan kendaraan yang berkeselamatan. Sesuai dengan kewenangannya pelaksanaan *ramp check* dilakukan pada 23 Terminal Tipe B. Selama tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan pada 20.058 kendaraan dengan hasil 16.568 kendaraan tidak terdapat pelanggaran dan 3.493 kendaraan melakukan pelanggaran yang didominasi pelanggaran administrasi.

Tabel II. 46 Pelaksanaan *Ramp Check* di Terminal Tipe B Pada Masing-Masing BPSPP Wilayah Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Kendaraan			Pelanggaran		
		Diperiksa	Tidak Melanggar	Melanggar	Administrasi	Operasional	Teknis
1	BPSPP WIL I	2237	1148	1089	1089	0	0
a.	Penggaron	701	700	1	1	0	0
b.	Bintoro	750	0	750	750	0	0
c.	Purwodadi	786	448	338	338	0	0
2	BPSPP WIL II	1261	1069	195	183	0	18
a.	Gagak Rimang	1261	1069	195	183	0	18
3	BPSPP WIL III	6.230	4.972	1.258	1.256	0	2
a.	Terminal Sukoharjo	360	284	76	76	0	0
b.	Terminal Jatisrono	1.080	894	186	186	0	0
c.	Terminal Baturetno	84	78	6	6	0	0
d.	Terminal Purwantoro	566	351	215	215	0	0
e.	Terminal Penggung	1.325	865	460	458	0	2
f.	Terminal Tegalgede	155	11	144	144	0	0
g.	Terminal Pilangsari	1.395	1.391	4	4	0	0
h.	Terminal Tawangmangu	293	242	51	51	0	0
i.	Terminal Pracimantoro	639	575	64	64	0	0
j.	Kartasura	333	281	52	52	0	0
4	BPSPP WIL IV	6.830	6.319	511	329	-	182
a.	Terminal Drs. Prayitno	3.057	2.783	274	191	-	83
b.	Terminal Madureso	2.952	2.729	223	138	-	85
c.	Terminal Kutoarjo	821	807	14	-	-	14
5	BPSPP WIL V	3.353	2.873	480	148	309	23
a.	Terminal Purbalingga	1.822	1.557	265	39	217	9
b.	Terminal Banjarnegara	1.531	1.316	215	109	92	14
6	BPSPP WIL VI	3500	3060	440	215	101	124
a.	Kajen	871	747	124	60	23	41
b.	Banyuputih	895	733	162	79	34	49
c.	Tanjung	874	804	70	36	25	9
d.	Bumiayu	860	776	84	40	19	25
TOTAL 1 sd 6		20.058	16.568	3.493	3.072	101	326

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

d. Peningkatan jumlah kendaraan laik jalan

Untuk meningkatkan keselamatan transportasi jalan, diperlukan upaya peningkatan jumlah kendaraan yang laik jalan melalui pelaksanaan uji berkala. Kegiatan uji laik jalan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sementara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam memberikan pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi peningkatan kapasitas penyelenggaraan uji berkala di daerah. Semakin banyak Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji, semakin tinggi pula tingkat kepastian keselamatan operasional kendaraan di jalan. Oleh karena itu, peningkatan jumlah kendaraan yang memenuhi standar kelaikan jalan menjadi salah satu indikator penting dalam

upaya mewujudkan sistem transportasi yang aman, andal, dan berkelanjutan di Jawa Tengah.

Tabel II. 47 Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Tahun 2024 di Jawa Tengah

No.	Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	KBWU Total (Yang Diuji)	KBWU Yang Lulus Uji
BPSPP Wil I			
1.	Kota Semarang	65.138	65.138
2.	Kab. Semarang	16.360	16.101
3.	Kota Salatiga	5.649	4.929
4.	Kab. Demak	11.403	10.861
5.	Kab. Grobogan	10.082	10.082
6.	Kab. Kendal	8.133	8.038
BPSPP Wil II			
7	Kab. Kudus	9.730	9.715
8	Kab. Pati	9.599	9.555
9	Kab. Rembang	8.663	8.494
10	Kab. Blora	3.392	3.392
11	Kab. Jepara	16.111	15.528
BPSPP Wil III			
12	kab. Boyolali	7.514	7.223
13	Kota Surakarta	23.549	23.534
14	Kab. Sukoharjo	12.864	12.549
15	Kab. Wonogiri	12.082	12.014
16	Kab. Klaten	15.015	14.209
17	Kab. Sragen	12.136	12.122
18	Kab. Karanganyar	13.785	13.738
BPSPP Wil IV			
19	Kota Magelang	7.244	6.449
20	Kab. Magelang	19.156	19.156
21	Kab. Kebumen	8.060	8.060
22	Kab. Purworejo	5.554	5.267
23	Kab. Temanggung	8.266	8.085
BPSPP Wil V			
32.	Kab. Wonosobo	11.098	10.286
33.	Kab. Banyumas	13.886	11.606
34.	Kab. Cilacap (Majenang)	1.045	1.045
35.	Kab. Cilacap	11.951	11.776
36.	Kab. Purbalingga	12.455	11.933
37.	Kab. Banjarnegara	12.914	12.914
BPSPP Wil VI			
7.	Kab. Batang	7.520	7.474
8.	Kab. Pekalongan	6.106	6.048
9.	Kota Pekalongan	7.019	6.963
10.	Kota Tegal	6.421	6.421
11.	Kab. Tegal	18.131	17.876
12.	Kab. Pemalang	11.889	11.554
13.	Kab. Brebes (Pagojengan)	4.002	3.996
14.	Kab. Brebes (Kluwut)	12.736	12.732
Jumlah		446.658	436.863

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

e. Penanganan perlintasan sebidang

Perlintasan kereta api sebidang adalah perpotongan antara jalur kereta api dengan bangunan lain (pada umumnya jalan raya) yang dibuat sebidang. Perlintasan sebidang masih menjadi salah satu titik kritis yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 83 kasus kecelakaan di perlintasan

sebidang yang berada dalam wilayah kewenangan DAOP 4 Semarang, DAOP 5 Purwokerto, dan DAOP 6 Yogyakarta. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlintasan sebidang masih menjadi permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan. Sebagai respons, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menjadikan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang sebagai salah satu prioritas strategis. Upaya yang dilakukan mencakup penyediaan dan pemenuhan fasilitas pengaman perlintasan hingga peningkatan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah kabupaten/kota dan PT KAI. Langkah ini sejalan dengan Rencana Aksi Keselamatan Jalan yang menargetkan penurunan angka kecelakaan lalu lintas, sekaligus mendukung visi pembangunan transportasi Jawa Tengah yang aman, selamat, dan berkelanjutan.

Provinsi Jawa Tengah terdapat 1.369 perlintasan jalan dengan kereta api, Sebagian besar perlintasan tersebut berada di ruas jalan kabupaten/kota sebanyak 1.303 perlintasan, adapun rincian perlintasan di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel II. 48 Data Perlintasan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Status Jalan	Jumlah Perlintasan Dengan Rel Kereta Api		Perlintasan Tidak Sebidang				Perlintasan Sebidang			
				Fly Over		Underpass		Berpalang Pintu & Dijaga		Tidak Ada Palang Pintu	
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
1.	Nasional	38	2.78%	10	41.67%	6	7.06%	22	5.93%	1	0.11%
2.	Provinsi	27	1.83%	1	4.17%	1	0.00%	24	6.47%	1	0.11%
3.	Kab/Kota	1304	95.39%	13	54.17%	79	92.94%	325	87.60%	887	99.78%
Jumlah		1369	100%	24	100%	85	100%	371	100	889	100%

Sumber : BTP Jawa Bagian Tengah, 2025

Perlintasan Kereta Api yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 27 perlintasan, terdiri dari 25 perlintasan sebidang dan 2 perlintasan tidak sebidang yaitu di Jalan A. Yani Surakarta (*Underpass*) dan di Jalana Semarang Godong (*Fly Over Ganefo*). Adapun data perlintasan Kereta Api sebidang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel II. 49 Data Perlintasan Di Ruas Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Jalan / Daerah	LHR	JPL	KM	Kab / Kota	Kelengkapan	Fasilitas Keselamatan	EWS
	Perlintasan Sebidang							
	DAOP 3 Cirebon							
1.	Ketanggungan - Kersana - Bantarsari	1.361	263	264+138	Kab. Brebes	Berpalang Pintu	Faskes : WL, Rambu (2016)	Belum Ada
	DAOP 4 Semarang							
2.	Wiradesa - Kajen	588	115	94+425	Kab. Pekalongan	Berpalang Pintu	Faskes : WL, Rambu (2016)	Belum Ada

No	Jalan / Daerah	LHR	JPL	KM	Kab / Kota	Kelengkapan	Fasilitas Keselamatan	EWS
3.	Tegowanu - Tanggung - Kapung	738	33	23+025	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu	Faskes : WL, Rambu (2016), Marka (2023)	Ada (2018)
4.	Gubug - Kapung - Kedungjati / Bts Kab. Semarang	345	39	30+840	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu	Faskes : Rambu, (2016)	Ada (2023)
5.	Gubug - Kapung - Kedungjati / Bts Kab. Semarang	345	27	33+832	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu	Faskes : Rambu (2016)	Ada (2023)
6.	Purwodadi - Geyer / Bts Kab. Semarang	981	81	58+880	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu	Faskes : Rambu (2016) Marka (2023)	Ada (2023)
7.	Purwodadi - Geyer / Bts Kab. Semarang	981	6	006+833	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu	Faskes : Rambu (2020)	Belum Ada
8.	Singget / Bts Kab. Grobogan - Doplang - Cepu	641	99	65+202	Kab. Blora	Berpalang Pintu	Faskes : WL, Rambu, LPJU (2017)	Belum Ada
9.	Wirosari - Sulursari - Singget / Bts Kab. Blora	528	72	42+634	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu	Faskes : Rambu (2018), LPJU	Belum Ada
10.	Kuwu - Galeh / Bts Kab. Sragen	383	54	32+897	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu	Faskes : WL & Rambu (2018)	Ada (2019)
	DAOP 5 Purwokerto							
11.	Buntu - Kroya - Slarang	997	409	402+292	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu	Faskes : Rambu (2016)	Belum Ada
12.	Menganti - Kesugihan	811	2	387+325	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu	Faskes : WL dan Rambu (2018), LPJU (2018),	Ada (2018)
13.	Menganti - Kesugihan	811	464	387+966	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu	Faskes : WL dan Rambu (2017) Marka , LPJU (2018)	Ada (2018)
14.	Sidareja - Cukangleuleus	705	441	339+819	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu	Faskes : Rambu (2019)	Belum Ada
15.	Sidareja - Cukangleuleus	705	446	346+950	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu	Perlintasan Baru (Sebelumnya Jalan Kab.)	
16.	Sidareja - Cukangleuleus	705	446 H	353+612	Kab. Cilacap	Tidak Ada Pintu/Palang pintu sederhana	Faskes : Rambu (2024)	Belum Ada
17.	Kutoarjo - Ketawang	970	610	479+174	Kab. Purworejo	Berpalang Pintu	Faskes : Rambu (2024),WL (2023)	Belum Ada
	DAOP 6 Yogyakarta							
18.	Gemolong / Bts Kab. Grobogan	767	123	80+144	Kab. Sragen	Berpalang Pintu	Faskes : Rambu, Marka dan WL (2021)	Ada (2023)
19.	Gemolong / Bts Kab. Grobogan	767	138	84+703	Kab. Sragen	Berpalang Pintu	Faskes : Rambu, Marka dan WL (2021)	Ada (2023)

No	Jalan / Daerah	LHR	JPL	KM	Kab / Kota	Kelengkapan	Fasilitas Keselamatan	EWS
20.	Gemolong - Andong / Bts Kab. Boyolali	1.024	146	89+038	Kab. Sragen	Berpalang Pintu	Faskes : WL (2024) Rambu (2021) & LPJU	Belum Ada
21.	Sragen - Batujamus / Bts.Kab.Karanganyar	1.311	72	233+038	Kab. Sragen	Berpalang Pintu	Faskes : WL (2024) Rambu (2017) & LPJU	Ada (2023)
22.	Karangwuni / Bts.Prov. Diy	1.144,24	251	130+530	Kab. Klaten	Berpalang Pintu	Faskes : Rambu, Markadan WL (2021)	Ada (2021)
23.	Lingkar Timur Sukoharjo	848,93	19	14+990	Kab. Sukoharjo	Berpalang Pintu	Faskes : Rambudan Marka (2021) WL (2019)	Ada (2023)
24.	Lingkar Timur Sukoharjo	848,93	9	10+185	Kab. Sukoharjo	Berpalang Pintu	Faskes : Rambu dan Marka (2021 dan WL (2022)	Ada (2022)
25.	Palur - Karanganyar	1.939	108	256+761	Kab.Karanganyar	Berpalang Pintu	-	
	Perlintasan Tidak Sebidang							
1	Jl. A. Yani (Surakarta)		-	-	Kota Surakarta	<i>Underpass</i>		
2.	Semarang – Godong		15&17	13+257	Kab. Demak	<i>Fly Over</i>		

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang di jalan Provinsi akan diupayakan pemenuhan secara bertahap sesuai dengan Perauran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No SK. 407/AJ.401/DRJD/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Lalu Lintas di Ruas Jalan Pada Lokasi Potensi Kecelakaan di Perlintasan Sebidang dengan Kereta Api

- f. Kinerja Ruas Jalan Provinsi
- Kinerja Ruas Jalan Provinsi selain ditinjau dari aspek keselamatan lalu lintas juga ditinjau dari aspek kelancaran lalu lintas, berikut gambaran kinerja Ruas Jalan Provinsi berdasarkan V/C rasio :



Sumber : Diolah dari DPUBMCK Prov.Jateng, 2025

Gambar II. 10 Kondisi V/C Rasio Ruas Jalan Provinsi Tahun 2024

Pada RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, pada Tahun 2022 terdapat 23 ruas jalan provinsi yang rawan macet (Tingkat Pelayanan C atau VCR > 0,44). Terjadi perubahan jumlah ruas jalan yang ditangani Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya 168 ruas menjadi 173 ruas jalan, perkembangan penanganan tersebut dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II. 50 Perkembangan VCR Pada Ruas Jalan Yang Berpotensi Terjadi Kemacetan/Rawan Macet pada Tahun 2023 – 2024

No.	Ruas Jalan	Status	Fungsi	VCR 2022	VCR 2023	2024		
						KAP.	VOL.	VCR
1.	Lingkar Selatan Purwodadi	P	K2	0,67	0,45	4622,80	979	0,21
2.	Semarang - Godong	P	K2	0,65	0,81	3585,09	2270	0,63
3.	Parakan - Patean (Bts. Kab. Kendal)	P	K2	0,6	0,50	2337,72	1070	0,46
4.	Sragen - Batujamus (Bts. Kab. Karanganyar)	P	K2	0,6	0,09	3640,00	867	0,24
5.	Wonogiri - Manyaran - Blimbing	P	K2	0,6	0,23	3152,24	813	0,26
6.	Pati - Tayu	P	K2	0,58	0,16	3520,00	1238	0,35
7.	Boyolali - Klaten	P	K2	0,56	0,42	3576,32	1119	0,31
8.	Kalimanah - Purbalingga	P	K2	0,55	0,38	3635,20	1059	0,29
9.	Ketanggungan - Kersana - Bantarsari	P	K2	0,55	0,34	3386,88	1115	0,33
10.	Randudongkal - Moga	P	K2	0,54	0,53	3203,20	762	0,24
11.	Jl Kol Sugiono (Surakarta)	P	K2	0,52	0,32	3399,94	800	0,24
12.	Jl. Brijend Sudiarto (Semarang)	P	K2	0,5	0,42	7847,84	2424	0,31
13.	Godong - Purwodadi	P	K2	0,49	0,46	3585,09	2270	0,63
14.	Weleri - Patean Bts.Kab.Kendal	P	K2	0,49	0,37	3559,56	1325	0,37

No.	Ruas Jalan	Status	Fungsi	VCR 2022	VCR 2023	2024		
						KAP.	VOL.	VCR
15.	Purwodadi - Wirosari	P	K2	0,48	0,41	3458,00	1148	0,33
16.	Surakarta - Sukoharjo	P	K2	0,47	0,38	4622,80	1691	0,37
17.	Cangkiran - Ungaran (Bts. Kota Semarang)	P	K2	0,46	0,35	3523,52	923	0,26
18.	Kudus - Margoyoso (Bts. Kab. Jepara)	P	K2	0,46	0,43	4058,60	1472	0,36
19.	Temanggung - Pertigaan Bulu	P	K2	0,46	0,37	3387,15	1197	0,35
20.	Karangwuni - Cawas - Jentir	P	K2	0,45	0,43	3266,56	1080	0,33
21.	Wonogiri - Ngadirojo	P	K2	0,45	0,43	4826,00	1567	0,32
22.	Jepara - Keling (Bts. Kab. Pati)	P	K2	0,44	0,36	3386,88	1056	0,31
23.	Jatibarang - Ketanggungan	P	K2	0,43	0,32	4419,60	987	0,22

Sumber : Diolah Dari DPUPBMCK Prov. Jateng, 2025

Berdasarkan data Volume Capacity Ratio (VCR) pada ruas jalan Provinsi Jawa Tengah, terlihat bahwa hampir seluruh ruas jalan mengalami penurunan nilai VCR dari tahun 2022 ke 2023. Namun demikian, pada tahun 2024 sebagian ruas menunjukkan kecenderungan stabil bahkan mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2024, terdapat beberapa ruas jalan yang masih termasuk kategori rawan macet dengan nilai VCR di atas 0,42 sebagaimana tabel berikut :

Tabel II. 51 Indikasi Ruas Jalan Provinsi Yang Berpotensi Terjadi Kemacetan/Rawan Macet pada Tahun 2024

No.	Ruas Jalan	Kab/Kota	Kelas Jalan	KAP.	VOL.	VCR
1.	Semarang-Godong	Kab. Grobogan	II C	3585,09	2270	0,63
2.	Godong - Purwodadi	Kab. Grobogan	II C	3585,09	2270	0,63
3.	Jl. Jendral Gatot Subroto (Purworejo)	Kab. Grobogan	II B	4237,00	1972	0,47
4.	Parakan - Patean / Bts. Kab Kendal	Kab. Temanggung	II C	2337,72	1070	0,46
5.	Magelang - Kaliangkrik / Bts. Kab Wonosobo	Kab. Magelang	II C	2661,12	1223	0,46

Sumber : Diolah Dari DPUBMCK Prov. Jateng, 2025

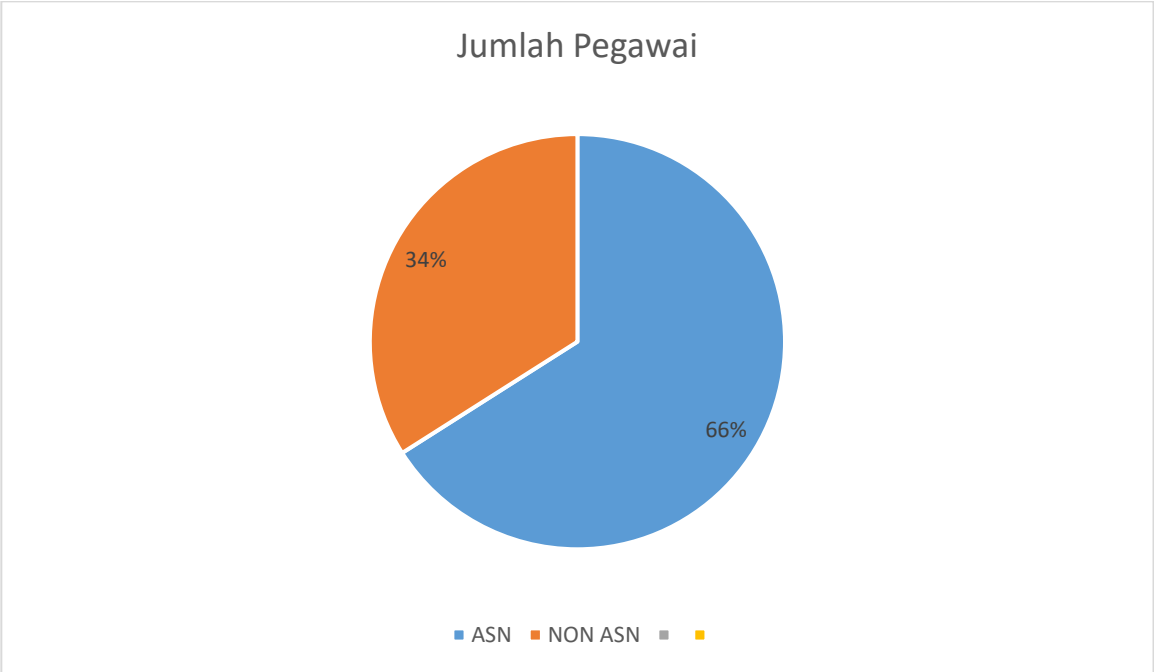
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelima ruas jalan tersebut memiliki volume lalu lintas yang mendekati kapasitas jalan, sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan. Dengan melihat tren pertumbuhan lalu lintas, maka pada tahun 2026 risiko kemacetan diperkirakan masih akan terkonsentrasi pada ruas Godong-Purwodadi dan Semarang–Godong. Hal ini menjadi perhatian strategis dalam perencanaan pembangunan transportasi daerah, mengingat kedua koridor tersebut memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah, distribusi logistik, serta pergerakan orang dan barang di Jawa Tengah.

Untuk mengantisipasi dan mengurangi permasalahan kemacetan, diperlukan pengoptimalan serta peningkatan pelayanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan,

antara lain melalui pengembangan layanan Trans Jateng dan moda angkutan umum lainnya yang terintegrasi. Upaya ini diperkuat dengan peningkatan peran simpul transportasi, khususnya terminal penumpang tipe B, agar mampu berfungsi optimal sebagai pusat pelayanan, penghubung antarangkutan, serta titik integrasi dengan moda transportasi lainnya. Selain itu, penataan manajemen lalu lintas, penyediaan fasilitas park and ride, serta pengembangan sistem transportasi ramah lingkungan juga menjadi bagian penting untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong peralihan masyarakat ke angkutan umum. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan permasalahan kemacetan dapat ditekan sekaligus mendukung terwujudnya mobilitas perkotaan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

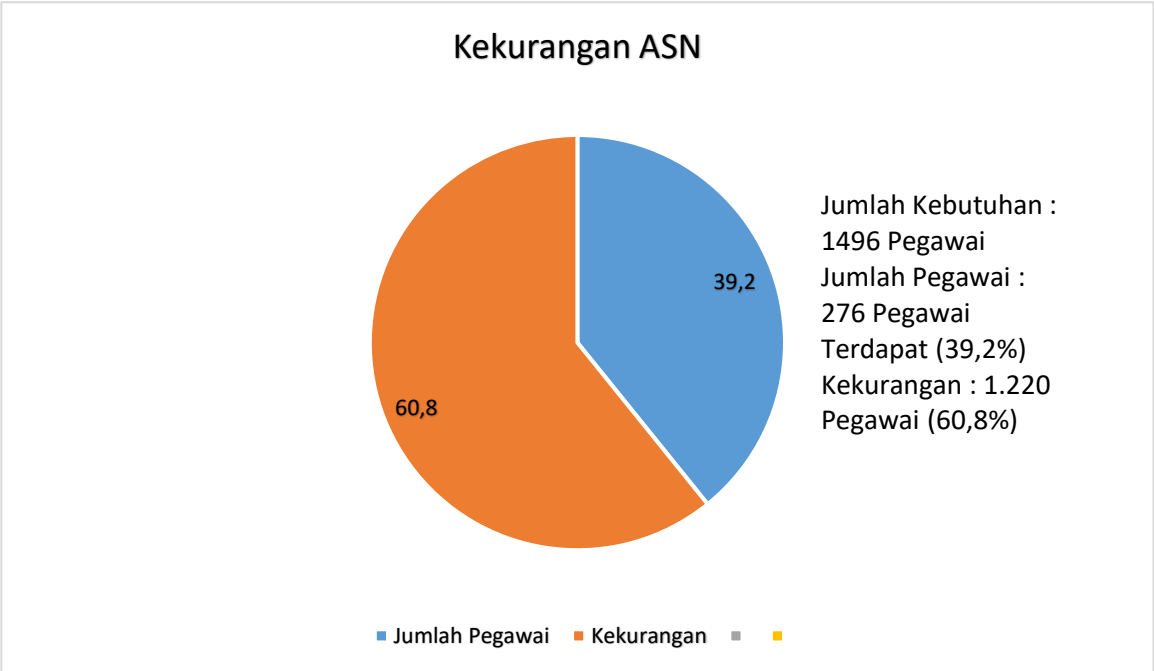
B. Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang pengampu urusan Pemerintah Daerah Bidang Perhubungan, berikut proporsi sumber daya manusia berdasar status pegawai :



Sumber : <http://simpeg.bkd.jatengprov.go.id/>, 2024
Gambar II. 11 Proporsi Pegawai ASN dan Non ASN Tahun 2024

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah saat ini terdiri dari Aparatur Sipil Negara Negeri Sipil sebanyak 276 (66%) dan Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Harian lepas) sebanyak 141 (34%). Dari seluruh pegawai tersebut masih belum pada kondisi ideal sesuai Analisis Beban Kerja yang sudah di susun, berikut perbandingan ketersediaan pegawai dengan kebutuhan ideal :



Sumber : <http://simpeg.bkd.jatengprov.go.id/>, 2024

Gambar II. 12 Proporsi Jumlah dan Kebutuhan Pegawai

Sesuai Analisis Beban Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah kondisi ideal membutuhkan 1.496 pegawai, namun kondisi saat ini hanya terdapat 39,2% dari total kebutuhan pegawai yang terpenuhi (276 ASN dan 141 Non ASN) dimana setiap tahunnya mengalami pengurangan yang diakibatkan purna tugas.

Tabel II. 52 Jumlah Pegawai (PNS) Menurut Unit Kerja

No	SUB UNIT	JPT	ES 3	ES 4	PELAKSANA	CPNS	JF	TOTAL
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	3	33	-	6	43
3	Bidang Lalu Lintas Jalan	-	1	-	7	4	4	16
4	Bidang Angkutan jalan	-	1	-	9	1	3	14
5	Bidang Jaringan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	-	1	-	8	2	3	14
6	Bidang Pelayaran	-	1	-	6	-	2	9
7	Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	-	1	3	18	-	2	24
8	Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	-	-	2	16	-	-	18
9	Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	-	1	2	54	-	3	60
10	Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	-	1	2	13	-	2	18
11	Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	-	-	2	16	-	2	20
12	Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	-	1	2	18	-	2	23
13	Balai Transportasi Jawa Tengah	-	1	3	15	-	-	19
	JUMLAH	1	10	19	213	7	29	279

Sumber : <http://simpeg.bkd.jatengprov.go.id/>, 2024

Data jumlah pegawai berdasarkan unit kerja pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, unit kerja dengan jumlah pegawai paling banyak Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A sebanyak 70 Pegawai dikarenakan balai tersebut mengapu 10 Terminal Penumpang Tipe B.

Tabel II. 53 Jumlah Pegawai (ASN) Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1	SD	5	
2	SMP	8	
3	SMA	79	
4	D I	-	
5	D II	-	
6	D III	51	
7	D IV	20	
8	S 1	72	
9	S 2	40	
10	S 3	1	
	Jumlah	276	

Sumber : <http://simpeg.bkd.jatengprov.go.id/>, 2024

Data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, tingkat pendidikan dengan jumlah pegawai paling banyak SMA sebanyak 79 Pegawai utamanya tersebar di Terminal Penumpang Tipe B sebagai Opetaror Terminal dan Juru Pungut Retribusi.

Tabel II. 54 Rincian Tenga Teknis

No	Tenaga Teknis	Jumlah
1	Tenaga Teknis Operator Layanan (Petugas Terminal)	36
2	Tenaga Teknis Kebijakan	6
3	Tenaga Pengadministrasi Perkantoran	29
4	Tenaga Pengawas Transportasi Darat	10
5	Tenaga Pengelola Layanan Operasional	7
6	Tenaga Pengolah Data dan Informasi	9
7	Tenaga Penyusun Materi Hukum (Sekretariat)	0
8	Tenaga Petugas Transportasi Darat (Terminal)	1
	Jumlah	98

Sumber : Laporan Tahunan, 2025

C. Kondisi Aset/Modal Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Jumlah Asset/Modal Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar Rp. 480.099.457.652,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II. 55 Rincian Aset/Modal Dinas Perhubungan Tahun 2024

No. Urut	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Keterangan
1.	1.3.1.01	Tanah	98	194.148.233.513	
2.	1.3.2.01	Alat Besar	12	1.967.974.500	- Aplikator Marka - Lift - Genset - Pompa Air
3.	1.3.2.02	Alat Angkutan	116	28.507.853.326	
4.	1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	118	1.588.566.200	
5.	1.3.2.04	Alat Pertanian	-	-	

No. Urut	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Keterangan
6.	1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.686	8.295.833.944	
7.	1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	139	1.671.830.873	
8.	1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	6	8.150.000	
9.	1.3.2.08	Alat Laboratorium	-	-	
10.	1.3.2.09	Alat Persenjataan	5	3.254.725	
11.	1.3.2.10	Alat Komputer	313	4.595.028.222	
12.	1.3.2.11	Alat Eksplorasi	-	-	
13.	1.3.2.12	Alat Pengeboran	-	-	
14.	1.3.2.13	Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian	-	-	
15.	1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	-	-	
16.	1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	-	-	
17.	1.3.2.16	Alat Peraga	-	-	
18.	1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	-	-	
19.	1.3.2.18	Rambu Rambu	1.861	30.502.773.356	
20.	1.3.2.19	Peralatan Olahraga	-	-	
21.	1.3.3.01	Bangunan Gedung	794	136.037.247.668	
22.	1.3.3.02	Monumen	-	-	-
23.	1.3.3.03	Bangunan Menara	1	386.581.815	
24.	1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	6	974.927.508	
25.	1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	26	32.672.423.373	
26.	1.3.4.02	Bangunan Air	13	4.702.597.675	
27.	1.3.4.03	Instalasi	362	10.287.642.897	
28.	1.3.4.04	Jaringan	1.044	20.703.045.136	
29.	1.3.5.01	Buku Perpustakaan	-	-	
30.	1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	16	378.775.000	Alat Musik
31.	1.3.5.03	Hewan	-	-	
32.	1.3.5.04	Biota Perairan	-	-	
33.	1.3.5.05	Tanaman	42	39.465.000	Tanaman di Terminal Drs. Prayitno Magelang
34.	1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	-	-	
35.	1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	
36.	1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	15	2.627.252.921	
	Total Aset		6.673	480.099.457.652	

Sumber : Laporan Tahunan, 2025

Dari data tersebut aset/modal Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terbesar di jenis aset/modal Tanah sebesar Rp. 480.099.457.652,-.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan perhubungan merupakan urusan daerah wajib bukan pelayanan dasar. Berikut tingkat capaian kinerja pelayanan urusan perhubungan yang diukur sampai dengan Tahun 2024 :

Tabel II.56 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	PERSENTASE PELAYANAN TRANSPORTASI ANTAR KAWASAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH	%				34,45	42,37	49,87	59,50		30,23	37,08	43,61	58,96		87,75	87,51	87,45	99,09	
A.1	PERSENTASE LAYANAN JARINGAN DISTRIBUSI TRANSPORTASI	%				42,12	49,08	54,46	60,38		37,84	43,38	54,98	61,37		89,84	88,39	100,95	101,64	
A.1.1	Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	%				4,87	5,34	5,49	5,68		4,72	5,14	5,49	5,68		96,92	96,25	100,00	99,98	
A.1.2	Persentase penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum	%				82,06	86,00	90,14	94,45		82,53	85,63	124,87	94,45		100,57	99,57	138,53	100,00	
A.1.3	Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%				39,56	41,02	42,34	43,21		39,12	41,46	42,77	43,50		98,89	101,07	101,02	100,67	
A.1.4	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%				64,62	65,17	65,96	66,43		64,47	65,88	66,43	66,59		99,77	101,09	100,71	100,24	
A.1.5	Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	%				23,81	33,33	38,10	42,86		19,05	28,57	28,57	42,86		80,01	85,72	74,99	99,99	
A.1.6	Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan	%				21,88	31,25	37,50	43,75		10,94	21,88	28,13	43,75		50,00	70,02	75,01	100,00	
A.1.7	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%				50,15	51,18	52,00	52,51		49,74	51,59	52,41	52,72		99,18	100,80	100,79	100,40	
A.1.8	Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%				49,17	50,28	51,20	52,03		48,52	50,28	51,20	52,21		98,68	100,00	100,00	100,35	
A.1.9	Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%				78,08	78,53	79,17	79,53		77,81	79,26	79,71	79,89		99,65	100,93	100,68	100,45	
A.1.10	Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%				82,49	82,87	83,09	83,55		82,34	83,77	83,92	84,23		99,82	101,09	101,00	100,81	
A.1.11	Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis	%				40,00	60,00	80,00	100,00		20,00	33,33	60,00	100,00		50,00	55,55	75,00	100,00	
A.1.12	Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	%				35,82	39,55	41,42	43,28		43,28	47,39	49,25	51,12		120,83	119,82	118,90	118,11	
A.1.13	Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa	%				65,41	73,26	78,39	87,79		59,38	60,67	78,39	87,79		90,78	82,81	100,00	100,01	
A.2	PERSENTASE PEMENUHAN FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI	%				21,22	31,36	41,82	51,45		12,85	21,18	29,19	48,83		60,56	67,54	69,80	94,91	
A.2.1	Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	%				21,42	29,14	42,85	52,34		16,93	25,06	30,03	35,97		79,04	86,00	70,08	68,73	
A.2.2	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%				20,00	30,00	40,00	50,00		20,00	35,00	40,00	55,00		100,00	116,67	100,00	110,00	
A.2.3	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%				30,77	46,15	61,54	76,92		38,46	53,85	61,54	84,62		124,99	116,68	100,00	110,00	

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.2.4	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%				12,50	18,75	25,00	31,25		12,50	21,88	28,13	37,50		100,00	116,69	112,52	120,00	
A.2.5	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%				25,00	37,50	50,00	62,50		31,25	43,75	50,00	68,75		125,00	116,67	100,00	110,00	
A.2.6	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%				15,38	23,08	30,77	38,46		7,69	19,23	23,08	42,31		50,00	83,32	75,01	110,00	
A.2.7	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%				13,79	20,69	27,59	34,48		13,79	20,69	27,59	41,38		100,00	100,00	100,00	120,01	
A.2.8	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api	%				13,64	27,27	36,36	45,45		4,55	9,09	17,88	45,45		33,36	33,33	49,17	100,01	
A.2.9	Persentase jumlah Abdi Yasa yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	%				7,16	10,84	14,63	18,52		3,89	3,89	8,90	12,99		54,33	35,89	60,83	70,15	
A.2.10	Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang	%				37,50	50,00	62,50	75,00		12,50	25,00	37,50	75,00		33,33	50,00	60,00	100,00	
A.3	PERSENTASE OPERASIONAL ANGKUTAN UMUM AGLOMERASI YANG NYAMAN DAN HANDAL	%				40,00	46,67	53,33	66,67		40,00	46,67	46,67	66,67		100,00	100,00	87,51	100,00	
A.3.1	Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	%				21,82	31,60	33,55	34,85		27,36	31,92	31,92	36,48		125,39	101,01	95,14	104,68	
B	NILAI REFORMASI BIROKRASI,93	Angka				67,73	70,33	72,93	75,50		77,66	78,28				114,66	111,30			
B.1	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	Angka				65,00	70,00	75,00	80,00		78,00	79,25	79,75	80,00		120,00	113,21	106,33	100,00	
B.1.1	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
B.1.2	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
B.1.3	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
B.1.4	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
B.1.5	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
B.1.6	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
B.1.7	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
B.1.8	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
B.2	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	Angka				70,45	70,65	70,85	71,00		77,31	77,31	78,18	78,18		109,74	109,43	110,35	110,11	
B.2.1	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
A	INDEKS PELAYANAN TRANSPORTASI									6.066					6.12					101

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.1	RASIO KEJADIAN KECELAKAAN TRANSPORTASI DALAM 1 JUTA KEBERANGKATAN									16.06 7					16.10					100
A.1.1	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A									0.81					0.83					102
A.1.2	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B									0.81					0.83					102
A.1.3	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A									0.81					0.82					101
A.1.4	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A									0.81					0.83					102
A.1.5	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A									0.81					0.82					101
A.1.6	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B									0.81					0.82					101
A.1.7	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A									0.98					0.98					100
A.1.8	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B									0.97					0.97					100
A.1.9	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A									0.97					0.97					100
A.1.10	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A									0.97					0.97					100
A.1.11	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A									0.97					0.97					100
A.1.12	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B									0.98					0.98					100
A.1.13	Rasio kendaraan laik jalan di jawa tengah									0.981					0.99					101
A.1.14	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan									0.47					0.38					81
A.1.15	Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai									0.2					0.20					100
A.1.16	Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan									0.04					0.04					100
A.2	RASIO KONEKTIVITAS PROVINSI									0.385					0.40					104
A.2.1	Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis									0.5					0.50					100
A.2.2	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A									0.2					0.22					110

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.2.3	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B									0.01					0.01					100
A.2.4	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A									0.24					0.26					108
A.2.5	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A									0.23					0.25					109
A.2.6	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A									0.21					0.21					100
A.2.7	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B									0.17					0.17					100
A.2.8	Rasio konektivitas perkotaan									0.494					0.51					103
A.2.9	Rasio pemanfaatan terminal									0.218					0.22					101
A.2.10	Rasio trayek angkutan jalan									0.51					0.51					100
A.2.11	Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP									0.31					0.33					106
A.3	ON TIME PERFORMANCE LAYANAN TRANSPORTASI									83.21					84.60					102
A.3.1	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum									65.38					65.45					102
A.3.2	Persentase Perpindahan moda angkutan umum									51					52.22					102
B	INDEKS REFORMASI BIROKRASI (PERANGKAT DAERAH)									78.28					85.09					109
B.1	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT									80.25					81.50					102
B.1.1	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A)									100					100.00					100
B.1.2	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B)									100					100.00					100
B.1.3	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A)									100					100.00					100
B.1.4	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A)									100					100.00					100
B.1.5	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A)									100					100.00					100
B.1.6	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B)									100					100.00					100

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B.1.7	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)									100					100.00					100
B.1.8	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat)									100					100.00					100
C.1	Indeks Manajemen Risiko									3.2					3.03					95
C.1.1	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah									100					100.00					100

Sumber : Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2024

Interpretasi capaian kinerja pelayanan terhadap kondisi akhir dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Pelayanan Dengan Status Tercapai

1. Capaian kinerja indikator tujuan

Tingkat capaian indikator tujuan nilai reformasi birokrasi sampai dengan 2024 terhadap target 2024 pada renstra sebesar 109% dikarenakan adanya peningkatan kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu capaian Indeks Pelayanan Transportasi mencapai 101%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan layanan Trans Jateng dengan penambahan armada Trans Jateng.

2. Capaian kinerja indikator sasaran

a. Nilai Kepuasan Masyarakat

Indikator Nilai kepuasan masyarakat diperkirakan tercapai karena sesuai dengan progres nilai IKM tahun sebelumnya selalu meningkat dimana IKM pada tahun 2024 sebesar 81,50 dari target 80,25 sementara target akhir renstra adalah sebesar 80,75. Hal yang dapat mendorong peningkatan IKM pada tahun 2024 diantaranya Pembangunan Terminal Kutoarjo dengan fasilitas UMKM, Peningkatan Terminal Purwodadi, serta rehabilitasi Terminal Penggaron dengan fasilitas Pojok Baca selain itu terdapat Pembangunan Halte Trans Jateng sebanyak 6 Unit dengan fasilitas ramah disabilitas.

b. Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan

Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan didukung oleh 16 Indikator Program yaitu Rasio hasil rekomendasi ramp check Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan I-VI, Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan I-VI, Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah dan Prasarana Perhubungan Wilayah I-VI, Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai dan Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan.

c. Rasio konektivitas provinsi

Rasio konektivitas provinsi di dukung oleh 11 Indikator Program yaitu Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan I-VI, Rasio Implementasi Simpul dan jaringan transportasi strategis, rasio konektivitas perkotaan, rasio pemanfaatan terminal, rasio trayek angkutan jalan, serta rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP.

d. On time performance layanan transportasi

Tercapainya Indikator On time performance mencapai angka 84,60 dari target renstra pada tahun 2024 83,21 atau dengan capaian sebesar 102 %. Hal yang dapat menunjang tercapainya indikator tersebut antara lain karena meningkatnya moda shifting yaitu perpindahan orang yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi menjadi menggunakan angkutan umum masal Trans Jateng.

3. Capaian kinerja indikator program

Indikator program pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang tingkat capaian sampai dengan Tahun 2020 dalam kategori tercapai :

a. Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah pada Kantor Dinas Perhubungan, Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I sampai dengan VI dan Balai Transportasi Jawa Tengah

Tingkat capaian indikator program Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah pada Kantor Dinas Perhubungan, Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I sampai dengan VI dan Balai Transportasi Jawa Tengah sebesar 100,00% dikarenakan semua aktivitas yang bersifat administrasi dilaksanakan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

b. Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD

Tingkat capaian indikator program ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD sebesar 100,00% dikarenakan semua aktivitas yang bersifat administrasi dilaksanakan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

c. Rasio hasil rekomendasi ramp check (6 Indikator pada masing Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah)

Realisasi Indikator pada tahun 2024 adalah sebagai berikut : Rasio hasil rekomendasi ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A tercapai 0,88 dari target 0,82 dengan tingkat capaian 101 % sementara target akhir renstra adalah 0,86 dan diperkirakan tercapai, Rasio hasil rekomendasi ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B tercapai 0,83 dari target 0,81 dengan tingkat capaian 102 % sementara target akhir renstra adalah 0,87 dan diperkirakan tercapai, Rasio hasil rekomendasi ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A tercapai 0,83 dari target 0,81 dengan tingkat capaian 102 % sementara target akhir renstra adalah 0,87 dan diperkirakan tercapai, Rasio hasil rekomendasi ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A tercapai 0,83

% dari target 0,81 dengan tingkat capaian 102 % sementara target akhir renstra adalah 0,87 dan diperkirakan tercapai, Rasio hasil rekomendasi ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B tercapai 0,82 dari target 0,81 dengan tingkat capaian 101 % sementara target akhir renstra adalah 0,87 diperkirakan tercapai dan Rasio hasil rekomendasi ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A tercapai 0,82 dari target 0,81 dengan tingkat capaian 101 %;

- d. Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani

Realisasi Indikator pada tahun 2024 Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A tercapai 0,97 dari target renstra 0,97 dengan tingkat capaian 100 %. Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B tercapai 0,97 dari target renstra 0,97 dengan tingkat capaian 100 %, Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A tercapai 0,98 dari target renstra 0,98 dengan tingkat capaian 100 %, Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A tercapai 0,83 dari target renstra 0,81 dengan tingkat capaian 100 %, Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B tercapai 0,81 dari target renstra 0,82 dengan tingkat capaian 101 % Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A tercapai 0,97 dari target renstra 0,97 dengan tingkat capaian 100 %. Tingkat capaian Rasio Kejadian Kecelakaan yang tertangani rata2 diatas 100% hal ini dikarenakan penanganan Daerah Rawan Kecelakaan di ruas jalan provinsi pada tahun 2024.

- e. Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP

Realisasi Indikator pada tahun 2024 Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP tercapai 0,33 % dari target 0,45 % dengan tingkat capaian 84,44 ;

- f. Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis

Realisasi Indikator pada tahun 2024 Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis tercapai 0,50 dari target 0,50 dengan tingkat capaian 100 %.

g. Rasio konektivitas perkotaan;

Realisasi Indikator pada tahun 2024 Rasio konektivitas perkotaan tercapai 0,51 % dari target 0,494 % dengan tingkat capaian 105 %. Tingkat capaian pada tahun 2024 dikarenakan terdapat kajian angkutan aglomerasi di wilayah pengembangan petanglong serta penambahan jumlah armada untuk Rute Semarang-Kendal-Weleri sebanyak 2 unit dan Surakarta Wonogiri sebanyak 1 Unit;

h. Rasio pemanfaatan terminal

Realisasi Indikator pada tahun 2024 Rasio pemanfaatan terminal tercapai 0,22 dari target 0,218 dengan tingkat capaian 101 %.

i. Persentase penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum

Realisasi Indikator pada tahun 2024 Persentase penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum tercapai 65,45 % dari target 65,38 % diperkirakan tercapai/melebihi karena adanya program mudik grtais yang diadakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta berbagai instansi baik Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta dan BUMN;

j. Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan

Realisasi Indikator pada tahun 2024 Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan tercapai 0,04 dari target 0,04 dengan tingkat capaian 100 % target akhir renstra diperkirakan tercapai karena adanya pemenuhan perlengkapan jalan pada perlintasan sebidang sesuai dengan standart pemenuhan perlengkapan jalan pada perlintasan sebidang;

k. Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai

Realisasi Indikator pada tahun 2024 Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan tercapai 0,20 dari target 0,20 dengan tingkat capaian 100 % sementara target akhir renstra diperkirakan tercapai karena adanya penyediaan sarana prasarana penyeberangan seperti life jacket dan rambu dermaga sungai.

Tabel II. 56 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp. 000)					Anggaran pada Tahun (Rp. 000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PENDAPATAN	-	-	-	-		8.570.479	13.831.164	22.321.786	26.400.000	27.000.00	11.863.807	14.612.292	26.898.579	26.400.000	36.928.928
Retribusi Daerah						3.819.085	2.308.620	3.521.786	5.400.000	2.162.150	3.141.613	1.995.094	4.419.443	5.400.000	4.440.420
Lain-Lain PAD yang Sah						4.751.394	11.522.544	18.800.000	21.000.000	24.837.850	8.722.194	12.617.198	22.479.136	21.000.000	32.488.508
BELANJA	318.569.963	307.679.528	300.737.886	309.410.034	250.243.346	94.761.827	204.112.865	170.418.443	200.605.355	193.075.157	90.122.465	194.619.417	167.478.842	196.666.609	189.906.926
Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	272.428.026	251.800.309	228.442.758	241.882.204	172.333.238	74.549.162	141.868.874	109.379.027	133.915.258	129.071.703	71.222.940	135.407.122	108.113.208	132.067.125	127.806.638
Pengelolaan Pelayaran	5.029.000	13.806.000	29.933.000	23.860.000	1.704.100	1.523.263	1.537.733	1.936.216	2.586.116	459.100	1.476.760	1.306.923	1.627.573	2.412.386	423.541
Pengelolaan Perkeretaapian	3.809.000	4.409.000	3.809.000	3.909.000	3.137.583	1.706.272	1.842.000	1.665.024	3.254.940	1.268.866	1.660.510	1.802.048	1.652.693	3.240.744	1.262.848
Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	37.303.937	37.664.219	38.553.128	39.758.830	73.068.425	16.983.130	58.864.258	57.438.176	60.849.041	62.275.488	15.762.255	56.103.324	56.085.367	58.946.354	60.413.896

Sumber : Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Tabel II. 57 Rasio Realsisasi Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Uraian **)	Rasio Realsisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
PENDAPATAN	138,43	105,65	120,50	100,00	136,77	13,65	13,57
Retribusi Daerah	82,26	86,42	125,49	100,00	205,37	(15,33)	5,85
Lain-Lain PAD yang Sah	183,57	109,50	119,57	100,00	130,80	16,17	14,63
BELANJA	95,10	95,35	98,28	98,04	98,36	10,18	10,51
Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	95,54	95,45	98,84	98,62	99,02	8,45	8,85
Pengelolaan Pelayaran	96,95	84,99	84,06	93,28	92,25	(46,36)	(49,73)
Pengelolaan Perkeretaapian	97,32	97,83	99,26	99,56	99,53	(6,89)	(6,30)
Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	92,81	95,31	97,64	96,87	97,01	14,55	14,78

Sumber : Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dikatakan baik pada Tahun 2024 dengan rasio 98,36% dengan rincian pada Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) rasio antara realisasi dan anggaran Tahun 2024 sebesar 99,02%, Program Pengelolaan Pelayaran pada Tahun 2024 sebesar 92,25%, Program Pengelolaan Perkeretaapian pada Tahun 2024 sebesar 99,53%, Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2024 sebesar 97,01%. Faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan tersebut karena prosedur/mekanisme pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Perhubungan berjalan dengan baik, jumlah personil serta kualitas personil yang cukup dengan adanya personil Non PNS yang sesuai dengan kebutuhan serta kompetensi sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, selain itu progress pelaksanaan keempat program tersebut pada Tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan dikatakan kurang baik pada Tahun 2020 pada Tahun 2020 dengan rasio 95,10% dengan rincian pada Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) rasio antara realisasi dan anggaran Tahun 2022 sebesar 95,54%, Program Pengelolaan Pelayaran pada Tahun 2022 sebesar 96,95%, Program Pengelolaan Perkeretaapian pada Tahun 2022 sebesar 97,32%, Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2022 sebesar 92,81%. Faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan tersebut dikarenakan anggaran pada Tahun 2020 dialihkan untuk mendukung penanganan darurat pandemi Covid-19 di Jawa Tengah, salah satu kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan yaitu pelaksanaan posko pengendalian di pintu masuk Jawa Tengah pada 17 lokasi di perbatasan Jawa Tengah dan implementasi Bus Sehat Trans Jateng. Dengan demikian berimplikasi terhadap target kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

2.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Perhubungan Provinsi Jawa Tengah pada Bab II, berikut Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi Internal maupun Eksternal dan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II. 58 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya aksesibilitas dan konektifitas antar wilayah di Jawa Tengah		
		Masih Kurangnya jaringan trayek angkutan jalan	

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Masih rendahnya jumlah total angkutan taksi berijin
			Masih kurangnya jumlah total angkutan barang berijin
			Masih kurangnya Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin
			Belum Optimalnya Trayek yang Ditetapkan Pemutakhiran Tarif
			Masih rendahnya jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan
			Belum semuanya Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		Belum sepenuhnya jumlah penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru yang menggunakan angkutan umum	
			Belum sepenuhnya penumpang angkutan umum yang terlayani
		Masih rendahnya jumlah kunjungan bus di terminal tipe B	
			Belum semua Terminal Tipe B sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal)
		Masih kurangnya implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	
			Masih kurangnya Implementasi Dokumen RIJLLAJ
		Masih kurangnya jumlah pengunjung terminal tipe B	

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Belum semua terminal Tipe B dalam kondisi baik
		Belum optimalnya Jumlah Penduduk yang Terlayani Trans Jateng	
			Masih kurangnya Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) yang Terpenuhi
			Belum optimalnya jumlah penumpang terlayani angkutan umum (Trans Jateng) di kawasan aglomerasi perkotaan
		Masih kurangnya Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	
			Belum sepenuhnya dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasarkan tingkatannya
			Masih rendahnya Fasilitas Pelabuhan SDP yang terpenuhi
			Masih rendahnya perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang diawasi
			Masih rendahnya Berth occupancy ratio
2	Masih tingginya kecelakaan perjalanan transportasi		
		Masih rendahnya Jumlah ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	
			Belum optimalnya penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
			Masih rendahnya jumlah rekomendasi hasil Forum LLAJ

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Masih kurangnya kepatuhan pelaksanaan rekomendasi andalalin dibandingkan dengan jumlah rekomendasi andalalin yang dikeluarkan
			Masih kurangnya pemenuhan perlengkapan jalan terpasang
		Masih terjadi kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang belum tertangani	
			Masih rendahnya rehabilitasi DRK
		Belum sepenuhnya kendaraan laik jalan di jawa tengah	
			Belum sepenuhnya Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah
		Belum sepenuhnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti	
			Belum sepenuhnya Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check
		Masih rendahnya perlintasan sebidang yang terpenuhi perlengkapan jalan sesuai standar	
			Masih rendahnya perlintasan KA yang dilengkapi prasarana penunjang sesuai tingkat pemenuhan per jenis Fasilitas keselamatan
3	Belum optimalnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan kualitas pelayanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Belum optimalnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	
			Belum optimalnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah
			Belum optimalnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
			Belum optimalnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah
			Belum optimalnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah
			Belum optimalnya milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset
			Belum optimalnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah
			Belum optimalnya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
4	Belum optimalnya pengelolaan risiko pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah		
		Kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah belum optimal	
			Kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah belum optimal

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Berbagai kondisi *Internal* dan *Eksternal* yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Kondisi *eksternal*

tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah meliputi :

Tantangan dan peluang yang dihadapi baik dalam kondisi internal maupun eksternal dalam perhubungan di bidang lalu lintas, angkutan jalan, dan perkeretaapian sebagai berikut.

Tabel II. 59 Analisa SWOT Sektor Perhubungan Darat

	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
Kondisi Internal	- Adanya payung hukum yang kuat diantaranya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, penyelenggaraan angkutan sewa khusus di wilayah operasi dalam Provinsi Jawa Tengah (Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 tahun 2018 terkait jasa transportasi online/daring), sistem manajemen informasi yang terintegrasi, rencana tata ruang, dan peraturan lain yang terkait; - Tersedianya layanan transportasi umum aglomerasi perkotaan (Bus Trans Jateng) dengan tarif terjangkau; - Fasilitas keselamatan menjadi salah satu prioritas dalam agenda rencana strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. - Pemenuhan fasilitas keselamatan perlintasan sebidang sesuai dengan standar menjadi prioritas dalam renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai dukungan terhadap jalur-jalur distribusi - Petugas JPL sudah memenuhi persyaratan tentang standar kompetensi	- Aksesibilitas antarwilayah belum merata, terutama di daerah selatan dan pegunungan dengan wilayah utara; - Rencana pembangunan jalan lingkar dan jalan tol dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya terealisasi; - Terminal Tipe B belum optimal; banyak bus AKDP dan AKAP tidak masuk terminal; - Konektivitas antara angkutan umum dan angkutan lanjutan dari/ke terminal dan stasiun belum terhubung sempurna; - Ketersediaan SDM di terminal Tipe B masih terbatas. - Masih adanya perlintasan sebidang yang belum terpenuhi prasarana yang standar (JPL 446H Cilacap palang pintu belum standar) - Terjadinya kerusakan peralatan penunjang keselamatan secara mendadak - Masih terdapat petugas PJJ yang belum diklat dan tidak memiliki sertifikasi
	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Kondisi Eksternal	- Pengembangan kawasan aglomerasi dan adanya penetapan kawasan pariwisata nasional dan kawasan industri; - Keberadaan layanan transportasi massal perkotaan yang berperan sebagai feeder; - Rencana pengembangan infrastruktur strategis kewenangan pusat di Jawa Tengah (Pengembangan bandara, kereta api, pelabuhan dan pembangunan Terminal Tipe B) yang tertuang dalam Perpres 79/2019 serta Perpres 109/2020; - Dukungan agenda SDGs 2030 untuk transportasi berkelanjutan, ramah lingkungan, dan inklusif. - Tingginya permintaan masyarakat akan pelayanan angkutan umum yang handal, nyaman, aman dan terjangkau dalam meningkatkan	- Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor; - Rendahnya disiplin dan pengetahuan masyarakat dalam keselamatan transportasi; - Tuntutan kualitas, kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada masyarakat semakin tinggi; - Terminal belum mengakomodir UMKM. - Tingkat kerawanan kecelakaan pada perlintasan sebidang masih relatif sering terjadi karena masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan keselamatan serta pemahaman terkait dengan petunjuk rambu lalu lintas pada perlintasan sebidang

	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
	kinerja pelayanan jasa transportasi; 6) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan angkutan aglomerasi Trans Jateng yang meningkat. 7) Pengadaan penyegaran atau bimtek yang diadakan Direktorat Keselamatan DJKA dan DAOP 6 Yogyakarta PT KAI untuk peningkatan kompetensi para petugas PJL	

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Tantangan dan peluang yang dihadapi baik dalam kondisi internal maupun eksternal di sektor Perhubungan Laut baik ASDP maupun laut sebagai berikut.

Tabel II. 60 Analisa SWOT Sektor Perhubungan Laut

	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
Kondisi Internal	1) Adanya payung hukum yang kuat diantaranya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dan peraturan terkait pengembangan di bidang pelayaran; 2) Angkutan laut banyak menarik wisatawan baik dalam dan luar negeri; 3) Angka perizinan angkutan laut telah memenuhi target. 4) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan efektif untuk membantu masyarakat mempersingkat waktu dan jarak tempuh	1) Sarana dan prasarana untuk mendukung aksesibilitas bagi penyandang berkebutuhan khusus belum merata dan sesuai dengan peraturan yang telah ada; 2) Konektivitas antara angkutan umum atau angkutan lanjutan dari/ke Pelabuhan; 3) Lokasi Pelabuhan dan Dermaga jauh dari lokasi perhentian angkutan umum; 4) Pelabuhan Pengumpan Regional yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum seluruhnya beroperasi rutin; 5) Sarana dan prasarana angkutan Sungai, danau dan penyeberangan belum terfasilitasi sesuai ketentuan; 6) Pelayanan short cut sehingga Masyarakat pengguna penyeberangan merasa tidak perlu menggunakan life jacket sebagai alat keselamatan
	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Kondisi Eksternal	1) Keberadaan layanan transportasi massal perkotaan yang dapat berperan sebagai feeder dari lokasi Pelabuhan ataupun dermaga; 2) Rencana pengembangan infrastruktur strategis kewenangan pusat di Jawa Tengah (Pengembangan bandara, kereta api, pelabuhan dan pembangunan Terminal Tipe B) yang tertuang dalam Perpres 79/2019 serta Perpres 109/2020; 3) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan angkutan aglomerasi Trans Jateng yang meningkat; 4) Keberadaan angkutan sungai/danau yang ditunjukkan untuk pariwisata dapat berperan sebagai simpul transportasi. 5) Angkutan sungai mempersingkat waktu dan jarak tempuh bagi	1) Rendahnya disiplin dan pengetahuan masyarakat dalam keselamatan transportasi; 2) Tuntutan kualitas, kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada masyarakat semakin tinggi; 3) Angkutan sungai mempersingkat waktu dan jarak tempuh bagi Masyarakat pengguna penyeberangan; 4) Angkutan sungai mempersingkat waktu dan jarak tempuh bagi Masyarakat pengguna penyeberangan; 5) Angkutan sungai mempersingkat waktu dan jarak tempuh bagi Masyarakat pengguna penyeberangan;

Strengths (Kekuatan)		Weaknesses (Kelemahan)
	Masyarakat pengguna penyeberangan; 6) Angkutan sungai mempersingkat waktu dan jarak tempuh bagi Masyarakat pengguna penyeberangan;	

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Tantangan dan peluang yang dihadapi baik dalam kondisi internal maupun eksternal di sektor Perhubungan Udara akan dibahas lebih fokus terhadap konektivitas dan simpul transportasi antara setiap transportasi dengan bandara yang berada di Provinsi Jawa Tengah

Tabel II. 61 Analisa SWOT Sektor Perhubungan Udara

Strengths (Kekuatan)		Weaknesses (Kelemahan)
Kondisi Internal	1) Adanya payung hukum yang kuat diantaranya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan; 2) Kereta bandara dan layanan BRT telah beroperasi di beberapa bandara di Provinsi Jawa Tengah 3) Diterbitkannya SK Kemenhub No 37 Tahun 2025 tentang status Bandar Udara Internasional (Bandar udara Internasional Adi Soemarmo dan Bandar Udara Internasional Ahmad Yani) 4) Daya tarik wisata laut 5) UPBU dan Cab Angkasa Pura sebagai operator bandara	1) Sarana dan prasarana untuk mendukung aksesibilitas bagi penyandang berkebutuhan khusus belum merata dan sesuai dengan peraturan yang telah ada; 2) Konektivitas antara angkutan umum dan angkutan lanjutan dari/ke lokasi bandara belum terhubung semua. 3) Bandara Ngloram, Bandara JB Sudirman dan Bandara Dewandaru pada saat ini belum terdapat layanan penerbangan reguler
Opportunities (Peluang)		Threats (Ancaman)
Kondisi Eksternal	1) Rencana pengembangan infrastruktur strategis kewenangan pusat di Jawa Tengah (Pengembangan bandara, kereta api, pelabuhan dan pembangunan Terminal Tipe B) yang tertuang dalam Perpres 79/2019 serta Perpres 109/2020; 2) Tingginya permintaan masyarakat akan pelayanan angkutan umum yang handal, nyaman, aman dan terjangkau dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi. 3) Penerbangan perintis serta potensi joy flight	1) Tuntutan kualitas, kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada masyarakat semakin tinggi. 2) Fluktuasi nilai tukar rupiah serta penurunan jumlah operasional pesawat

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Berdasarkan Analisis SWOT dalam melihat *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman) telah disusun beberapa strategi sebagai berikut :

Tabel II. 62 Strategi dari Analisa SWOT

Perhubungan Darat

Strategi S-O	Strategi S-T
“Strength” untuk memanfaatkan “Opportunity”	“Strength” untuk mengatasi “Threats”
1) Mengoptimalkan potensi Terminal Tipe B sebagai simpul konektivitas dengan dukungan regulasi dan digitalisasi layanan.;	1) Memfasilitasi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengikuti kegiatan peningkatan keselamatan lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah pusat;

2) Mengembangkan angkutan umum aglomerasi perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas Kawasan industri dan pariwisata.	2) Melibatkan instansi terkait dalam peningkatan pembinaan dan pemahaman penyedia layanan transportasi untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di Jawa Tengah.
Strategi W-O	Strategi W-T
Tanggulangi “Weaknesses” untuk memanfaatkan “Opportunities”	Tanggulangi “Weaknesses” untuk mengatasi “Threats”
1) Menyediakan, meningkatkan dan mempertahankan kinerja sarana prasarana transportasi untuk mendukung pengembangan kawasan strategis wilayah di Jawa Tengah; 2) Meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan terminal untuk menarik pengguna angkutan umum.	1) Melengkapi fasilitas keselamatan pada Daerah Rawan Kecelakaan Jawa Tengah; 2) Memfasilitasi pembangunan simpul dan atau layanan transportasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Jawa Tengah;

Perhubungan Laut

Strategi S-O	Strategi S-T
“Strength” untuk memanfaatkan “Opportunity”	“Strength” untuk mengatasi “Threats”
1) Mengembangkan Pelabuhan Tanjung Emas dan Pelabuhan Kendal sebagai pintu gerbang logistik Jawa Tengah. 2) Memanfaatkan posisi strategis pelabuhan regional untuk mendukung ekspor-impor dan pariwisata bahari.	1) Koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan proses P3D Pelabuhan Pengumpan Regional di Jawa Tengah; 2) Mendorong Penguatan tata kelola operasional untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan di pelabuhan (pendangkalan, sedimentasi).
Strategi W-O	Strategi W-T
Tanggulangi “Weaknesses” untuk memanfaatkan “Opportunities”	Tanggulangi “Weaknesses” untuk mengatasi “Threats”
1). Mendorong Perbaikan fasilitas bongkar muat serta digitalisasi layanan pelabuhan untuk mendukung efisiensi logistik.	1) Mendorong Penanganan pendangkalan dan keterbatasan kapasitas pelabuhan sebagai prioritas agar tidak kehilangan daya saing.

Perhubungan Udara

Strategi S-O	Strategi S-T
“Strength” untuk memanfaatkan “Opportunity”	“Strength” untuk mengatasi “Threats”
1) Mengoptimalkan status Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo sebagai bandara internasional untuk mendorong pariwisata dan investasi. 2) Menarik maskapai baru melalui insentif dan promosi potensi pasar Jawa Tengah. 3) Mengembangkan layanan kargo udara untuk mendukung sektor perdagangan ekspor.	1) Memperkuat koordinasi dengan Angkasa Pura dalam menjaga daya saing dan keandalan layanan.
Strategi W-O	Strategi W-T
Tanggulangi “Weaknesses” untuk memanfaatkan “Opportunities”	Tanggulangi “Weaknesses” untuk mengatasi “Threats”
1) Mengatasi keterbatasan fasilitas bandara melalui modernisasi infrastruktur dan kerja sama investasi. 2) Meningkatkan konektivitas multimoda (bandara–jalan tol–kereta) untuk memperluas catchment area	1) Mendorong Rehabilitasi sarana dan prasarana bandara yang belum optimal agar tidak kalah bersaing dengan bandara sekitarnya. 2) Peningkatan kualitas layanan dan efisiensi operasional untuk menghadapi potensi penurunan minat maskapai.

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

2.5. Isu Strategis Perangkat Daerah

A. Telaahan Renstra K/L

Didasarkan pada tema visi Indonesia emas 2045, yakni untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, maka untuk mendukung Visi Presiden menuju Indonesia Emas 2045 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, Visi Kementerian Perhubungan “Transportasi Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam mendukung visi tersebut Kementerian Perhubungan berpedoman pada 8 Asta Cita serta 17 Arah Pembangunan Nasional.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Kementerian Perhubungan mempunyai 8 misi, yaitu :

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
2. Mewujudkan dukungan transportasi thdp ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. Membangun transportasi kewilayahandan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional;
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Adapun tujuan pembangunan sektor perhubungan 2025-2029, sebagai berikut :

1. Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional RPJMN 2025-2029;
2. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing;
3. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas;
4. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif;

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis sebagai berikut :

1. Menurunnya Emisi GRK Transportasi;

2. Meningkatnya Stok Infrastruktur Transportasi;
3. Menurunnya Biaya Transportasi Logistik;
4. Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional;
5. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi nasional;
6. Meningkatnya keselamatan transportasi nasional;
7. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan transportasi nasional;
8. Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten;
9. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kemenhub.

Tabel II. 63 Persandingan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Renstra Kemenhub 2025-2029			Renstra Dinas Perhubungan Provinsi 2025-2029			Keterangan
Sasaran Strategis	Indikator	Target	Tujuan/Sasaran Dinas Perhubungan	Indikator	Target	
			Tujuan Meningkatkan Kualitas layanan transportasi di Jawa Tengah	Indeks Pelayanan Transportasi	2025 : 6,660 2026 : 6,788 2027 : 6,904 2028 : 7,019 2029 : 7,126 2030 : 7,242	Indikator Tambahan
Meningkatnya Konektivitas dan Integrasi transportasi nasional	Rasio Konektivitas Nasional	2025 : 0,651 2026 : 0,660 2027 : 0,670 2028 : 0,690 2029 : 0,700	Sasaran : Meningkatkan konektivitas provinsi	Rasio konektivitas provinsi	2025 : 0,274 2026 : 0,302 2027 : 0,327 2028 : 0,352 2029 : 0,375 2030 : 0,401	Sesuai
	Tingkat Integrasi Jaringan transportasi Nasional	2025 : 67,50 2026 : 70,00 2027 : 72,25 2028 : 75,00 2029 : 77,75	-	-	-	Tidak digunakan
Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional	2025 : 99,9999 2026 : 99,9999 2027 : 99,9999 2028 : 99,9999 2029 : 99,9999	Sasaran Meningkatkan Keselamatan Perjalanan Transportasi di Jawa Tengah	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi	2025 : 99,9836 2026 : 99,9838 2027 : 99,9842 2028 : 99,9846 2029 : 99,9850 2030 : 99,9853	Sesuai
Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan transportasi	Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi	2025 : 72 2026 : 74 2027 : 77 2028 : 80 2029 : 83				Tidak digunakan
Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten	Indeks Peningkatan SDM transportasi	2025 : 88; 2026 : 89; 2027 : 90 2028 : 91; 2029 : 92				Tidak digunakan
Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan	Indeks RB Kementrian Perhubungan	2025 : 86,00 2026 : 87,00 2027 : 88,00 2028 : 89,00 2029 : 90,00	Tujuan Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perhubungan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	2025 : 85,12 2026 : 85,15 2027 : 85,20 2028 : 85,25 2029 : 85,30 2030 : 85,35	Sesuai
			Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perhubungan	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	2025 : 3,07 2026 : 3,11 2027 : 3,15 2028 : 3,19 2029 : 3,23 2030 : 3,30	Indikator Tambahan

Renstra Kemenhub 2025-2029			Renstra Dinas Perhubungan Provinsi 2025-2029			Keterangan
Sasaran Strategis	Indikator	Target	Tujuan/Sasaran Dinas Perhubungan	Indikator	Target	
Meningkatkan Kinerja pelayanan transportasi nasional	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan transportasi nasional	2025 : >88,31 2026 : >88,31 2027 : >88,31 2028 : >88,31 2029 : >88,31	Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	2025 : 81,55 2026 : 81,60 2027 : 81,65 2028 : 81,70 2029 : 81,75 2030 : 81,80	Sesuai

Sumber : Renstra Kemenhub 2025-2029

Selain itu untuk sektor transportasi dalam RPJMN, *Major Project* yang berada di Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Pengembangan sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di WM Semarang melalui Pembangunan BRT dan peningkatan kereta komuter;
2. Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya;
3. Pengembangan Pelabuhan New Tanjung Mas dan Kendal Seaport;
4. Pengambangan KIT Batang, termasuk infrastruktur pendukungnya seperti jalan, system penyediaan air baku dan air minum, tele komunikasi, *dry port*, pelabuhan, dsb
5. Pengembangan Pelabuhan Cilacap
6. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui : penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih danbibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitihasi OPT dan Kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani ; peningkatan kualitas pasca panen melalui peningkatan prasarana pascapanen.

Tabel II. 64 Telaahan Renstra K/L

NO	SASARAN STRATEGIS K/L	PERMASALAHAN PD	PENGHAMBAT/PENDORONG
1	Meningkatnya Konektivitas dan Integrasi transportasi Nasional	1. Diperlukan reaktiva si jalur rel KA non aktif, diantaranya: Semarang-Kudus-Rembang -Bojonegoro, Semarang-Magelang (Borobudur)-Yogyakarta, Purwokerto-Wonosobo; 2. Diperlukan perpanjangan layanan dan elektrifikasi KA pramex dari Stasiun Tugu Yogyakarta-Stasiun Kutoarjo Purworejo diperpanjang ke Kebumen dan KA Kedungsepur dari	PENGHAMBAT : 1. Ketersediaan lahan untuk reaktivasi jalur Kereta Api karena jalur eksisting Sebagian besar sudah dimanfaatkan oleh masyarakat; 2. Adanya konflik pembebasan lahan untuk pembangunan akses kereta api; 3. Sarana Prasarana perpanjangan rute kebun saat ini belum siap; 4. Belum ada blue print Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA) di Provinsi Jawa Tengah

NO	SASARAN STRATEGIS K/L	PERMASALAHAN PD	PENGHAMBAT/PENDORON G
		Stasiun Ngrombo Grobogan-Stasiun Poncol Kota Semarang di perpanjang ke Stasiun Weleri Kab Kendal; 3. Diperlukan pembangunan double track rel kereta api diantaranya pada jalur Kroya-Batas Cilacap 4. Jaringan Rel KA yang sudah terbangun yang terintegrasi dengan Pelabuhan Tanjung Emas perlu dioptimalisasi. 5. Diperlukan peningkatan frekuensi kereta api barang/logistik dalam mendukung penumpu pangan dan industri nasional 6. Jembatan timbang belum sepenuhnya ter optimalisasi untuk menyediakan data pendukung logistic pangan Jawa Tengah 7. Diperlukan bantuan fasilitas penyusunan Sistem Logistik Daerah dalam mendukung kebijakan Nasional Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri Nasional	PENDORONG : 1. Tingginya permintaan masyarakat terhadap pelayanan transportasi berbasis rel; 2. Daya Tarik wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara terhadap KSPN Borobudur; 3. Ditetapkannya Kabupaten Rembang menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) promosi; 4. Integrasi KSPN Borobudur-Dieng sebagai daya Tarik pariwisata; 5. Lokasi Bandara Adi Soemarmo yang strategis pasca pembangunan Bandara YIA di Yogyakarta.
2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	1. Diperlukan layanan angkutan umum massal perkotaan lintas provinsi Surakarta-Klaten-Prambanan-Yogyakarta; 2. Diperlukan peningkatan integrasi antar moda transportasi di Terminal Tipe A, Stasiun, Bandara ,dan Pelabuhan	PENGHAMBAT : 1. Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 10 Wilayah Pengembangan, sampai saat ini baru 4 Wilayah Pengembangan yang terlayani angkutan umum masal, masih perlu pemerataan di berbagai WP terkait dengan pengembangan angkutan umum masal; 2. Pada saat ini Tingkat kunjungan ke Terminal baik itu Terminal Tipe A maupun Terminal Tipe B masih tergolong rendah. PENDORONG : 1. Sudah adanya angkutan umum berbasis rel (KRL) pada wilayah Surakarta-

NO	SASARAN STRATEGIS K/L	PERMASALAHAN PD	PENGHAMBAT/PENDORONG
			Klaten-Prambanan-Yogyakarta; 2. Sudah ada integrasi antar moda di Terminal Tipe A Tirtonadi dengan Stasiun Balapan serta kereta Bandara, sehingga terintegrasi secara langsung.
3	Meningkatnya keselamatan transportasi	1. Diperlukan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penyediaan perlengkapan jalan sebagai bagian dari peningkatan keselamatan jalan diruas jalan provinsi dan kabupaten/kota; 2. Diperlukan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan rel kereta api.	PENGHAMBAT : 1. Semua jalur Kereta Api di Jawa Tengah Masuk dalam RIPNAS sehingga merupakan kewenangan Pemerintah Pusat; 2. Kebutuhan fasilitas keselamatan jalan di Ruas Jalan Nasional sangat banyak. PENDORONG : 1. Adanya jalur Kereta Api Loop yang melingkar di Provinsi Jawa Tengah; 2. Adanya Balai Pengelola Transportasi Darat di wilayah Jawa Tengah.

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

B. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tetang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, Adapun telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah di dalam dokumen Renstra ini :

Tabel II. 65 Telaahan Rencana Tata Wilayah

O	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan							
a	Program Peningkatan dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A	Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Wonosobo, Kota Salatiga, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Blora, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kota						

O	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Tegal, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara						
b	Program pembangunan Terminal Penumpang Tipe A	Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten/ Kota lainnya sesuai hasil kajian						
c	Program Peningkatan dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B	Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Magelang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Rembang						
d	Program pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten/Kota lainnya sesuai hasil kajian						
e	Program Peningkatan dan pengembangan Terminal Barang	Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pekalongan, Kota Magelang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pati, Kota Salatiga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Batang, Kota Semarang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Magelang						
f	Program pembangunan Terminal Barang	Kabupaten Pemalang, Kabupaten Rembang dan Kabupaten/Kota lainnya sesuai hasil kajian						
g	Program penyelenggaraan dryport	Penentuan lokasi dilakukan melalui kajian lebih lanjut						
h	Peningkatan dan pengembangan Jembatan Timbang	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Boyolali						

O	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
i	Program peningkatan dan pengembangan angkutan umum massal	Penentuan lokasi dilakukan melalui kajian lebih lanjut						
j	Pengembangan kawasan yang berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD)	WP Cibalingmas, WP Wonobanjar, WP Keburejo, WP Gelangmanggung, WP Subosukawonosraten, WP Jekuti, WP Banglor, WP Kedungsepur, WP Petanglong, dan WP Bregasmalang						
2	Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api							
a	Kajian perencanaan, pembangunan, peningkatan dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api							
b	Peningkatan dan pengembangan Stasiun Kereta Api	Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Wonosobo, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan.						
3	Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan							
a	Pembangunan dan peningkatan pelabuhan sungai dan danau	Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kudus.						

O	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
b	Pembangunan dan peningkatan pelabuhan penyeberangan	Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Kendal.						
4	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut							
a	Peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Utama yang didukung dengan pengembangan terminal multipurpose Kabupaten Kendal.	Kota Semarang dan Kabupaten Kendal						
b	Peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpul	Kabupaten Cilacap, Kota Tegal, dan Kabupaten Batang						
c	Peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional	Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Brebes.						
d	Peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes.						
e	Peningkatan dan pengembangan Terminal Khusus	Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, dan Kota Semarang						
f	Penataan dan pengaturan alur pelayaran masuk pelabuhan	Perairan di sekitar Kabupaten Brebes, Perairan di sekitar Kota Tegal, Perairan di sekitar Kabupaten Pemalang, Perairan di sekitar Kabupaten Batang, Perairan di sekitar Kabupaten Kendal, Perairan di sekitar Kota Semarang, Perairan di sekitar Kabupaten Demak, Perairan di sekitar Kabupaten Jepara, Perairan di sekitar Kabupaten Pati, Perairan di sekitar Kabupaten Rembang, Perairan di sekitar Kabupaten Cilacap, dan Perairan lainnya sesuai kajian yang dilakukan.						
5	Bandar Udara Umum							
a	Peningkatan dan pengembangan Bandar Udara Pengumpul	Kota Semarang, Kabupaten Boyolali						
b	Peningkatan dan pengembangan Bandar Udara Pengumpan	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora.						
c	Pengembangan sistem integrasi antarmoda	Kota Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora.						

O	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
d	Pengaturan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)	Kota Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Jepara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kabupaten						
e	Peningkatan konektivitas udara dalam rangka pertumbuhan industri pariwisata dan penerbangan	Kota Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Blora.						

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Kajian Lingkuan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam rencana pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam KLHS untuk RPJMD, analisis indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dilakukan dengan membandingkan target indikator TPB dengan TPB sesuai Perpres 59 Tahun 2017. Adapun indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas;
2. Panjang jalur kereta api;
3. Jumlah bandara;
4. Jumlah dermaga penyeberangan;
5. Jumlah pelabuhan strategis;
6. Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan;
7. Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.

Adapun capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana tabel berikut :

Tabel II. 66 Capaian Indikator TPB/SDGs Tahun 2024

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs PROVINSI	TARGET	REALISASI	KET.
Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia				
Target 3.6 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas				
3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	PM	4.302	
Tujuan 9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi				
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua				

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs PROVINSI	TARGET	REALISASI	KET.
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api di Jawa Tengah	PM	1053,765	Rencana target reaktivasi jalur kereta api di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2023 bertambah menjadi 1363,655 kmsp dari 878,155 kmsp pada tahun 2018 (2020 dan 2021 terjadi refocusing anggaran pada program reaktivasi jalur kereta api non aktif di jawa tengah)
9.1.2 (a)	Jumlah bandara.	PM	6	Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, Bandar Udara Adi Sumarmo Boyolali, Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap, Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga, Bandar Udara Ngloram Cepu, Bandar Udara Dewadaru Jepara
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	PM	51	Pelabuhan Laut yang digunakan sebagai angkutan penyeberangan ada 6 (Kendal, Jepara, Karimunjawa, Parang, Genting, Nyamuk). Dermaga Penyeberangan yang beroperasi sesuai KP432 sejumlah 26 (Lohmanis, Wijayapura, Sodong, Prenca, Alas Malang, Jojok, Pekuyan, Motehan, Klaces, Donan, Derm. Sungai Sleko (Plengsengan), Sungai Karanganyar, Dermaga Sungai Citanduy – Patimbuan, Dermaga Waduk Sempor, Tangen, Miri, Sumberlawang, Dermaga Kemukus di Waduk Kedungombo, Dermaga Kedunguter di Waduk Kedungombo, Dermaga Waduk Cacaban, Dermaga Mijing di Waduk Wadas Lintang, Dermaga di Waduk Gajah Mungkur, Wadaslintang, Garung, Dermaga Tritis di Waduk Wadas Lintang, Seleko) dan dermaga penyeberangan sungai yang belum diakomodir di RIPN KP 432 ada 19 dermaga (di sungai Bengawan Solo, Kali Bodri , Kalikutho, Comal, Pemali, Gangsa, Cisanggarung, Citandeuy, Kali Ijo
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis di Jawa Tengah	PM	14	Pelabuhan strategis hirarki 1 Pelabuhan Utama di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang , 2 Pelabuhan Pengumpul di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap dan Pelabuhan Tegal dan 8 Pelabuhan Pengumpan regional di Pelabuhan Sluke, Pelabuhan Tasikagung di Rembang, Pelabuhan Juwana di Pati, Pelabuhan Jepara, Pelabuhan Karimunjawa dan Pelabuhan Legonbajak di Jepara, Pelabuhan Batang, Pelabuhan Kendal dan 3 Pelabuhan Pengumpan Lokal di Pelabuhan Brebes, Pelabuhan Pekalongan, Pelabuhan Pemalang.
Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan				
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua				
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	PM	16,55%	Banyaknya pengguna moda transportasi umum (AKDP, BRT Trans Jateng, BRT Trans Semarang, Batik Solo Trans) di perkotaan pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk di perkotaan (Kota Semarang, Surakarta, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang) pada kurun waktu yang sama dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%). penurunan pengguna angkutan umum terjadi karena beberapa kebijakan terkait pembatasan perjalanan akibat pandemi Covid 19
11.2.1.(b).	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	PM	2	Angkutan rel joglosemarkarto, Kaligung dan Kedungsepur

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Berikut telaah implikasi RTRW dan KLHS sebagaimana tabel berikut :

Tabel II. 67 Telaahan RTRW dan KLHS

NO	IMPLIKASI RTRW/KLHS	PERMASALAHAN PD	PENGHAMBAT/PENDORONG
A	RTRW		
1	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan	1. Masih kurangnya jumlah kunjungan bus di terminal tipe B; 2. Masih kurangnya implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis; 3. Masih kurangnya jumlah pengunjung terminal tipe B.	PENGHAMBAT : 1. Belum semua Terminal Tipe B sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal); 2. Masih kurangnya Implementasi Dokumen RIJLLAJ; 3. Belum semua terminal Tipe B dalam kondisi baik. PENDORONG : 1. Tingginya permintaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman dan tepat waktu; 2. Diterbitkannya Permendagri No.101/2014 tentang PKB dan BBNKB yang mewajibkan angkutan umum berbadan hukum; 3. Tingginya permintaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum / massal aglomerasi perkotaan; 4. Pengembangan kawasan aglomerasi dan adanya penetapan kawasan pariwisata nasional dan kawasan industry di Jawa Tengah; 5. Rencana pengembangan infrastruktur strategis kewenangan pusat di Jawa Tengah (Pengembangan bandara, kereta api, pelabuhan dan pembangunan Terminal Tipe A) yang tertuang dalam Perpres 79/2019 serta Perpres 109/2020; 6. Adanya layanan transportasi umum aglomerasi perkotaan di Provinsi Jawa Tengah (TransJateng); 7. Ditetapkannya 3 Pusat Kegiatan Lokal dipromosikan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah; 8. Sesuai dengan RTRW Provinsi terdapat kebutuhan terminal tipe B di 27 Kab/Kota.
2	Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api	Masih rendahnya perlintasan sebidang yang terpenuhi	PENGHAMBAT : Masih rendahnya perlintasan KA yang dilengkapi prasarana penunjang sesuai tingkat

NO	IMPLIKASI RTRW/KLHS	PERMASALAHAN PD	PENGHAMBAT/PENDORONG
		perlengkapan jalan sesuai standar.	pemenuhan per jenis Fasilitas keselamatan. PENDORONG : Diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan.
3	Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan	Masih kurangnya Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP.	PENGHAMBAT : 1. Belum sepenuhnya dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasarkan tingkatannya; 2. Masih rendahnya Fasilitas Pelabuhan SDP yang terpenuhi; 3. Masih rendahnya perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang diawasi ; 4. Masih rendahnya Berth occupancy ratio. PENDORONG : 1. Diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 2. Mulai Tahun 2020 sudah dilakukan review KP.432 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
4	Perwujudan Sistem jaringan transportasi laut	Masih kurangnya Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP.	PENGHAMBAT : 1. Belum sepenuhnya dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasarkan tingkatannya; 2. Masih rendahnya Fasilitas Pelabuhan SDP yang terpenuhi; 3. Masih rendahnya perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang diawasi ; 4. Masih rendahnya Berth occupancy ratio. PENDORONG :

NO	IMPLIKASI RTRW/KLHS	PERMASALAHAN PD	PENGHAMBAT/PENDORONG
			1. Diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 2. Mulai Tahun 2020 sudah dilakukan review KP.432 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
5	Bandar Udara Umum	Masih kurangnya implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	PENGHAMBAT : 1. Masih kurangnya Implementasi Dokumen RIJLLAJ 2. Diperlukan fasilitasi pembangunan simpul dan layanan transportasi; 3. Tidak adanya nomenklatur program pengelolaan penerbangan pada urusan perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. PENDORONG : 1. Tingginya permintaan daerah dalam pengembangan Bandara; 2. Munculnya kawasan pengembangan strategis wilayah di kawasan DLKr dan DLKp Bandara.
B	KLHS		
1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	1. Masih rendahnya Jumlah ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan; 2. Bertambahnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang belum tertangani; 3. Belum sepenuhnya kendaraan laik jalan di Jawa Tengah; 4. Belum sepenuhnya rekomendasi <i>ramp</i>	PENGHAMBAT : 1. Belum optimalnya penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah; 2. Perlunya rekomendasi hasil Forum LLAJ; 3. Masih kurangnya kepatuhan pelaksanaan rekomendasi andalalin dibandingkan dengan jumlah rekomendasi andalalin yang dikeluarkan; 4. Masih kurangnya pemenuhan perlengkapan jalan terpasang; 5. Masih rendahnya rehabilitasi DRK; 6. Masih perlunya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas

NO	IMPLIKASI RTRW/KLHS	PERMASALAHAN PD	PENGHAMBAT/PENDORONG
		<i>check</i> yang ditindak lanjuti.	Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi. 7. Belum sepenuhnya Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di Jawa Tengah; 8. Masih diperlukanya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Kendaraan karoseri yang sesuai uji tipe yang ditetapkan); 9. Masih rendahnya Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi (sopir dan pelajar); 10. Belum sepenuhnya Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check; PENDORONG : 1. Koordinasi antar pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan baik ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat berjalan dengan baik; 2. Sudah ditetapkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, yang meliputi peningkatan kompetensi dan pelatihan bagi Awak kendaraan bermotor.
2	Panjang jalur kereta api	Total panjang jalur kereta api di Jawa Tengah 1.645,65 km/sp, terdiri dari 929,50 km/sp jalur rel aktif/operasional dan 716,15 km jalur rel non aktif/belum operasional.	PENGHAMBAT : Banyak fungsi lahan yang sudah berubah, sehingga untuk pembebasan sangat sulit dan harus mencari trase baru yang membutuhkan pembebasan tanah (factor social dan nilai investasi). PENDORONG : Provinsi Jawa Tengah memiliki jalur Kereta Api Loop.
3	Jumlah bandara	Masih kurangnya implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	PENGHAMBAT : 1. Diperlukan fasilitasi pembangunan simpul dan layanan transportasi; 2. Tidak adanya nomenklatur program pengelolaan penerbangan pada urusan perhubungan yang menjadi

NO	IMPLIKASI RTRW/KLHS	PERMASALAHAN PD	PENGHAMBAT/PENDORONG
			kewenangan Pemerintah Provinsi. PENDORONG : 1. Tingginya permintaan daerah dalam pengembangan Bandara; 2. Munculnya kawasan pengembangan strategis wilayah di kawasan DLKr dan DLKp Bandara.
4	Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan : permasalahan belum memenuhinya aspek keselamatan pada penyeberangan sungai	PENGHAMBAT : Penyedia layanan angkutan penyeberangan sungai belum berbadan hukum/koperasi. PENDORONG : Diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5	Jumlah pelabuhan strategis	Tingginya biaya pemeliharaan untuk normalisasi alur pelayaran karena tingginya laju sedimentasi	PENGHAMBAT : Proses P3D Pelabuhan Pengumpan Regional dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum selesai. PENDORONG : Mulai Tahun 2020 sudah dilakukan review KP.432 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
6	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	1. Masih Kurangnya jaringan trayek angkutan jalan; 2. Belum sepenuhnya jumlah penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru yang menggunakan angkutan umum; 3. Masih rendahnya jumlah kunjungan bus di terminal tipe B; 4. Masih kurangnya implementasi penetapan simpul dan jaringan	PENGHAMBAT : 1. Masih rendahnya jumlah total angkutan taksi berijin 2. Masih kurangnya jumlah total angkutan barang berijin 3. Masih kurangnya Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin 4. Belum Optimalnya Trayek yang Ditetapkan Pemutakhiran Tarif 5. Masih rendahnya jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan 6. Belum semuanya Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan

NO	IMPLIKASI RTRW/KLHS	PERMASALAHAN PD	PENGHAMBAT/PENDORONG
		transportasi strategis; 5. Masih kurangnya jumlah pengunjung terminal tipe B ; 6. Masih kurangnya implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis. 7. Belum optimalnya Jumlah Penduduk yang Terlayani Trans Jateng	Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 7. Belum sepenuhnya penumpang angkutan umum yang terlayani 8. Belum semua Terminal Tipe B sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) 9. Masih kurangnya Implementasi Dokumen RIJLLAJ 10. Belum semua terminal Tipe B dalam kondisi baik 11. Masih kurangnya Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) yang Terpenuhi 12. Belum optimalnya jumlah penumpang terlayani angkutan umum (Trans Jateng) di kawasan aglomerasi perkotaan PENDORONG : 1. Meningkatnya sektor Pariwisata dan rencana pengembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah; 2. Tingginya permintaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum / massal aglomerasi perkotaan; 3. Tingginya permintaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman dan tepat waktu; 4. Diterbitkannya Permendagri No.101/2014 tentang PKB dan BBNKB yang mewajibkan angkutan umum berbadan hukum; 5. Tingginya permintaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum / massal aglomerasi perkotaan; 6. Pengembangan kawasan aglomerasi dan adanya penetapan kawasan pariwisata nasional dan kawasan industry di Jawa Tengah; 7. Rencana pengembangan infrastruktur strategis kewenangan pusat di Jawa Tengah (Pengembangan bandara, kereta api, pelabuhan dan pembangunan Terminal Tipe A) yang tertuang dalam

NO	IMPLIKASI RTRW/KLHS	PERMASALAHAN PD	PENGHAMBAT/PENDORONG
			Perpres 79/2019 serta Perpres 109/2020; 8. Adanya layanan transportasi umum aglomerasi perkotaan di Provinsi Jawa Tengah (TransJateng); 9. Ditetapkannya 3 Pusat Kegiatan Lokal dipromosikan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah; Sesuai dengan RTRW Provinsi terdapat kebutuhan terminal tipe B di 27 Kab/Kota.
7	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar	Masih rendahnya perlintasan sebidang yang terpenuhi perlengkapan jalan sesuai standar.	PENGHAMBAT : Masih rendahnya perlintasan KA yang dilengkapi prasarana penunjang sesuai tingkat pemenuhan per jenis Fasilitas keselamatan. PENDORONG : Diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan.

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

C. Potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan isu-isu yang ada dalam SDG’s, isu nasional dalam RPJPN, isu-isu dalam KLHS terdapat potensi yang menjadi kewenangan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran Pembangunan daerah sebagaimana berikut :

Tabel II. 68 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
• Jumlah AKDP pada Tahun 2024 sebanyak 3.434 Kendaraan dengan 272 Trayek • Jumlah AJDP pada Tahun 2024 Sebanyak 969 Kendaraan dengan 66 Trayek	• Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Jawa Tengah • Masih Kurangnya jaringan trayek angkutan jalan	Peningkatan sarana dan prasarana penyediaan pelayanan dasar untuk menunjang pengembangan wilayah dan ekonomi daerah yang tangguh dan berkelanjutan	SDGs 9 (Infrastruktur) & 11 (Kota & Komunitas Berkelanjutan)	Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Peningkatan konektivitas antar wilayah di Jawa Tengah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
• Terdapat 19 terminal tipe a dan 23 terminal tipe b serta 178 terminal tipe c • Terdapat 1 pelabuhan utama, 2 pelabuhan pengumpul, 8 pelabuhan pengumpan regional dan 2 pelabuhan lokal • Terdapat 6 bandara. 2 Bandara dari 6 Bandar tersebut berstatus bandara internasional	• Belum optimalnya aksesibilitas dan konektifitas antar wilayah di Jawa Tengah • Masih rendahnya jumlah kunjungan bus di terminal tipe B • Masih kurangnya implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Peningkatan sarana dan prasarana penyediaan pelayanan dasar untuk menunjang pengembangan wilayah dan ekonomi daerah yang tangguh dan berkelanjutan	SDGs 9 (Infrastruktur) & 11 (Kota & Komunitas Berkelanjutan)	Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Simpul Transportasi

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
• Terdapat 113 stasiun terdiri dari 14 stasiun besar, 12 stasiun Kelas 1 21 stasiun Kelas 2, 66 Kelas 3	• Masih kurangnya jumlah pengunjung terminal tipe B • Masih kurangnya Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP					
• Jalur Kereta Api : Jalur ganda aktif 637,058 km Jalur tunggal aktif 292,44 km Jalur KA non aktif 716,153 km • Ruas Jalan di Jawa Tengah Nasional 1.581,	• Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Jawa Tengah • Belum optimalnya Jumlah Penduduk yang	Peningkatan sarana dan prasarana penyediaan pelayanan dasar untuk menunjang pengembangan wilayah dan ekonomi	SDGs 9 (Infrastruktur) & 11 (Kota & Komunitas Berkelanjutan)	Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Optimalisasi ruang pergerakan dengan peningkatan kualitas layanan angkutan umum.

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
30 KM Provinsi 2.440,12 KM • Potensi jaringan angkutan aglomerasi perkotaan Trans Jateng pada 14 Kabupaten/Kota dan 5 Wilayah Pengembangan	Terlayani Trans Jateng	daerah yang tangguh dan berkelanjutan		terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi		
• Telah disusun Rencana Aksi Keselamatan Daerah • Telah diidentifikasi kebutuhan perlengkapan jalan di jalan provinsi per jenis	• Masih tingginya kecelakaan perjalanan transportasi • Masih rendahnya Jumlah ruas jalan yang dilengkapi dengan	• Keselamatan transportasi darat dan perlintasan sebidang • Pengurangan risiko bencana dan kecelakaan • Peningkatan	SDGs 3 (Kesehatan & Keselamatan) & 11 (Transportasi aman & inklusif)	• Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan,	• Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan • Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Peningkatan keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
perlengkapan jalan	perlengkapan jalan • Masih terjadi kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang belum tertangani • Belum sepenuhnya kendaraan laik jalan di jawa tengah • Belum sepenuhnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti	kualitas infrastruktur berkelanjutan		infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi • Ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi		

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Masih rendahnya perlintasan sebidang yang terpenuhi perlengkapan jalan sesuai standar					

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Perangkat Daerah, di atas selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan konektivitas antar wilayah di Jawa Tengah

Salah satu isu utama dalam sektor transportasi di Provinsi Jawa Tengah adalah konektivitas antarwilayah. Hal ini semakin penting mengingat fokus arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Tengah, yaitu “Meneguhkan Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sektor perhubungan memiliki peran strategis dalam mendukung sistem distribusi logistik pangan. Upaya ini terutama ditujukan untuk memastikan kelancaran mobilitas barang dari dan menuju wilayah penumpu pangan di Jawa Tengah, serta menjamin keterhubungan distribusi hingga ke wilayah tujuan. Intervensi yang diperlukan mencakup peningkatan dan penyediaan infrastruktur perlengkapan jalan guna mendukung kelancaran arus logistik serta penanganan daerah rawan kecelakaan pada ruas jalan provinsi, sebagai upaya untuk menekan risiko kecelakaan sekaligus menjamin keselamatan pengguna jalan. Dengan adanya penguatan konektivitas transportasi melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan distribusi logistik pangan di Jawa Tengah dapat berlangsung lebih efisien, aman, dan berkesinambungan, sehingga mampu memperkuat peran Jawa Tengah sebagai salah satu pusat ketahanan pangan nasional. Peningkatan kualitas simpul transportasi

2. Peningkatan Kualitas Simpul Transportasi

Kondisi prasarana pada simpul-simpul transportasi di Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya dalam pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Keterbatasan sarana dan prasarana ini berimplikasi pada belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi. Di sisi lain, dengan adanya pengembangan infrastruktur strategis sektor transportasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di wilayah Jawa Tengah, diperlukan peran fasilitatif dari Pemerintah Provinsi untuk mendukung keberlanjutan dan optimalisasi pemanfaatannya. Salah satu contoh yang krusial adalah kondisi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, yang saat ini mengalami pendangkalan alur pelayaran. Terdapat perbedaan kedalaman antara kolam pelabuhan (-12 MLWS) dengan alur pelayaran (-10 MLWS), sehingga pelabuhan hanya mampu melayani kapal dengan ukuran Panamax size (<90.000 GT). Kondisi ini membatasi kapasitas pelabuhan dalam mendukung arus logistik berskala besar.

Selain itu, dalam rangka penyusunan Revisi Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.11/11.393 telah menyampaikan usulan terkait Pelabuhan Kendal. Usulan tersebut adalah perubahan status dari semula Pelabuhan Pengumpan Regional menjadi dermaga/bagian dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Dengan perubahan tersebut,

Pelabuhan Kendal diharapkan dapat melayani pelayaran internasional, sehingga mampu memperkuat fungsi Jawa Tengah sebagai simpul logistik nasional dan mendukung konektivitas perdagangan global.

Isu lain yang tak kalah penting yaitu kembalinya status Bandara Internasional Ahmad Yani yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No 26 Tahun 2025. Dengan kembalinya status Bandara Internasional Ahmad Yani diharapkan dapat memberi kemudahan akses kepada investor yang berinvestasi di Provinsi Jawa Tengah, serta meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Selain itu pada tanggal 8 Agustus telah diterbitkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 37 Tahun 2025 tentang peningkatan status Bandar Udara Adi Soemarmo sebagai Bandar Udara Internasional.

3. Optimalisasi ruang pergerakan dengan peningkatan kualitas layanan angkutan umum

Tingkat pertumbuhan kendaraan yang tinggi merupakan isu lain di sektor transportasi, hal ini menyebabkan beberapa ruas jalan menjadi rawan macet. Sehingga dibutuhkan utamanya untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum serta pengalihan moda jalan ke moda transportasi lainnya. Hal ini dibutuhkan peran Pemerintah Provinsi untuk memfasilitasi rencana Pemerintah Pusat dalam pengembangan angkutan umum berbasis rel.

4. Peningkatan keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah

Isu penting yang masih menjadi tantangan besar dalam sektor transportasi di Provinsi Jawa Tengah adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas, baik di jalan raya maupun pada perlintasan sebidang kereta api. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih banyaknya Daerah Rawan Kecelakaan yang tersebar di berbagai wilayah, khususnya pada ruas jalan provinsi yang memiliki intensitas lalu lintas tinggi dan berperan penting dalam mobilitas orang maupun distribusi barang.

Berdasarkan data tahun 2024, tercatat sebanyak 24.171 kasus kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 4.164 jiwa, atau rata-rata 11 orang meninggal per hari. Angka tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas tinggi di Indonesia.

Selain itu, kecelakaan pada perlintasan sebidang kereta api juga masih menjadi permasalahan serius. Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 83 kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang yang berada di bawah wilayah kerja DAOP 4 Semarang, DAOP 5 Purwokerto, dan DAOP 6 Yogyakarta. Tingginya angka kecelakaan tersebut menunjukkan masih terbatasnya fasilitas pengaman perlintasan serta rendahnya disiplin pengguna jalan dalam mematuhi aturan lalu lintas.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

A. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2030 yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Penjabaran visi dan misi daerah berdasarkan pada filosofi cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk **“NGOPENI. NGLAKONI. Jateng”**. Dengan landasan filosofis tersebut maka ditetapkan visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah:

“JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045”

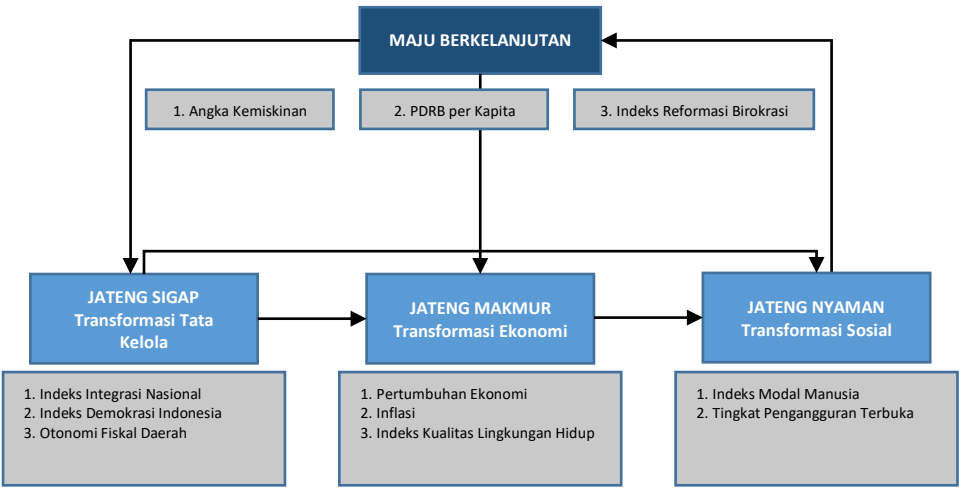
Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Implementasi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dilaksanakan dengan 3 (tiga) fokus kerja yaitu:

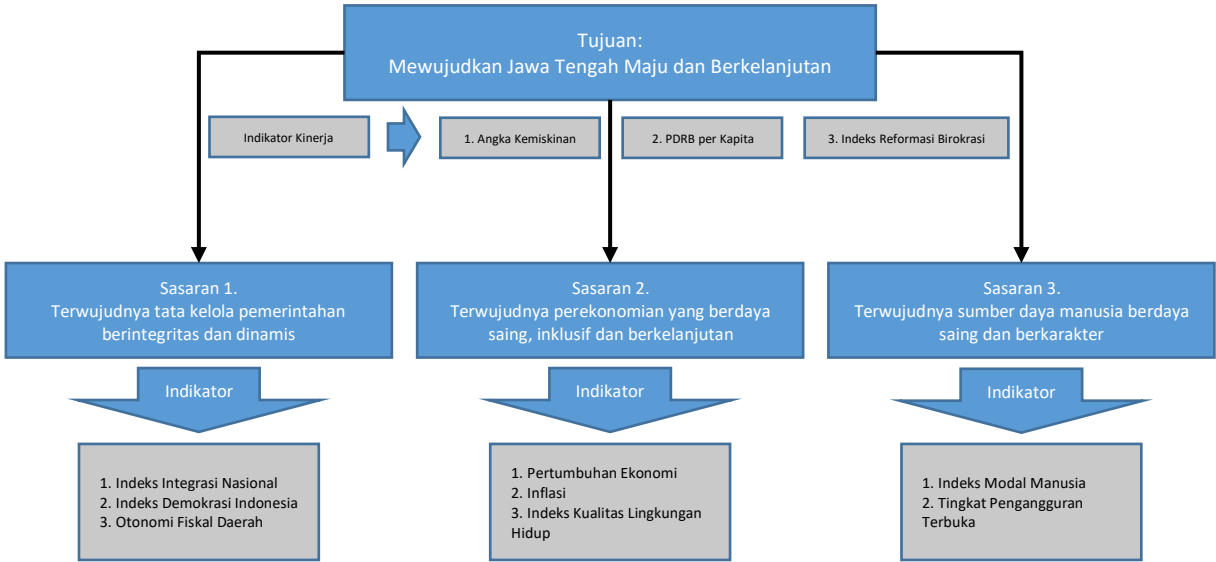
1. Jateng Sigap;
2. Jateng Makmur;
3. Jateng Nyaman.

Penerjemahan visi dan misi daerah menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029 dirumuskan melalui *logframe* pembangunan daerah Jawa Tengah sebagai berikut.



Gambar III. 1 *Logframe* Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Mendasarkan pada *logframe* pembangunan tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam upaya penjabaran visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 sebagai berikut.



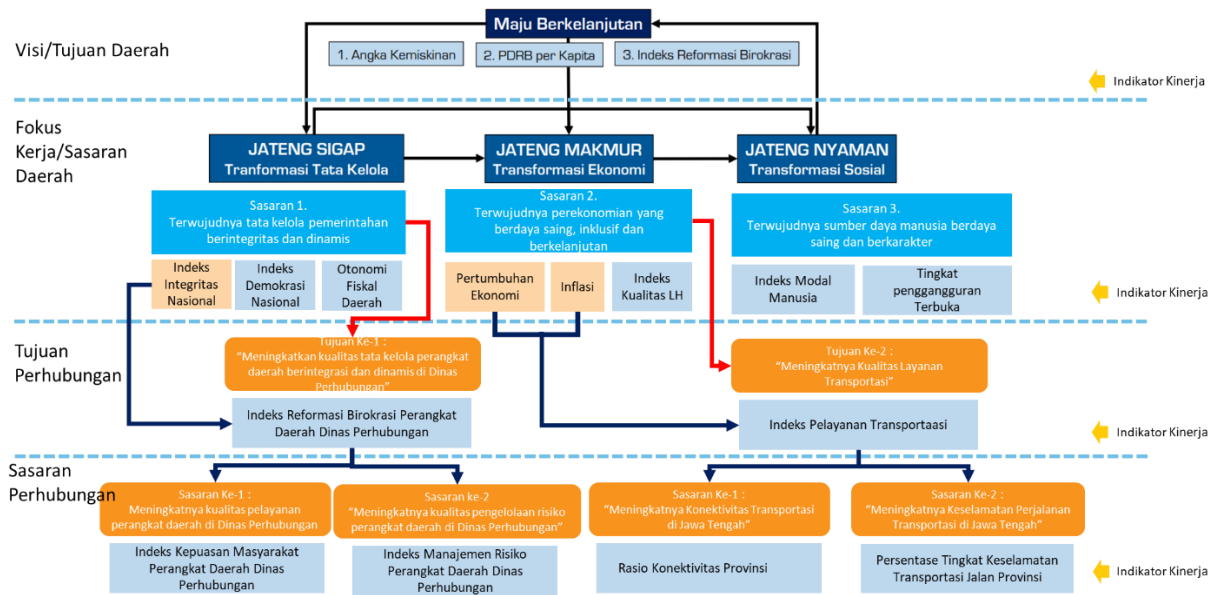
Gambar III. 2 *Cascading* Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Untuk memastikan arah kebijakan dan strategi dapat diimplementasikan secara konsisten setiap tahun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka ditetapkan tahapan pembangunan. Tahapan pembangunan ini merumuskan prioritas pembangunan tahunan yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi, misi, serta tujuan dan sasaran kepala daerah. Adapun penahapan serta fokus tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2025–2029 ditetapkan sebagai berikut.

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah	Akselerasi Kinerja Pembangunan Daerah	Pemantapan Kinerja Pembangunan Daerah	Perwujudan Kinerja Pembangunan Daerah
Tema Pembangunan				
				
2026 Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	2027 Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung	2028 Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	2029 Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	2030 Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan

Gambar III. 3 Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah merumuskan tujuan dan sasaran guna mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah yang telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 sebagai berikut.



Gambar III. 4 Cascading Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Adapun tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan transportasi dengan indikator tujuan Indeks pelayanan transportasi, diharapkan pada akhir Tahun 2030 mencapai angka 7,242;
2. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perhubungan dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, diharapkan pada Tahun 2030 mencapai angka 85,35.

Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Ke-1 sebagaimana dimaksud untuk mendukung sasaran daerah Ke-2

“Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan”. Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Ke-2 sebagaimana dimaksud untuk mendukung sasaran daerah Ke-1 “Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis”. Sasaran daerah dimaksud mendukung pada tujuan Daerah “Mewujudkan Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan”.

B. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan “Meningkatkan kualitas layanan transportasi” terdapat beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi di Jawa Tengah, dengan indikator Rasio konektivitas provinsi pada Tahun 2030 sebesar 0,401;
2. Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah, dengan indikator Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi pada Tahun 2030 sebesar 99,9853%.

Untuk mendukung pencapaian tujuan “Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perhubungan” terdapat beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Perhubungan, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perhubungan pada Tahun 2030 sebesar 81,80%;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perhubungan, dengan indikator Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perhubungan pada Tahun 2030 sebesar 3,30.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dijabarkan menjadi rumusan program sebagai berikut.



Gambar III. 5 Rangkuman Program Pembangunan Daerah

Tabel III. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi		Indeks Pelayanan Transportasi	Angka	6,345	6,614	6,660	6,788	6,904	7,019	7,126	7,242	7,242
		Meningkatnya Keselamatan Perjalanan Transportasi di Jawa Tengah	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi	%	99,9824	99,9830	99,9836	99,9838	99,9842	99,9846	99,9850	99,9853	99,9853
		Meningkatnya Konektivitas Transportasi di Jawa Tengah	Rasio Konektivitas Provinsi	Angka	0,206	0,264	0,274	0,302	0,327	0,352	0,375	0,401	0,401
2	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perhubungan		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	Angka	83,03	85,09	85,12	85,15	85,20	85,25	85,30	85,35	85,35
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	Angka	80,13	81,50	81,55	81,60	81,65	81,70	81,75	81,80	81,80
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perhubungan	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	Angka	3,08	3,03	3,07	3,11	3,15	3,19	3,23	3,30	3,30

Sumber : Hasil Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah -langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah akan dicapai. Rumusan strategi dilakukan melalui metode analisa SWOT dalam melihat Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman) dan diformulasikan dalam pohon kinerja yang merupakan landasan berpikir logis dari proses bisnis yang dilakukan. Pohon Kinerja merupakan alat bantu untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Rumusan strategi yang disusun bersifat operasional yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan – kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah dengan:

1. Meningkatkan keterhubungan antar wilayah dengan meningkatkan cakupan layanan transportasi, meningkatkan kualitas layanan angkutan umum meningkatkan kemudahan perpindahan Antarmoda serta mengembangkan system jaringan dan simpul transportasi;
2. Meningkatkan keselamatan layanan transportasi dengan meningkatkan kelayakan sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan implementasi regulasi, serta meningkatkan kualitas SDM Transportasi dan keterlibatan masyarakat;
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian, dan keuangan;
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa. Arah kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi wilayah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Kebijakan tersebut disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah 2025-2045 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. Dalam menjabarkan sasaran daerah, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan. Pemikiran di atas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari perumusan arah kebijakan pembangunan di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Arah kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan Daerah: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan	Sasaran Daerah : Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan	Memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah melalui	Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antardaerah dan kewilayahan dengan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan selaras dengan perencanaan tata ruang yang responsif.
Tujuan Dinas Perhubungan : Meningkatkan kualitas layanan transportasi	Sasaran Dinas Perhubungan : Meningkatnya Konektivitas Transportasi di Jawa Tengah	Meningkatkan keterhubungan antar wilayah dengan meningkatkan cakupan layanan transportasi, meningkatkan kualitas layanan angkutan umum meningkatkan kemudahan perpindahan Antarmoda serta mengembangkan system jaringan dan simpul transportasi	1. Peningkatan jaringan trayek angkutan jalan melalui fasilitasi perizinan dan perumusan kebijakan 2. Peningkatan Penumpang angkutan umum yang terlayani pada periode arus lalu lintas tinggi melaui pengendalian dan pengawasan penyediaan angkutan umum; 3. Peningkatan kunjungan Bus dan penumpang di terminal tipe B 4. Peningkatan implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi 5. Peningkatan jumlah penduduk terlayani (Trans Jateng) 6. Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP dengan pembangunan dermaga sungai dan pemenuhan Fasilitas Pelayanan Dermaga sungai serta fasilitasi perizinan usaha angkutan laut dan pelabuhan regional.
	Sasaran Dinas Perhubungan : Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah	Meningkatkan keselamatan layanan transportasi dengan meningkatkan kelayakan sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan implementasi regulasi, serta meningkatkan kualitas SDM Transportasi dan keterlibatan masyarakat	1. Peningkatan ruas jalan yang dilengkapi dengan kebutuhan minimal perlengkapan jalan; 2. Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan pada Ruas Jalan Provinsi; 3. Peningkatan kendaraan laik jalan di Jawa Tengah; 4. Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA pada Ruas Jalan Provinsi.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan Daerah : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan	Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Meningkatkan birokrasi yang berintegritas dan dinamis melalui	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan responsif berbasis teknologi informasi 2. Penguatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi
Tujuan Dinas Perhubungan : Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perhubungan	Sasaran Dinas Perhubungan : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Perhubungan	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	1. Peningkatan layanan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Peningkatan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah 3. Peningkatan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah 4. Peningkatan kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah 5. Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset 6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah 7. Penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
	Sasaran Dinas Perhubungan : Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perhubungan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Tabel III. 3 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan jaringan trayek angkutan jalan melalui fasilitasi perizinan dan perumusan kebijakan (Kajian FS dan ATP/WTP Inisiasi Layanan Trans Jateng Executive Koridor Bawen – Tawang; DED Trans Jateng Koridor Kab. Magelang – Kota Magelang – Kab. Temanggung; Masterplan Trans Jateng Jekuti DED Trans Jateng Petanglong) serta sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/barang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)	Peningkatan jaringan trayek angkutan jalan melalui fasilitasi perizinan dan perumusan kebijakan (DED Trans Jateng Jekuti, ATP / WTP Trans Jateng Jekuti, ATP / WTP Trans Jateng Petanglong) serta sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/barang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;	Peningkatan jaringan trayek angkutan jalan melalui fasilitasi perizinan dan perumusan kebijakan (DED Trans Jateng Cibalingmas, ATP / WTP Trans Jateng Cibalingmas) serta sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/barang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;	Peningkatan jaringan trayek angkutan jalan melalui fasilitasi perizinan dan perumusan kebijakan (FS (Sosial dan Teknis) & DED Semarang – Demak, ATP / WTP Trans Jateng Semarang – Demak) serta sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/barang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;	Peningkatan jaringan trayek angkutan jalan melalui fasilitasi perizinan dan perumusan kebijakan (FS Bregasmalang, FS Banglor, FS Wonobanjar) serta sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/barang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
Peningkatan Penumpang angkutan umum yang terlayani pada periode arus lalu lintas tinggi melalui pengendalian dan pengawasan penyediaan angkutan umum;	Peningkatan Penumpang angkutan umum yang terlayani pada periode arus lalu lintas tinggi melalui pengendalian dan pengawasan penyediaan angkutan umum;	Peningkatan Penumpang angkutan umum yang terlayani pada periode arus lalu lintas tinggi melalui pengendalian dan pengawasan penyediaan angkutan umum;	Peningkatan Penumpang angkutan umum yang terlayani pada periode arus lalu lintas tinggi melalui pengendalian dan pengawasan penyediaan angkutan umum;	Peningkatan Penumpang angkutan umum yang terlayani pada periode arus lalu lintas tinggi melalui pengendalian dan pengawasan penyediaan angkutan umum;

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan kunjungan Bus dan penumpang di terminal tipe B melalui peningkatan terminal tipe B kondisi baik dan sesuai Standart dengan pembangunan Terminal Tipe B Kutoarjo, revitalisasi Terminal Tipe B Purbalingga serta pemeliharaan terminal tipe B di Jawa Tengah;	Peningkatan kunjungan Bus dan penumpang di terminal tipe B melalui peningkatan terminal tipe B kondisi baik dan sesuai Standart dengan pembangunan Terminal Tipe B Kutoarjo, revitalisasi Terminal Tipe B Madureso dan Tawangmangu serta pemeliharaan terminal tipe B di Jawa Tengah;	Peningkatan kunjungan Bus dan penumpang di terminal tipe B melalui peningkatan terminal tipe B kondisi baik dan sesuai Standart dengan revitalisasi Terminal Tipe B Banyuputih serta pemeliharaan terminal tipe B di Jawa Tengah;	Peningkatan kunjungan Bus dan penumpang di terminal tipe B melalui peningkatan terminal tipe B kondisi baik dan sesuai Standart dengan revitalisasi Terminal Tipe B Purbalingga, Tawangmangu dan Madureso serta pemeliharaan terminal tipe B di Jawa Tengah;	Peningkatan kunjungan Bus dan penumpang di terminal tipe B melalui peningkatan terminal tipe B kondisi baik dan sesuai Standart dengan revitalisasi Terminal Tipe B Bumiayu, Sukoharjo, dan Penggaron serta pemeliharaan terminal tipe B di Jawa Tengah;
Peningkatan implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis utamanya terminal tipe B dan Jaringan Trayek aglomerasi perkotaan dan pedesaan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada, serta infrastruktur strategis lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;	Peningkatan implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis utamanya terminal tipe B dan Jaringan Trayek aglomerasi perkotaan dan pedesaan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada, serta infrastruktur strategis lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;	Peningkatan implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis utamanya terminal tipe B dan Jaringan Trayek aglomerasi perkotaan dan pedesaan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada, serta infrastruktur strategis lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;	Peningkatan implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis utamanya terminal tipe B dan Jaringan Trayek aglomerasi perkotaan dan pedesaan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada, serta infrastruktur strategis lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;	Peningkatan implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis utamanya terminal tipe B dan Jaringan Trayek aglomerasi perkotaan dan pedesaan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada, serta infrastruktur strategis lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan jumlah penduduk terlayani (Trans Jateng) melalui perluasan cakupan wilayah angkutan aglomerasi perkotaan dengan pemenuhan shelter dan penyediaan angkutan Trans Jateng (lanjutan operasional pada wilayah pengembangan Kedungsepur, Cibalingmas, Gelangmanggung, Keburejo, Subosukawonosraten);	Peningkatan jumlah penduduk terlayani (Trans Jateng) melalui perluasan cakupan wilayah angkutan aglomerasi perkotaan dengan pemenuhan shelter dan penyediaan angkutan Trans Jateng (lanjutan operasional pada wilayah pengembangan Kedungsepur, Cibalingmas, Gelangmanggung, Subosukawonosraten dan penambahan operasional koridor baru pada wilayah pengembangan Gelangmanggung serta Modernisasi armada Trans Jateng pada koridor Semarang-Bawen);	Peningkatan jumlah penduduk terlayani (Trans Jateng) melalui perluasan cakupan wilayah angkutan aglomerasi perkotaan dengan pemenuhan shelter dan penyediaan angkutan Trans Jateng (lanjutan operasional pada wilayah pengembangan Kedungsepur, Cibalingmas, Subosukawonosraten, Gelangmanggung, Subosukawonosraten, Keburejo, dan penambahan operasional koridor baru pada wilayah Petanglong dan Jekuti serta Modernisasi armada Trans Jateng pada koridor Semarang-Bawen dan koridor Purwokerto-Purbalingga);	Peningkatan jumlah penduduk terlayani (Trans Jateng) melalui perluasan cakupan wilayah angkutan aglomerasi perkotaan dengan pemenuhan shelter dan penyediaan angkutan Trans Jateng (lanjutan operasional pada wilayah pengembangan Kedungsepur, Cibalingmas, Subosukawonosraten, Keburejo, Gelangmanggung, Jekuti, Petanglong dan penambahan operasional koridor baru pada wilayah pengembangan Cibalingmas serta Modernisasi armada Trans Jateng pada koridor Semarang-Kendal);	Peningkatan jumlah penduduk terlayani (Trans Jateng) melalui perluasan cakupan wilayah angkutan aglomerasi perkotaan dengan pemenuhan shelter dan penyediaan angkutan Trans Jateng (lanjutan operasional pada wilayah pengembangan Kedungsepur, Cibalingmas, Subosukawonosraten, Jekuti, Petanglong, Keburejo, Gelangmanggung dan Penambahan koridor baru Semarang – Demak (Kedungsepur) serta Modernisasi armada Trans Jateng pada koridor Kutoarjo-Magelang, Solo-Sumberlawang, serta Semarang-Bawen);
Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP dengan pembangunan dermaga sungai dan pemenuhan Fasilitas Pelayanan Dermaga sungai serta fasilitasi perizinan usaha angkutan laut dan pelabuhan regional.	Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP dengan pembangunan dermaga sungai dan pemenuhan Fasilitas Pelayanan Dermaga sungai serta fasilitasi perizinan usaha angkutan laut dan pelabuhan regional.	Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP dengan pembangunan dermaga sungai dan pemenuhan Fasilitas Pelayanan Dermaga sungai serta fasilitasi perizinan usaha angkutan laut dan pelabuhan regional.	Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP dengan pembangunan dermaga sungai dan pemenuhan Fasilitas Pelayanan Dermaga sungai serta fasilitasi perizinan usaha angkutan laut dan pelabuhan regional.	Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP dengan pembangunan dermaga sungai dan pemenuhan Fasilitas Pelayanan Dermaga sungai serta fasilitasi perizinan usaha angkutan laut dan pelabuhan regional.

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan ruas jalan yang dilengkapi dengan kebutuhan minimal perlengkapan jalan utamanya mendukung Konektivitas daerah penghasil pangan (Beras) yang ada di Jawa Tengah (Kab. Cilacap, Kab. Sragen, Kab. Grobogan);	Peningkatan ruas jalan yang dilengkapi dengan kebutuhan minimal perlengkapan jalan utamanya mendukung Akses Pariwisata Borobudur, Dieng, Tawangmangu, Kaliangkrik serta Geopark;	Peningkatan ruas jalan yang dilengkapi dengan kebutuhan minimal perlengkapan jalan utamanya mendukung Akses distribusi daerah industri yang ada di Pantura KITB dan KIK Kendal serta daerah industri potensial lainnya;	Peningkatan ruas jalan yang dilengkapi dengan kebutuhan minimal perlengkapan jalan utamanya peningkatan konektivitas antar wilayah yang ada di Jawa Tengah;	Peningkatan ruas jalan yang dilengkapi dengan kebutuhan minimal perlengkapan jalan utamanya peningkatan konektivitas antar wilayah yang ada di Jawa Tengah;
Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan pada Ruas Jalan Provinsi;	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan pada Ruas Jalan Provinsi;	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan pada Ruas Jalan Provinsi;	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan pada Ruas Jalan Provinsi;	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan pada Ruas Jalan Provinsi;
Peningkatan kendaraan laik jalan di Jawa Tengah melalui Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, Palaksanaan Ramp Check serta peningkatan pemahaman keselamatan kepada pengemudi angkutan umum dan pelajar;	Peningkatan kendaraan laik jalan di Jawa Tengah melalui Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, Palaksanaan Ramp Check serta peningkatan pemahaman keselamatan kepada pengemudi angkutan umum dan pelajar;	Peningkatan kendaraan laik jalan di Jawa Tengah melalui Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, Palaksanaan Ramp Check serta peningkatan pemahaman keselamatan kepada pengemudi angkutan umum dan pelajar;	Peningkatan kendaraan laik jalan di Jawa Tengah melalui Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, Palaksanaan Ramp Check serta peningkatan pemahaman keselamatan kepada pengemudi angkutan umum dan pelajar;	Peningkatan kendaraan laik jalan di Jawa Tengah melalui Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, Palaksanaan Ramp Check serta peningkatan pemahaman keselamatan kepada pengemudi angkutan umum dan pelajar;

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA pada Ruas Jalan Provinsi.	Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA pada Ruas Jalan Provinsi.	Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA pada Ruas Jalan Provinsi.	Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA pada Ruas Jalan Provinsi	Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA pada Ruas Jalan Provinsi.
Peningkatan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Peningkatan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Peningkatan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Peningkatan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Peningkatan layanan administrasi keuangan perangkat daerah
Peningkatan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Peningkatan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Peningkatan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Peningkatan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Peningkatan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
Peningkatan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Peningkatan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Peningkatan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Peningkatan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Peningkatan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah
Peningkatan kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Peningkatan kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Peningkatan kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Peningkatan kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Peningkatan kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah
Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

3.3 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan renstra dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis

Hasil identifikasi terdapat 2 (dua) pernyataan Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diantaranya :

1. Berkurangnya layanan pada jaringan trayek AKDP pada Sasaran Meningkatnya Konektivitas Transportasi di Jawa Tengah;
2. Meningkatnya frekuensi kecelakaan transportasi pada Sasaran Meningkatnya Keselamatan Perjalanan Transportasi di Jawa Tengah;

Sesuai dengan perhitungan skala resiko terdapat pernyataan resiko yang membutuhkan Rencana Tindak Pengendalian. Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sesuai tabel berikut.

Tabel III. 4 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi JawaTengah Tahun 2025 – 2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Konektivitas Transportasi di Jawa Tengah	Rasio Konektivitas Provinsi	Berkurangnya layanan pada jaringan trayek AKDP	9	Ketidakmampuan pengusaha transportasi untuk menyediakan layanan angkutan sesuai ekspektasi masyarakat (ekonomi)	Terhambatnya distribusi orang, barang dan jasa	Evaluasi Jaringan Trayek dan Tarif	Kepala Dinas Perhubungan	12 Bulan setiap tahun
Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi	Meningkatnya frekuensi Kecelakaan Transportasi	12	1. <i>Human Error</i> ; 2. Ketidak laikan kendaraan; 3. Cuaca/ bencana; 4. Kondisi Medan ; 5. Fasilitas keselamatan	Adanya korban , kerugian material dan kemacetan lalu lintas	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk kecepatan respon penanganan, Sosialisasi <i>call center</i> fasilitas kesehatan, Sosilisasi pertolongan pertama terhadap penanganan kecelakaan	Kepala Dinas Perhubungan	12 Bulan setiap tahun

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Tahun 2026-2030 yang selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagaimana Tabel, Sebagai berikut :

Tabel IV. 1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perhubungan *									66.408.998.000		70.790.626.000		76.725.776.000		76.975.776.000		72.645.776.000	Dinas Perhubung an	
				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perhubung an *	Angka	85,09	85,12	85,15		85,2		85,25		85,3		85,35		Dinas Perhubung an	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Perhubungan **								65.992.398.000		70.374.026.000		76.255.776.000		76.505.776.000		72.175.776.000	Dinas Perhubung an	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perhubung an **	Angka	81,5	81,55	81,6	65.992.398.000	81,65	70.374.026.000	81,7	76.255.776.000	81,75	76.505.776.000	81,8	72.175.776.000	Dinas Perhubung an	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI ***							64.590.971.000		68.597.099.000		74.274.349.000		74.724.349.000		70.424.349.000	Dinas Perhubung an	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Perhubungan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaia n, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perhubung an ***	%	100	100	100	64.590.971.000	100	68.597.099.000	100	74.274.349.000	100	74.724.349.000	100	70.424.349.000	Dinas Perhubung an	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							46.794.366.000		50.688.719.000		52.108.469.000		52.108.469.000		52.108.469.000	Dinas Perhubung an	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah pada sekretariat	Jumlah jenis dokumen administrai keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Doku men	36	36	36	46.794.366.000	36	50.688.719.000	36	52.108.469.000	36	52.108.469.000	36	52.108.469.000	SUB BAGIAN KEUANGA N	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****							45.949.166.000		49.843.519.000		51.263.269.000		51.263.269.000		51.263.269.000	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang /Bulan	300	300	300	45.949.166.000	300	49.843.519.000	300	51.263.269.000	300	51.263.269.000	300	51.263.269.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi Pegawai di Kantor Induk dan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan, JAWA TENGAH
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							745.200.000		745.200.000		745.200.000		745.200.000		745.200.000	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	12	745.200.000	12	745.200.000	12	745.200.000	12	745.200.000	12	745.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD *****	Laporan	12	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****							1.155.000.000		1.155.000.000		1.155.000.000		1.155.000.000		1.155.000.000	Dinas Perhubungan	
			Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	1	1.155.000.000	1	1.155.000.000	1	1.155.000.000	1	1.155.000.000	1	1.155.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							1.155.000.000		1.155.000.000 0		1.155.000.000		1.155.000.000		1.155.000.000	Dinas Perhubung an	
			Terlaksananya a Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamana n Barang Milik Daerah SKPD *****	Doku men	1	1	1	1.155.000.000	1	1.155.000.000 0	1	1.155.000.000	1	1.155.000.000	1	1.155.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****							175.000.000		175.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000	Dinas Perhubung an	
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada sekretariat	Persentase layanan administra si kepegawaia n perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	175.000.000	100	175.000.000	100	310.000.000	100	310.000.000	100	310.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann va *****							0		0		135.000.000		135.000.000		135.000.000	Dinas Perhubung an	
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapa n *****	Paket	1	N/A	N/A	0	N/A	0	1	135.000.000	1	135.000.000	1	135.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Perhubung an	
			Terlaksananya a Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administra si Kepegawaia n *****	Doku men	1	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN	KOTA SEMARANG OPD Provins

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****							150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Perhubungan	
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	150	150	150	150.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							1.855.500.000		1.855.500.000		1.978.000.000		1.978.000.000		1.978.000.000	Dinas Perhubungan	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah pada sekretariat	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *****	%	100	100	100	1.855.500.000	100	1.855.500.000	100	1.978.000.000	100	1.978.000.000	100	1.978.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							48.000.000		48.000.000		88.000.000		88.000.000		88.000.000	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	48.000.000	1	48.000.000	1	88.000.000	1	88.000.000	1	88.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							82.500.000		82.500.000		165.000.000		165.000.000		165.000.000	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	82.500.000	1	82.500.000	1	165.000.000	1	165.000.000	1	165.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	40	40	40	5.000.000	40	5.000.000	40	5.000.000	40	5.000.000	40	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Perhubungan	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	Dinas Perhubung an	
			Terlaksananya a Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Lapor an	12	12	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****							60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Perhubung an	
			Terlaksananya a Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaa n Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Doku men	12	12	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****							2.115.000.000		1.905.000.000		5.905.000.000		6.355.000.000		1.905.000.000	Dinas Perhubung an	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *****	Unit	16	2	11	2.115.000.000	11	1.905.000.000	15	5.905.000.000	16	6.355.000.000	11	1.905.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000	Dinas Perhubung an	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	2	1	1.800.000.000	1	1.800.000.000	1	1.800.000.000	1	1.800.000.000	1	1.800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pengadaan Mebel *****							50.000.000		0		500.000.000		200.000.000		0	Dinas Perhubung an	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	2	50.000.000	N/A	0	2	500.000.000	1	200.000.000	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							80.000.000		0		1.500.000.000		1.500.000.000		0	Dinas Perhubung an	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	3	80.000.000	N/A	0	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		2.000.000.000		2.000.000.000		0	Dinas Perhubung an	
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							185.000.000		105.000.000		105.000.000		855.000.000		105.000.000	Dinas Perhubung an	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	16	N/A	5	185.000.000	10	105.000.000	10	105.000.000	12	855.000.000	10	105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							11.108.705.000		11.330.480.000		11.330.480.000		11.330.480.000		11.330.480.000	Dinas Perhubung an	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah pada sekretariat	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Lapor an	36	36	36	11.108.705.000	36	11.330.480.000	36	11.330.480.000	36	11.330.480.000	36	11.330.480.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Dinas Perhubung an	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Lapor an	12	12	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							1.589.225.000		1.811.000.000		1.811.000.000		1.811.000.000		1.811.000.000	Dinas Perhubung an	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Lapor an	12	12	12	1.589.225.000	12	1.811.000.000	12	1.811.000.000	12	1.811.000.000	12	1.811.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							9.515.480.000		9.515.480.000		9.515.480.000		9.515.480.000		9.515.480.000	Dinas Perhubung an	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Lapor an	12	12	12	9.515.480.000	12	9.515.480.000	12	9.515.480.000	12	9.515.480.000	12	9.515.480.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							1.387.400.000		1.487.400.000		1.487.400.000		1.487.400.000		1.637.400.000	Dinas Perhubung an	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada sekretariat	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah an daerah yang dilakukan pemelihara an ****	Unit	285	283	288	1.387.400.000	288	1.487.400.000	288	1.487.400.000	288	1.487.400.000	288	1.637.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							857.400.000		857.400.000		857.400.000		857.400.000		857.400.000	Dinas Perhubun g an	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanny a *****	Unit	73	73	73	857.400.000	73	857.400.000	73	857.400.000	73	857.400.000	73	857.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	Dinas Perhubun g an	
			Terlaksananya a Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	24	24	29	80.000.000	29	80.000.000	29	80.000.000	29	80.000.000	29	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							200.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Perhubun g an	
			Terlaksananya a Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi *****	Unit	3	4	1	200.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perhubung an	
			Terlaksananya a Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi *****	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi *****	Unit	92	93	92	100.000.000	92	100.000.000	92	100.000.000	92	100.000.000	92	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		300.000.000	Dinas Perhubung an	
			Terlaksananya a Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi *****	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi *****	Unit	93	93	93	150.000.000	93	150.000.000	93	150.000.000	93	150.000.000	93	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI ***							170.340.000		200.340.000		200.340.000		200.340.000		200.340.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah I Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaia n, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah I Kelas A ***	%	100	100	100	170.340.000	100	200.340.000	100	200.340.000	100	200.340.000	100	200.340.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah I Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah I Kelas A	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Jumlah jenis dokumen administrai keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah I Kelas A ****	Doku men	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah I Kelas A	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrai Pelaksanaa n Tugas ASN ****	Doku men	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah I Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ****	%	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							82.340.000		112.340.000		112.340.000		112.340.000		112.340.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ****	%	100	100	100	82.340.000	100	112.340.000	100	112.340.000	100	112.340.000	100	112.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener- angan Bangunan Kantor *****							37.500.000		67.500.000		67.500.000		67.500.000		67.500.000	Dinas Perhubung- an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung- an Wilayah I Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Pener- angan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen- erangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	37.500.000	1	67.500.000	1	67.500.000	1	67.500.000	1	67.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Perhubung- an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung- an Wilayah I Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap- an Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Dinas Perhubung- an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung- an Wilayah I Kelas A	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	Dinas Perhubung- an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung- an Wilayah I Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							19.340.000		19.340.000		19.340.000		19.340.000		19.340.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah I Kelas A	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	19.340.000	1	19.340.000	1	19.340.000	1	19.340.000	1	19.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah I Kelas A	
			Terlaksananya a Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah I Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah	Laporan	24	24	24	21.000.000	24	21.000.000	24	21.000.000	24	21.000.000	24	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				I Kelas A ****															
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah I Kelas A	
			Terlaksananya a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Lapor an	N/A	N/A	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah I Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Lapor an	12	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							54.000.000		54.000.000		54.000.000		54.000.000		54.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah I Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah an daerah yang dilakukan pemelihara an pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah I Kelas A *****	Unit	11	11	9	54.000.000	9	54.000.000	9	54.000.000	9	54.000.000	9	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	10	10	8	4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***							136.112.000		166.112.000		166.112.000		166.112.000		161.112.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A ***	%	100	100	100	136.112.000	100	166.112.000	100	166.112.000	100	166.112.000	100	161.112.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah II Kelas A	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Jumlah jenis dokumen administra si keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah II Kelas A ****	Doku men	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah II Kelas A	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN *****	Doku men	5	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah II Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A *****	%	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							64.112.000		94.112.000		94.112.000		94.112.000		94.112.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A *****	%	100	100	100	64.112.000	100	94.112.000	100	94.112.000	100	94.112.000	100	94.112.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan							35.500.000		65.500.000		65.500.000		65.500.000		65.500.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Bangunan Kantor *****																Perhubung an Wilayah II Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	35.500.000	1	65.500.000	1	65.500.000	1	65.500.000	1	65.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah II Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah II Kelas A	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah II Kelas A	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							7.612.000		7.612.000		7.612.000		7.612.000		7.612.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah II Kelas A	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	7.612.000	1	7.612.000	1	7.612.000	1	7.612.000	1	7.612.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah II Kelas A	
			Terlaksananya a Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Lapor an	12	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah II Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah II Kelas A *****	Lapor an	12	12	24	8.000.000	24	8.000.000	24	8.000.000	24	8.000.000	24	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah II Kelas A	
			Terlaksananya a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Lapor an	N/A	N/A	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah II Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Lapor an	12	12	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							51.000.000		51.000.000		51.000.000		51.000.000		51.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah II Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah an daerah yang dilakukan pemelihara an pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah II Kelas A *****	Unit	2	2	6	51.000.000	6	51.000.000	6	51.000.000	6	51.000.000	6	51.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	1	1	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***							259.600.000		285.100.000		289.600.000		289.600.000		284.600.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ***	%	100	100	100	259.600.000	100	285.100.000	100	289.600.000	100	289.600.000	100	284.600.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah III Kelas A	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Jumlah jenis dokumen administra si keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah III Kelas A ****	Doku men	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah III Kelas A	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN *****	Doku men	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah III Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ****	%	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							140.000.000		165.500.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ****	%	100	100	100	140.000.000	100	165.500.000	100	170.000.000	100	170.000.000	100	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Pener- angan Bangunan Kantor *****							44.500.000		70.000.000		74.500.000		74.500.000		74.500.000	Dinas Perhubung- an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung- an Wilayah III Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Pener- angan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Pen- erangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	44.500.000	1	70.000.000	1	74.500.000	1	74.500.000	1	74.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	Dinas Perhubung- an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung- an Wilayah III Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap- an Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000	Dinas Perhubung- an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung- an Wilayah III Kelas A	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah III Kelas A	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							52.000.000		52.000.000		52.000.000		52.000.000		52.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah III Kelas A	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	52.000.000	1	52.000.000	1	52.000.000	1	52.000.000	1	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah III Kelas A	
			Terlaksananya a Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Lapor an	12	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****							46.600.000		46.600.000		46.600.000		46.600.000		46.600.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
																		an Wilayah III Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah III Kelas A ****	Lapor an	12	12	24	46.600.000	24	46.600.000	24	46.600.000	24	46.600.000	24	46.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah III Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Lapor an	N/A	N/A	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							45.600.000		45.600.000		45.600.000		45.600.000		45.600.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah III Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Lapor an	12	12	12	45.600.000	12	45.600.000	12	45.600.000	12	45.600.000	12	45.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah III Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah an daerah yang dilakukan pemelihara an pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah III Kelas A *****	Unit	21	21	21	60.000.000	21	60.000.000	21	60.000.000	21	60.000.000	21	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah III Kelas A	
			Terlaksananya a Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi *****	Unit	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah III Kelas A	
			Terlaksananya a Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi *****	Unit	20	20	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI ***							177.200.000		207.200.000		207.200.000		207.200.000		202.200.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah IV Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaia n, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah IV Kelas A ***	%	100	100	100	177.200.000	100	207.200.000	100	207.200.000	100	207.200.000	100	202.200.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah IV Kelas A	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah IV Kelas A	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Jumlah jenis dokumen administra si keuangan perangkat daerah yang disusun pada pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah IV Kelas A ****	Doku men	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah IV Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaa n Tugas ASN *****	Doku men	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah IV Kelas A	
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase layanan administrai kepegawaia n perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah IV Kelas A *****	%	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah IV Kelas A	
			Terlaksanany a Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia n *****	Doku men	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							84.200.000		114.200.000		114.200.000		114.200.000		114.200.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah IV Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A *****	%	100	100	100	84.200.000	100	114.200.000	100	114.200.000	100	114.200.000	100	114.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							37.500.000		67.500.000		67.500.000		67.500.000		67.500.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	37.500.000	1	67.500.000	1	67.500.000	1	67.500.000	1	67.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							21.200.000		21.200.000		21.200.000		21.200.000		21.200.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	21.200.000	1	21.200.000	1	21.200.000	1	21.200.000	1	21.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****							26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah IV Kelas A *****	Lapor an	24	24	24	26.000.000	24	26.000.000	24	26.000.000	24	26.000.000	24	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah IV Kelas A	
			Terlaksananya a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Lapor an	N/A	N/A	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah IV Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Lapor an	12	12	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							54.000.000		54.000.000		54.000.000		54.000.000		54.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah IV Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan an daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah IV Kelas A *****	Unit	8	8	8	54.000.000	8	54.000.000	8	54.000.000	8	54.000.000	8	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah IV Kelas A	
			Terlaksananya a Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi *****	Unit	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah IV Kelas A	
			Terlaksananya a Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi *****	Unit	7	7	7	4.000.000	7	4.000.000	7	4.000.000	7	4.000.000	7	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI ***							162.275.000		192.275.000		192.275.000		192.275.000		187.275.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah V Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A ***	%	100	100	100	162.275.000	100	192.275.000	100	192.275.000	100	192.275.000	100	187.275.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A ****	Dokumen	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS OPD Provinsi
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
																		an Wilayah V Kelas A	
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A *****	%	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS OPD Provinsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							82.200.000		112.200.000		112.200.000		112.200.000		112.200.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A *****	%	100	100	100	82.200.000	100	112.200.000	100	112.200.000	100	112.200.000	100	112.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener- angan Bangunan Kantor *****							36.500.000		66.500.000		66.500.000		66.500.000		66.500.000	Dinas Perhubung- an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung- an Wilayah V Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Pener- angan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen- erangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	36.500.000	1	66.500.000	1	66.500.000	1	66.500.000	1	66.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Dinas Perhubung- an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung- an Wilayah V Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap- an Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubung- an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung- an Wilayah V Kelas A	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	Dinas Perhubung- an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung- an Wilayah V Kelas A	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	1	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Disediakan *****															
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							22.200.000		22.200.000		22.200.000		22.200.000		22.200.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah V Kelas A	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	22.200.000	1	22.200.000	1	22.200.000	1	22.200.000	1	22.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS OPD Provinsi
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah V Kelas A	
			Terlaksananya a Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Lapor an	12	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****							14.075.000		14.075.000		14.075.000		14.075.000		14.075.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah V Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah V Kelas A *****	Lapor an	24	24	24	14.075.000	24	14.075.000	24	14.075.000	24	14.075.000	24	14.075.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah V Kelas A	
			Terlaksananya a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Lapor an	12	12	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							13.075.000		13.075.000		13.075.000		13.075.000		13.075.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah V Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Lapor an	12	12	12	13.075.000	12	13.075.000	12	13.075.000	12	13.075.000	12	13.075.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							53.000.000		53.000.000		53.000.000		53.000.000		53.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah V Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah an daerah yang dilakukan pemelihara an pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah V Kelas A *****	Unit	9	9	7	53.000.000	7	53.000.000	7	53.000.000	7	53.000.000	7	53.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS OPD Provinsi
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	8	8	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***							183.900.000		213.900.000		213.900.000		213.900.000		208.900.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ***	%	100	100	100	183.900.000	100	213.900.000	100	213.900.000	100	213.900.000	100	208.900.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah VI Kelas A	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Jumlah jenis dokumen administra si keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah VI Kelas A ****	Doku men	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah VI Kelas A	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN *****	Doku men	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah VI Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ****	%	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							88.500.000		118.500.000		118.500.000		118.500.000		118.500.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ****	%	100	100	100	88.500.000	100	118.500.000	100	118.500.000	100	118.500.000	100	118.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan							38.500.000		68.500.000		68.500.000		68.500.000		68.500.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Bangunan Kantor *****																Perhubun an Wilayah VI Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	2	1	38.500.000	1	68.500.000	1	68.500.000	1	68.500.000	1	68.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Perhubun an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubun an Wilayah VI Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Perhubun an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubun an Wilayah VI Kelas A	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Perhubun an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubun an Wilayah VI Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah VI Kelas A	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah VI Kelas A	
			Terlaksananya a Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Lapor an	12	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****							27.400.000		27.400.000		27.400.000		27.400.000		27.400.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah VI Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah VI Kelas A *****	Lapor an	24	12	24	27.400.000	24	27.400.000	24	27.400.000	24	27.400.000	24	27.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Lapor an	N/A	N/A	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							26.400.000		26.400.000		26.400.000		26.400.000		26.400.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Lapor an	12	12	12	26.400.000	12	26.400.000	12	26.400.000	12	26.400.000	12	26.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan an daerah yang dilakukan pemelihara an pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah VI Kelas A *****	Unit	13	13	16	55.000.000	16	55.000.000	16	55.000.000	16	55.000.000	16	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah VI Kelas A	
			Terlaksananya a Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi *****	Unit	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEKALONGAN
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah VI Kelas A	
			Terlaksananya a Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi *****	Unit	12	12	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI ***							312.000.000		512.000.000		712.000.000		512.000.000		507.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Transporta si Jawa Tengah Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A ***	%	100	100	100	312.000.000	100	512.000.000	100	712.000.000	100	512.000.000	100	507.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A ****	Dokumen	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A ****	%	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							41.500.000		41.500.000		41.500.000		41.500.000		41.500.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A ****	%	100	100	100	41.500.000	100	41.500.000	100	41.500.000	100	41.500.000	100	41.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Pener- angan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen- erangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Perhubung- an - Balai Transporta- si Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap- an Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000	Dinas Perhubung- an - Balai Transporta- si Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubung- an - Balai Transporta- si Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda- an yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyelenggara- an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Perhubung- an - Balai Transporta- si Jawa Tengah Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya a Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Lapor an	12	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****							0		200.000.000		400.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Transporta si Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Balai Transporta si Jawa Tengah Kelas A ****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	1	200.000.000	2	400.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		200.000.000		400.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Transporta si Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	1	200.000.000	2	400.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Transporta si Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah yang disusun pada Balai Transporta si Jawa Tengah Kelas A ****	Lapor an	12	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Transporta si Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Lapor an	12	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							252.500.000		252.500.000		252.500.000		252.500.000		252.500.000	Dinas Perhubung an - Balai Transporta si Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah an daerah yang dilakukan pemelihara an pada Balai Transporta si Jawa Tengah Kelas A ****	Unit	7	7	7	252.500.000	7	252.500.000	7	252.500.000	7	252.500.000	7	252.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Transporta si Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya a Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Transporta si Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya a Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi asi *****	Unit	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	Dinas Perhubung an - Balai Transporta si Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksanany a Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi *****	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi *****	Unit	5	5	5	2.500.000	5	2.500.000	5	2.500.000	5	2.500.000	5	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perhubungan **							416.600.000		416.600.000		470.000.000		470.000.000		470.000.000	Dinas Perhubung an	
				Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perhubung an **	Angka	3,03	3,07	3,11	416.600.000	3,15	416.600.000	3,19	470.000.000	3,23	470.000.000	3,3	470.000.000	Dinas Perhubung an	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI ***							416.600.000		416.600.000		470.000.000		470.000.000		470.000.000	Dinas Perhubung an	
			Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Perhubungan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perhubung an ***	%	100	100	100	416.600.000	100	416.600.000	100	470.000.000	100	470.000.000	100	470.000.000	Dinas Perhubung an	
		Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****							416.600.000		416.600.000		470.000.000		470.000.000		470.000.000	Dinas Perhubung an	
			Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan	%	100	100	100	416.600.000	100	416.600.000	100	470.000.000	100	470.000.000	100	470.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				perundang an ****															
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****							261.600.000		261.600.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Perhubung an	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah *****	Doku men	9	9	9	261.600.000	9	261.600.000	9	300.000.000	9	300.000.000	9	300.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****							85.000.000		85.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perhubung an	
			Terlaksananya a Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Lapor an	4	4	4	85.000.000	4	85.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perhubung an	
			Terlaksananya a Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulk an dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	N/A	N/A	126	50.000.000	126	50.000.000	126	50.000.000	126	50.000.000	126	50.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyelenggara an Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Perhubung an	
			Terselenggara nya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengg araan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Doku men	N/A	N/A	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi *									142.811.886.00 0		160.438.983. 000		200.749.755.00 0		229.993.702.00 0		277.577.027.00 0	Dinas Perhubung an	
				Indeks Pelayanan Transporta si *	Angka	6,614	6,66	6,788		6,904		7,019		7,126		7,242		Dinas Perhubung an	
		Meningkatnya Konektivitas Transportasi di Jawa Tengah **							130.602.007.00 0		142.326.510. 000		171.718.153.00 0		198.623.920.00 0		230.986.020.00 0	Dinas Perhubung an	
				Rasio Konektivita s Provinsi **	Angka	0,264	0,274	0,302	130.602.007.00 0	0,327	142.326.510. 000	0,352	171.718.153.00 0	0,375	198.623.920.00 0	0,401	230.986.020.00 0	Dinas Perhubung an	
		PROGRAM PENYELENG GARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							2.063.478.000		2.143.478.00 0		2.058.478.000		2.013.478.000		2.083.478.000	Dinas Perhubung an - Bidang Angkutan Jalan	
			Meningkatnya jaringan trayek angkutan jalan	Rasio Trayek Angkutan Jalan ***	Angka	42,08	44,24	46,74	1.033.478.000	48,28	1.043.478.00 0	49,83	958.478.000	51,39	913.478.000	52,43	983.478.000	Dinas Perhubung an - Bidang Angkutan Jalan	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****							40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Perhubung an - Bidang Angkutan Jalan	
			Bertambahny a jumlah total angkutan barang berijin	Persentase angkutan barang yang berijin ****	%	67,56	68,25	68,95	40.000.000	69,64	40.000.000	70,33	40.000.000	71,02	40.000.000	71,72	40.000.000	Pokja Angkutan Tidak Dalam Trayek	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****							40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Perhubung an - Bidang Angkutan Jalan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi *****	Unit	264	60	60	40.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	Pokja Angkutan Tidak Dalam Trayek	Bidang Angkutan Jalan JAWA TENGAH
		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****							650.288.000		560.288.000		475.288.000		430.288.000		500.288.000	Dinas Perhubun- an - Bidang Angkutan Jalan	
			Bertambahnya Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****	%	35,9	41,03	48,72	650.288.000	51,28	560.288.000	53,85	475.288.000	56,41	430.288.000	56,41	500.288.000	Pokja Angkutan Aglomerasi	
		Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi *****							525.000.000		315.000.000		210.000.000		210.000.000		325.000.000	Dinas Perhubun- an - Bidang Angkutan Jalan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersusunnya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi *****	Doku men	2	2	5	525.000.000	3	315.000.000	2	210.000.000	2	210.000.000	3	325.000.000	Pokja Angkutan Aglomerasi	BANYUMAS BATANG Bidang Angkutan Jalan CILACAP MAGELANG PEKALONGAN TEMANGGUNG
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi *****							125.288.000		245.288.000		265.288.000		220.288.000		175.288.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
			Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi *****	Doku men	7	7	7	125.288.000	8	245.288.000	10	265.288.000	11	220.288.000	12	175.288.000	Pokja Angkutan Aglomerasi	BANYUMAS Bidang Angkutan Jalan CILACAP GROBOGAN JEPARA KENDAL KOTA SURAKARTA MAGELANG PATI PEKALONGAN PURBALINGGA PURWOREJO SEMARANG SRAGEN TEMANGGUNG WONOGIRI
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****							35.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
			Bertambahnya jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan	Presentase jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan ****	%	4	9	13,04	35.000.000	17,39	135.000.000	21,74	135.000.000	26,09	135.000.000	30,43	135.000.000	Pokja Angkutan Aglomerasi	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi *****							0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
			Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	1	N/A	N/A	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Pokja Angkutan Aglomerasi	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi *****							35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
			Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	1	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	Pokja Angkutan Aglomerasi	BANYUMAS Bidang Angkutan Jalan BLORA DEMAK KENDAL MAGELANG SEMARANG SRAGEN TEGAL
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****							223.190.000		223.190.000		223.190.000		223.190.000		223.190.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
			Bertambahnya Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin	Persentase Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin ****	%	52,34	52,71	53,1	223.190.000	53,53	223.190.000	53,99	223.190.000	54,47	223.190.000	54,99	223.190.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *****							223.190.000		223.190.000		223.190.000		223.190.000		223.190.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
			Tersedianya Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan *****	Unit	22	24	26	223.190.000	28	223.190.000	30	223.190.000	32	223.190.000	34	223.190.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek	Bidang Angkutan Jalan JAWA TENGAH KOTA SEMARANG
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****							35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
			Bertambahnya jumlah total angkutan taksi berijin	Persentase angkutan taksi terpenuhi *****	%	18,17	18,48	18,85	35.000.000	19,22	35.000.000	19,59	35.000.000	19,96	35.000.000	20,32	35.000.000	Pokja Angkutan Tidak Dalam Trayek	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *****							35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
			Tersedianya Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan *****	Unit	76	32	37	35.000.000	37	35.000.000	37	35.000.000	37	35.000.000	37	35.000.000	Pokja Angkutan Tidak Dalam Trayek	Bidang Angkutan Jalan CILACAP JAWA TENGAH KOTA SEMARANG PURBALINGGA SRAGEN WONOSOBO
		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
			Bertambahnya Trayek yang Ditetapkan Pemutakhiran Tarif	Presentase Trayek yang Ditetapkan Pemutakhiran Tarif *****	%	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
			Tersedianya Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan n Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi *****	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek	Bidang Angkutan Jalan JAWA TENGAH
			Meningkatnya penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru yang menggunakan angkutan umum	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum ***	%	67,05	69,13	69,85	1.030.000.000	70,55	1.100.000.000	71,26	1.100.000.000	71,97	1.100.000.000	72,69	1.100.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****							1.030.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
			Bertambahnya penumpang angkutan umum yang terlayani	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani *****	Orang	33656899	34702831	35063886	1.030.000.000	35414525	1.100.000.000	35768670	1.100.000.000	36126357	1.100.000.000	36487620	1.100.000.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi *****							1.030.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
			Terkendalinya dan Terawasinya KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi *****	Laporan	3	3	3	1.030.000.000	3	1.100.000.000	3	1.100.000.000	3	1.100.000.000	3	1.100.000.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek	Bidang Angkutan Jalan JAWA TENGAH
		PROGRAM PENYELENG GARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							6.451.690.000		7.283.190.000		4.593.190.000		6.938.190.000		26.283.190.000	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
			Meningkatnya jumlah kunjungan bus di terminal tipe B	Persentase kunjungan Bus pada terminal tipe B ***	%	69,85	69,99	70,14	6.073.500.000	70,28	6.905.000.000	70,43	3.515.000.000	70,58	6.560.000.000	70,72	25.905.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B ****							6.073.500.000		6.905.000.000		3.515.000.000		6.560.000.000		25.905.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
			Meningkatnya Jumlah Terminal Tipe B sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Presentase Keterpenuhan SPM Terminal Tipe B ****	%	51,56	52,24	53,48	6.073.500.000	54,72	6.905.000.000	55,96	3.515.000.000	57,2	6.560.000.000	58,44	25.905.000.000	Pokja Terminal Penumpang	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B *****							105.000.000		105.000.000		315.000.000		210.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
			Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B *****	Dokumen	2	1	1	105.000.000	1	105.000.000	3	315.000.000	2	210.000.000	1	105.000.000	Pokja Terminal Penumpang	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian KARANGANYAR PEKALONGAN TEMANGGUNG WONOGIRI
		Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) *****							1.100.000.000		2.150.000.000		3.200.000.000		6.350.000.000		25.800.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
			Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) *****	Unit	1	1	1	1.100.000.000	2	2.150.000.000	1	3.200.000.000	3	6.350.000.000	3	25.800.000.000	Pokja Terminal Penumpang	BATANG Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian BREBES KARANGANYAR KOTA SEMARANG PURBALINGGA SUKOHARJO TEMANGGUNG
		Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang *****							4.868.500.000		4.650.000.000		0		0		0	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
			Terbangunnya Terminal Tipe B yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang *****	Unit	1	1	1	4.868.500.000	1	4.650.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Terminal Penumpang	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian PURWOREJO
			Meningkatnya total implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Persentase implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis ***	%	47,69	50,32	52,95	378.190.000	55,58	378.190.000	58,21	1.078.190.000	60,83	378.190.000	63,46	378.190.000	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi ****							378.190.000		378.190.000		1.078.190.000		378.190.000		378.190.000	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
			Meningkatnya Implementasi Dokumen RIJLLAJ	Persentase implementasi dokumen RIJLLAJ ****	%	39,02	41,46	43,9	378.190.000	47,56	378.190.000	52,44	1.078.190.000	56,1	378.190.000	59,76	378.190.000	Pokja Perencanaan Transportasi	
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi *****							378.190.000		378.190.000		1.078.190.000		378.190.000		378.190.000	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
			Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi *****	Dokumen	2	2	2	378.190.000	3	378.190.000	4	1.078.190.000	3	378.190.000	3	378.190.000	Pokja Perencanaan Transportasi	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian JAWA TENGAH
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ***	%	19,98	20,98	22,04	105.000.000	23,15	105.000.000	24,32	105.000.000	25,53	105.000.000	26,83	105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B ****							105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Bertambahnya rata - rata terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ****	%	30,83	31,36	31,91	105.000.000	32,46	105.000.000	33,03	105.000.000	33,6	105.000.000	34,18	105.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) *****							105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara *****	Unit	2	1	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A GROBOGAN SEMARANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A ***	%	3,66	3,83	3,99	105.000.000	4,16	105.000.000	4,41	105.000.000	4,66	105.000.000	4,91	105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B ****							105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Bertambahnya rata - rata terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A ****	%	39,06	39,56	40,06	105.000.000	40,56	105.000.000	41,06	105.000.000	41,56	105.000.000	42,06	105.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) *****							105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara *****	Unit	1	1	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A BLORA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							525.000.000		525.000.000		525.000.000		525.000.000		525.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ***	%	40,87	42,95	45,11	525.000.000	47,37	525.000.000	49,74	525.000.000	52,23	525.000.000	54,86	525.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B ****							525.000.000		525.000.000		525.000.000		525.000.000		525.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Bertambahnya rata - rata terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A *****	%	28,19	28,32	28,44	525.000.000	28,56	525.000.000	28,69	525.000.000	28,82	525.000.000	28,94	525.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) *****							525.000.000		525.000.000		525.000.000		525.000.000		525.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terhabilitasi dan terpelihara *****	Unit	3	5	5	525.000.000	5	525.000.000	5	525.000.000	5	525.000.000	5	525.000.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A BOYOLALI KARANGANYAR SRAGEN SUKOHARJO WONOGIRI
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ***	%	7,28	7,66	8,04	105.000.000	8,43	105.000.000	8,86	105.000.000	9,3	105.000.000	9,77	105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B ****							105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Bertambahnya rata - rata terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A *****	%	37,53	37,92	38,31	105.000.000	38,71	105.000.000	39,11	105.000.000	39,52	105.000.000	39,93	105.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) *****							105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara *****	Unit	1	1	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A MAGELANG PURWOREJO TEMANGGUNG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A ***	%	39,45	41,45	43,53	105.000.000	45,74	105.000.000	48,02	105.000.000	50,44	105.000.000	52,99	105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B *****							105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Bertambahnya rata - rata terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A *****	%	31,31	31,44	31,71	105.000.000	31,71	105.000.000	31,84	105.000.000	31,98	105.000.000	32,12	105.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) *****							105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara *****	Unit	1	1	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A BANJARNEGARA PURBALINGGA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ***	%	25,5	26,76	28,16	210.000.000	29,58	210.000.000	31,05	210.000.000	32,67	210.000.000	34,3	210.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B ****							210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Bertambahnya rata - rata terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A *****	%	42,27	42,6	42,94	210.000.000	43,29	210.000.000	43,63	210.000.000	43,98	210.000.000	44,33	210.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) *****							210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terhabilitasi dan terpelihara *****	Unit	1	2	2	210.000.000	2	210.000.000	2	210.000.000	2	210.000.000	2	210.000.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A BATANG BREBES PEKALONGAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							119.805.449.000		130.264.952.000		162.528.595.000		187.240.362.000		200.701.462.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
			Meningkatnya Jumlah Penduduk Terlayani (Trans Jateng)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum (Trans Jateng) ***	%	4,29	4,4	4,42	119.805.449.000	4,47	130.264.952.000	4,51	162.528.595.000	4,57	187.240.362.000	4,62	200.701.462.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi ****							974.690.000		1.904.690.000		7.814.690.000		7.524.690.000		5.424.690.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
			Bertambahnya Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi	Persentase Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi ****	%	27,03	27,58	28,06	974.690.000	29,17	1.904.690.000	32,03	7.814.690.000	34,26	7.524.690.000	36,49	5.424.690.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi *****							974.690.000		1.904.690.000		7.814.690.000		7.524.690.000		5.424.690.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkap an Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia *****	Unit	6	6	6	974.690.000	14	1.904.690.00 0	36	7.814.690.000	28	7.524.690.000	28	5.424.690.000	SEKSI SARANA DAN PRASARAN A	Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A BANYUMAS BATANG CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KENDAL KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SEMARANG KUDUS MAGELANG PATI PURBALINGGA PURWOREJO SRAGEN SUKOHARJO TEMANGGUNG WONOGIRI
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****							118.830.759.00 0		128.360.262. 000		154.713.905.00 0		179.715.672.00 0		195.276.772.00 0	Dinas Perhubung an - Balai Transporta si Jawa Tengah Kelas A	
			Meningkatnya jumlah penumpang terlayani angkutan umum (Trans Jateng) di kawasan aglomerasi perkotaan	Jumlah penumpang terlayani angkutan umum (Trans Jateng) di kawasan aglomerasi perkotaan ****	Orang	9.499. 742	9.501. 790	9.557. 771	118.830.759.00 0	9.774. 613	128.360.262. 000	10.61 7.501	154.713.905.00 0	11.83 0.758	179.715.672.00 0	12.55 3.570	195.276.772.00 0	SEKSI OPERASIO NAL	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****							118.830.759.00 0		128.360.262. 000		154.713.905.00 0		179.715.672.00 0		195.276.772.00 0	Dinas Perhubung an - Balai Transporta si Jawa Tengah Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi *****	Unit	112	115	115	118.830.759.000	129	128.360.262.000	157	154.713.905.000	171	179.715.672.000	185	195.276.772.000	SEKSI OPERASIONAL	Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A BANYUMAS BATANG CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KENDAL KOTA MAGELANG KOTA SURAKARTA KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN PURBALINGGA PURWOREJO SEMARANG SRAGEN SUKOHARJO TEMANGGUNG WONOGIRI
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN ***							1.126.390.000		1.479.890.000		1.382.890.000		1.276.890.000		762.890.000	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran	
			Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP ***	Angka	0,381	0,402	0,472	1.126.390.000	0,534	1.479.890.000	0,596	1.382.890.000	0,652	1.276.890.000	0,715	762.890.000	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran	
		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan ****							326.890.000		326.890.000		326.890.000		326.890.000		326.890.000	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran	
			Bertambahnya dokumen terlengkap sebagai persyaratan ijin trayek berdasarkan tingkatannya	Persentase dokumen terlengkap sebagai persyaratan ijin trayek berdasarkan tingkatannya *****	%	42,42	42,42	51,52	326.890.000	57,58	326.890.000	63,64	326.890.000	69,7	326.890.000	75,76	326.890.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *****							326.890.000		326.890.000		326.890.000		326.890.000		326.890.000	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran	
			Tersedianya Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Serizinan	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewengana n Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan *****	Unit	2	4	3	326.890.000	2	326.890.000	2	326.890.000	2	326.890.000	2	326.890.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	BATANG Bidang Pelayaran BREBES KENDAL KOTA SURAKARTA SUKOHARJO TEGAL
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan, Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas *****							75.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Bertambahnya perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang diawasi ****	%	36,69	46,32	56,84	75.000.000	67,37	100.000.000	77,89	100.000.000	88,42	100.000.000	98,95	100.000.000	Pokja Angkutan Laut	
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *****							75.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan, Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan, Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *****	Dokumen	33	38	30	75.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	Pokja Angkutan Laut	Bidang Pelayaran CILACAP JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA SEMARANG
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional ****							85.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran	
			Bertambahnya Berth occupancy ratio	Berth occupancy ratio ****	%	25,9	19,64	20,44	85.000.000	21,24	100.000.000	22,04	100.000.000	22,84	100.000.000	23,64	100.000.000	Pokja Kepelabuhanan	
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional *****							85.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Pelabuhan Pengumpulan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian *****	Unit	8	8	8	85.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	Pokja Kepelabuhanan	Bidang Pelayaran CILACAP PATI PEKALONGAN REMBANG SEMARANG
		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****							639.500.000		953.000.000		856.000.000		750.000.000		236.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran	
			Bertambahnya Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi	Persentase Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi *****	%	47,5	52,5	60	639.500.000	67,5	953.000.000	75	856.000.000	80	750.000.000	87,5	236.000.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****							70.000.000		130.000.000		70.000.000		0		0	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran	
			Tersedianya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan *****	Laporan	1	1	1	70.000.000	3	130.000.000	1	70.000.000	N/A	0	N/A	0	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	BATANG Bidang Pelayaran BREBES KENDAL KOTA SURAKARTA SUKOHARJO TEGAL

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pembanguna n Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****							533.000.000		783.000.000		586.000.000		550.000.000		36.000.000	Dinas Perhubung an - Bidang Pelayaran	
			Terbangunnya a Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun *****	Unit	N/A	1	1	533.000.000	1	783.000.000	1	586.000.000	1	550.000.000	1	36.000.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberan gan	BATANG Bidang Pelayaran BREBES KENDAL KOTA SURAKARTA SUKOHARJO TEGAL
		Pengoperasia n dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****							0		0		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Perhubung an - Bidang Pelayaran	
			Terlaksananya a Pengoperasia n dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperas ian dan Pemelihara an *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberan gan	Bidang Pelayaran JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****							36.500.000		40.000.000		0		0		0	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran	
			Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia *****	Unit	28	25	18	36.500.000	28	40.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Bidang Pelayaran BREBES KOTA SURAKARTA SUKOHARJO TEGAL
	Meningkatnya Keselamatan Perjalanan Transportasi di Jawa Tengah **								12.209.879.000		18.112.473.000		29.031.602.000		31.369.782.000		46.591.007.000	Dinas Perhubungan	
				Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi **	%	99,98 ₃	99,98 ₄	99,98 ₄	12.209.879.000	99,98 ₄	18.112.473.000	99,98 ₅	29.031.602.000	99,98 ₅	31.369.782.000	99,98 ₅	46.591.007.000	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							5.059.428.000		6.373.329.000		11.303.218.000		12.846.323.000		28.919.613.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	
			Meningkatnya Jumlah ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi ***	%	5,78	6,36	6,94	4.759.428.000	7,51	6.073.329.000	8,09	11.003.218.000	8,67	12.546.323.000	9,25	28.619.613.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi *****							4.262.683.000		5.546.584.000		10.471.473.000		12.039.578.000		28.092.868.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya pemenuhan perlengkapan jalan terpasang	Persentase perlengkapan jalan terpenuhi *****	%	63,63	63,9	64,24	4.262.683.000	66,47	5.546.584.000	69,1	10.471.473.000	72,93	12.039.578.000	77,21	28.092.868.000	Pokja Rekayasa Lalu Lintas Jalan	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi *****							4.262.683.000		5.546.584.000		10.471.473.000		12.039.578.000		28.092.868.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	
			Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia *****	Unit	154	513	310	4.262.683.000	622	5.546.584.000	800	10.471.473.000	863	12.039.578.000	1608	28.092.868.000	Pokja Rekayasa Lalu Lintas Jalan	Bidang Lalu Lintas Jalan JAWA TENGAH
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *****							421.745.000		451.745.000		456.745.000		431.745.000		451.745.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	
			Tercapainya penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Kabupaten /Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng *****	Kabupaten /Kota	15	17	19	75.000.000	19	75.000.000	21	75.000.000	21	75.000.000	23	75.000.000	Pokja Manajemen Lalu Lintas Jalan	
		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	
			Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *****	Dokumen	30	30	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	Pokja Manajemen Lalu Lintas Jalan	Bidang Lalu Lintas Jalan JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Bertambahnya jumlah rekomendasi hasil Forum LLAJ	Jumlah Rekomendasi hasil forum LLAJ ****	Dokumen	12	12	12	346.745.000	12	376.745.000	12	381.745.000	12	356.745.000	12	376.745.000	Pokja Keselamatan n Lalu Lintas Jalan	
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi *****							346.745.000		376.745.000		381.745.000		356.745.000		376.745.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	
			Terlaksananya a Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi *****	Laporan	6	6	13	346.745.000	13	376.745.000	13	381.745.000	13	356.745.000	13	376.745.000	Pokja Keselamatan n Lalu Lintas Jalan	Bidang Lalu Lintas Jalan JAWA TENGAH
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi ****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	
			Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan rekomendasi andalalin dibandingkan dengan jumlah rekomendasi andalalin yang dikeluarka	Persentase tingkat kepatuhan pelaksanaan rekomendasi andalalin ****	%	70,18	71,66	73,13	75.000.000	74,61	75.000.000	76,08	75.000.000	77,56	75.000.000	79,03	75.000.000	Pokja Manajemen Lalu Lintas Jalan	
		Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin *****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	
			Ditetapkannya a Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan *****	Dokumen	31	32	33	75.000.000	34	75.000.000	35	75.000.000	36	75.000.000	37	75.000.000	Pokja Manajemen Lalu Lintas Jalan	Bidang Lalu Lintas Jalan JAWA TENGAH
			Meningkatnya kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	Persentase kendaraan laik jalan di Jawa Tengah ***	%	97,98	98,01	98,03	300.000.000	98,05	300.000.000	98,08	300.000.000	98,1	300.000.000	98,12	300.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan *****							300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Bertambahnya Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di Jawa tengah	Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus di Jawa tengah ****	Unit	31392 ₇	31790 ₈	31798 ₄	300.000.000	31806 ₁	300.000.000	31813 ₇	300.000.000	31821 ₃	300.000.000	31829 ₀	300.000.000	Pokja Keselamatan n Lalu Lintas Jalan	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi *****							250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi *****	Laporan	135	135	135	250.000.000	135	250.000.000	135	250.000.000	135	250.000.000	135	250.000.000	Pokja Keselamatan n Lalu Lintas Jalan	Bidang Lalu Lintas Jalan JAWA TENGAH
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****	Laporan	66	66	66	50.000.000	66	50.000.000	66	50.000.000	66	50.000.000	66	50.000.000	Pokja Keselamatan n Lalu Lintas Jalan	Bidang Lalu Lintas Jalan JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		PROGRAM PENYELENG GARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							754.043.000		1.667.878.000		2.360.398.000		2.383.168.000		2.397.138.000	Dinas Perhubun- g an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubun- g an Wilayah I Kelas A	
			Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubun- g an Wilayah I Kelas A ***	%	3	3	3	543.418.000	3	1.457.253.000	3	2.149.773.000	3	2.172.543.000	3	2.186.513.000	Dinas Perhubun- g an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubun- g an Wilayah I Kelas A	
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi ****							543.418.000		1.457.253.000		2.149.773.000		2.172.543.000		2.186.513.000	Dinas Perhubun- g an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubun- g an Wilayah I Kelas A	
			Meningkatnya rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubun- g an Wilayah I Kelas A ****	%	11,11	16,67	33,33	543.418.000	61,11	1.457.253.000	77,78	2.149.773.000	88,89	2.172.543.000	100	2.186.513.000	SEKSI LALU LINTAS	
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi *****							145.680.000		145.680.000		145.680.000		145.680.000		145.680.000	Dinas Perhubun- g an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubun- g an Wilayah I Kelas A	
			Terlaksananya a Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan	Laporan	56	56	56	145.680.000	56	145.680.000	56	145.680.000	56	145.680.000	56	145.680.000	SEKSI LALU LINTAS	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A DEMAK GROBOGAN KENDAL KOTA SEMARANG SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Provinsi *****															
		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas *****							397.738.000		1.311.573.000		2.004.093.000		2.026.863.000		2.040.833.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan *****	Unit	1	1	2	397.738.000	5	1.311.573.000	4	2.004.093.000	2	2.026.863.000	2	2.040.833.000	SEKSI LALU LINTAS	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A DEMAK GROBOGAN KENDAL KOTA SEMARANG
			Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ***	%	52,43	54,84	57,12	210.625.000	59,3	210.625.000	61,36	210.625.000	63,32	210.625.000	65,19	210.625.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ****							210.625.000		210.625.000		210.625.000		210.625.000		210.625.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Bertambahnya Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A *****	Unit	2241	2241	2241	210.625.000	2241	210.625.000	2241	210.625.000	2241	210.625.000	2241	210.625.000	SEKSI ANGKUTAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal *****							185.625.000		185.625.000		185.625.000		185.625.000		185.625.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan an Wilayah I Kelas A	
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal *****	Laporan	36	36	36	185.625.000	36	185.625.000	36	185.625.000	36	185.625.000	36	185.625.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A DEMAK GROBOGAN KOTA SEMARANG
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan an Wilayah I Kelas A	
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****	Laporan	2	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A JAWA TENGAH
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							678.295.000		1.314.820.000		2.258.470.000		2.521.480.000		2.511.140.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan an Wilayah II Kelas A	
			Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan an Wilayah II Kelas A ***	%	3	3	3	562.345.000	3	1.198.870.000	3	2.142.520.000	3	2.405.530.000	3	2.395.190.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan an Wilayah II Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *****							562.345.000		1.198.870.000		2.142.520.000		2.405.530.000		2.395.190.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Meningkatnya rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A *****	%	31,25	37,5	43,75	562.345.000	50	1.198.870.000	68,75	2.142.520.000	87,5	2.405.530.000	100	2.395.190.000	SEKSI LALU LINTAS	
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi *****							121.680.000		121.680.000		121.680.000		121.680.000		121.680.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi *****	Laporan	46	46	46	121.680.000	46	121.680.000	46	121.680.000	46	121.680.000	46	121.680.000	SEKSI LALU LINTAS	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A BLORA JEPARA KUDUS PATI REMBANG
		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas *****							440.665.000		1.077.190.000		2.020.840.000		2.283.850.000		2.273.510.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan *****	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan *****	Unit	1	1	1	440.665.000	1	1.077.190.000	3	2.020.840.000	3	2.283.850.000	2	2.273.510.000	SEKSI LALU LINTAS	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A BLORA JEPARA KUDUS PATI REMBANG

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase Hasil rekomenda si ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah II Kelas A ***	%	84,62	85,41	86,2	115.950.000	86,92	115.950.000	87,63	115.950.000	88,26	115.950.000	88,9	115.950.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah II Kelas A	
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ****							115.950.000		115.950.000		115.950.000		115.950.000		115.950.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah II Kelas A	
			Bertambahnya Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah II Kelas A ****	Unit	1261	2241	1261	115.950.000	1261	115.950.000	1261	115.950.000	1261	115.950.000	1261	115.950.000	SEKSI ANGKUTAN	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal *****							95.950.000		95.950.000		95.950.000		95.950.000		95.950.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah II Kelas A	
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal *****	Laporan	36	36	36	95.950.000	36	95.950.000	36	95.950.000	36	95.950.000	36	95.950.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A BLORA
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah II Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****	Laporan	2	2	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A JAWA TENGAH
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							1.143.105.000		1.690.640.000		2.613.720.000		2.792.470.000		2.806.110.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ***	%	3	3	3	738.455.000	3	1.285.990.000	3	2.209.070.000	3	2.387.820.000	3	2.401.460.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi ****							738.455.000		1.285.990.000		2.209.070.000		2.387.820.000		2.401.460.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Meningkatnya rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A *****	%	22,22	33,33	55,56	738.455.000	66,67	1.285.990.000	77,78	2.209.070.000	88,89	2.387.820.000	100	2.401.460.000	SEKSI LALU LINTAS	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi *****							198.480.000		198.480.000		198.480.000		198.480.000		198.480.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi *****	Laporan	78	78	78	198.480.000	78	198.480.000	78	198.480.000	78	198.480.000	78	198.480.000	SEKSI LALU LINTAS	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A BOYOLALI KARANGANYAR KLATEN KOTA SURAKARTA SRAGEN SUKOHARJO WONOGIRI
		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas *****							539.975.000		1.087.510.000		2.010.590.000		2.189.340.000		2.202.980.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanak an Pengadaan dan Pemasangan *****	Unit	2	1	2	539.975.000	1	1.087.510.000	1	2.010.590.000	1	2.189.340.000	1	2.202.980.000	SEKSI LALU LINTAS	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A BOYOLALI KARANGANYAR KLATEN KOTA SURAKARTA SRAGEN SUKOHARJO WONOGIRI
			Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ***	%	79,85	80,87	81,84	404.650.000	82,76	404.650.000	83,63	404.650.000	84,45	404.650.000	85,24	404.650.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ****							404.650.000		404.650.000		404.650.000		404.650.000		404.650.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Bertambahnya Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ****	Unit	6199	6199	6889	404.650.000	6199	404.650.000	6199	404.650.000	6199	404.650.000	6199	404.650.000	SEKSI ANGKUTAN	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal *****							363.800.000		363.800.000		363.800.000		363.800.000		363.800.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal *****	Laporan	36	36	36	363.800.000	36	363.800.000	36	363.800.000	36	363.800.000	36	363.800.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A BOYOLALI KARANGANYAR SRAGEN SUKOHARJO WONOGIRI
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****							40.850.000		40.850.000		40.850.000		40.850.000		40.850.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****	Laporan	2	2	2	40.850.000	2	40.850.000	2	40.850.000	2	40.850.000	2	40.850.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		PROGRAM PENYELENG GARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							779.005.000		1.531.030.00 0		2.456.640.000		2.765.080.000		2.529.020.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah IV Kelas A	
			Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah IV Kelas A ***	%	3	3	3	581.205.000	3	1.333.230.00 0	3	2.258.840.000	3	2.567.280.000	3	2.331.220.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah IV Kelas A	
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi ****							581.205.000		1.333.230.00 0		2.258.840.000		2.567.280.000		2.331.220.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah IV Kelas A	
			Meningkatnya rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah IV Kelas A ****	%	13,33	20	33,33	581.205.000	53,33	1.333.230.00 0	66,67	2.258.840.000	93,33	2.567.280.000	100	2.331.220.000	SEKSI LALU LINTAS	
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi *****							126.480.000		126.480.000		126.480.000		126.480.000		126.480.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah IV Kelas A	
			Terlaksananya a Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasa n dan Pengendali an Efektivitas Pelaksanaa n Kebijakan untuk Jalan	Lapor an	56	56	48	126.480.000	48	126.480.000	48	126.480.000	48	126.480.000	48	126.480.000	SEKSI LALU LINTAS	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A KEBUMEN MAGELANG PURWOREJO TEMANGGUNG

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Provinsi *****															
		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas *****							454.725.000		1.206.750.000		2.132.360.000		2.440.800.000		2.204.740.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanak an Pengadaan dan Pemasangan *****	Unit	2	1	1	454.725.000	3	1.206.750.000	2	2.132.360.000	2	2.440.800.000	1	2.204.740.000	SEKSI LALU LINTAS	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A KEBUMEN MAGELANG PURWOREJO TEMANGGUNG
			Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ***	%	92,05	92,45	92,83	197.800.000	93,19	197.800.000	93,54	197.800.000	93,87	197.800.000	94,19	197.800.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ****							197.800.000		197.800.000		197.800.000		197.800.000		197.800.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Bertambahnya Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ****	Unit	6889	6889	6889	197.800.000	6889	197.800.000	6889	197.800.000	6889	197.800.000	6889	197.800.000	SEKSI ANGKUTAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal *****							167.800.000		167.800.000		167.800.000		167.800.000		167.800.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal *****	Laporan	36	36	36	167.800.000	36	167.800.000	36	167.800.000	36	167.800.000	36	167.800.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A MAGELANG PURWOREJO TEMANGGUNG
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****	Laporan	2	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A JAWA TENGAH KEBUMEN KOTA MAGELANG MAGELANG PURWOREJO TEMANGGUNG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							790.005.000		1.555.670.000		2.575.990.000		2.547.610.000		2.538.480.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A ***	%	3	3	3	594.505.000	3	1.360.170.000	3	2.380.490.000	3	2.352.110.000	3	2.342.980.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *****							594.505.000		1.360.170.000		2.380.490.000		2.352.110.000		2.342.980.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Meningkatnya rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A *****	%	25	50	75	594.505.000	100	1.360.170.000	100	2.380.490.000	100	2.352.110.000	100	2.342.980.000	SEKSI LALU LINTAS	
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi *****							169.680.000		169.680.000		169.680.000		169.680.000		169.680.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi *****	Laporan	58	58	66	169.680.000	66	169.680.000	66	169.680.000	66	169.680.000	66	169.680.000	SEKSI LALU LINTAS	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A BANJARNEGARA BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA WONOSOBO
		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas *****							424.825.000		1.190.490.000		2.210.810.000		2.182.430.000		2.173.300.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan *****	Unit	1	1	1	424.825.000	1	1.190.490.000	1	2.210.810.000	1	2.182.430.000	1	2.173.300.000	SEKSI LALU LINTAS	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A BANJARNEGARA BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase Hasil rekomenda si ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah V Kelas A ***	%	85,68	86,4	87,09	195.500.000	87,74	195.500.000	88,37	195.500.000	88,97	195.500.000	89,53	195.500.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah V Kelas A	
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan *****							195.500.000		195.500.000		195.500.000		195.500.000		195.500.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah V Kelas A	
			Bertambahny a Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah V Kelas A *****	Unit	3353	3353	3353	195.500.000	3353	195.500.000	3353	195.500.000	3353	195.500.000	3353	195.500.000	SEKSI ANGKUTA N	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal *****							165.500.000		165.500.000		165.500.000		165.500.000		165.500.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah V Kelas A	
			Terlaksanany a Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantau n Terminal *****	Lapor an	36	36	36	165.500.000	36	165.500.000	36	165.500.000	36	165.500.000	36	165.500.000	SEKSI ANGKUTA N	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A BANJARNEGAR A PURBALINGGA
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Perhubung an - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubung an Wilayah V Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****	Laporan	2	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A BANJARNEGARA BANYUMAS CILACAP JAWA TENGAH PURBALINGGA WONOSOBO
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							812.987.000		1.506.050.000		2.602.380.000		2.471.260.000		2.778.270.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ***	%	3	3	3	560.997.000	3	1.254.060.000	3	2.350.390.000	3	2.219.270.000	3	2.526.280.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi ****							560.997.000		1.254.060.000		2.350.390.000		2.219.270.000		2.526.280.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Meningkatnya rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A *****	%	33,33	37,5	45,83	560.997.000	58,33	1.254.060.000	66,67	2.350.390.000	70,83	2.219.270.000	100	2.526.280.000	SEKSI LALU LINTAS	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi *****							136.080.000		136.080.000		136.080.000		136.080.000		136.080.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi *****	Laporan	52	52	52	136.080.000	52	136.080.000	52	136.080.000	52	136.080.000	52	136.080.000	SEKSI LALU LINTAS	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A BATANG BREBES PEKALONGAN PEMALANG TEGAL
		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas *****							424.917.000		1.117.980.000		2.214.310.000		2.083.190.000		2.390.200.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanak an Pengadaan dan Pemasangan *****	Unit	5	1	1	424.917.000	3	1.117.980.000	3	2.214.310.000	1	2.083.190.000	7	2.390.200.000	SEKSI LALU LINTAS	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A BATANG BREBES PEKALONGAN PEMALANG TEGAL
			Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ***	%	87,43	88,06	88,66	251.990.000	89,23	251.990.000	89,77	251.990.000	90,29	251.990.000	90,77	251.990.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ****							251.990.000		251.990.000		251.990.000		251.990.000		251.990.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Bertambahnya Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ****	Unit	3500	3500	3500	251.990.000	3500	251.990.000	3500	251.990.000	3500	251.990.000	3500	251.990.000	SEKSI ANGKUTAN	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal *****							221.990.000		221.990.000		221.990.000		221.990.000		221.990.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal *****	Laporan	36	36	36	221.990.000	36	221.990.000	36	221.990.000	36	221.990.000	36	221.990.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A BATANG BREBES PEKALONGAN
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****	Laporan	2	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A JAWA TENGAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN ***							2.193.011.000		2.473.056.000		2.860.786.000		3.042.391.000		2.111.236.000	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu- an	Baseli- ne Tahun 2024 (R)	Baseli- ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
																		Perkeretaa pian	
			Meningkatnya perlintasan sebidang terpenuhi perlengkapan jalan sesuai standar	Persentase perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkap an jalan ***	%	4	4	28	2.193.011.000	36	2.473.056.000	60	2.860.786.000	88	3.042.391.000	92	2.111.236.000	Dinas Perhubung an - Bidang Jaringan Transporta si dan Perkeretaa pian	
		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapia n ****							2.193.011.000		2.473.056.000		2.860.786.000		3.042.391.000		2.111.236.000	Dinas Perhubung an - Bidang Jaringan Transporta si dan Perkeretaa pian	
			Bertambahny a perlintasan KA yang dilengkapi prasarana penunjang sesuai tingkat pemenuhan Fasilitas keselamatan	Persentase realisasi rencana induk perkeretaa pian ****	%	57,4	59,3	70,48	2.193.011.000	72,71	2.473.056.000	85,71	2.860.786.000	95,04	3.042.391.000	97,7	2.111.236.000	Pokja Perkeretaa pian	
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapia n *****							2.193.011.000		2.473.056.000		2.860.786.000		3.042.391.000		2.111.236.000	Dinas Perhubung an - Bidang Jaringan Transporta si dan Perkeretaa pian	
			Terkendalnya Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapia n	Jumlah Laporan Pelaksanaa n Rencana Induk Perkeretaa pian *****	Lapor an	5	3	7	2.193.011.000	5	2.473.056.000	5	2.860.786.000	7	3.042.391.000	2	2.111.236.000	Pokja Perkeretaa pian	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian JAWA TENGAH

Sumber Dinas Perhubungan 2025

Keterangan:

Kolom (1) dan (2) diisi tujuan dan sasaran

Kolom (3) diisi dengan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang direncanakan oleh perangkat daerah (catatan: program sama dengan program dalam RPJMD)

Kolom (4) diisi dengan outcome/ kinerja program dan output/ kinerja kegiatan/ sub kegiatan (catatan outcome program sama dengan outcome program dalam RPJMD)

Kolom (5) diisi indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan (catatan: IK tujuan, sasaran, program sama dengan yang tertuang dalam RPJMD)

Kolom (8) s.d ((17) diisi target kinerja dan pagu indikatif (catatan: target tujuan, sasaran, program, dan pagu per program sama dengan yang tertuang dalam RPJMD)

Kolom (18) diisi unit kerja sampai tingkat eselon III/IV

Kolom (19) diisi lokasi sasaran sampai dengan tingkat desa, atau lokasi tertentu

Tabel IV. 2 Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mendorong pengembangan pelabuhan Tanjung Mas sebagai sentra ekonomi Jawa					
		Memfasilitasi kebutuhan rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas melalui penyelenggaraan rapat koordinasi / konsultasi / sinkronisasi. Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat (Kemenhub cq. KSOP) untuk mendorong peningkatan kinerja Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pintu keluar perdagangan.	2025 : 1 Kegiatan 2026 : 1 Kegiatan 2027 : 1 Kegiatan 2028 : 1 Kegiatan 2029 : 1 Kegiatan 2030 : 1 Kegiatan	• Program Pengelolaan Pelayaran • Keg Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional • Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Bidang Pelayaran	• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Peningkatan kualitas jalan provinsi dengan lebar 7 meter					
	Peningkatan Kualitas Jalan Provinsi baik di Wilayah Perbatasan maupun di Kabupaten / Desa					

	Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Provinsi	Pemenuhan perlengkapan jalan berupa pemasangan baru lampu penerangan jalan umum (LPJU) di ruas jalan provinsi yang mempunyai nilai strategis tinggi dan secara teknis dapat dilaksanakan pemasangan LPJU (tersedia lahan dan jaringan tegangan rendah (JTR) PLN Diprioritaskan pada ruas jalan provinsi yang volume lalu lintas nya tinggi, memiliki nilai strategis mendukung perekonomian (akses pariwisata, jalur logistik dan perbatasan) dan yang berpotensi mengurangi frekuensi kejadian kecelakaan lalu lintas serta ruas jalan yang sudah dinyatakan tuntas penanganannya secara kebinamargaan.	2025 : 402 Unit 2026 : 200 Unit 2027 : 200 Unit 2028 : 368 Unit 2029 : 430 Unit 2030 : 1.172 Unit	• Program Penyelenggaraan LLAJ • Keg. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi • Sub Keg. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Bidang Lalu Lintas	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral • Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Peremajaan / penggantian LPJU yang kinerjanya sudah menurun berupa penggantian suku cadang sesuai kebutuhan		2025 : 323 Unit 2026 : 283 Unit 2027 : 600 Unit 2028 : 600 Unit 2029 : 600 Unit 2030 : 600 Unit	• Program Penyelenggaraan LLAJ • Keg. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi • Sub Keg. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	• Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A • Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A • Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A • Balai Pengelola Sarana Prasarana	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

					Perhubungan Wilayah IV Kelas A - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penanganan kerusakan LPJU melalui pemenuhan kebutuhan jumlah armada kendaraan (crane/skylift) untuk pemeliharaan LPJU	2025 : 1 Unit 2026 : 1 Unit 2027 : 1 Unit 2028 : 1 Unit 2029 : 1 Unit 2030 : 1 Unit	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi - Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Sekretariat Dinas Perhubungan	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte)					
	BLUD Pengelola Trans Jateng	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola Trans Jateng dari semula UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Balai Transportasi Jawa Tengah menjadi PPK BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah)	2025 : Kajian 2026 : Realisasi	- Program Penyelenggaraan LLAJ - Keg. Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Sub Keg. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek	Bidang Angkutan	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

				Perkotaan Kewenangan Provinsi		
	Kerjasama CSR dan BUMN/BUMD	Peningkatan kerjasama pembiayaan sarana dan prasarana pendukung Trans Jateng yang bersumber dari CSR BUMN/BUMD dan swasta	2025 : 1 Kegiatan 2026 : 1 Kegiatan 2027 : 1 Kegiatan 2028 : 1 Kegiatan 2029 : 1 Kegiatan 2030 : 1 Kegiatan	- Program Penyelenggaraan LLAJ - Keg. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Sub Keg. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Balai Transportasi Kelas A	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Moderanisasi armada Trans Jateng	Penambahan armada dan peremajaan Bus Trans Jateng yang sudah memasuki batas usia kendaraan sesuai ketentuan/regulasi serta kondisi laik jalan	2027 : 18 Bus (Koridor Bawen : 18 bus) 2028 : 21 Bus (koridor Bawen : 7 bus , 14 koridor Purwokerto) 2029 : 14 bus (14 Bus koridor Kendal) 2030 : 31 Bus (peremajaan koridor Kutoarjo - Magelang : 14 bus dan Solo-Sumberlawang : 14 Bus Semarang – Bawen : 3 Bus)	- Program Penyelenggaraan LLAJ - Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Sub Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Balai Transportasi Kelas A	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Moderanisasi sistem Trans Jateng	Pembangunan command center untuk memantau dan menjamin kualitas serta digitalisasi layanan Trans Jateng	2028 : Pembangunan Gedung Command Center. 2029 : Lanjutan Comand Center (Peralatan dan Perlengkapan)	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi - Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Sub Keg. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat Dinas Perhubungan	- Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Dinas Pendidikan
		Peningkatan pilihan pembayaran secara digital dan/atau cashless	2025 : 7% Pengguna menggunakan cashless	Program Penyelenggaraan LLAJ	Balai Transportasi Kelas A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital

			2026 : 7,2 % Pengguna menggunakan cashless 2027 : 7,4% Pengguna menggunakan cashless 2028 : 7,6% Pengguna menggunakan cashless 2029 : 7,8% Pengguna menggunakan cashless 2027 : 8,0% Pengguna menggunakan cashless	• Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Sub Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Pendidikan • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Inisiasi layanan Trans Jateng "Executive"	2026 : Kajian FS dan ATP / WTP 2027 : Uji coba, 1 bus eksisting, 2 rit per hari (senin - jumat) selama 3 bulan di 1 koridor (Smrg - Bawen), dan proses penyusunan SK Gubernur terkait tarif eksekutif 2028 : Operasionalisasi Tahap I, 2 bus baru, 2 rit per hari (senin - jumat) selama 1 tahun di 1 koridor (Smrg - Bawen) 2029 : Operasionalisasi Tahap II, 4 bus baru, 2 rit per hari (senin - jumat) selama 1 tahun di 1 koridor (Smrg - Bawen) 2030 : Operasionalisasi Tahap III, 6 bus baru, 2 rit per hari (senin - jumat) selama 1 tahun di 1 koridor (Smrg - Bawen)	• Program Penyelenggaraan LLAJ • Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Sub Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Program Penyelengg. LLAJ • Keg. Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Sub Keg. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek	• Bidang Angkutan • Balai Transportasi Kelas A	• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Pendidikan • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

				Perkotaan Kewenangan Provinsi		
		Pembangunan halte portable	2026 : Pembangunan halte portable sejumlah 6 unit untuk pentahapan pemenuhan halte koridor lama Trans Jateng. 2027 : Pembangunan halte portable sejumlah 6 unit untuk pentahapan pemenuhan halte koridor lama Trans Jateng dan untuk pembukaan 1 koridor Gelangmanggung 2028 : Pembangunan halte portable sejumlah 20 unit untuk pentahapan pemenuhan halte koridor lama Trans Jateng dan Pembukaan 2 koridor baru Jekuti & Petanglong 2029 : Pembangunan halte portable sejumlah 20 unit untuk pentahapan pemenuhan halte koridor lama Trans Jateng.- Pembangunan Halte untuk pembukaan 1 koridor baru (Cibalingmas) –	• Program Penyelenggaraan LLAJ • Keg. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi • Sub Keg. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	• Balai Transportasi Kelas A	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital • Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Pendidikan • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

			2030 : Pembangunan halte portable sejumlah 20 unit untuk pentahapan pemenuhan halte koridor lama Trans Jateng dan untuk pembukaan 1 koridor baru (Demak) serta pembangunan ruang tunggu 1 Lokasi			
		Pembangunan ruang tunggu penumpang Bus Trans Jateng di terminal tipe B yang representatif dan dilengkapi dengan Public Transport Information System (PTIS)	2028 : Pembangunan Ruang Tunggu di Terminal Banyuputih dan Pembangunan Transit Hub di Kab Pati di lengkapi dengan PTIS 2029 : Pembangunan ruang tunggu pada 4 Lokasi (Pembangunan ruang tunggu di Terminal Penggaron (integrasi Trans Jateng dan Trans Semarang), Pembangunan ruang tunggu di Terminal Sukoharjo dan Madureso yang dilengkapi dengan PTIS dan Pembangunan ruang tunggu di Terminal Kroya dilengkapi dengan PTIS) 2030 : Pembangunan ruang tunggu di Terminal Purbalingga dilengkapi dengan PTIS	• Program Penyelenggaraan LLAJ • Keg. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi • Sub Keg. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	• Balai Transportasi Kelas A	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital • Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Pendidikan • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
4	Memastikan Integrasi Jaringan untuk menjamin Konektivitas Trans Jateng dengan Trans Kabupaten/Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi					

		Pengembangan cakupan layanan (penambahan koridor, ritasi, jam operasional dan perpanjangan koridor) Trans Jateng	2025 : Pra FS WP Jekuti 2026 : DED dan ATP WTP Trans Jateng Koridor Kab. Magelang – Kota Magelang – Kab. Temanggung; Masterplan Trans Jateng Jekuti DED Trans Jateng Petanglong 2027 : Operasional WP Gelangmanggung DED Trans Jateng Jekuti ATP / WTP Trans Jateng Jekuti ATP / WTP Trans Jateng Petanglong 2028 : Operasional WP Petanglong Operasional WP Jekuti DED Trans Jateng Cibalingmas ATP / WTP Trans Jateng Cibalingmas 2029 : Operasional WP Cibalingmas FS (Sosial dan Teknis) & DED Semarang – Demak ATP / WTP Trans Jateng Semarang – Demak 2030 : Operasional Trans Jateng Semarang – Demak	• Program Penyelenggaraan LLAJ • Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Sub Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Program Penyelengg. LLAJ • Keg. Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Sub Keg. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	• Balai Transportasi Kelas A • Bidang Angkutan	• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Pendidikan • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
5	Optimalisasi Pelabuhan dan Bandara Perintis di Jawa Tengah sebagai Generator Aktivitas Perekonomian Global					
		Fasilitasi peningkatan kualitas, kapasitas dan kinerja pelabuhan dan bandara perintis dalam	2025 : 2 Kegiatan 2026 : 2 Kegiatan 2027 : 2 Kegiatan 2028 : 2 Kegiatan 2029 : 2 Kegiatan	• Program Pengelolaan Pelayaran • Keg Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan	• Bidang Pelayaran • Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

		mendukung aktivitas perekonomian	2030 : 2 Kegiatan	- Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional, dan; - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Lalan (LLAJ) - Kegiatan Pemetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Dinas Pendidikan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan Mendorong revitalisasi jalur kereta api					
		Fasilitasi revitalisasi jalur non aktif kereta api dan mengusulkan perpanjangan layanan kereta api komuter	2025 : 1 Kegiatan 2026 : 1 Kegiatan 2027 : 1 Kegiatan 2028 : 1 Kegiatan 2029 : 1 Kegiatan 2030 : 1 Kegiatan	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Lalan (LLAJ) - Kegiatan Pemetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

7	Peningkatan status bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo menjadi bandara internasional					
		Fasilitasi kegiatan dengan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk mendorong Bandara A. Yani Semarang dan Adi Soemarmo menjadi Bandara Internasional Status Bandara sudah internasional berdasarkan SK Menhub No. KM 37 Tahun 2025 tanggal 8 Agustus 2025 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional	2025 : Bandara A. Yani Semarang dan Adi Soemarmo ditetapkan menjadi Bandara Internasional	• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Lalan (LLAJ) • Kegiatan Pemetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi • Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	• Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	• Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8	Penurunan tarif Trans Jateng Rp. 1000,-	Revisi SK Gubernur terkait Penetapan Tarif sebagaimana SK Gubernur No. 100.3.3.1/124 Tahun 2025 tentang Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng tanggal 30 April 2025. Tarif Khusus : Rp. 1.000,- (Pelajar, Veteran, Buruh, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas) Tarif Umum : Rp. 5.000,- (Penumpang Umum).	2025 : Penetapan Keputusan Gubernur Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng	• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Lalan (LLAJ) • Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Sub Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	• Balai Transportasi Kelas A	• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Pendidikan • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Sumber Dinas Perhubungan 2025

Keterangan:

Kolom (2) 136 Program Daerah yang didukung oleh perangkat daerah;

Kolom (3) rencana aktivitas riil yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan 136 Program Daerah;

Kolom (4) output/target/volume yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun perencanaan;

Kolom (5) program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah yang mendukung program daerah

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan

Dalam rangka mengatasi tingginya angka korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jawa Tengah, diperlukan langkah strategis dan berkelanjutan. Berdasarkan data periode tahun 2020–2024, tercatat rata-rata sekitar 4.000 korban meninggal dunia setiap tahun, atau setara dengan 11 orang per hari. Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan keselamatan lalu lintas harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan transportasi daerah.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menetapkan strategi utama berupa pemenuhan perlengkapan jalan, khususnya melalui pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di ruas-ruas jalan provinsi serta penggantian LPJU yang mengalami kerusakan. Intervensi ini diharapkan mampu menurunkan risiko kecelakaan, meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah.

Arah kebijakan penentuan lokasi intervensi pemasangan LPJU diselaraskan dengan tema pembangunan Jawa Tengah setiap tahunnya, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahun 2026 Fokus pada jalur distribusi hasil produksi pangan, terutama di daerah penghasil beras terbesar di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, serta daerah sentra pangan lainnya;
2. Tahun 2027 Fokus pada jalur menuju destinasi wisata unggulan dan geopark, meliputi Kawasan Wisata Super Prioritas Borobudur, Kawasan Wisata Dieng, Kawasan Wisata Tawangmangu, Kawasan Wisata Kaliangkrik (Nepal van Java), serta beberapa kawasan Geopark yang ada di Jawa Tengah;
3. Tahun 2028 Fokus pada jalur kawasan industri, terutama kawasan industri strategis berskala nasional di sepanjang Pantura Jawa Tengah, seperti Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kawasan Industri Kendal (KIK), serta wilayah industri potensial lainnya;
4. Tahun 2029–2030 Fokus pada peningkatan konektivitas antarwilayah yang memerlukan intervensi LPJU untuk mendukung kelancaran arus barang, jasa, dan mobilitas masyarakat.

Melalui pendekatan bertahap ini, diharapkan tidak hanya tercapai penurunan angka kecelakaan lalu lintas, tetapi juga terwujud peningkatan kualitas pelayanan transportasi, konektivitas wilayah, serta pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara berkelanjutan.

2. Modernisasi Trans Jateng

Selain itu, dalam rangka mendukung aksi Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte). Pertama, terdapat peningkatan kapasitas kelembagaan Sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang direncanakan akan diterapkan pada Balai Transportasi Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah, berupa penerapan praktek bisnis yang

sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem BLUD pada Balai Transportasi Jawa Tengah bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Gubernur Jawa Tengah. Sampai dengan saat ini telah dioperasikan sebanyak 7 (tujuh) koridor Trans Jateng.

Kedua, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan pengguna, modernisasi armada Trans Jateng menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan. Modernisasi ini mencakup peningkatan teknologi mesin (dari Euro 2 menjadi Euro 4) guna menunjang efisiensi dan keandalan operasional, serta pembaruan sistem interior armada yang dilengkapi dengan fitur keamanan seperti CCTV. Dengan peningkatan tersebut, diharapkan masyarakat merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakan layanan Trans Jateng sebagai moda transportasi pilihan.

Ketiga, guna memperluas aksesibilitas informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan di titik keberangkatan, dilakukan pula modernisasi halte dan ruang tunggu Trans Jateng. Penerapan Passenger Transport Information System (PTIS) di halte-halte utama diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi real-time terkait jadwal, rute, dan estimasi kedatangan bus. Selain itu, desain halte juga akan ditingkatkan agar lebih ramah bagi penyandang disabilitas, termasuk penambahan fasilitas khusus yang mendukung mobilitas mereka. Dengan demikian, layanan Trans Jateng dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara inklusif dan berkeadilan.

Dengan arah kebijakan tersebut, diharapkan Trans Jateng dapat semakin berperan sebagai tulang punggung transportasi publik modern di Jawa Tengah yang andal, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan melihat jumlah kebutuhan koridor serta fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu ada terobosan atau inovasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan pelayanan transportasi umum aglomerasi yang lebih efektif dan efisien. Penerapan sistem BLUD Balai Transportasi Jawa Tengah harus memenuhi persyaratan substantif, Administratif dan teknis sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Dokumen administratif berupa Rencana Strategis BLUD Balai Transportasi Jawa Tengah disusun tersendiri sebagai bagian dari Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah serta menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan Teknik analisis bisnis.

3. Integrasi Jaringan untuk menjamin Konektivitas Trans Jateng dengan Trans Kabupaten/Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi

Berdasarkan Studi Pola Pengelolaan dan Pengembangan Angkutan Aglomerasi, dari 10 Wilayah Pengembangan (WP) di Jawa Tengah saat ini baru 5 WP yang dilayani oleh Trans Jateng, yaitu Kedungsepur, Subosukawonosraten, Cibalingmas, Gelangmanggung, dan Keburejo. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kebutuhan layanan angkutan massal berbasis bus aglomerasi sehingga perlu dilakukan penambahan koridor secara bertahap. Pengembangan koridor baru Trans Jateng diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan tema pembangunan tahunan Jawa Tengah. Strategi ini tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan layanan transportasi semata, melainkan juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor prioritas seperti pariwisata, industri, dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Pada tahun 2027, direncanakan pembukaan koridor baru Trans Jateng di Wilayah Pengembangan Gelangmanggung. Langkah ini selaras dengan tema pembangunan tahun 2027, yaitu pariwisata, dengan fokus meningkatkan kunjungan wisata ke Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur serta memperluas akses ke destinasi pendukung di Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung. Kehadiran koridor baru diharapkan mampu memperkuat daya tarik Borobudur sebagai ikon pariwisata dunia sekaligus menumbuhkan destinasi wisata baru di sekitarnya.

Selanjutnya, pada tahun 2028, sesuai dengan tema pembangunan industri, akan dilakukan pengembangan dua koridor baru. Pertama, koridor Jekuti (Jepara–Kudus–Pati) yang diharapkan mendukung pengembangan kawasan industri unggulan, seperti industri mebel kayu berskala ekspor, industri rokok, serta industri makanan. Kedua, koridor baru di Wilayah Pengembangan Petanglong, yang selaras dengan implementasi Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020. Untuk mendukung pengembangan WP Petanglong, pada TA 2022 telah disusun Studi Kelayakan Layanan Angkutan Massal Aglomerasi Perkotaan dengan rekomendasi lima koridor, yaitu: Pekalongan – Kajen, Banyuputih – Batang, Limpung – Banyuputih, KIT Batang – Banyuputih, Weleri – Banyuputih (terintegrasi dengan WP Kedungsepur).

Pada tahap berikutnya, tahun 2029–2030, pengembangan diarahkan pada WP Cibalingmas dan Kedungsepur. Rute Cilacap–Purwokerto (2029) dan Demak–Semarang (2030) diproyeksikan akan memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus menjawab tantangan tingginya angka kemacetan serta kebutuhan mobilitas masyarakat dan logistik di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, penambahan koridor Trans Jateng dalam Renstra ini merupakan bagian dari strategi besar yaitu untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Jawa Tengah serta mendukung pengembangan sektor unggulan daerah (pariwisata, industri, dan pertumbuhan ekonomi).

4. Optimalisasi Pelabuhan dan Bandara Perintis di Jawa Tengah sebagai Generator Aktivitas Perekonomian Global

Upaya untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan bandara dan pelabuhan perintis di Provinsi Jawa Tengah terus dilakukan sebagai bagian dari strategi peningkatan konektivitas wilayah, pengembangan pariwisata, serta penguatan sektor industri dan perdagangan.

Salah satu capaian penting adalah penerbangan perdana maskapai Susi Air pada 5 Juli 2025 yang menandai langkah awal optimalisasi Bandara Dewandaru di Karimunjawa. Pembukaan penerbangan reguler menuju Karimunjawa diharapkan mampu memperkuat posisi Karimunjawa sebagai destinasi pariwisata unggulan Jawa Tengah. Saat ini, penerbangan dilayani tiga kali dalam seminggu (Senin, Jumat, dan Minggu). Tingkat keterisian (load factor) masih fluktuatif, dengan rata-rata 84,3% untuk rute Semarang (SRG) – Karimunjawa (KWB) dan 61,1% untuk rute Karimunjawa (KWB) – Semarang (SRG), dengan dominasi penumpang wisatawan mancanegara. Capaian ini menunjukkan potensi besar, namun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan operasional dan meningkatkan jumlah penumpang.

Selain Bandara Dewandaru, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga terus mendorong optimalisasi bandara perintis lainnya, yaitu Bandara Ngloram (Blora), Bandara Jenderal Besar Soedirman (Purbalingga), dan Bandara Tunggalwulung (Cilacap). Langkah yang ditempuh mencakup koordinasi pengembangan jaringan rute penerbangan, peningkatan kerja sama dengan maskapai, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta integrasi dengan sektor pariwisata dan perdagangan lokal.

Di samping bandara, optimalisasi juga difokuskan pada pelabuhan perintis, khususnya Pelabuhan Kendal dan Pelabuhan Batang. Kedua pelabuhan ini diarahkan untuk menopang sektor industri di kawasan sekitarnya. Saat ini, Kendal Seaport sedang dalam tahap canvassing guna menghimpun minat investasi serta kajian potensi bangkitan dan tarikan arus barang. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran pelabuhan sebagai simpul logistik dan distribusi barang, sekaligus mendorong tumbuhnya kawasan industri yang berdaya saing.

Dengan penguatan peran bandara dan pelabuhan perintis secara terpadu, diharapkan terwujud konektivitas yang lebih baik, peningkatan aksesibilitas wilayah, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh wilayah Jawa Tengah.

5. Peningkatan status Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo menjadi bandara internasional serta pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas sebagai sentra ekonomi Jawa Tengah

Saat ini Bandara Ahmad Yani (Semarang) dan Bandara Adi Soemarmo (Surakarta) telah resmi berstatus sebagai Bandar Udara Internasional, setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 37 Tahun 2025 tentang Penetapan

Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo serta 36 bandar udara lainnya sebagai bandar udara internasional. Keberhasilan ini merupakan hasil dari upaya berkesinambungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong peningkatan status bandara strategis di wilayahnya.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terus melakukan langkah konkret untuk membuka dan memperluas jaringan penerbangan internasional. Salah satu capaian penting adalah dibukanya penerbangan perdana AirAsia rute Semarang – Kuala Lumpur yang mulai beroperasi pada 5 September 2025. Penerbangan ini menjadi bagian dari strategi berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas internasional Jawa Tengah, sekaligus memperkuat posisi Bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Soemarmo sebagai gerbang udara internasional.

Berdasarkan proyeksi PT Angkasa Pura Indonesia dengan mengacu pada data lalu lintas udara tahun 2019, Bandara Ahmad Yani memiliki potensi penerbangan internasional hingga 15.500 penumpang (pax). Potensi ini menjadi dasar bagi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk terus mendorong optimalisasi peran bandara, baik melalui pengembangan kerja sama dengan maskapai penerbangan internasional maupun dengan mengintegrasikan layanan bandara dengan sektor-sektor strategis, seperti pariwisata, industri, dan perdagangan. Upaya yang dilakukan meliputi:

1. Membangun komunikasi intensif dengan maskapai nasional dan internasional untuk membuka rute baru;
2. Mendorong dan berupaya mengintegrasikan bandara dengan destinasi unggulan Jawa Tengah, seperti Candi Borobudur, Karimunjawa, Dieng, Solo Heritage, serta kawasan industri di Pantura dan sekitarnya;
3. Mendorong sinergi dengan sektor pariwisata dan perdagangan, agar peningkatan status bandara memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;

Dengan strategi tersebut, diharapkan Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi udara internasional, tetapi juga sebagai motor penggerak perekonomian, pariwisata, dan perdagangan Jawa Tengah di tingkat nasional maupun global.

6. Mendorong pengembangan pelabuhan Tanjung Mas sebagai sentra ekonomi Jawa

Selain bandara, tidak kalah penting adalah pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang memiliki peran strategis sebagai generator ekonomi Jawa Tengah. Pelabuhan ini merupakan salah satu pintu masuk utama arus barang, penumpang, ekspor-impor, serta jalur distribusi logistik di Jawa Tengah. Oleh karena itu, optimalisasi perannya menjadi prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya optimalisasi Pelabuhan Tanjung Emas dilakukan melalui sinergi dengan para pemangku kepentingan, khususnya Pelindo dan Kementerian Perhubungan, untuk menangani berbagai permasalahan

yang masih dihadapi. Beberapa langkah yang saat ini telah dan sedang dilakukan oleh pihak pelabuhan antara lain:

1. Penanganan permasalahan pendangkalan kolam dan alur pelayaran. Saat ini, Pelindo tengah melaksanakan survey bathimetri sebagai bagian dari upaya penanganan sedimentasi yang berpotensi mengganggu kelancaran arus kapal dan operasional pelabuhan.
2. Rencana perluasan Container Yard (CY). Dalam jangka waktu tiga tahun ke depan, direncanakan perluasan CY melalui relokasi tenant di Jalan Coaster, sehingga kapasitas pelayanan peti kemas dapat meningkat dan mendukung kelancaran arus logistik.
3. Pengembangan fasilitas pelabuhan. Perluasan seaway, modernisasi fasilitas bongkar muat, serta integrasi dengan sistem logistik nasional terus diupayakan untuk meningkatkan daya saing Pelabuhan Tanjung Emas.

Upaya-upaya tersebut merupakan langkah strategis dalam menjadikan Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Diharapkan, dengan adanya peningkatan kapasitas, efisiensi, dan konektivitas, pelabuhan ini mampu memperkuat daya saing ekspor-impor Jawa Tengah, meningkatkan kelancaran distribusi barang, serta mendorong tumbuhnya sektor industri, perdagangan, dan logistik yang pada akhirnya memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah.

7. Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan Mendorong revitalisasi jalur kereta api

Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan transportasi nasional berbasis rel, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mendorong reaktivasi jalur-jalur kereta api sesuai arahan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas). Reaktivasi jalur ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, mengurangi beban lalu lintas jalan, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aksesibilitas transportasi.

Beberapa jalur strategis di Jawa Tengah yang masuk dalam prioritas reaktivasi meliputi:

1. Jalur Purwokerto – Wonosobo, sebagai penghubung kawasan Banyumas Raya dengan wilayah pegunungan tengah Jawa.
2. Jalur Kedungjati – Ambarawa – Tuntang, sebagai jalur bersejarah yang memiliki potensi besar untuk angkutan penumpang sekaligus pariwisata.
3. Jalur Cepu – Blora – Rembang – Lasem, yang berfungsi menghubungkan kawasan industri migas, kehutanan, dan hasil bumi dengan pelabuhan di pantai utara Jawa.
4. Jalur Cilacap – Kroya – Banjarnegara – Wonosobo, sebagai jalur alternatif untuk mendukung arus barang dan penumpang dari kawasan selatan Jawa.

Reaktivasi jalur-jalur tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia, serta pemangku

kepentingan lainnya dalam rangka penyusunan studi kelayakan, pembebasan lahan, serta pengembangan kawasan pendukung stasiun dan simpul transportasi.

Dengan terealisasinya program reaktivasi jalur kereta api, diharapkan tercapai sistem transportasi berkelanjutan, terintegrasi, dan andal di Jawa Tengah, sekaligus memperkuat posisi provinsi ini sebagai simpul strategis transportasi nasional.

8. Penurunan tarif Trans Jateng

Sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan transportasi publik yang terjangkau, aman, dan inklusif, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/124 Tahun 2025 tentang Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng. Melalui kebijakan ini, dilakukan penurunan tarif khusus Trans Jateng dari sebelumnya sebesar Rp2.000 menjadi Rp1.000 per perjalanan yang berlaku mulai tanggal 15 Mei 2025.

Kebijakan penurunan tarif ini diprioritaskan bagi kelompok masyarakat rentan seperti buruh, pelajar, mahasiswa, lansia, veteran, dan penyandang disabilitas. Langkah ini tidak hanya sekadar meringankan beban biaya transportasi harian, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung program pengentasan kemiskinan, memperluas akses pendidikan, meningkatkan produktivitas kerja, serta memperkuat perlindungan sosial.

Dengan terealisasinya kebijakan ini, transportasi publik Trans Jateng semakin berperan sebagai sarana mobilitas yang berkeadilan sosial. Tarif yang lebih terjangkau memungkinkan kelompok rentan memperoleh akses yang lebih mudah terhadap layanan pendidikan, kesehatan, maupun kesempatan kerja, sekaligus berkontribusi dalam mengurangi pengeluaran rumah tangga miskin. Pada akhirnya, kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah, yaitu terciptanya sistem transportasi yang inklusif serta penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merujuk pada indikator kinerja tujuan dan /atau sasaran yang telah tertuang dalam Bab IV serta indikator program pada Bab VI. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yaitu Indeks pelayanan transportasi, Rasio konektivitas provinsi dan Persentase tingkat keselamatan transportasi jalan provinsi.

Secara lengkap Indikator Kinerja Utama, target dan capaian Tahun 2023 dan 2024, serta target capaian Tahun 2025 sampai dengan 2029 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel IV. 3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun		Target Capaian						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pelayanan Transportasi	6,345	6,614	6,660	6,788	6,904	7,019	7,126	7,242	
2	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi	99,9824 %	99,9830 %	99,9836 %	99,9838 %	99,9842 %	99,9846 %	99,9850 %	99,9853 %	
3	Rasio Konektivitas Provinsi	0,206	0,264	0,274	0,302	0,327	0,352	0,375	0,401	
4	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	83,03	85,09	85,12	85,15	85,20	85,25	85,30	85,35	

Sumber : Hasil Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Tabel IV. 4 Indikator Kinerja Kunci

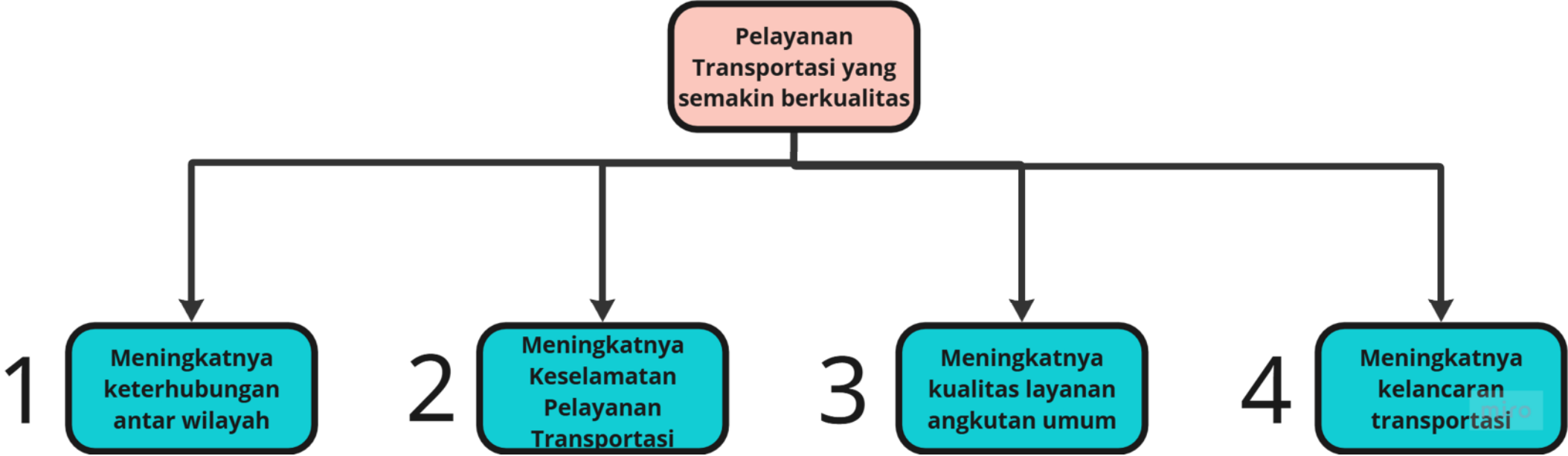
No	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun		Target Capaian						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi	5,20 %	5,78 %	6,36 %	6,94 %	7,51 %	8,09 %	8,67 %	9,25 %	
2	Persentase kendaraan laik jalan di jawa tengah	97,76 %	97,98 %	98,01 %	98,03 %	98,05 %	98,08 %	98,10 %	98,12 %	

Sumber : Hasil Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

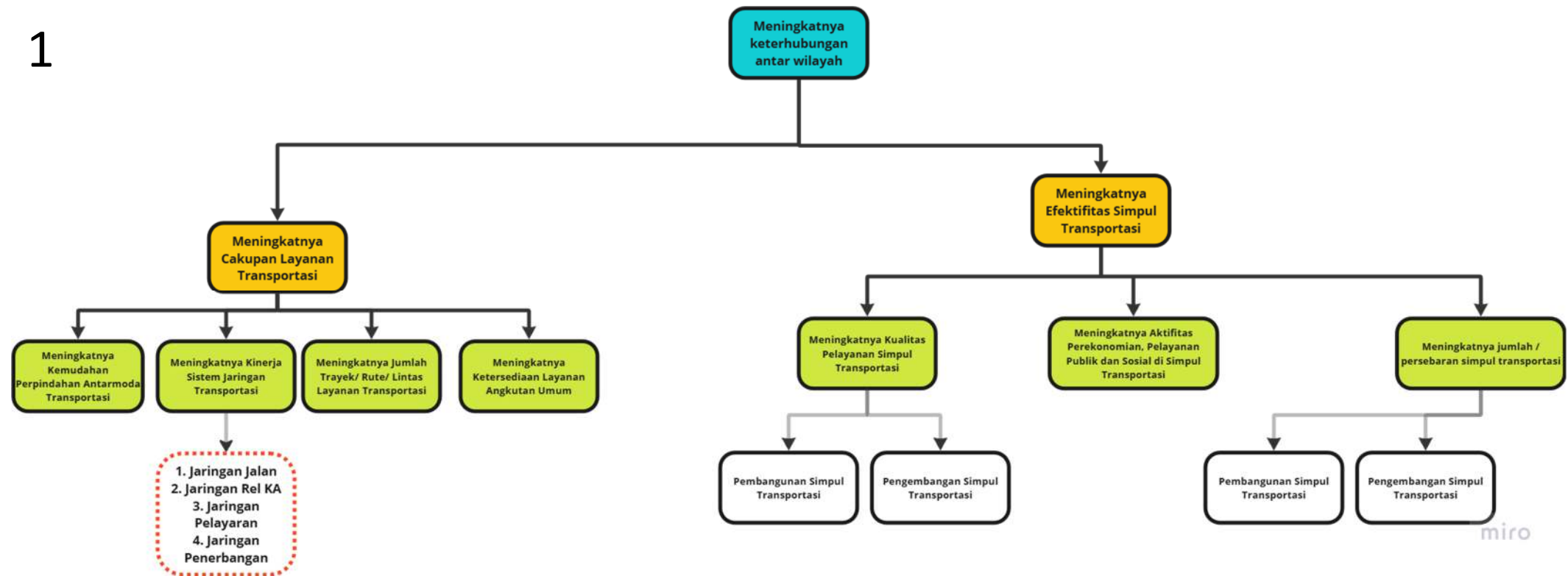
BAB V

PENUTUP

1. Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, mewadahi Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029, perubahan lingkungan strategis, perubahan kebijakan nasional serta menjadi cerminan dari perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah. Di lain pihak, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial serta bersifat logis, dinamis dan fleksibel agar berdaya guna dan berhasil guna. Target indikator, fokus dan lokus dalam renstra menyesuaikan dengan dinamika perubahan global, nasional dan regional serta ketersediaan anggaran berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah;
2. Adapun kaidah-kaidah penyusunan renstra adalah :
 - a. Bappeda telah melakukan proses teknokratis untuk menghasilkan rancangan teknokratis RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disusun rancangan awal RPJMD Provinsi Jawa Tengah mengacu kepada RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025 – 2045.
 - b. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menyusun Rancangan Awal Renstra PD dengan mempertimbangkan masukan dari *Stakeholders* terkait dan menyelenggarakan Forum PD untuk mendapatkan masukan penyempurnaan Rancangan Awal Perubahan Renstra PD;
 - c. Bappeda melakukan proses finalisasi RPJMD 2025-2029 melalui Forum Musrenbang.
 - d. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menyempurnakan Renstra PD berdasarkan Perubahan RPJMD 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub).
3. Tindak lanjut dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah dijadikan :
 - a. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Panduan penyelarasan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
 - c. Penyusunan Rencana Strategis Balai transportasi Jawa Tengah dengan penerapan Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. Monitoring dan evaluasi pasca penyusunan Renstra



1



Keterangan



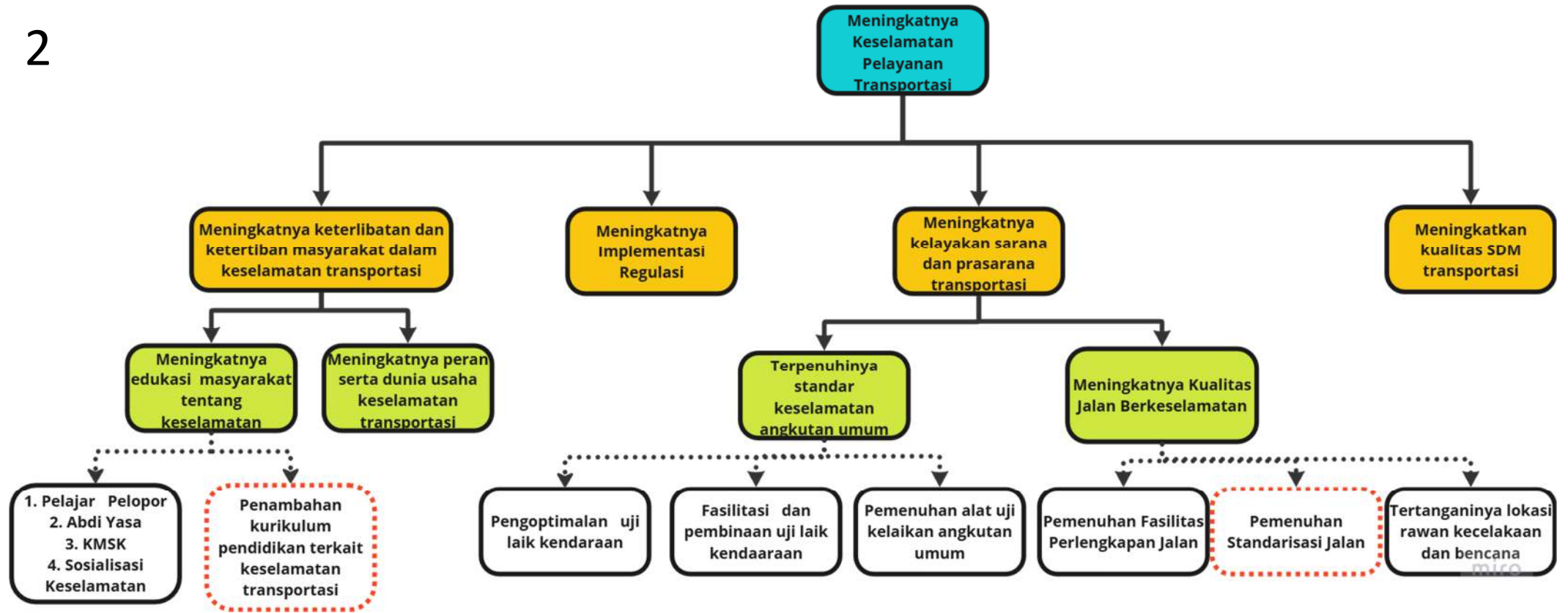
Level Aktivitas yang bukan kewenangan



Level Aktivitas kewenangan

.....➔ Garis Bantu Menunjukkan Aktivitas

➔ Garis Bantu Menunjukkan Hubungan Kinerja



Keterangan



Level Aktivitas yang bukan kewenangan



Level Aktivitas kewenangan

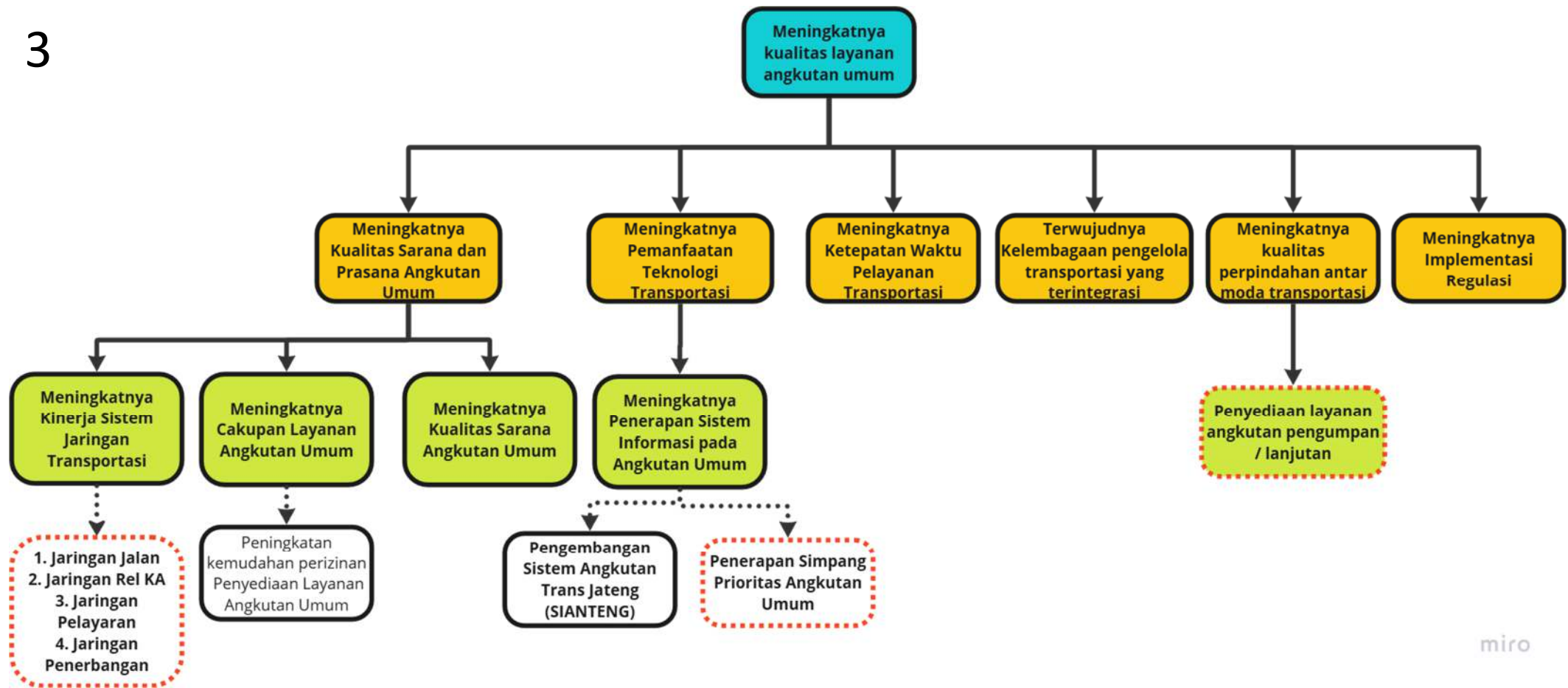


Garis Bantu Menunjukkan Aktifitas



Garis Bantu Menunjukkan Hubungan Kinerja

3



miro

Keterangan



Level Aktivitas yang bukan kewenangan



Level Aktivitas kewenangan

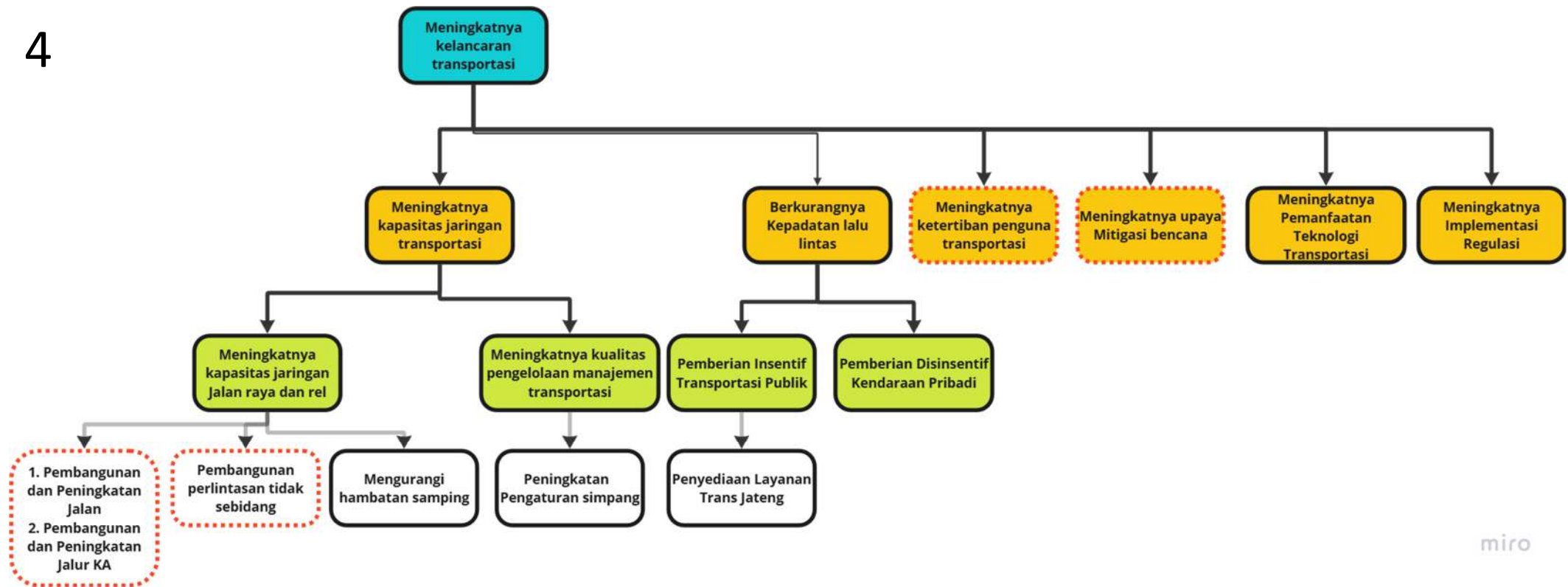


Garis Bantu Menunjukkan Aktifitas



Garis Bantu Menunjukkan Hubungan Kinerja

4



miro

Keterangan



Level Aktivitas yang bukan kewenangan



Level Aktivitas kewenangan

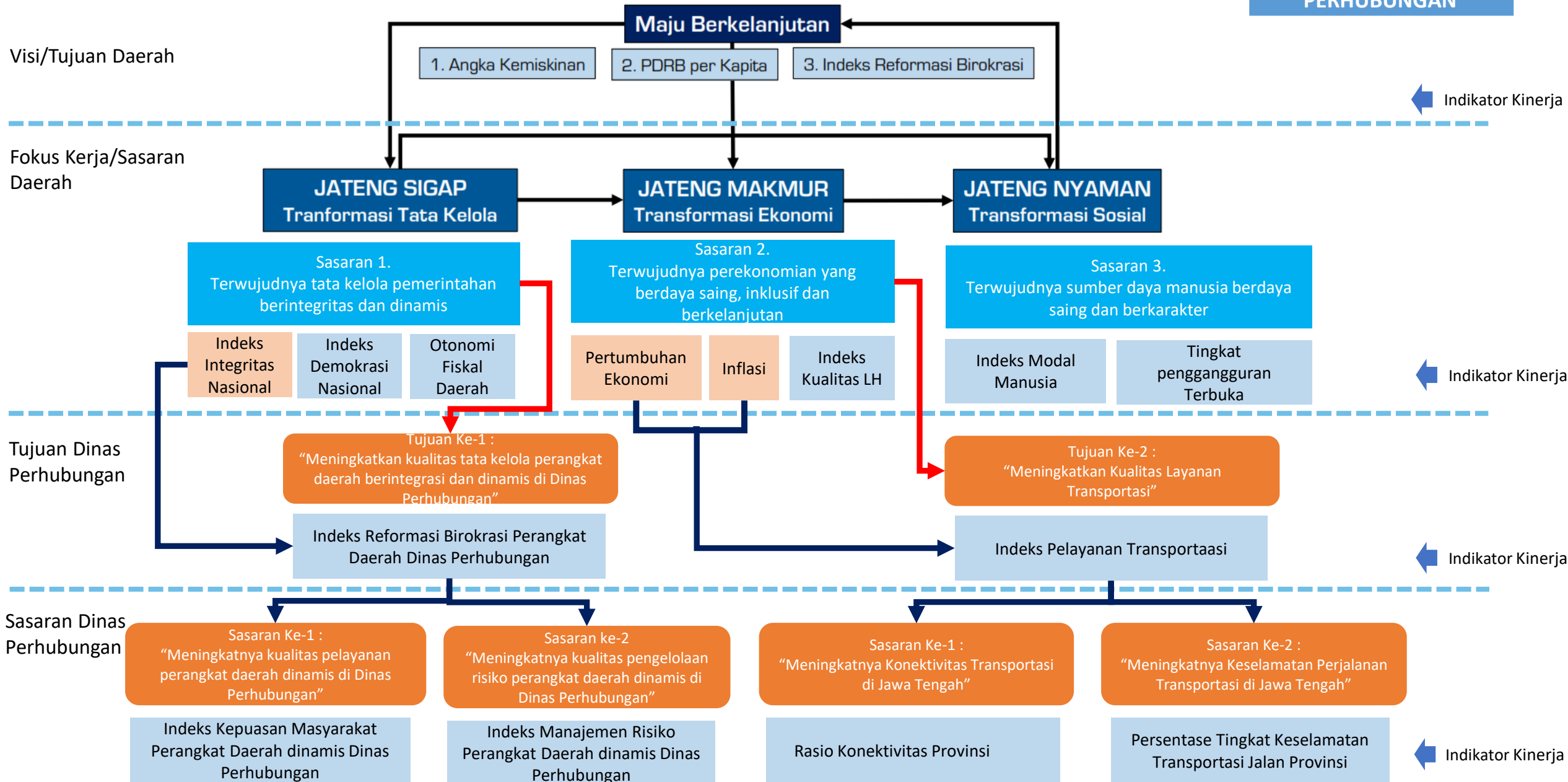


Garis Bantu Menunjukkan Aktivitas



Garis Bantu Menunjukkan Hubungan Kinerja

CASCADING RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA PD)
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025 - 2029



TUJUAN DAERAH

SASARAN DAERAH

TUJUAN DINAS

SASARAN DINAS

PROGRAM

CASCADING TUJUAN 1
DINAS PERHUBNGAN

TUJUAN DAERAH

Mewujudkan Jawa Tengah Maju
dan Berkelanjutan
IK : PDRB Perkapita
IK Angka Kemiskinan
IK Rasio Gini

SASARAN 2 DAERAH

Terwujudnya perekonomian yang berdayasaing, inklusif dan berkelanjutan
IK
1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Inflasi

TUJUAN PD

Meningkatkan kualitas pelayanan
transportasi

IK : Indeks Pelayanan Transportasi
DO : Indeks Pelayanan Transportasi menggambarkan tingkat pelayanan transportasi yang diukur
dari unsur Konektivitas Provinsi, dan Tingkat Keselamatan
Satuan : Angka (0-10) .

MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI
DI JAWA TENGAH

IK : Rasio Konektivitas Provinsi
DO : Mengukur Rata - rata rasio Konektivitas
Transportasi Darat, Rasio Konektivitas Perkotaan
(persentase penduduk terlayani transportasi umum
Trans Jateng) dan Rasio Konektivitas Transportasi
Laut dan ASDP
Satuan : Angka (0-1)

SASARAN 1

MENINGKATNYA KESELAMATAN PERJALANAN
TRANSPORTASI DI JAWA TENGAH

IK : Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi
Jalan Provinsi
DO : Mengukur tingkat keselamatan AKDP dengan
acceptable level maksimum 1 Accident/1 juta
keberangkatan
Satuan : %

SASARAN 2

1A

1B

1C

1D

1E

1F

1G

2A

2B

2C

2D

2E

1A

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

IK : Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum
DO : Mengukur Pengguna angkutan umum pada masa angkutan lebaran dan nataru dibandingkan total penumpang pada masa angkutan lebaran dan nataru
Satuan : %

BIDANG ANGKUTAN JALAN

PROGRAM

KEGIATAN

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

IK : Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani
DO : Mengukur Jumlah total penumpang semua moda angkutan umum dalam satu tahun (pada masa Lebaran, NATARU dan masa liburan panjang)
Satuan : Orang

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

IK : Persentase angkutan taksi terpenuhi
DO : Mengukur jumlah total izin angkutan taksi (Taksi, AJDP, ASK) yang diterbitkan dibandingkan dengan kebutuhan angkutan taksi (Taksi, AJDP, ASK)
Satuan : %

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

IK : Persentase angkutan barang yang berjin
DO : Mengukur jumlah total kendaraan angkutan barang berjin dibandingkan dengan dengan total kendaraan angkutan barang
Satuan : %

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

IK : Persentase Angkutan Orang Dalam Trayek yang berjin
DO : Mengukur total armada angkutan AKDP yang berjin dibandingkan kebutuhan armada angkutan AKDP
Satuan : %

1B

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

IK : Rasio Trayek Angkutan Jalan
DO : Mengukur Rata - rata Persentase pemenuhan angkutan taksi, Presentase Angkutan Orang Dalam Trayek yang berjin, Presentase trayek yang ditetapkan pemutakhiran tarif, Presentase jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan, Presentase Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Satuan : Angka (0-1)

BIDANG ANGKUTAN JALAN

SUB KEGIATAN

Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi

IK :Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
DO : Mengukur Jumlah Laporan Pelayanan Posko Terpadu Angkutan lebaran, natal dan tahun baru serta laporan pemantauan masa liburan panjang
Satuan : Laporan

Pola Angkutan Dalam Trayek

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

IK : Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan
DO : Mengukur Jumlah Angkutan Taksi (Taksi, AJDP, ASK) yang dikeluarkan jennya
Satuan : Unit

Pola Angkutan Tidak Dalam Trayek

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

IK :Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
DO : Mengukur Jumlah armada angkutan barang yang dikeluarkan jennya
Satuan : Unit

Pola Angkutan Tidak Dalam Trayek

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

IK :Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan
DO : Mengukur Jumlah AKDP yang dikeluarkan jennya
Satuan : Unit

Pola Angkutan Dalam Trayek

Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

IK : Presentase Trayek yang Ditetapkan Pemutakhiran Tarif
DO : Mengukur Jumlah trayek (AKDP) yang dievaluasi tarifnya dibandingkan jumlah Kab/Kota
Satuan : %

Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

IK :Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
DO : Mengukur Jumlah dokumen evaluasi tarif dan load factor Trayek angkutan AKDP kelas Ekonomi
Satuan : Laporan

Pola Angkutan Dalam Trayek

Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

IK : Persentase jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan
DO : Mengukur jumlah total trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi ditetapkan dibandingkan dengan kebutuhan trayek pedesaan
Satuan : %

Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi

IK :Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
DO : Mengukur Jumlah Dokumen Studi Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
Satuan : Dokumen

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi

IK :Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
DO : Mengukur Jumlah Pelaksanaan fasilitas angkutan Pedesaan
Satuan : Dokumen

Pola Angkutan Aglomerasi

Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

IK : Persentase Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
DO : Mengukur jumlah kawasan perkotaan (WP) yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi di bandingkan dengan kebutuhan perencanaan pada semua kawasan perkotaan (WP)
Satuan : %

Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi

IK :Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi
DO : Mengukur Jumlah Dokumen Studi Angkutan Aglomerasi Perkotaan
Satuan : Dokumen

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi

IK :Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
DO : Mengukur Jumlah Dokumen Sosialisasi Angkutan Aglomerasi Perkotaan
Satuan : Dokumen

Pola Angkutan Aglomerasi

1C

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

IK : Persentase kunjungan Bus pada terminal tipe B
DO : Mengukur rata - rata jumlah kunjungan bus di terminal tipe B per hari dibandingkan dengan jumlah bus AKDP siap operasi di Jawa Tengah
Satuan : %

BIDANG JARINGAN TRANSPORTASI DAN PERKERETAAPIAN

1D

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

IK : Persentase implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis
DO : Mengukur presentase implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis dibandingkan dengan kebutuhan dalam RJLLAJ
Satuan : %

BIDANG JARINGAN TRANSPORTASI DAN PERKERETAAPIAN

1E

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

IK : Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
DO : Perbandingan rata-rata pengunjung yang memanfaatkan fasilitas terminal dibanding dengan kapasitas terminal di terminal tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
Satuan : %

BALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH

1F

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

IK : Persentase penduduk terlayani transportasi umum (Trans Jateng)
DO : Jumlah penduduk yang menggunakan transportasi umum (Trans Jateng) dibagi dengan jumlah penduduk wilayah yang dilayani koridor trans Jateng dikali dengan seratus
Satuan : %

BALAI TRANSPORTASI JAWA TENGAH

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B

IK : Presentase Keterpenuhan SPM Terminal Tipe B
DO : Mengukur rata - rata Ketersediaan 6 Aspek pemenuhan SPM pada Terminal Tipe B di Jawa Tengah
Satuan : %

Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi

IK : Persentase implementasi dokumen RJLLAJ
DO : mengukur jumlah realisasi kebijakan dibandingkan dengan perencanaan atau rekomendasi RJLLAJ
Satuan : %

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B

IK : Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
DO : Mengukur rata - rata terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
Satuan : %

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

IK : Persentase Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi
DO : Mengukur TPB terbangun dibandingkan kebutuhan ideal
Satuan : %

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

IK : Jumlah penumpang terlayani angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan
DO : Mengukur Peningkatan total jumlah penumpang terangkut trans Jateng
Satuan : Orang

Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B

IK :Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
DO : Mengukur Jumlah studi rencana pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
Satuan : Dokumen

Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang

IK :Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
DO : Mengukur Jumlah Terminal terbangun
Satuan : Unit

Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)

IK :Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)
DO : Mengukur Jumlah Terminal dikembangkan
Satuan : Unit

Pokja Terminal Penumpang

Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi

IK : Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
DO : mengukur jumlah realisasi kebijakan dalam RJLLAJ
Satuan : Laporan

Pokja Perencanaan Transportasi

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)

IK :Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara
DO : MengukurJumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara
Satuan : Unit

Seksi Angkutan

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

IK :Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia
DO : Mengukur Jumlah Shelter Trans Jateng terbangun
Satuan : Unit

Seksi Sarana dan Prasarana

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

IK : Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
DO : Mengukur Jumlah Armada Angkutan Orang yang beroperasi (Bus Trans Jateng)
Satuan : Unit

Seksi Operasional

PROGRAM



KEGIATAN



SUB KEGIATAN



2A

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

IK : Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan provinsi
DO : Mengukur jumlah ruas jalan provinsi yang telah memenuhi kebutuhan semua jenis perlengkapan jalan di atas 60% dibandingkan dengan jumlah ruas jalan provinsi
Satuan : %

BIDANG LALU LINTAS JALAN

2B

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

IK : Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
DO : Mengukur persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di tahun berjalan dibandingkan dengan angka kejadian kecelakaan di tahun sebelumnya pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
Satuan : %

BALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH

PROGRAM

KEGIATAN

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

IK : Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng
DO : Jumlah Kabupaten/Kota yang diusulkan Lomba Tertib Lalin Tingkat Nasional
Satuan : Kabupaten/Kota

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi

IK : Persentase tingkat kepatuhan pelaksanaan rekomendasi andalalin
DO : mengukur jumlah kepatuhan pelaksanaan rekomendasi andalalin dibandingkan dengan jumlah rekomendasi andalalin yang dikeluarkan
Satuan : %

Penyediaan Perlengkapan Jalan di JalanProvinsi

IK : Persentase perlengkapan jalan terpenuhi
DO : Mengukur Rata - rata persentase jumlah per jenis perlengkapan jalan dibandingkan dengan total kebutuhan per jenis perlengkapan jalan
Satuan : %

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

IK : Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ
DO : Jumlah Rekomendasi hasil forum LLAJ yang ditindak lanjuti
Satuan : Dokumen

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

IK : Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
DO : Mengukur Jumlah Penanganan DRK dibandingkan Jumlah Total DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
Satuan : %

Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

IK : Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan
DO : Mengukur Jumlah Penanganan DRK
Satuan : Unit

Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi

IK: Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
DO: Mangukur Jumlah :
Mengukur Jumlah Anggola Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan
Satuan : Laporan

Seksi Lalu Lintas



SUB

KEGIATAN

Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

IK: Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
DO: Mengukur Jumlah Dokumen Sosialisasi Peserta Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng terkait Lomba Tertib Lalin Tingkat Nasional
Satuan : Dokumen

Pokja Manajemen Lalu Lintas Jalan

Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalin

IK : Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalin yang ditetapkan
DO : Mengukur jumlah pembahasan dokumen andalalin di Ruas Jalan Provinsi
Satuan : Angka

Pokja Manajemen Lalu Lintas Jalan

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

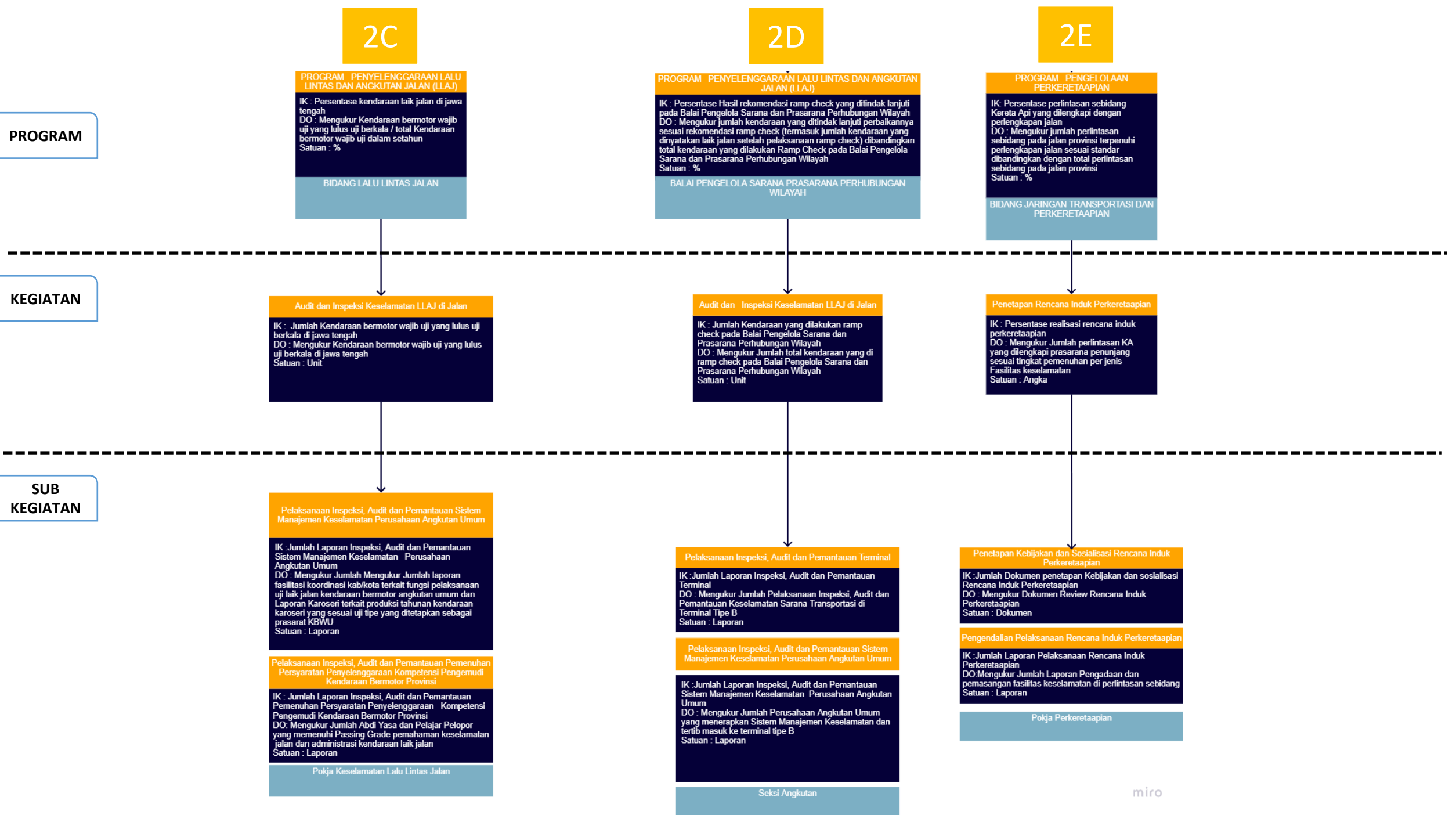
IK : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia
DO : Mengukur Perlengkapan Jalan yang terpasang di Jalan Provinsi
Satuan : Unit

Pokja Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi

IK :Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
DO :Mengukur Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
Satuan : Laporan

Pokja Keselamatan Lalu Lintas Jalan



TUJUAN DAERAH

SASARAN DAERAH

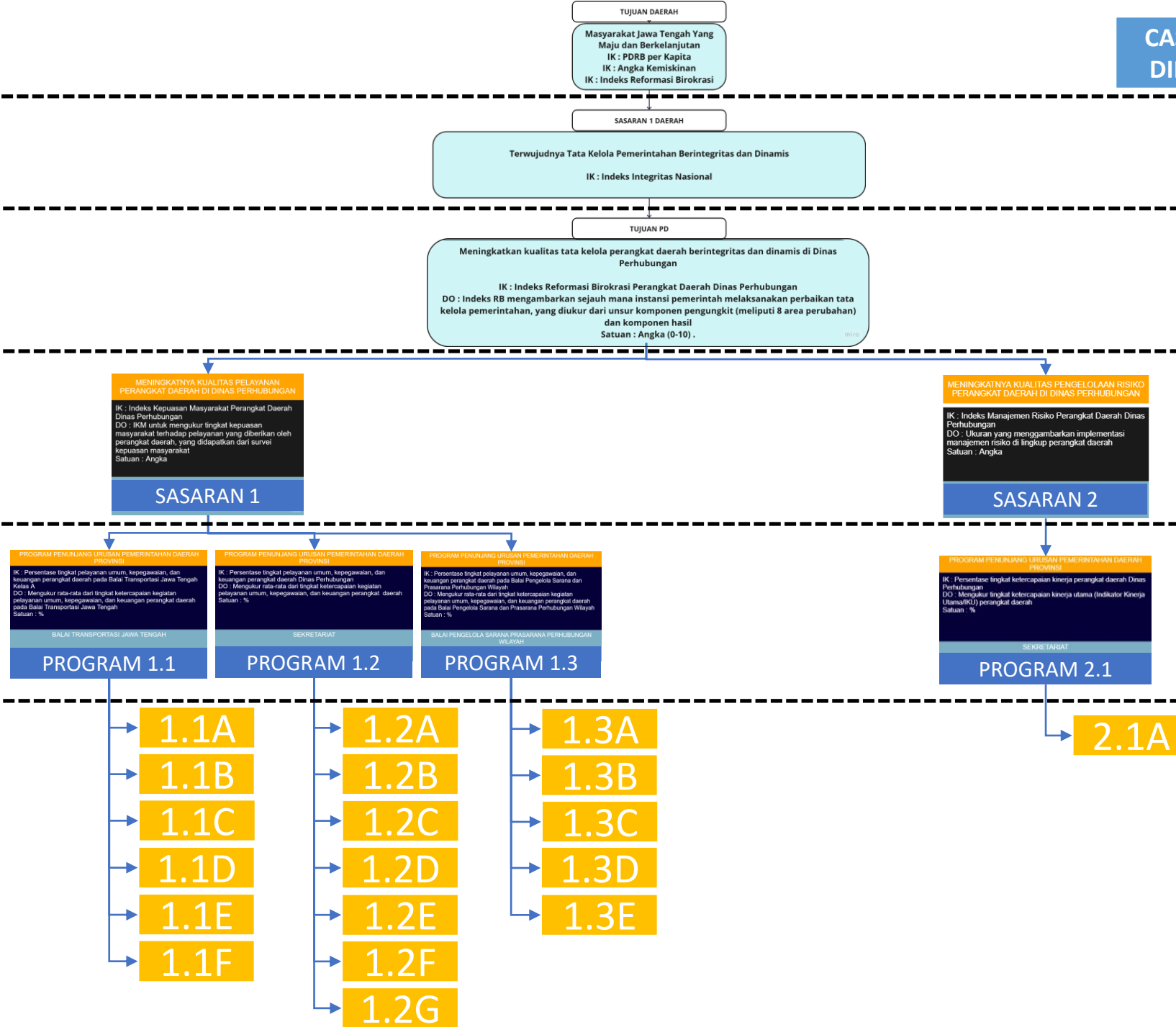
TUJUAN DINAS

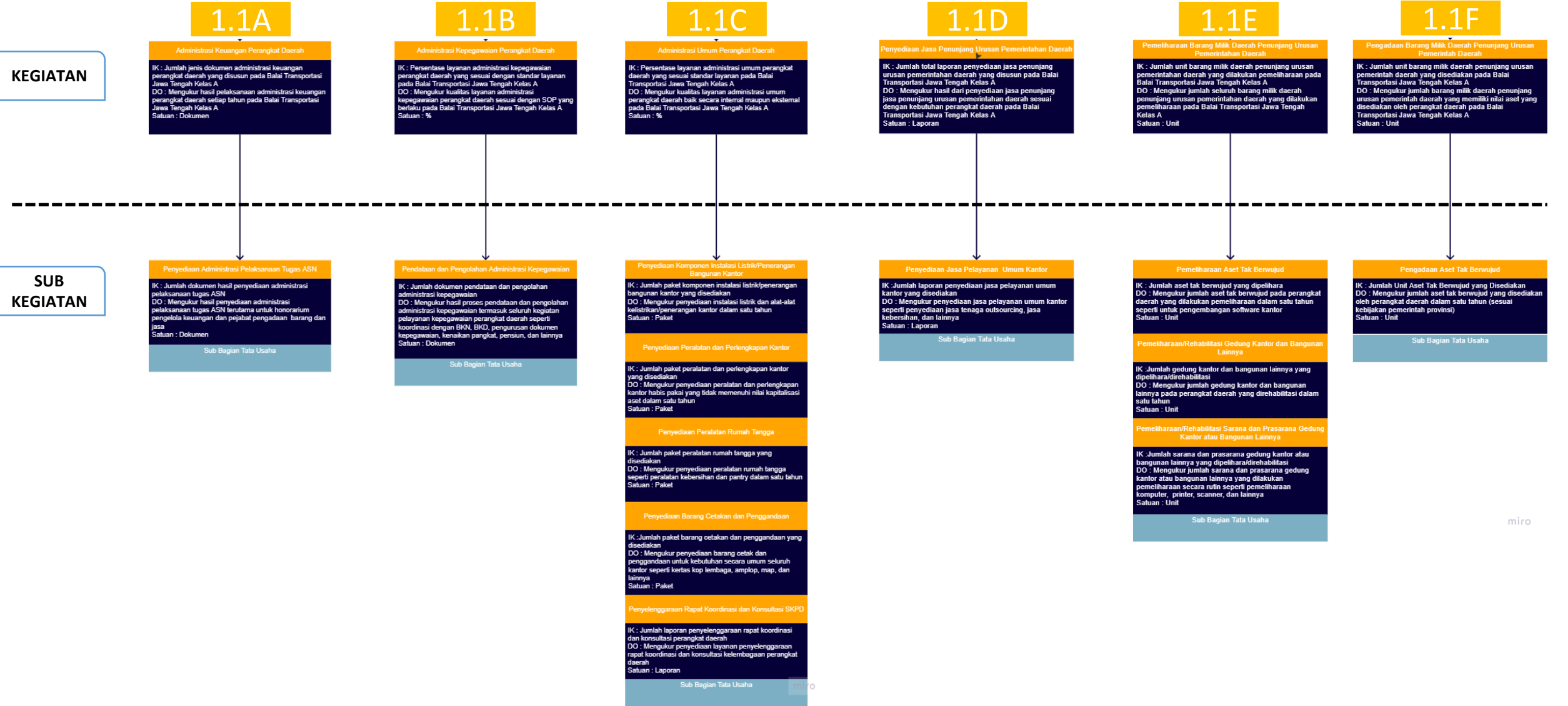
SASARAN DINAS

PROGRAM

KEGIATAN

CASCADING TUJUAN 2 DINAS PERHUBNGAN





Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

IK : Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun

DO : Mengukur hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah setiap tahun

Satuan : Dokumen

KEGIATAN

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

IK : Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
DO : Mengukur hasil pelaksanaan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
Satuan : Dokumen

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

IK : Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah
DO : Mengukur hasil pengamanan barang milik daerah perangkat daerah
Satuan : Dokumen

Subbagian Umum & Kepegawaian

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

IK : Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan
DO : Mengukur kualitas layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai dengan SOP yang berlaku
Satuan : %

IK : Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
DO : Mengukur jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan untuk seluruh ASN dalam satu tahun
Satuan : Paket

Amin

[illegible]

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

IK : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
DO : Mengukur berapa jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan dalam satu tahun
Satuan : Orang

IK : Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
DO : Mengukur hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN terutama untuk honorarium pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang dan jasa
Satuan : Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

IK : Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah
DO : Mengukur hasil penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah
Satuan : Laporan

Subbagian Keuangan

Subbagian Umum & Kepegawaian

KEGIATAN

SUB
KEGIATAN

1.2E

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
IK : Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan DO : Mengukur jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang memiliki nilai aset yang disediakan oleh perangkat daerah Satuan : Unit

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
IK : Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan DO : Mengukur jumlah kendaraan dinas operasional pendukung kegiatan operasional atau lapangan yang disediakan perangkat daerah dalam satu tahun Satuan : Unit
Pengadaan Mebel
IK : Jumlah paket mebel yang disediakan DO : Mengukur jumlah jenis mebel perkantoran yang disediakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun Satuan : Paket
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
IK : Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan DO : Mengukur jumlah peralatan dan mesin lainnya pendukung kegiatan perangkat daerah yang disediakan (sesuai kebijakan pemerintah provinsi) Satuan : Unit
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
IK : Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan DO : Mengukur jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun (sesuai kebijakan pemerintah provinsi) Satuan : Laporan
Subbagian Umum & Kepegawaian

1.2F

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
IK : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun DO : Mengukur hasil dari penyediaan jasa penunjang jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah Satuan : Laporan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
IK : Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat DO : Mengukur penyediaan jasa surat menyurat perangkat daerah dalam satu tahun seperti biaya pengiriman pos dan kelengkapan jasa lainnya Satuan : Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
IK : Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan DO : Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Satuan : Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
IK : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan DO : Mengukur penyediaan jasa pelayanan umum kantor seperti penyediaan jasa tenaga outsourcing, jasa kebersihan, dan lainnya Satuan : Laporan
Subbagian Umum & Kepegawaian

1.2G

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
IK : Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan DO : Mengukur jumlah seluruh barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan Satuan : Unit

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
IK : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya DO : Mengukur jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara, dibayarkan pajak dan perizinannya oleh perangkat daerah dalam satu tahun Satuan : Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
IK : Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara DO : Mengukur jumlah peralatan dan mesin lainnya pada perangkat daerah yang dilakukan pemeliharaan dalam satu tahun Satuan : Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
IK : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi DO : Mengukur jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya pada perangkat daerah yang direhabilitasi dalam satu tahun Satuan : Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
IK : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi DO : Mengukur jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan secara rutin seperti pemeliharaan komputer, printer, scanner, dan lainnya Satuan : Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
IK : Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi DO : Mengukur jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan secara rutin seperti pemeliharaan lift Satuan : Unit
Subbagian Umum & Kepegawaian

1.3A

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

IK : Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
DO : Mengukur hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah setiap tahun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
Satuan : Dokumen

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

IK : Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
DO : Mengukur hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN terutama untuk honorarium pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang dan jasa
Satuan : Dokumen

Subbagian Tatausaha

1.3B

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

IK : Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
DO : Mengukur kualitas layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai dengan SOP yang berlaku pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
Satuan : %

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

IK : Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
DO : Mengukur hasil proses pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian termasuk seluruh kegiatan pelayanan kepegawaian perangkat daerah seperti koordinasi dengan BKN, BKD, pengurusan dokumen kepegawaian, kenaikan pangkat, pensiun, dan lainnya
Satuan : Dokumen

Subbagian Tatausaha

1.3C

Administrasi Umum Perangkat Daerah

IK : Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
DO : Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
Satuan : %

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

IK : Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
DO : Mengukur penyediaan instalasi listrik dan alat-alat kelistrikan/penerangan kantor dalam satu tahun
Satuan : Paket

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

IK : Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
DO : Mengukur penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor habis pakai yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset dalam satu tahun
Satuan : Paket

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

IK : Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
DO : Mengukur penyediaan peralatan rumah tangga seperti peralatan kebersihan dan pantry dalam satu tahun
Satuan : Paket

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

IK : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
DO : Mengukur penyediaan bahan logistik kantor seperti BBM, obat-obatan, reagen laboratorium, dan lainnya dalam satu tahun
Satuan : Paket

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

IK : Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan
DO : Mengukur penyediaan barang cetak dan penggandaan untuk kebutuhan secara umum seluruh kantor seperti kertas kop lembaga, amplop, map, dan lainnya
Satuan : Paket

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

IK : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah
DO : Mengukur penyediaan layanan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi kelembagaan perangkat daerah
Satuan : Laporan

Subbagian Tatausaha

1.3D

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

IK : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
DO : Mengukur hasil dari penyediaan jasa penunjang jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
Satuan : Laporan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

IK : Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
DO : Mengukur penyediaan jasa surat menyurat perangkat daerah dalam satu tahun seperti biaya pengiriman pos dan kelengkapan jasa lainnya
Satuan : Laporan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

IK : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
DO : Mengukur penyediaan jasa pelayanan umum kantor seperti penyediaan jasa tenaga outsourcing, jasa kebersihan, dan lainnya
Satuan : Laporan

Subbagian Tatausaha

1.3E

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

IK : Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
DO : Mengukur jumlah seluruh barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
Satuan : Unit

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

IK : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
DO : Mengukur jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya pada perangkat daerah yang direhabilitasi dalam satu tahun
Satuan : Unit

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

IK : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
DO : Mengukur jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan secara rutin seperti pemeliharaan komputer, printer, scanner, dan lainnya
Satuan : Unit

Subbagian Tatausaha

KEGIATAN

SUB
KEGIATAN

2.1A

KEGIATAN

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

IK : Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan
DO : Mengukur proses dan hasil penyusunan dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Satuan : %

SUB KEGIATAN

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

IK :Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
DO : Mengukur semua jenis dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh perangkat daerah
Satuan : Dokumen

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

IK :Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
DO : Mengukur semua jenis laporan evaluasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah
Satuan : Laporan

Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

IK : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
DO : Mengukur Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
Satuan : Dokumen

Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

IK : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
DO : Mengukur Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Satuan : Dokumen

Sub Bagian Program

Lampiran III : Manajemen Resiko Rencana Strategis
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029

Tabel 1. Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya Konektivitas Transportasi di Jawa Tengah	Rasio Konektivitas Provinsi	berkurangnya layanan pada jaringan trayek AKDP	Risiko Operasional	Ketidakmampuan pengusaha transportasi untuk menyediakan layanan angkutan sesuai ekspektasi masyarakat (ekonomi)	Terhambatnya distribusi orang, barang dan jasa	Masyarakat
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi	Meningkatnya frekuensi Kecelakaan Transportasi	Risiko Operasional	1. Human Error ; 2. Tidak laikan kendaraan; 3. Cuaca/ bencana; 4. Kondisi Medan ; 5. Fasilitas keselamatan	Adanya korban , kerugian material dan kemacetan lalu lintas	Masyarakat

Tabel 2. Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
berkurangnya layanan pada jaringan trayek AKDP	3	3	9	Belum ada	Evaluasi Jaringan Trayek dan Tarif	Belum memadai	3	3	9
Meningkatnya frekuensi Kecelakaan Transportasi	5	3	15	Ada	1. Sosialisasi, Edukasi dan Pelatihan ; 2. Ramp Check dan Uji berkala kendaraan 3. Pemantauan Kondisi cuaca dan mitigasi bencana; 4. Pemasangan rambu peringatan 5. Pemenuhan Fasilitas keselamatan secara bertahap	Memadai	4	3	12

Tabel 3. Daftar Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
3	9	Kepala Dinas Perhubungan	Ketidakmampuan pengusaha transportasi untuk menyediakan layanan angkutan sesuai ekspektasi masyarakat (ekonomi)	Terhambatnya distribusi orang, barang dan jasa
1	12	Kepala Dinas Perhubungan	1. Human Error ; 2. Ketidak laikan kendaraan; 3. Cuaca/ bencana; 4. Kondisi Medan ; 5. Fasilitas keselamatan	Adanya korban , kerugian material dan kemacetan lalu lintas

Tabel 4. Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya konektivitas Provinsi	Rasio Konektivitas Provinsi	berkurangnya layanan pada jaringan trayek AKDP	9	Ketidakmampuan pengusaha transportasi untuk menyediakan layanan angkutan sesuai ekspektasi masyarakat (ekonomi)	Terhambatnya distribusi orang, barang dan jasa	Evaluasi Jaringan Trayek dan Tarif	Kepala Dinas Perhubungan	12 Bulan setiap tahun
Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan	Meningkatnya frekuensi Kecelakaan Transportasi	12	1. Human Error ; 2. Tidak laik kendaraan; 3. Cuaca/ bencana; 4. Kondisi Medan ; 5. Fasilitas keselamatan	Adanya korban , kerugian material dan kemacetan lalu lintas	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk kecepatan respon penanganan, Sosialisasi call center fasilitas kesehatan, Sosialisasi pertolongan pertama terhadap penanganan kecelakaan	Kepala Dinas Perhubungan	12 Bulan setiap tahun